

BUPATI TAPANULI TENGAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan ...

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tapanuli Tengah di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6943);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

dan

BUPATI TAPANULI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah ...

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.
9. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPN Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode dua puluh tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMN Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan terhitung dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

13. Rencana ...

13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Sumatera Utara adalah Dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2025-2045.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Sumatera Utara adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2025-2029.
15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025–2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah kabupaten.
20. Kajian lingkungan hidup strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II...

BAB II

RPJMD

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3

(1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati hasil pemilihan umum kepala daerah serentak Tahun 2024.
(2) RPJMD berpedoman pada RPJPN, RPJMN, RPJPD Provinsi Sumatera Utara, RPJMD Provinsi Sumatera Utara, RPJPD, RTRW, serta memperhatikan KLHS.

Pasal 4

RPJMD menjadi pedoman untuk:

a. penyusunan RKPD, Renstra, dan rencana kerja Perangkat Daerah;
b. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
c. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2025-2029.

Pasal 5

RPJMD wajib dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

Pasal 6

Sistematika RPJMD terdiri dari:

a. BAB I Pendahuluan;
b. BAB II Gambaran Umum Daerah;
c. BAB III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
d. BAB IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
e. BAB V Penutup

Pasal 7...

Pasal 7

Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD

Pasal 8

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kebijakan perencanaan RPJMD; dan
b. pelaksanaan RPJMD.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kebijakan perencanaan RPJMD;
b. pelaksanaan RPJMD; dan
c. hasil RPJMD.

(4) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bappeda.

(5) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 9

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan dalam hal:
a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. terjadi...

c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
d. merugikan kepentingan nasional.

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

(3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

Pasal 10

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, perubahan capaian sasaran tahunan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang belum memiliki RPJMD, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD.

(2) Bupati pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode Pemerintahan berikutnya.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode Pemerintahan Bupati berikutnya.

BAB VI ...

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan

Pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI TAPANULI TENGAH

MASINTON PASARIBU

Diundangkan di Pandan

pada tanggal 20 Agustus 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

NURJALILAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2025

NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH, PROVINSI SUMATERA UTARA : (2 - 80 / 2025)

RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah

2025–2029



DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GAMBAR x

BAB I Pendahuluan 1
1.1 Latar Belakang 2
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 4
1.3 Hubungan antar Dokumen 8
1.3.1 Hubungan RPJMD dengan RPJPD 10
1.3.2 Hubungan RPJMD dengan RPJMN 10
1.3.3 Hubungan RPJMD dengan KLHS 10
1.3.4 Hubungan RPJMD dengan RTRW 11
1.3.5 Hubungan RPJMD dengan Ripparkab 11
1.3.6 Hubungan RPJMD dengan RPIK 12
1.3.7 Hubungan RPJMD dengan RIPJIPD 12
1.4 Maksud dan Tujuan 13
1.5 Sistematika Penulisan 14

BAB II Gambaran Umum Daerah 16
2.1 Aspek Geografi dan Demografi 17
2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah 17
A Topografi 18
B Geologi 20
C Hidrologi 20
D Klimatologi 21
E Penggunaan Lahan 22
2.1.2 Potensi Sumber Daya Alam 23
2.1.3 Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan Hidup 44
A Daya Dukung Pangan 44
B Daya Dukung Air 49
2.1.4 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan 53
A Pangan 53
B Konsumsi Listrik 55
C Kapasitas Air Baku 56
D Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman 56
2.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas 57
A Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 57
B Emisi Gas Rumah Kaca 58
C Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman 58
D Pengelolaan Sampah 59
2.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim .. 59

2.1.7 Aspek Demografi 67
A Penduduk menurut Kecamatan 67
B Penduduk menurut Kelompok Umur 68
C Sex Ratio 69
D Piramida Penduduk 70
E Laju Pertumbuhan Penduduk 71
F Kepadatan Penduduk 72
G Proyeksi Penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah 73
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 75
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi 75
A Laju Pertumbuhan Ekonomi 76
B Distribusi Perekonomian 77
C Produk Domestik Regional Bruto 78
D Kemiskinan 82
E Tingkat Pengangguran Terbuka 84
F Indeks Gini 85
G Indeks Pembangunan Manusia 86
H Pengeluaran Per Kapita 87
2.2.2 Kesehatan untuk Semua 87
A Usia Harapan Hidup 88
B Prevalensi Stunting 89
C Tuberkulosis 90
2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata 90
A Rata-Rata Lama Sekolah & Harapan Lama Sekolah 90
B Literasi dan Numerasi 91
C Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 92
2.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif 93
2.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju 94
2.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif 94
A Indeks Pembangunan Keluarga 95
B Indeks Perlindungan Anak 96
C Indeks Pembangunan Gender 97
D Indeks Pemberdayaan Gender 97
E Indeks Ketimpangan Gender 98
2.3 Aspek Daya Saing Daerah 99
2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia 99
A Angka Ketergantungan 100
2.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi 101
A Rasio PDRB Industri Pengolahan 101
B Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum 102
C Rasio Kewirausahaan 103
D Indeks Akses Keuangan Daerah 104
E Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 105
F Indeks Inovasi Daerah 106

2.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru 106
2.3.4 Transformasi Digital..... 107
A Indeks Masyarakat Digital 107
2.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global 109
A Pembentukan Modal Tetap Bruto 109
B Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB 110
2.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi 111
A Indeks Infrastruktur 111
B Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan 111
C Indeks Desa Membangun 112
2.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro 113
A Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB 113
2.4 Aspek Pelayanan Umum 114
2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif..... 114
2.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial..... 115
2.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan..... 116
A Indeks Daya Saing Daerah 117
2.4.4 Layanan Urusan Wajib Dasar 118
A Pendidikan..... 118
B Kesehatan..... 121
C Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang..... 123
D Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 123
E Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 124
F Sosial 125
2.4.5 Layanan Urusan Wajib Non-Dasar 125
A Tenaga Kerja..... 126
B Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 126
C Pangan 127
D Pertanahan 128
E Lingkungan Hidup 129
F Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 129
G Pemberdayaan Masyarakat dan Desa..... 130
H Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 131
I Perhubungan 131
J Komunikasi dan Informatika 132
K Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah 132
L Penanaman Modal 133
M Kepemudaan dan Olahraga 134

N Statistik 134
O Persandian 134
P Kebudayaan 135
Q Perpustakaan 135
R Kearsipan 135
2.4.6 Layanan Urusan Pilihan 136
A Pariwisata 136
B Kelautan dan Perikanan 137
C Pertanian 138
D Energi dan Sumber Daya Mineral 139
E Perdagangan 141
F Perindustrian 143
G Kelautan dan Perikanan 143
2.4.7 Penunjang Urusan 145
A Perencanaan Pembangunan 145
B Keuangan 147
C Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 148
D Penelitian dan Pengembangan 148
E Pengawasan 148
F Sekretariat Daerah 149
2.5 Gambaran Keuangan Daerah 150
2.5.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu 153
2.5.2 Kinerja Pelaksanaan APBD 154
A Pendapatan Daerah 155
B Belanja 169
C Pembiayaan 180
2.5.3 Neraca Keuangan Daerah 185
2.5.4 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 191
A Proporsi Penggunaan Anggaran 191
B Analisis Pembiayaan 197
2.5.5 Proyeksi Keuangan Daerah 198
A Proyeksi Pendapatan Daerah 198
B Proyeksi Belanja Daerah 201
C Proyeksi Pembiayaan Daerah 205
2.6 Permasalahan dan Isu Strategis 207
2.6.1 Permasalahan 207
2.6.2 Isu Strategis 215
A Isu Strategis Internasional 216
B Isu Strategis Nasional 223
C Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara 227
D Isu Strategis Kabupaten Tapanuli Tengah 245

BAB III

Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah 250
3.1 Visi dan Misi 251
3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas

Pembangunan Daerah 268
3.3 Program Prioritas 285
BAB IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 305
BAB V Penutup 524
5.1 Kaidah Pelaksanaan 525
5.1.1 Konsistensi Perencanaan Pembangunan 525
A Keterkaitan RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Perencanaan Pembangunan Provinsi dan Pusat 526
B Skema Pendanaan dan Penganggaran 529
5.1.2 Kerangka Pengendalian 530
5.1.3 Sistem Insentif 540
5.1.4 Mekanisme Perubahan 541
5.1.5 Komunikasi Publik 542
5.2 Pembiayaan Pembangunan 543
5.3 Kesimpulan 544

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul	Halaman
2.1	Luas Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah	18
2.2	Keadaan Iklim Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023	21
2.3	Kebutuhan Pangan di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023	45
2.4	Produksi Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023	45
2.5	Jumlah Pangan dalam satuan Kilo Kalori Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023	46
2.6	Ketersediaan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023	47
2.7	Status Daya Dukung Pangan di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023	48
2.8	Kebutuhan Air Domestik Per Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023	49
2.9	Kebutuhan Air Penutup Lahan per Kecamatan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023	50
2.10	Kebutuhan Air di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023	51
2.11	Status Daya Dukung Air Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023	52
2.12	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	58
2.13	Indikator Kinerja Pengelolaan Sampah	59
2.14	Pembobotan Informasi Geologi Untuk Kawasan Rawan Bencana Longsor Kabupaten Tapanuli Tengah	61
2.15	Distribusi Sebaran Tingkat Kerawanan Bencana Longsor Per Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah (Ha)	62
2.16	Pembobotan Informasi Geologi Untuk Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Tapanuli Tengah	63
2.17	Distribusi Sebaran Tingkat Kerawanan Bencana Gempa Bumi Per Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah	64
2.18	Distribusi Sebaran Tingkat Kerawanan Bencana Tsunami Per-Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah	66
2.19	Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Tapanuli Tengah	67
2.20	Penduduk menurut Kecamatan	68
2.21	Penduduk menurut Kelompok Umur	69
2.22	Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan (Jiwa/Km^2)	72
2.23	Proyeksi Sex Ratio dan Rasio Ketergantungan	74
2.24	Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Lapangan Usaha (%)	77
2.25	Distribusi Perekonomian menurut Lapangan Usaha	78
2.26	PDRB ADHB Kabupaten Tapanuli Tengah (Rp Miliar)	79
2.27	PDRB ADHK Kabupaten Tapanuli Tengah (Rp Miliar)	80
2.28	Capaian Kinerja Penanganan Tuberkulosis	90
2.29	Literasi dan Numerasi	92
2.30	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah (Poin)	92
2.31	Indeks Masyarakat Digital Kabupaten Tapanuli Tengah (Poin)	107

2.32 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan 112
2.33 Capaian Kinerja Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif 115
2.34 Capaian Kinerja Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial 116
2.35 Capaian Kinerja Pendidikan 120
2.36 Fasilitas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah 121
2.37 Tenaga Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 122
2.38 Capaian Kinerja Kesehatan 123
2.39 Capaian Kinerja Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 123
2.40 Capaian Kinerja Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 124
2.41 Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 125
2.42 Capaian Kinerja Urusan Sosial 125
2.43 Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja 126
2.44 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 126
2.45 Capaian Kinerja Urusan Pangan 127
2.46 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan 128
2.47 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup 129
2.48 Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 130
2.49 Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 131
2.50 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan 132
2.51 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika 132
2.52 Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 133
2.53 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal 133
2.54 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga 134
2.55 Capaian Kinerja Urusan Statistik 134
2.56 Capaian Kinerja Urusan Persandian 135
2.57 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan 135
2.58 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan 135
2.59 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan 136
2.60 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata 137
2.61 Capaian Kinerja Urusan Perikanan 137
2.62 Produksi, Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah 138
2.63 Populasi Ternak di Kabupaten Tapanuli Tengah 138
2.64 Capaian Kinerja Urusan Pertanian 138
2.65 Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral 141
2.66 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan 142
2.67 Perkembangan Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah 143
2.68 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian 143

2.69 Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan 144
2.70 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan 146
2.71 Capaian Kinerja Urusan Keuangan 147
2.72 Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 148
2.73 Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan 148
2.74 Capaian Kinerja Urusan Pengawasan 149
2.75 Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah 149
2.76 Skala Interval Otonomi Fiskal..... 153
2.77 Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, Tahun 2020-2024 (Rupiah) 154
2.78 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2024 (dalam Rp) 167
2.79 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2024 (Rp) 178
2.80 Realisasi APBD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2024..... 181
2.81 Neraca Keuangan Daerah Tahun 2020-2024 186
2.82 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Tapanuli Tengah..... 192
2.83 Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2024 (Rp) 195
2.84 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tapanuli Tengah (Rp Miliar) 197
2.85 Nilai Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tapanuli Tengah (Rp Miliar) 198
2.86 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029 200
2.87 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2 025-2029 203
2.88 Proyeksi Pembiayaan Daerah..... 206
2.89 Permasalahan Pembangunan menurut Urusan Pemerintahan 213
3.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029..... 255
3.2 Penyelarasan Target Sasaran RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029 267
3.3 Tahapan Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah..... 272
3.4 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tapanuli Tengah..... 274
3.5 Isu Strategis, Program Prioritas, dan Kegiatan Strategis Daerah 285
3.6 Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029..... 290
4.1 Program Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2030 307
4.2 Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah Terhadap PHTC Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 378

4.3 Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah erhadap Program Prioritas dan proyek strategis daerah Provinsi Sumatera Utara ke dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029 394
4.4 Keselarasan Program Nasional, Provinsi Sumatera Utara, dan Kabupaten Tapanuli Tengah 477
4.5 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2030 481
4.6 Penyelarasan Indikator Kinerja Utama Pembangunan RPJMN Nasional Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029, dan RPMJD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029..... 482
4.7 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2030 493

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul	Halaman
1.1	Hubungan RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya	9
1.2	Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Sektoral	9
2.1	Wilayah Administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah	17
2.2	Peta Guna Lahan Kabupaten Tapanuli Tengah	23
2.3	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah	54
2.4	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	55
2.5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Tengah	57
2.6	Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tapanuli Tengah	60
2.7	Sex Ratio (Per 100 Orang)	70
2.8	Piramida Penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah (2024)	71
2.9	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	72
2.10	Proyeksi Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk	74
2.11	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	76
2.12	PDRB Per Kapita Kabupaten Tapanuli Tengah (Rp juta)	81
2.13	Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin (Maret)	82
2.14	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P-1) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P-2)	83
2.15	Tingkat Pengangguran Terbuka (Agustus)	84
2.16	Indeks Gini (Poin)	85
2.17	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	86
2.18	Pengeluaran Per Kapita (Rp Ribu)	87
2.19	Usia Harapan Hidup (Tahun)	88
2.20	Prevalensi Stunting (%)	89
2.21	Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah (Tahun)	91
2.22	Indeks Pembangunan Keluarga (Poin)	95
2.23	Indeks Perlindungan Anak (Poin)	96
2.24	Indeks Pembangunan Gender (Poin)	97
2.25	Indeks Pemberdayaan Gender (Poin)	98
2.26	Indeks Ketimpangan Gender (Poin)	99
2.27	Rasio Ketergantungan (Per 100 Penduduk)	100
2.28	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	102
2.29	Rasio PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum (%)	103
2.30	Rasio Kewirausahaan (%)	104
2.31	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	105
2.32	Indeks Inovasi Daerah (Poin)	106
2.33	Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB (%)	110
2.34	Indeks Desa Membangun (Poin)	113
2.35	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	114
2.36	Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah	117
2.37	Angka Partisipasi Kasar	119

2.38 Angka Partisipasi Murni 120
2.39 Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2024..... 156
2.40 Perkembangan Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2024 157
2.41 Perkembangan Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2024(Rp Miliar)..... 160
2.42 Rata-Rata Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2024 (%)..... 161
2.43 Komponen Pendapatan Transfer Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2024 (Rp Miliar) 162
2.44 Rata-Rata Kontribusi dan Komposisi Dana Perimbangan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022-2024 (Rp Miliar) 163
2.45 Struktur Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2024 (Rp Miliar)..... 164
2.46 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2024 (Rp Miliar) 170
2.47 Rata-rata Struktur dan Komponen Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2024..... 171
2.48 Struktur Belanja Operasi Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2024 172
2.49 Struktur Belanja Modal Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2024 174
2.50 Perkembangan Struktur Belanja Transfer Keuangan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2024 (Rp Miliar)..... 175
2.51 Komposisi Pembiayaan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2024 (Rp Miliar) 180
2.52 Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas Kabupaten Tapanuli Tengah 190
3.1 Tahapan Pembangunan Tahunan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2026 – 2030..... 269
5.1 Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan 527
5.2 Kerangka Kerja MRPN 531
5.3 Tahapan Manajemen Risiko untuk Mencapai Target RPJMD 531



BAB I
Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur setiap pemangku kepentingan dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Penyusunan rencana pembangunan daerah harus mampu mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki setiap daerah serta sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah (Pemda) perlu menyusun perencanaan pembangunan daerah, dimana perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini penting dilakukan agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan efektif dan efisien serta sejalan dengan pembangunan nasional. Salah satu indikasi perencanaan yang baik adalah mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan kepada pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 tahun.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD ini merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala

daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Ketentuan mengenai penyusunan RPJMD tersebut, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat. Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, maka keberadaan dokumen RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029 menjadi sangat penting.

Oleh karena itu, RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029 perlu dilakukan penyelarasan dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodisasinya. Aspek penyelarasan dimaksud bahwa RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029 selain menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh belas) Program

Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029.

Berdasarkan kondisi tersebut dan dalam upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah daerah lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, maka dalam implementasi RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029 diharapkan bisa berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran sehingga mampu mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah periode 2025-2029, yaitu ”Membangun Tapanuli Tengah Adil untuk Semua, Lestari, dan Berkeadaban”

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029 berpedoman pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan yuridis dan praktis. Adapun peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undag Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang

Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

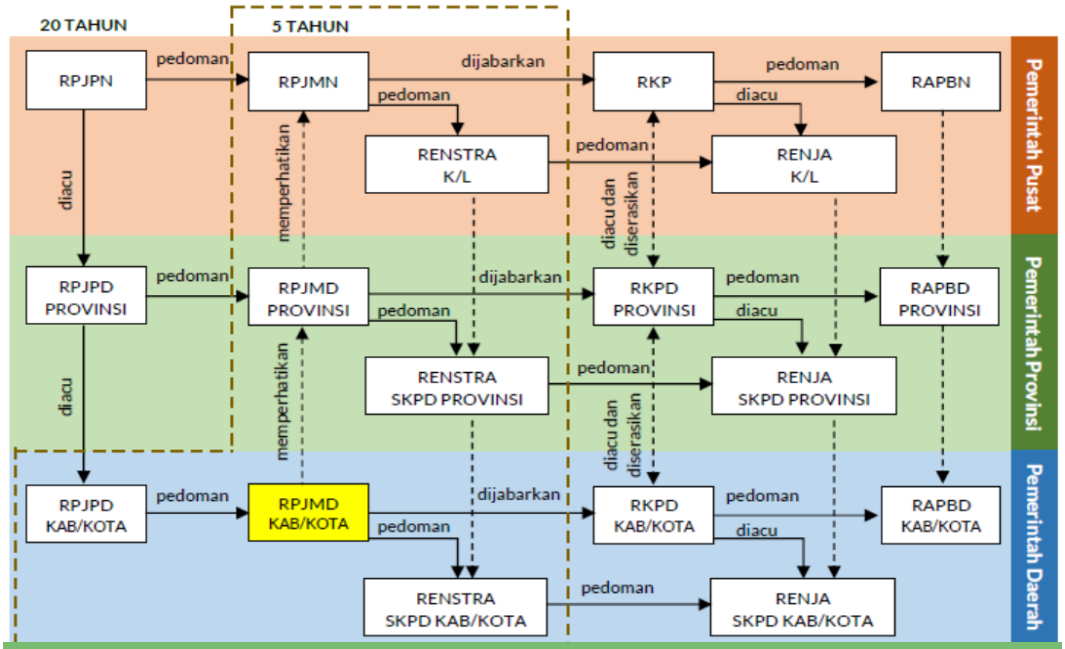
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan RPJMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
26. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 77);

27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2013 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah No 3 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021 Nomor 3).

1.3 Hubungan antar Dokumen

Dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang utuh dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025–2029 disusun dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029, di samping berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2045 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2013-2033, serta hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017–2022.

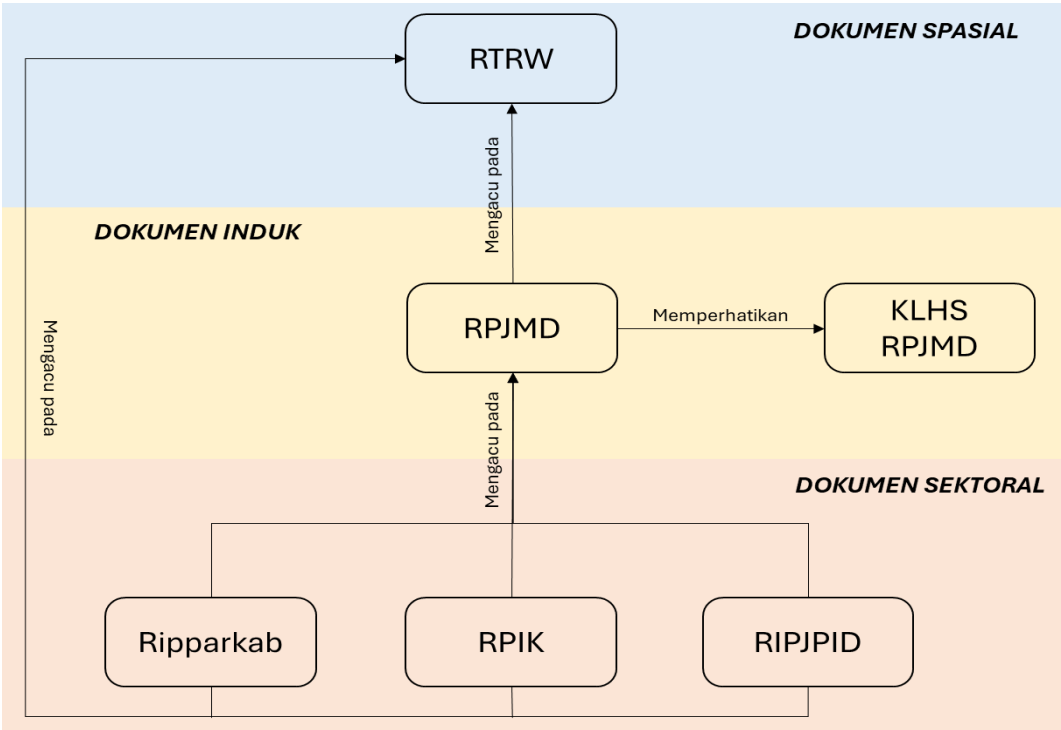
Selain dokumen-dokumen perencanaan di atas, perlu juga memperhatikan dokumen rencana pembangunan yang relevan, antara lain: agenda pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Selanjutnya RPJMD ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Adapun keterkaitan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.1 Hubungan RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dokumen RPJMD juga memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan sektoral lainnya. Hubungan keterkaitan antar dokumen tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.2 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Sektoral

1.3.1 Hubungan RPJMD dengan RPJPD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahun yang disusun berdasarkan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. RPJMD berfungsi sebagai penjabaran operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten, yang mencakup periode 20 tahun dan berfokus pada arah pembangunan strategis jangka panjang. RPJMD harus selaras dengan RPJPD, memastikan bahwa setiap program dan kegiatan dalam 5 tahun mendukung pencapaian tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan dalam RPJPD. RPJMD menjadi alat untuk menerjemahkan visi jangka panjang RPJPD ke dalam langkah-langkah konkret yang dapat diimplementasikan dalam jangka menengah. RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029 merupakan Tahap I dalam perencanaan pembangunan jangka panjang, di mana pada tahap pertama ini Kabupaten Tapanuli Tengah difokuskan untuk membangun fondasi transformasi.

1.3.2 Hubungan RPJMD dengan RPJMN

RPJMD Kabupaten disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang merupakan dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 tahun. RPJMD harus menyesuaikan dengan prioritas dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam RPJMN agar pembangunan daerah sejalan dengan tujuan nasional. Hubungan ini memastikan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencapai target pembangunan yang sinergis.

1.3.3 Hubungan RPJMD dengan KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen untuk memastikan bahwa rencana pembangunan dalam RPJMD memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. KLHS digunakan untuk menganalisis dampak lingkungan dari kebijakan, rencana, dan program yang diusulkan dalam RPJMD, sehingga pembangunan yang direncanakan tidak merusak

ekosistem atau sumber daya alam. Misalnya, jika RPJMD mencakup pembangunan kawasan industri, KLHS akan mengevaluasi potensi dampaknya terhadap lingkungan, seperti polusi atau kerusakan lahan, dan merekomendasikan langkah mitigasi. KLHS menjadi alat pengendalian agar RPJMD selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, sosial, dan pelestarian lingkungan.

1.3.4 Hubungan RPJMD dengan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah dokumen yang mengatur penggunaan dan pengelolaan ruang di wilayah kabupaten, termasuk zona untuk permukiman, industri, pertanian, dan konservasi. RPJMD harus sejalan dengan RTRW agar program pembangunan yang direncanakan sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi pelanggaran seperti pembangunan di kawasan yang dilindungi. Jika RPJMD mengusulkan pembangunan pusat ekonomi baru, lokasi dan pelaksanaannya harus sesuai dengan zona yang diizinkan dalam RTRW. Hubungan ini memastikan bahwa pembangunan dalam RPJMD tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial, tetapi juga mematuhi aturan tata ruang untuk mencegah konflik penggunaan lahan dan mendukung pembangunan yang terencana dengan baik.

1.3.5 Hubungan RPJMD dengan Ripparkab

RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) merupakan dokumen perencanaan utama yang mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun, mencakup visi, misi, tujuan, dan program prioritas daerah. Sementara itu, Ripparkab (Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten) adalah rencana sektoral yang difokuskan pada pengembangan pariwisata daerah, termasuk identifikasi potensi wisata, strategi promosi, dan infrastruktur pendukung. Ripparkab disusun berpedoman pada RPJMD untuk memastikan bahwa pengembangan

pariwisata selaras dengan arah pembangunan keseluruhan daerah, Implementasi Ripparkab dalam konteks RPJMD melibatkan sinkronisasi program, di mana anggaran dan sumber daya daerah dialokasikan secara terintegrasi untuk mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan.

1.3.6 Hubungan RPJMD dengan RPIK

RPJMD berfungsi sebagai payung perencanaan daerah yang menentukan prioritas pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam periode menengah, termasuk target pertumbuhan industri sebagai pendorong nilai tambah ekonomi. Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) adalah dokumen sektoral yang merinci strategi pengembangan industri lokal, seperti pemetaan kawasan industri, pemberdayaan UMKM, dan integrasi dengan rantai pasok nasional. Hubungan antara keduanya bersifat subordinatif, di mana RPIK disusun berdasarkan misi dan sasaran RPJMD untuk memastikan bahwa pembangunan industri mendukung visi daerah secara keseluruhan, sebagaimana dijelaskan dalam naskah akademik RPIK yang menekankan sinergi dengan dokumen perencanaan tingkat atas. RPIK berperan sebagai panduan operasional yang menerjemahkan kebijakan RPJMD ke dalam program konkret, seperti alokasi lahan industri yang selaras dengan target penciptaan lapangan kerja dalam RPJMD.

1.3.7 Hubungan RPJMD dengan RIPJIPD

RPJMD menyediakan kerangka strategis pembangunan daerah yang mencakup integrasi ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sebagai enabler utama untuk inovasi dan efisiensi. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK (RIPJPID) adalah dokumen khusus yang merancang roadmap untuk pengembangan IPTEK di daerah, termasuk prioritas riset, transfer teknologi, dan kolaborasi dengan institusi seperti BRIN. Hubungan keduanya bersifat integratif, di mana RIPJPID disusun sebagai bagian tak terpisahkan dari RPJMD, berdasarkan program prioritasnya untuk memastikan bahwa kemajuan IPTEK mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan daerah. RIPJPID berfungsi

sebagai alat sinkronisasi yang menyelaraskan kebijakan IPTEK dengan agenda RPJMD, seperti penerapan teknologi digital dalam sektor unggulan daerah sehingga mempercepat pencapaian target seperti peningkatan daya saing ekonomi.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan arah pembangunan jangka menengah dan menjaga kesinambungan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029. RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah juga memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan dalam rangka menjamin keberlanjutan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2045.

Adapun tujuan dari disusunnya dokumen RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029, antara lain:

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Tengah untuk 5 (lima) tahun ke depan dan selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah (Renstra-PD) dalam rentang waktu 5 (lima) tahun ke depan.
3. Sebagai tolok ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029.
4. Sebagai parameter penilaian kinerja SKPD Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam rangka pelaksanaan urusan.
5. Menjadi tolok ukur kinerja Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta instrumen bagi DPRD

dalam melaksanakan fungsi pengawasan;

6. Menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan bagi seluruh pemangku kepentingan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029 yang sekaligus memuat keterkaitan antar bab sepenuhnya mengacu kepada Inmendagri tentang RPJMD Tahun 2025-2029 yang terdiri atas 5 (lima) BAB, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan penyusunan RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Gambaran umum daerah menjelaskan beberapa aspek, diantaranya adalah: (1) Aspek geografi dan demografi, (2) Aspek kesejahteraan masyarakat, (3) Aspek daya saing daerah, serta (4) Aspek pelayanan umum. Selain itu, gambaran umum daerah ini juga berisi gambaran keuangan daerah serta berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029 disertai dengan tujuan dan sasaran RPJMD. Selain itu, bab III ini juga memuat strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dan Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Di samping itu, bab ini juga menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terkait target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan secara substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah

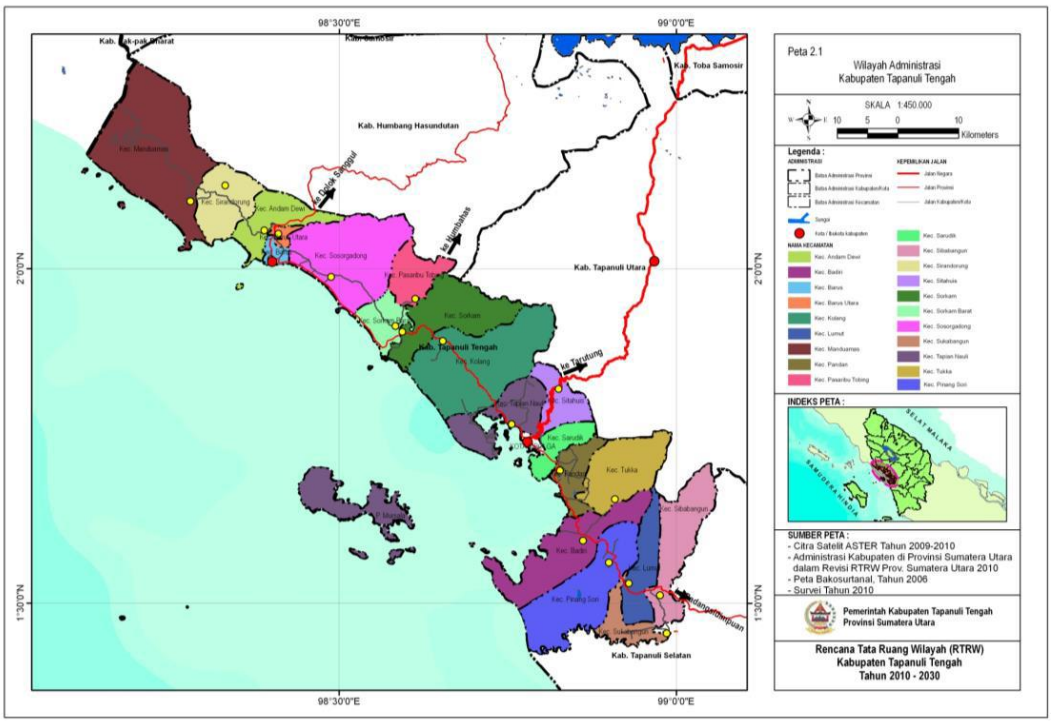
BAB II
Gambaran Umum Daerah

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek ini memberikan gambaran terkait kondisi geografi dan demografi Kabupaten Tapanuli Tengah.

2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Secara astronomis, Kabupaten Tapanuli Tengah terletak antara 1° 11’ 00” sampai 2° 22’ 0” Lintang Utara dan antara 98° 07’ 0’’ sampai 98° 12’ 0’’ Bujur Timur. Kabupaten Tapanuli Tengah berbatasan dengan Provinsi Aceh di sebelah utara; Kabupaten Tapanuli Selatan di sebelah selatan; Kota Sibolga dan Samudra Hindia di sebelah barat; Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kabupaten Pakpak Bharat di sebelah timur.



Gambar 2.1 Wilayah Administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah

Sumber: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah

Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki luas wilayah sebesar 2.194,97 Km^2 serta memiliki 20 kecamatan, yang terdiri dari 159 Desa dan 56 Kelurahan. Secara lebih rinci mengenai luas wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah

Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas (Km²)	Persentase
Pinangsori	5	5	78,32	3,57
Badiri	2	7	129,49	5,90
Sibabangun	1	6	284,64	12,97
Lumut	1	5	105,98	4,83
Sukabangun		6	49,37	2,25
Pandan	20	2	34,30	1,56
Tukka	5	4	150,93	6,88
Sarudik	4	1	25,92	1,18
Tapian Nauli	1	8	83,01	3,78
Sitahuis	1	5	50,52	2,30
Kolang	2	12	436,29	19,88
Sorkam	4	17	80,61	3,67
Sorkam Barat	2	9	44,58	2,03
Pasaribu Tobing		9	103,36	4,71
Barus	2	11	21,81	0,99
Sosorgadong	1	8	143,13	6,52
Andam Dewi	1	13	122,42	5,58
Barus Utara		6	63,02	2,87
Manduamas	3	17	99,55	4,54
Sirandorung	1	7	87,72	4,00
Tapanuli Tengah	**56**	**159**	**2.194,97**	**100,00**

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Kolang yaitu 436,29 km² (19,88 persen) , sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Barus yaitu 21,81 km² (0,99 persen).

A Topografi

Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan salah satu wilayah yang berada dipesisir Pantai Barat Sumatera dengan ketinggian antara 0–1.266 m di atas permukaan laut (dpl). Kota Pandan adalah Ibukota Kabupaten Tapanuli Tengah yang berada pada ketinggian antara 0-1.000 m di atas permukaan laut. Umumnya setiap kecamatan yang ada di Tapanuli Tengah memiliki ketinggian yang bervariasi yaitu antara 0-1.000 m diatas permukaan laut, karena umumnya kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah berada di sepanjang pesisir Pantai Barat Sumatera Utara dengan ketinggian antara 0-8

m di atas permukaan laut dan ke arah tengah merupakan kawasan perbukitan yang memiliki ketinggian di atas 100 m dari permukaan laut. Hanya beberapa kecamatan yang tidak berada di pesisir pantai dan terletak di ketinggian antara 100-1.266 di atas permukaan laut, seperti Kecamatan Barus Utara, Kecamatan Pasaribu Tobing, Kecamatan Sitahuis, Kecamatan Tukka, Kecamatan Suka Bangun, Kecamatan Lumut dan Kecamatan Sirandorung.

Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki hamparan gunung, pantai, laut dan sungai (GUPALA) dan berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia dengan garis pantai ±200 km dan dilalui jalur pegunungan Bukit Barisan. Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai ketinggian tempat yang bervariasi antara wilayah yang paling rendah, yang sejajar dengan permukaan laut hingga wilayah tertinggi di daerah pegunungan. Sebesar 50,46 persen wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah berada pada ketinggian diatas 100 m di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah terbagi dalam beberapa tipologi kelerengan yang bervariasi terdiri dari kelerengan Datar (0–8%), Berombak (8–15 %), Bergelombang (15–25 %), Curam (25 – 40 %) dan Terjal (>40 %).

Sumber air yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Tengah berasal dari mata air dan sungai hal ini dapat menjadi pengembangan jaringan sumber daya air dan sarana prasarana sumber daya air selain air minum dapat juga mendukung ketahanan pangan, ketersediaan air baku, pengendalian banjir dan pengamanan pantai. Secara umum, sungai-sungai di Kabupaten Tapanuli Tengah beraliran panjang. Pola Daerah Aliran Sungai (DAS) sangat dipengaruhi oleh keadaan morfologis, topografi dan bentuk wilayah disamping bentuk atau corak DAS itu sendiri. Di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki 6 (enam) Daerah Aliran Sungai (DAS) utama meliputi DAS Tapus, DAS Lae Chinong, DAS Sirahar, DAS Aek Sibundong, DAS Aek Kolang, dan DAS Batangtoru. Daerah hulu sungai berasal dari Pegunungan Bukit Barisan dan bermuara ke Pantai Barat Sumatera Utara. Selain itu terdapat sungai-sungai lainnya yang secara keseluruhan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk air minum, irigasi,

transportasi, pembangkit listrik tenaga air, dan untuk kepentingan lainnya.

B Geologi

Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki kondisi geologis yang cukup unik dan kompleks, mencerminkan beragam formasi geologis yang ada di wilayah ini. Selain struktur tanah alluvium dan regosol, daerah ini juga dikenal memiliki formasi vulkanik yang signifikan, terutama di bagian pegunungan. Aktivitas vulkanik di masa lalu telah memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan tanah regosol, yang kaya akan mineral vulkanik dan sering ditemukan di daerah kaki bukit.

Sebagian besar wilayah pesisir di Tapanuli Tengah memiliki tanah alluvium yang subur, hasil dari sedimentasi yang terus menerus dari sungai-sungai yang mengalir ke Samudera Hindia. Tanah alluvium ini sangat cocok untuk pertanian, terutama untuk tanaman padi dan palawija, serta mendukung ekosistem mangrove yang penting bagi keseimbangan lingkungan pesisir.

Dalam hal sumber daya tambang, selain bahan galian bukan logam dan batuan, Tapanuli Tengah juga memiliki potensi geothermal yang cukup besar. Potensi energi panas bumi ini menjadi salah satu perhatian utama untuk pengembangan energi terbarukan di masa depan. Selain itu, beberapa daerah di Tapanuli Tengah juga memiliki endapan batubara, meskipun belum dieksplorasi secara signifikan. Keberadaan berbagai jenis mineral dan sumber daya alam ini menjadikan Tapanuli Tengah sebagai daerah dengan potensi ekonomi yang sangat besar, terutama di sektor pertambangan dan energi.

C Hidrologi

Sumber air yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Tengah berasal dari mata air dan sungai hal ini dapat menjadi pengembangan jaringan sumber daya air dan sarana prasarana sumber daya air selain air minum dapat juga mendukung ketahanan pangan, ketersediaan air baku, pengendalian banjir dan pengamanan pantai. Secara umum, sungai-sungai di Kabupaten Tapanuli

Tengah beraliran panjang. Pola Daerah Aliran Sungai (DAS) sangat dipengaruhi oleh keadaan morfologis, topografi dan bentuk wilayah disamping bentuk atau corak DAS itu sendiri. Di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki 6 (enam) Daerah Aliran Sungai (DAS) utama meliputi DAS Tapus, DAS Lae Chinong, DAS Sirahar, DAS Aek Sibundong, DAS Aek Kolang, dan DAS Batangtoru. Daerah hulu sungai berasal dari Pegunungan Bukit Barisan dan bermuara ke Pantai Barat Sumatera Utara. Selain itu terdapat sungai-sungai lainnya yang secara keseluruhan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk air minum, irigasi, transportasi, pembangkit listrik tenaga air, dan untuk kepentingan lainnya.

D Klimatologi

Sebagian besar wilayah kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah berbatasan dengan lautan sehingga berpengaruh pada suhu udara yang tergolong daerah beriklim tropis. Dalam periode Bulan Januari sampai Desember, rata-rata suhu udara maksimum berada pada kisaran 27,800C pada bulan Mei dan minimum sebesar 26,200C pada bulan Januari. Kelembaban paling tinggi berada pada bulan Oktober sebesar 89,10% dan terendah pada bulan Februari sebesar 83,50%. Adapun dari sisi curah hujan, maka curah hujan tertinggi berada pada bulan November hingga mencapai 642,90 mm. Untuk lebih rinci, keadaan iklim wilayah Tapanuli Tengah dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Keadaan Iklim Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023

Bulan	Rata-rata Suhu (°C)	Kelembaban (%)	Kecepatan Angin (m/det)	Tekanan Udara (mb)	Jumlah Curah Hujan	Jumlah Hari Hujan	Penyinaran Matahari (jam)
Januari	26,20	86,10	1,10	1.008,60	302,80	19,00	3,83
Februari	26,70	83,50	1,10	1.008,40	169,20	14,00	5,35
Maret	26,70	86,30	1,20	1.008,40	438,30	26,00	5,42
April	27,00	86,30	1,30	1.007,80	339,80	23,00	3,81
Mei	27,80	83,80	1,40	1.008,60	311,20	23,00	5,23
Juni	27,49	83,50	1,50	1.008,40	74,10	16,00	5,66
Juli	26,80	85,90	1,70	1.009,20	479,20	21,00	4,51
Agustus	26,70	87,10	1,80	1.009,50	454,20	23,00	4,90
September	26,30	88,00	1,70	1.009,10	390,30	23,00	3,34
Oktober	26,40	89,10	1,40	1.010,10	417,20	24,00	3,02

Bulan	Rata-rata Suhu (°C)	Kelembaban (%)	Kecepatan Angin (m/det)	Tekanan Udara (mb)	Jumlah Curah Hujan	Jumlah Hari Hujan	Penyinaran Matahari (jam)
November	26,80	88,10	1,40	1.008,90	642,90	26,00	3,02
Desember	26,90	88,40	1,50	1.008,70	497,00	25,00	3,47

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Kecepatan angin yang bergerak melewati Kabupaten Tapanuli Tengah selama 2023 menunjukkan fluktuasi yang relatif kecil, dengan beberapa titik terendah di 1,10 m/det di bulan Januari dan Februari sedangkan titik tertinggi mencapai 1,80 m/det di bulan Agustus. Curah hujan di Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2023 menunjukkan pola yang beragam. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November dan Desember dengan rata-rata di atas 400 mm. Curah hujan terendah terjadi pada bulan Februari dan Maret dengan rata-rata di bawah 100 mm.

Jam penyinaran matahari per hari di Kabupaten Tapanuli Tengah selama tahun 2023 menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Rentang waktu penyinaran matahari mulai dari 3,02 jam hingga 5,66 jam. Ini menggambarkan adanya fluktuasi dalam intensitas penyinaran matahari yang dipengaruhi oleh faktor-faktor cuaca, seperti awan dan curah hujan. Pada tahun 2023 hujan turun selama 263 hari, dapat dikatakan bahwa pada tahun 2023 musim hujan lebih panjang daripada musim kemarau.

E Penggunaan Lahan

Guna lahan di Kabupaten Tapanuli Tengah diklasifikasikan menjadi delapan kategori. Sedangkan guna lahan yang terluas adalah peruntukan lahan hutan/perkebunan yang mencapai 167.951,38 Ha atau 77,32% dari total luas Kabupaten Tapanuli Tengah. Berikut merupakan peta tata guna lahan Kabupaten Tapanuli Tengah



Gambar 2.2 Peta Guna Lahan Kabupaten Tapanuli Tengah

Sumber: RTRW Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2013-2033

Guna lahan untuk perkebunan seluas 43.501,80 Ha dari total luas Kabupaten Tapanuli Tengah. Perkebunan yang mendominasi adalah perkebunan karet dengan total luas areal sekitar 31.846,5 Ha atau 73,21 persen, kemudian adalah perkebunan kelapa dengan luas sekitar 5.428 Ha, selanjutnya adalah perkebunan sawit dengan luas sekitar 2.753 Ha dan perkebunan kakao dengan luas sekitar 2.695,5 Ha dari total luas perkebunan yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah. Guna lahan peruntukan hutan seluas 161.948,46 ha atau sekitar 7,38 persen dari Total luas Kabupaten Tapanuli Tengah, dimana sebagai kawasan hutan lindung luasannya sekitar 54.975,11 Ha atau 33,95 persen dari luas kawasan hutan, yang diperuntukkan sebagai kawasan hutan produksi sekitar 7.666,41 Ha, yang ditetapkan sebagai kawasan HPT sekitar 51.896,19 Ha dan areal penggunaan lain sekitar 47.410,75 Ha dari total luas kawasan hutan di Kabupaten Tapanuli Tengah.

2.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Sesuai dengan deskripsi karakteristik wilayah pada sub bab sebelumnya, maka wilayah yang memiliki potensi untuk dapat dikembangkan

di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sebagai berikut:

1. Wilayah Hutan Produksi

   Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Kawasan peruntukan hutan produksi dimaksudkan untuk menyediakan komoditas hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan untuk keperluan industri, sekaligus untuk melindungi kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dan hutan konservasi dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali.

   Penerapan kriteria kawasan peruntukan hutan produksi secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan hutan produksi yang dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

   a. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
   b. meningkatkan fungsi lindung;
   c. menyangga kawasan lindung terhadap pengembangan kawasan budi daya;
   d. menjaga keseimbangan tata air dan lingkungan;
   e. meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya hutan;
   f. meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di daerah setempat;
   g. meningkatkan pendapatan daerah dan nasional;
   h. meningkatkan kesempatan kerja terutama untuk masyarakat daerah setempat;
   i. meningkatkan nilai tambah produksi hasil hutan dan industri yang mengolahnya;
   j. meningkatkan ekspor; atau
   k. mendorong perkembangan usaha dan peran masyarakat terutama di daerah setempat.

2. Wilayah Hutan Produksi Terbatas

   Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) adalah hutan produksi

dimana eksploitasinya hanya dapat dengan cara tebang pilih dan tanam. Tujuan dari kawasan hutan produksi ini adalah untuk mengekpoitasi tanaman yang ada didalam kawasan hutan dengan tidak merubah fungsi kawasan tersebut. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara terbatas.

Berdasarkan SK.44/Menhut-II/2005 Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai luas kawasan Hutan Produksi Terbatas sebesar 52.280 Ha yang terdapat di Kecamatan Kolang, Sorkam, Sorkam Barat, Pasaribu Tobing, Sosor Gadong, Andam Dewi, Manduamas, Sirandorung dan Tapian Nauli. Berdasarkan hal tersebut dengan luasan HPT yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri seperti pohon sengon yang sebagai bahan baku pembuatan beton, pagar konstruksi. Pohon lainnya dapat juga dialokasikan oleh masyarakat untuk produksi kayu sebagai bahan konstruksi.

3. Wilayah Pertanian Tanaman Pangan

   Kawasan tanaman pangan basah adalah kawasan yang dipergunakan bagi tanaman pangan lahan basah dimana pengairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis. Berdasarkan analisis kesesuaian lahan, maka kawasan ini direncanakan berlokasi menyebar hampir di seluruh wilayah kecamatan baik dalam skala besar maupun kecil dengan luas total 16.653 Ha yang secara dominan berlokasi pada Kecamatan Kolang, Sibabangun, Sorkam, Sorkam Barat, Tukka dan Badiri.

   Bila dilihat peruntukan guna lahan sawah di lapangan dari tahun ke tahun mengalami penurunan dan peralihan fungsi lahan, perubahan luas lahan ini antara lain disebabkan:

   a. Telah terjadinya perubahan status penggunaan lahan (alih fungsi lahan) dari kawasan pertanian lahan basah (sawah) menjadi kawasan perkebunan.
   b. Masih kurangnya sarana irigasi untuk persawahan dan irigasi yang ada belum dapat difungsikan dengan baik sehingga banyak masyarakat

mengalih fungsikan lahannya.

c. Sawah non irigasi/tadah hujan pada prinsipnya dapat dialihkan ke penggunaan lain tanpa menimbulkan kerugian investasi yang besar karena tidak ada saluran irigasi teknis yang dibongkar/tidak terpakai.
d. Prospek dan pemasaran hasil perkebunan lebih luas, tidak hanya berskala lokal dan regional tetapi juga internasional.

Oleh sebab itu untuk mempertahankan pertanian lahan basah yang ada saat ini harus melakukan peningkatan, baik hasil produksi maupun pemasaran serta peningkatan sarana irigasi teknis sehingga Kabupaten Tapanuli Tengah dapat sebagai salah satu pemasok hasil pertanian lahan basah di Sumatera Utara.

Adapun rencana peningkatan dan pengelolaan kawasan pertanian lahan basah dalam rangka upaya mempertahankan lahan pertanian yang ada, meliputi:

a. Dalam jangka pendek meningkatkan produktivitas pertanian melalui pemanfaatan bibit yang unggul, pupuk yang tepat, teknologi tepat-guna, pemanfaatan sistem jaringan irigasi secara optimal, pengembangan kelompok dan kelembagaan usaha tani untuk yang didukung sistem pengolahan produksi dan jaringan pemasaran.
b. Lembaga yang bertanggungjawab dalam pengelolaan Kawasan Pertanian Lahan Basah di tingkat kabupaten
c. Penentuan batas dan pemberian izin Kawasan Pertanian Lahan
d. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah memberikan arahan kepada masyarakat tentang pengelolaan Kawasan Pertanian Lahan Basah

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Kawasan Pertanian Lahan Basah dan melakukan penertiban kepada pihak-pihak yang melanggar pemanfaatannya. Pada prinsipnya pengelolaan kawasan pertanian lahan basah bertujuan untuk selalu menjaga ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah khususnya dan Provinsi Sumatera Utara umumnya.

Kawasan tanaman pangan lahan kering adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan kering berupa tanaman palawija, hortikultura, atau tanaman pangan lainnya.

Tanaman pangan lahan kering tidak memerlukan sistem pengairan irigasi. Sedangkan kawasan tanaman lahan kering direncanakan menyebar hampir di seluruh Kecamatan Kabupaten Tapanuli Tengah baik dalam skala besar mau pun kecil dengan luas total 35.654 Ha dengan pusat pengembangan pertanian lahan kering di Kecamatan Kolang dan Sibabangun.

4. Wilayah Pertanian Hortikultura

   Prospek hortikultura diperkirakan akan semakin baik. Tanaman ini terdapat pada semua kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, namun dominan di Kecamatan Kolang dan Sibabangun serta akan dikembangkan di semua kecamatan di samping padi dan palawija, baik di lahan basah maupun kering.

   Tanaman sayuran dan buah-buahan di Kabupaten Tapanuli Tengah untuk tujuan konsumsi lokal, regional maupun ekspor dapat dikembangkan di seluruh kecamatan. Kawasan hortikultura dapat berupa kawasan tanaman pangan lahan kering yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan kering berupa tanaman palawija, hortikultura, atau tanaman pangan lainnya.

   Kawasan hortikultura direncanakan menyebar hampir di seluruh Kecamatan Kabupaten Tapanuli Tengah baik dalam skala besar mau pun kecil dengan luas total 458,12 Ha dengan pusat pengembangan hortikultura di Kecamatan Kolang dan Sibabangun dengan komoditas unggulan adalah mangga, rambutan dan durian.

5. Wilayah Perkebunan

   Pengembangan kawasan tanaman tahunan di Kabupaten Tapanuli Tengah berupa perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Seiring dengan usaha perluasan kawasan tanaman tahunan, maka jaringan jalan yang ada

harus ditingkatkan. Kabupaten Tapanuli Tengah terdapat lahan tidur yang dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu lahan tidur yang telah dimiliki oleh perorangan dan lahan tidur yang merupakan hak pemerintah setempat. Kedua jenis lahan tidur tersebut di atas masih banyak terdapat di Kabupaten Tapanuli Tengah yang menyebar di seluruh kecamatan. Lahan tidur tersebut diprioritaskan dalam pengembangannya untuk kawasan tanaman tahunan.

Berdasarkan rencana pengembangan perkebunan, dan melihat ketersediaan lahan serta potensinya, maka Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai bagi pengembangan perkebunan, utamanya di Kecamatan Kolang, Sibabangun, Tukka, Sosorgadong, Kecamatan Manduamas dan Kecamatan Pinangsori. Kondisi infrastruktur yang masih terbatas sangat mempengaruhi minat swasta untuk investasi sehingga perlu peran serta Pemerintah Daerah untuk meningkatkan infrastruktur pendukung.

Orientasi pasar komoditas perkebunan umumnya sudah berorientasi pasar lokal, regional dan bahkan nasional seperti kelapa sawit, coklat, karet, kelapa, dan kopi. Hal ini membuat pengembangan komoditi perkebunan tidak terbatas oleh daya serap pasar lokal. Pembatas utama adalah ketersediaan dan kesesuaian dan lahan dengan jenis komoditi yang dikembangkan. Oleh karena itu, pengembangan komoditif perkebunan juga harus melihat kesesuaian lahan yang ada agar hasil yang diperoleh optimal. Luar rencana polar ruang perkebunan kurang lebih sebesars 40.386 Ha. Pengelolaan Kawasan Perkebunan, meliputi:

a. Dalam jangka pendek meningkatkan produktivitas perkebunan melalui pemanfaatan bibit yang unggul, pupuk yang tepat, dan teknologi tepat-guna yang didukung oleh pengembangan sistem jaringan pemasaran produksi perkebunan melalui pembangunan sentra pengumpulan dan Terminal Agribisnis di sekitar kawasan perkebunan.
b. Dalam jangka pendek mencari investor untuk pengembangan

perkebunan besar untuk mendorong percepatan pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah.

c. Lembaga yang bertanggung-jawab dalam pengelolaan Kawasan Perkebunan Rakyat adalah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan sedangkan untuk Perkebunan besar adalah Badan Usaha pengelola.
d. Penentuan batas dan pemberian izin pemanfaatan Kawasan Perkebunan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melalui Badan Pertanahan dengan mendapat arahan dari Pemerintah Provinsi.
e. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan memberikan arahan kepada masyarakat dan seluruh stakeholders tentang pengelolaan Kawasan Perkebunan.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Kawasan Perkebunan dan melakukan penertiban kepada pihak-pihak yang melanggar pemanfaatannya.

6. Wilayah Perikanan

Pengembangan kawasan perikanan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan ikan, baik pasar lokal daerah sekitar Kabupaten Tapanuli Tengah. Untuk mencapai arahan ini perlu ditindaklanjuti dengan menyediakan sarana dan prasarana pembangunan perikanan, terutama perikanan darat dan laut.

Penetapan wilayah pengembangan perikanan didasarkan pada pendekatan konsep kompleks wilayah. Konsep kompleks wilayah adalah kombinasi antara analisis keruangan dan ekologi perikanan. Setiap wilayah mempunyai interaksi dengan wilayah lain yang muncul karena adanya perbedaan antar wilayah. Fenomena wilayah dipelajari melalui analisis keruangan, sedangkan interaksi manusia dengan lingkungan dipelajari keterkaitannya dalam analisis ekologi. Satu wilayah adalah satu kesatuan sosial ekonomi dan sumber hayati perikanan.

Sektor perikanan merupakan sektor yang cukup berkembang di Kabupaten Tapanuli Tengah. Kegiatan perikanan merupakan salah satu dari bentuk pemanfaatan ruang yang lebih efisien dari pertanian dan perkebunan. Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki cukup banyak sumber daya ruang yang sesuai untuk pengembangan sektor perikanan, baik budidaya perikanan darat, budidaya perikanan air payau/tambak, penangkapan di daerah perairan umum, maupun penangkapan di laut.

Kaitannya dengan pola pemanfaatan ruang, maka yang menjadi penekanan di sini adalah budidaya tambak dan penangkapan perikanan laut. Kebutuhan masyarakat akan produk perikanan makin hari makin meningkat seiring dengan peningkatan pemenuhan gizi masyarakat. Produk perikanan menjadi pilihan dalam pemenuhan kebutuhan akan gizi, karena di samping mudah diperoleh juga harganya relatif terjangkau. Akhir-akhir ini bahkan sudah banyak dijumpai pabrik-pabrik pengelolaan ikan untuk tujuan ekspor. Prospek pasar untuk pengembangan komoditi ini baik lokal, nasional, maupun internasional sangat tinggi.

Rencana pengembangan kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Tapanuli Tengah dengan luas kurang lebih sebesar 2.508,78 Ha yang meliputi pengembangan perikanan tangkap, perikanan budidaya dan kawasan peruntukan pengolahan ikan:

a. Rencana pengembangan kawasan perikanan tangkap dikembangkan di Kecamatan Badiri, Kecamatan Pandan, Kecamatan Sarudik, Kecamatan Tapian Nauli, Kecamatan Sorkam Barat,Kecamatan Barus, Kecamatan Andam Dewi, dan Kecamatan Manduamas;
b. Rencana pengembangan perikanan budidaya dikembangkan di Kecamatan Andam Dewi, Kecamatan Tapian Nauli, Kecamatan Badiri, Kecamatan Sibabangun, Kecamatan Lumut, dan Kecamatan Pinagsori;
c. Kawasan pengembangan pengolahan ikan berada di Kecamatan Sarudik dan Kecamatan Tapian Nauli; dan

d. Kawasan pengembangan pangkalan ikan (PPI) dan Tempat Penangkapan Ikan (TPI) yaitu diarahkan ke TPI Labuan Angin, PPI Barus dan PPI Sorkam.

Rencana Pengelolaan Kawasan Perikanan, meliputi:

a. Meningkatkan produktivitas perikanan dengan memperhatikan aspek lingkungan;
b. Penentuan batas dan pemberian ijin pada Kawasan Perikanan;
c. Meningkatkan kualitas pelaku perikanan khususnya dalam pengelolaan menuju industri perikanan;
d. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Kawasan Perikanan dan melakukan penertiban kepada pihak-pihak yang melanggar pemanfaatannya; dan
e. Pengembangan kawasan perikanan menuju pengembangan kawasan Minapolitan.

Penerapan kriteria kawasan peruntukan perikanan secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan perikanan yang dapat memberikan manfaat berikut:

a. Meningkatkan produksi perikanan dan mendayagunakan investasi;
b. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
c. Meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
d. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
e. Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
f. Meningkatkan kesempatan kerja;
g. Meningkatkan ekspor; dan/atau
h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

7. Wilayah Pertambangan

Kawasan pertambangan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi industri pertambangan, baik wilayah yang sedang maupun akan segera dilakukan kegiatan penambangan. Kriteria lokasi sesuai dengan yang

ditetapkan oleh Departemen Pertambangan dan Energi untuk daerah masing-masing, yang mempunyai potensi bahan tambang yang bernilai tinggi.

Kawasan pertambangan di Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri atas kawasan pertambangan mineral logam, kawasan pertambangan mineral non logam, kawasan pertambangan batubara, dan kawasan pertambangan rakyat. Yang dimaksud dengan kawasan pertambangan mineral logam meliputi emas, tembaga, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, stronium, germanium, dan zenotin. Definisi dari kawasan pertambangan mineral bukan logam meliputi komoditas intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen

Untuk pengembangan potensi bahan galian yang terdapat di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, perlu disusun skala prioritas terhadap bahan galian yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:

a. Ketersediaan bahan galian dan lokasinya;
b. Kondisi dan Kebutuhan Daerah; dan
c. Pangsa Pasar.

Beberapa komoditi yang menonjol untuk dikembangkan selain bahan galian c untuk konstruksi adalah bahan galian industri dan energi, di

antaranya Batu Bara dan Logam Dasar.

Pola pemanfaatan ruang di wilayah potensi pertambangan diarahkan pada kegiatan industri pengolahan bahan-bahan tersebut menjadi komoditi turunan yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Pola pemanfaatan ini perlu diiringi dengan penyediaan sarana dan prasarana fisik yang mendukung. Salah satu prasyarat pengembangan kawasan pertambangan adalah kemudahan perjanjian bagi pengusaha yang akan membuka usaha pertambangan, termasuk perizinan industri yang menggunakan bahan baku bahan tambang dari Kabupaten Tapanuli Tengah.

Kawasan pertambangan merupakan kawasan budidaya yang mempunyai kriteria berpotensi mineral yang sudah atau belum dibudidayakan, tetapi kawasan yang dapat dikembangkan sebagai kawasan pertambangan harus di luar dari kawasan hutan lindung yang telah ditetapkan. Sehingga kawasan pertambangan yang ada tidak merusak kawasan lindung yang telah ditetapkan.

Rencana pengembangan kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Tapanuli Tengah meliputi:

a. jenis bahan galian komoditi yang menonjol untuk dikembangkan selain bahan galian c untuk konstruksi adalah bahan galian industri dan energi;
b. kawasan pertambangan merupakan kawasan budidaya yang mempunyai kriteria berpotensi mineral yang sudah atau belum dibudidayakan;
c. kawasan yang dapat dikembangkan sebagai kawasan pertambangan harus di luar dari kawasan-kawasan hutan lindung yang telah ditetapkan; dan
d. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WP) di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah berada di Kecamatan Sibabangun, Kecamatan Pinangsori dan Kecamatan Tukka.

Penerapan kriteria kawasan peruntukan pertambangan secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pertambangan yang diharapkan dapat memberikan manfaat berikut:

a. meningkatkan produksi pertambangan dan mendayagunakan investasi;
b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
c. tidak mengganggu fungsi lindung;
d. memperhatikan upaya pengelolaan kemampuan sumber daya alam;
e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
f. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
g. menciptakan kesempatan kerja;
h. meningkatkan ekspor; dan/atau
i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana kawasan pertambangan mineral logam di Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri atas emas, timah, seng dan perak meliputi:

a. Kecamatan Sibabangun;
b. Kecamatan Sukabangun;
c. Kecamatan Lumut;
d. Kecamatan Pinangsori;
e. Kecamatan Badiri;
f. Kecamatan Tukka;
g. Kecamatan Manduamas;
h. Kecamatan Sitahuis;
i. Kecamatan Tapian Nauli;
j. Kecamatan Kolang;
k. Kecamatan Sorkam;
l. Kecamatan Sorkam Barat;
m. Kecamatan Sirandorung;
n. Kecamatan Barus Utara;

o. Kecamatan Andamdewi.

Rencana kawasan pertambangan mineral non logam dan pertambangan batuan di Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri atas batu gamping, batu cadas dan pasir sedimen meliputi:

a. Kecamatan Sibabangun;
b. Kecamatan Pinangsori; dan
c. Kecamatan Tukka;
d. Kecamatan Tapian Nauli;
e. Kecamatan Sitahuis;
f. Kecamatan Kolang;
g. Kecamatan Manduamas;
h. Kecamatan Andamdewi;
i. Kecamatan Barus;
j. Kecamatan Sorkam;
k. Kecamatan Sorkam Barat;
l. Kecamatan Pasaributobing;
m. Kecamatan Sosorgadong;
n. Kecamatan Pandan;
o. Kecamatan Sarudik;
p. Kematan Badiri;
q. Kecamatan Sibabangun; dan
r. Kecamatan Sukabangun.

Rencana kawasan pertambangan batubara meliputi:

a. Kecamatan Badiri;
b. Kecamatan Kolang; dan
c. Kecamatan Sosorgadong.

Rencana kawasan pertambangan rakyat adalah usaha pertambangan terhadap galian C yang di usahakan secara individu oleh masyarakat yang lokasinya meliputi:

a. Kecamatan Sibabangun;

b. Kecamatan Pinangsori;
c. Kecamatan Tukka;
d. Kecamatan Tapian Nauli;
e. Kecamatan Sitahuis;
f. Kecamatan Kolang;
g. Kecamatan Manduamas;
h. Kecamatan Andamdewi;
i. Kecamatan Barus;
j. Kecamatan Sorkam;
k. Kecamatan Sorkam Barat;
l. Kecamatan Pasaributobing;
m. Kecamatan Sosorgadong;
n. Kecamatan Pandan;
o. Kecamatan Sarudik; dan
p. Kecamatan Badiri.

Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Tapanuli Tengah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

8. Wilayah Industri

Pengembangan kawasan peruntukan industri diarahkan pada industri yang tidak merusak lingkungan. Penekanan kegiatan industri adalah industri kecil dan kerajinan yang tersebar di berbagai kecamatan serta industri yang berbasis agroindustri atau industri yang mengelola hasil pertanian. Tidak ada peruntukan kawasan industri khusus untuk menampung kegiatan industri kecil dan kerajinan. Kawasan industri pertambangan diarahkan sesuai dengan lokasi bahan baku berada.

Yang dimaksud dengan jenis atau klasifikasi industri pada kawasan peruntukan industri adalah:

a. Industri besar, yaitu industri yang memiliki ciri-ciri: modal sangat besar, teknologi canggih dan modern, organisasi teratur, tenaga kerja dalam jumlah banyak dan terampil, pemasarannya berskala nasional

atau internasional;

b. Industri menengah, yaitu industri yang memiliki ciri-ciri: modal relatif besar, teknologi cukup maju tetapi masih terbatas, pekerja antara 10-200 orang, tenaga kerja tidak tetap, dan lokasi pemasarannya relatif lebih luas (berskala regional); dan
c. Industri kecil dan mikro, yaitu industri yang memiliki ciri-ciri: modal relatif kecil, teknologi sederhana, pekerjanya kurang dari 10 orang biasanya dari kalangan keluarga, produknya masih sederhana, dan lokasi pemasarannya masih terbatas (berskala lokal).

Secara garis besar, pengembangan industri diarahkan pada:

a. Pengembangan industri yang memiliki hubungan dan keterkaitan erat dengan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata;
b. Memperluas lapangan kerja, kesempatan berusaha dan meningkatkan volume ekspor;
c. Peningkatan kualitas produksi dan daya saing;
d. Menciptakan iklim usaha yang tetap untuk mendorong investasi lokal.

Dalam pengembangan sektor industri di Kabupaten Tapanuli Tengah, penentuan lokasi pengembangan merupakan salah satu faktor penting karena kesalahan pemilihan lokasi akan berakibat terhambatnya perkembangan yang ingin dicapai.

Teori lokasi menyatakan bahwa variabel-variabel yang perlu mendapat penilaian atas potensi lokasi industri adalah:

a. Ketersediaan prasarana dan sarana penunjang pada lokasi atau daerah sekitarnya;
b. Kemudahan mendapat material dari sumbernya ditinjau dari segi waktu, biaya dan mutu;
c. Ketersediaan tenaga kerja yang potensial bagi kegiatan industri; dan
d. Sarana lingkungan yang menunjang bagi perkembangan kegiatan industri.

Berdasarkan pertimbangan faktor-faktor di atas disimpulkan bahwa

beberapa kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah dipandang memenuhi syarat sebagai lokasi pengembangan agroindustri yang dinilai berdasarkan ketersediaan potensi bahan baku pada *hinterland*-nya dan berdasarkan kriteria yang telah diuraikan di atas, maka rencana pengembangan kawasan industri di Kabupaten Tapanuli Tengah meliputi:

a. industri kecil dan menengah dapat diarahkan di seluruh kecamatan sesuai dengan potensi dan sumber bahan baku yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah dengan tetap melihat kaedah lingkungan;
b. industri besar diarahkan di pusat industri Labuan Angin Kecamatan Tapian Nauli;
c. industri menengah di kawasan pesisir Kabupaten Tapanuli Tengah terutama di Kecamatan Sarudik dan Kecamatan Barus

Penerapan kriteria kawasan peruntukan industri secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan peruntukan industri yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. meningkatkan produksi hasil industri dan meningkatkan daya guna investasi di daerah sekitarnya;
b. mendorong perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
c. tidak mengganggu fungsi lindung;
d. tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
f. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
g. menciptakan kesempatan kerja;
h. meningkatkan ekspor; dan/atau
i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berbudaya industri dan berdaya saing.

9. Wilayah Pariwisata

Dari segi potensi, Kabupaten memiliki potensi-potensi berupa keunggulan kondisi alam maupun kegiatan lain yang mendukung kegiatan

pariwisata. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan pariwisata dengan mengacu pada pola pemanfaatan ruang yang telah ditentukan. Selain itu, pengembangan pariwisata juga diisyaratkan tetap berbasis pada nilai budaya setempat, pendidikan sosial dan upaya-upaya pelestarian alam. Pola pengembangan pariwisata dilakukan dengan mekanisme yang terencana dan terpadu. Perencanaan yang perlu dilakukan berupa identifikasi potensi objek dan potensi pasar wisata, penyusunan prioritas pengembangan kawasan, studi kelayakan pengembangan serta penyusunan *master plan* pengembangan yang dipaduserasikan dengan pola pemanfaatan ruang untuk sektor-sektor lain. Mekanisme keterpaduan dalam pengembangan pariwisata dimaksudkan agar pengembangan pariwisata sejauh mungkin melibatkan unit-unit usaha masyarakat lokal secara aktif dan memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial.

Rencana pengembangan kawasan pariwisata di Kabupaten Tapanuli Tengah meliputi:

a. Kawasan peruntukan pariwisata bertujuan untuk menyelenggarakan jasa pariwisata atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut.
b. Usaha pariwisata digolongkan ke dalam usaha jasa pariwisata, pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha sarana pariwisata.
c. Usaha jasa pariwisata meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan, dan jasa penyelenggaraan pariwisata.
d. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola objek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola objek dan daya tarik wisata yang telah ada.

e. Usaha sarana pariwisata meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan dan penyediaan fasilitas, serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata.

Penerapan kriteria kawasan peruntukan pariwisata secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pariwisata yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. meningkatkan devisa dari pariwisata dan mendayagunakan investasi;
b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan subsektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
c. tidak mengganggu fungsi lindung;
d. tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
f. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
g. menciptakan kesempatan kerja;
h. melestarikan nilai warisan budaya, adat istiadat, kesenian dan mutu keindahan lingkungan alam; dan/atau
i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana peruntukan kawasan pariwisata di Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri atas:

a. Pariwisata alam berupa wisata sungai, pegunungan,pantai, air terjun meliputi di Kecamatan Pinangsori yaitu danau pandan, pemandian sungai lubuk nabolon, sungai ramayana dan air terjun aeknabobar, Kecamatan Badiri yaitu pantai ujung batu pari, pantai kampung sawah sitandus, pantai maloko, pantai sikapas, pantai kampung danau, pulau situngkus, pulau batu mandi, pulau batu layar, pantai bottot, pantai monyet, pulau bakar, pulau ungge, dan pantai sijago-jago, Kecamatan Pandan yaitu pantai bosur, pantai kalangan, pantai hajoran, pantai pandan cerita, pantai labuan mandailing, pantai sibuluan, pantai muara sibuluan, pantai muara nibung, air terjun labuan sonang, sungai sibuluan, Kecamatan Sarudik yaitu bukit

pondok batu, sungai sarudik, pantai ujung batu, pantai labuan nasonang, pantai batu lubang, pulau poncan gadang, pulau poncan ketek dan air terjun sibuni-buni, Kecamatan Tukka dengan Wisata Pegunungan, Air Terjun Sipitu-pitu Kecamatan Sitahuis dengan objek wisata adalah bukit anugerah, puncak bonan dolok, sungai aek maranti, sungai aek raisan, air terjun batu lobang dan air terjun bonan dolok, Kecamatan Tapian Nauli dengan objek wisata pantai labuan angin, pantai mela, pulau mursala, air terjun mursala, pulau silaban barat, pulau talam, pulau silabu na menek, pulau silabu na godang, pulau kalimatung na menek, pulau kalimatung na godang, pulau putri runduk, pulau raja janggi, pulau putih, air terjun aloban dan pantai kuta, Kecamatan Kolang dengan objek wisata adalah air terjun silaklak, sungai aek sibundong, pantai muara kolang, pantai kayu putih, pantai tanah hitam, pantai rintis, pantai bandang, Kecamatan Sorkam Barat dengan objek wisata adalah pantai aek raso, pantai binasi, pantai pasar sorkam, Kecamatan Barus dengan objek wisata adalah pantai pasar tarandam, pantai pasar batu gerigis, pantai kade gadang, Kecamatan Sorkam dengan objek wisata adalah sungai aek sibundong, pantai teluk roban/bottot, pulau sorkam, Kecamatan Andam Dewi dengan objek wisata adalah sungai aek husor, pantai sitiris-tiris, pantai sipaubat, pantai aek busuk, pantai kinati, pantai kedai tiga, pulau karang, pulau panjang, pulau dundun, Kecamatan Manduamas dengan objek wisata adalah pantai sitiris tiris, pantai simanuk manuk;

b. Pariwisata budaya dan sejarah meliputi Kecamatan Sitahuis adalah tugu peringatan perang gerilia, makam raja panggabean dan batu lobang, Kecamatan Kolang adalah liang gorga, dan makam pahlawan Dr. Ferdinan Lumbantobing, Kecamatan Barus makam papan tinggi, makam mahligai, makam tuan madhdud, makam ibrahim syeh, makam tuan ambar, benteng portugis, pasar tarandam, rumah

tradisional barus, dan desa nelayan pasar tarandam, Kecamatan Barus Utara adalah batu cawan perjamuan kudus, Kecamatan Andamdewi batu ping, makam raja uti, lobu tua, sungai aek busuk, permandian putri andam dewi, dan aek raja, Kecamatan Sorkam dengan objek wisata adalah makam tuan hidayat, Kecamatan Tukka dengan objek wisata adalah liang pagar gunung, Kecamatan Tapian Nauli dengan objek wisata adalah Makam Raja Sasi Hutagalung.

10. Wilayah Permukiman

Kawasan permukiman terdiri dari permukiman perkotaan dan permukiman pedesaan. Pengembangan Permukiman pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kondisi permukiman perkotaan dan perdesaan yang sehat dan layak huni (*livable*), aman, nyaman, damai dan berkelanjutan sehingga tercipta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pengembangan permukiman, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah merencanakan penetapan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) di beberapa lokasi. Proses penetapan dengan memperhatikan berbagai faktor, seperti potensi ekonomi kawasan, jumlah penduduk, prasarana dan sarana dasar serta potensi-potensi lain yang belum tergali yang diperkirakan mampu meningkatkan kawasan menjadi lebih mandiri dan berkembang.

Di sisi lain, terdapat lingkungan permukiman yang telah berkembang relatif sangat cepat dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi sehingga cenderung mengakibatkan lingkungan permukiman menjadi kumuh (*slum area*) karena keterbatasan ketersediaan prasarana dan sarana dasar.

Pengembangan kawasan pemukiman terkait dengan sektor-sektor lain, terutama sektor fisik prasarana. Kawasan yang dikembangkan untuk pemukiman memiliki beberapa syarat, antara lain:

a. Memiliki sumber air yang terjamin kontinuitas.
b. Aksesibilitas (keterjangkauan transportasi) mudah.
c. Dekat dengan pusat-pusat ekonomi-sosial.

d. Mudah dalam pengembangan sarana prasarana seperti penerangan, komunikasi/telepon, air bersih dan sebagainya.
e. Resiko bencana alam kecil.

Pola pengembangan pemukiman diselaraskan dengan pola pemanfaatan ruang untuk sektor lain sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang. Hal ini terutama agar tidak terjadi dislokasi kawasan budidaya menjadi kawasan pemukiman, terlebih dengan semakin banyaknya jumlah penduduk. Penggunaan kawasan budidaya menjadi kawasan pemukiman akan berakibat pada menurunnya produktivitas lahan secara keseluruhan dan menurunnya tingkat kemandirian kawasan. Pengembangan kawasan pemukiman meliputi beberapa langkah pokok, yaitu identifikasi kesesuaian kawasan untuk pemukiman, penetapan kawasan, sosialisasi pemanfaatan ruang dan relokasi kawasan pemukiman. Identifikasi kawasan pemukiman dilakukan untuk mendata kawasan-kawasan yang memenuhi syarat dan diprioritaskan untuk pengembangan pemukiman, yang selanjutnya ditetapkan sebagai kawasan untuk pengembangan pemukiman. Sosialisasi dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap bentuk-bentuk pelanggaran penggunaan ruang. Adapun relokasi yang dimaksudkan di sini adalah penempatan kembali pemukiman yang berada pada kawasan yang dialokasikan untuk tujuan lain dan keberadaannya membahayakan fungsi utama kawasan tersebut. Hal ini terutama karena di Kabupaten Tapanuli Tengah banyak terjadi pemukiman dan kegiatan budidaya ilegal di kawasan-kawasan lindung/konservasi, seperti di kawasan Hutan Lindung, kawasan sempadan pantai dan kanan kiri sungai yang keseluruhannya merupakan kawasan lindung.

Penerapan kriteria kawasan peruntukan permukiman secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan permukiman yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. meningkatkan ketersediaan permukiman dan mendayagunakan

prasarana dan sarana permukiman;

b. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
c. tidak mengganggu fungsi lindung;
d. tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
e. meningkatkan pendapatan masyarakat;
f. meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
g. menyediakan kesempatan kerja; dan/atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3 Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan Hidup merupakan konsep kunci dalam pembangunan berkelanjutan yang mengacu pada kemampuan ekosistem untuk: 1) Daya Dukung (menyediakan sumber daya alam yang cukup untuk memenuhi kebutuhan populasi); dan 2) Daya Tampung (menyerap limbah/dampak aktivitas manusia tanpa mengalami kerusakan). Implementasinya memerlukan pendekatan terpadu melalui analisis carrying capacity di tiap wilayah, pengendalian eksploitasi SDA, serta penerapan ekonomi sirkular untuk menjamin keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian ekologi, khususnya dalam pengelolaan air, udara, lahan, dan keanekaragaman hayati.

A Daya Dukung Pangan

Daya dukung pangan merujuk pada kemampuan suatu wilayah untuk menyediakan pangan yang cukup bagi masyarakat secara berkelanjutan tanpa merusak sumber daya alam. Kemampuan ini bergantung pada ketersediaan lahan pertanian yang subur, produktivitas pertanian yang dipengaruhi oleh teknologi dan praktik bercocok tanam, serta faktor lingkungan seperti kualitas tanah dan iklim. Selain itu, aksesibilitas pangan, yang mencakup distribusi dan kemampuan ekonomi masyarakat untuk memperoleh pangan, juga menjadi faktor kunci. Untuk menjaga daya dukung pangan, diperlukan

pengelolaan sumber daya yang baik, seperti penggunaan teknologi pertanian ramah lingkungan dan diversifikasi tanaman, agar produksi pangan tetap stabil di tengah tantangan seperti perubahan iklim dan pertumbuhan populasi.

Tabel 2.3 Kebutuhan Pangan di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Kalori (Kkal/Th)
1	Andam Dewi	17.032	13.055.028.000
2	Badiri	28.757	22.042.240.500
3	Barus	18.227	13.970.995.500
4	Barus Utara	5.114	3.919.881.000
5	Kolang	22.054	16.904.391.000
6	Lumut	13.380	10.255.770.000
7	Manduamas	24.314	18.636.681.000
8	Pandan	63.671	48.803.821.500
9	Pasaribu Tobing	7.929	6.077.578.500
10	Pinang Sori	26.753	20.506.174.500
11	Sangkulirik	23.919	18.333.913.500
12	Sibabangun	19.227	14.737.495.500
13	Sirandorung	17.842	13.675.893.000
14	Sitahuis	6.232	4.776.828.000
15	Sorkam	17.432	13.361.628.000
16	Sorkam Barat	18.709	14.340.448.500
17	Sosor Gadong	15.432	11.828.628.000
18	Sukabangun	4.155	3.184.807.500
19	Tapian Nauli	21.348	16.363.242.000
20	Tukka	15.368	11.779.572.000
Total		**386.895**	**296.555.017.500**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029

Produksi Pangan di Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Produksi Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023

No.	Jenis Pangan	Produksi 2023 (Kg)
1	Beras	109.493,939
2	Jagung	41.468,000
3	Pisang	567.800
4	Ubi Kayu	27.900
5	Daging Sapi	2.958,000
6	Daging Domba	977.000
7	Daging Kambing	13.358,000

No.	Jenis Pangan	Produksi 2023 (Kg)
8	Daging Kerbau	11.638,000
9	Daging Babi	9.689,000
10	Ayam	439.106
11	Itik	19.007
12	Ikan Tangkap	41.474,000
13	Ikan Budidaya	150.522,000

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah produksi pangan di kabupaten Tapanuli Tengah. Dari hasil produksi padi yang telah dikonversi ke dalam jumlah beras terdapat sebanyak 109.493.939 Kg dan Jagung juga terdapat sebanyak 41.468.000 Kg. Pangan lainnya yang produksi terbanyak adalah dari sektor perikanan yaitu terdapat 150.522.000 kg ikan budidaya dan 41.474.000 kg ikan hasil tangkapan.

Tabel 2.5 Jumlah Pangan dalam satuan Kilo Kalori Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023

No	Jenis Pangan	Kkal/ 100g	BDD (%)	Produksi (Kg)	Produksi (Gram)	Per 100g (Unit)	Total Kkal
Pertanian dan Perkebunan							
1	Beras	357,00	100,00	109.493.939	109.493.939.200	1.094.939.392	390.893.362.944
2	Jagung	366,00	90,00	41.468.000	41.468.000.000	414.680.000	136.595.592.000
3	Pisang	109,00	62,00	567.800	567.800.000	5.678.000	383.719.240
4	Ubi Kayu	119,00	61,00	27.900	27.900.000	279.000	20.252.610
Peternakan dan Perikanan							
1	Daging Sapi	201,00	70,00	2.958.000	2.958.000.000	29.580.000	4.161.906.000
2	Daging Domba/ Kambing	317,00	70,00	977.000	977.000.000	9.770.000	2.167.963.000
3	Daging Kerbau	149,00	70,00	13.358.000	13.358.000.000	133.580.000	13.932.394.000
4	Daging Babi	453,00	70,00	9.689.000	9.689.000.000	96.890.000	30.723.819.000
5	Ayam	298,00	58,00	439.106	439.106.000	4.391.060	758.950.810
6	Itik	321,00	60,00	19.007	19.007.200	190.072	36.607.867
7	Ikan Tangkap	89,00	70,00	41.474.000	41.474.000.000	414.740.000	25.838.302.000
8	Ikan Budidaya	89,00	70,00	150.522.000	150.522.000.000	1.505.220.000	93.775.206.000

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029

Untuk melakukan pemetaan pangan dalam sistem Grid maka produksi pangan dikonversi kedalam satuan kilo kalori sehingga data produksi pangan terdistribusikan kedalam grid dalam bentuk angka kilo kalori. Untuk mengonversi produksi pangan yang satuannya kilogram menjadi kilo kalori mengacu pada standar kandungan kilo kalori masing-masing pangan yang

dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam buku Tabel Komposisi Pangan Indonesia tahun 2017. Dari tabel perhitungan menggunakan standar kkal dengan jumlah produksi pangan diatas maka didapatkan bahwa energi pangan (kkal) di kabupaten Tapanuli Tengah terdapat sebesar 705.723.889.472 kkal. Pangan terbesar yang menghasilkan energi pangan adalah beras dengan jumlah energi pangan sebesar 390.893.362.944 kkal disusul oleh jagung dengan energi pangan yang disediakan sebesar 136.595.592.000 kkal. Pangan lainnya yang berkontribusi besar dalam menyediakan energi pangan adalah Ikan yang menghasilkan energi pangan sebesar 93.775.206.000 kkal dari ikan budidaya dan 25.838.302.000 dari ikan tangkap.

Tabel 2.6 Ketersediaan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023

No	Kecamatan	Ketersediaan (Kkal/Th)
1	Andam Dewi	34.509.888.380
2	Badiri	47.861.611.381
3	Barus	7.458.458.910
4	Barus Utara	4.832.040.745
5	Kolang	70.768.994.908
6	Lumut	20.049.640.728
7	Manduamas	107.728.851.646
8	Pandan	16.598.505.735
9	Pasaribu Tobing	17.080.155.244
10	Pinang Sori	52.240.569.416
11	Sarudik	10.923.013.656
12	Sibabangun	35.194.162.855
13	Sirandorung	36.749.658.249
14	Sitahuis	13.232.141.055
15	Sorkam	49.215.810.498
16	Sorkam Barat	22.691.338.809
17	Sosor Gadong	64.401.389.093
18	Sukabangun	15.143.857.782
19	Tapian Nauli	50.314.901.461
20	Tukka	28.728.898.450
Total		**705.723.889.001**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil analisis status daya dukung pangan di kabupaten

Tapanuli Tengah maka diketahui bahwa secara keseluruhan ketersediaan pangan di kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2023 adalah 705.723.889.001 kkal. Sedangkan total kebutuhan pangan di kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2023 adalah sebesar 296.555.017.500 kkal. Dari jumlah tersebut maka diketahui bahwa jumlah ketersediaan lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah kebutuhan dan terdapat selisih surplus pangan sebesar 409.168.871.500,5 kkal. Dengan demikian status daya dukung pangan di kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2023 berstatus Belum Terlampaui. Jika dilihat untuk masing-masing kecamatan maka dari 20 kecamatan yang ada di kabupaten Tapanuli Tengah terdapat 3 kecamatan yang berstatus terlampaui. Adapun kecamatan tersebut adalah kecamatan Barus, Pandan dan Sarudik. Status terlampaui ini diakibatkan oleh jumlah penduduk yang tinggi sedangkan secara luas wilayah administrasi kecamatan luas lahan pangan sangat sedikit, angka ketersediaan pangannya sedikit sedangkan kebutuhannya tinggi. Untuk lebih jelasnya mengenai status daya dukung pangan di kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada tabel dan peta berikut ini.

Tabel 2.7 Status Daya Dukung Pangan di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023

No	Kecamatan	Kebutuhan (Kkal/Th)	Ketersediaan (Kkal/Th)	Selisih Ketersediaan dengan Kebutuhan	Status Daya Dukung
1	Andam Dewi	13.055.028.000,00	34.509.888.380,00	21.454.860.380,00	Terlampaui
2	Badiri	22.042.240.500,00	47.861.611.381,00	25.819.370.881,00	Terlampaui
3	Barus	13.970.995.500,00	7.458.458.910,00	-6.512.536.590,00	Belum Terlampaui
4	Barus Utara	3.919.881.000,00	4.832.040.745,00	912.159.745,00	Terlampaui
5	Kolang	16.904.391.000,00	70.768.994.908,00	53.864.603.908,00	Terlampaui
6	Lumut	10.255.770.000,00	20.049.640.728,00	9.793.870.728,00	Terlampaui
7	Manduamas	18.636.681.000,00	107.728.851.646,00	89.092.170.646,00	Terlampaui
8	Pandan	48.803.821.500,00	16.598.505.735,00	-32.205.315.765,00	Belum Terlampaui
9	Pasaribu Tobing	6.077.578.500,00	17.080.155.244,00	11.002.576.744,00	Terlampaui
10	Pinang Sori	20.506.174.500,00	52.240.569.416,00	31.734.394.916,00	Terlampaui
11	Sangkulirik	18.333.913.500,00	10.923.013.656,00	-7.410.899.844,00	Belum Terlampaui
12	Sibabangun	14.737.495.500,00	35.194.162.855,00	20.456.667.355,00	Terlampaui
13	Sirandorung	13.675.893.000,00	36.749.658.249,00	23.073.765.249,00	Terlampaui

No	Kecamatan	Kebutuhan (Kkal/Th)	Ketersediaan (Kkal/Th)	Selisih Ketersediaan dengan Kebutuhan	Status Daya Dukung
14	Sitahuis	4.776.828.000,00	13.232.141.055,00	8.455.313.055,00	Terlampaui
15	Sorkam	13.361.628.000,00	49.215.810.498,00	35.854.182.498,00	Terlampaui
16	Sorkam Barat	14.340.448.500,00	22.691.338.809,00	8.350.890.309,00	Terlampaui
17	Sosor Gadong	11.828.628.000,00	64.401.389.093,00	52.572.761.093,00	Terlampaui
18	Sukabangun	3.184.807.500,00	15.143.857.782,00	11.959.050.282,00	Terlampaui
19	Tapian Nauli	16.363.242.000,00	50.314.901.461,00	33.951.659.461,00	Terlampaui
20	Tukka	11.779.572.000,00	28.728.898.450,00	16.949.326.450,00	Terlampaui
	Total	**296.555.017.500,00**	**705.723.889.001,00**	**409.168.871.501,00**	**Terlampaui**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029

B Daya Dukung Air

Daya dukung air adalah kapasitas suatu wilayah untuk menyediakan air bersih yang cukup untuk kebutuhan manusia, pertanian, dan industri tanpa menguras sumber daya air secara berlebihan. Faktor utama yang memengaruhi daya dukung air meliputi ketersediaan sumber air seperti sungai, danau, dan air tanah, serta kualitas air yang bebas dari polusi. Pengelolaan air yang berkelanjutan, seperti konservasi air, pengendalian polusi, dan pembangunan infrastruktur seperti waduk, sangat penting untuk menjaga daya dukung air. Permasalahan seperti kekeringan, urbanisasi, dan perubahan iklim dapat mengurangi ketersediaan air sehingga diperlukan strategi, seperti daur ulang air dan penggunaan teknologi irigasi yang efisien untuk memastikan keberlanjutan sumber daya air bagi generasi mendatang.

Tabel 2.8 Kebutuhan Air Domestik Per Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air Domestik (m^3/Th)
1	Andam Dewi	17.032	1.471.564,8
2	Badiri	28.757	2.484.604,8
3	Barus	18.227	1.574.812,8
4	Barus Utara	5.114	441.849,6
5	Kolang	22.054	1.905.465,6
6	Lumut	13.380	1.156.032,0
7	Manduamas	24.314	2.100.729,6
8	Pandan	63.671	5.501.174,4
9	Pasaribu Tobing	7.929	685.065,6

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air Domestik (m^3/Th)
10	Pinang Sori	26.753	2.311.459,2
11	Sangkulirik	23.919	2.066.601,6
12	Sibabangun	19.227	1.661.212,8
13	Sirandorung	17.842	1.541.548,8
14	Sitahuis	6.232	538.444,8
15	Sorkam	17.432	1.506.124,8
16	Sorkam Barat	18.709	1.616.457,6
17	Sosor Gadong	15.432	1.333.324,8
18	Sukabangun	4.155	358.992,0
19	Tapian Nauli	21.348	1.844.467,2
20	Tukka	15.368	1.327.795,2
Total		**386.895**	**33.427.728,0**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029

Kebutuhan air penutup lahan per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9 Kebutuhan Air Penutup Lahan per Kecamatan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023

No.	Kecamatan	Kebutuhan Air Penutup Lahan (m^3/Th)
1	Andam Dewi	27.776.763,1
2	Badiri	59.703.316,6
3	Barus	9.639.942,5
4	Barus Utara	3.755.756,7
5	Kolang	87.635.107,5
6	Lumut	12.125.914,3
7	Manduamas	190.933.816,9
8	Pandan	13.649.179,1
9	Pasaribu Tobing	1.613.056,1
10	Pinang Sori	83.098.657,6
11	Sarudik	1.647.983,4
12	Sibabangun	21.784.040,7
13	Sirandorung	64.016.068,3
14	Sitahuis	280.157,1
15	Sorkam	54.917.705,0
16	Sorkam Barat	28.767.142,3
17	Sosor Gadong	43.354.825,7
18	Sukabangun	30.185.245,9
19	Tapian Nauli	8.309.752,8

No.	Kecamatan	Kebutuhan Air Penutup Lahan (m^3/Th)
20	Tukka	2.927.585,4
Total		**746.122.016,3**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029

Dari hasil analisis kebutuhan air domestik dan kebutuhan air penutup lahan di atas maka penjumlahan antara keduanya akan menghasilkan total kebutuhan air di kabupaten Tapanuli Tengah. Dari penjumlahan tersebut maka diperoleh jumlah total kebutuhan air di kabupaten Tapanuli Tengah adalah sebesar 779.549.744,3 m^3/tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.10 Kebutuhan Air di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air Domestik (m^3/Th)	Kebutuhan Air Penutup Lahan (m^3/Th)	Total Kebutuhan Air (m^3/)
1	Andam Dewi	17.032	1.471.564,8	27.776.763,1	29.248.327,9
2	Badiri	28.757	2.484.604,8	59.703.316,6	62.187.921,4
3	Barus	18.227	1.574.812,8	9.639.942,5	11.214.755,3
4	Barus Utara	5.114	441.849,6	3.755.756,7	4.197.606,3
5	Kolang	22.054	1.905.465,6	87.635.107,5	89.540.573,1
6	Lumut	13.380	1.156.032,0	12.125.914,3	13.281.946,3
7	Manduamas	24.314	2.100.729,6	190.933.816,9	193.034.546,5
8	Pandan	63.671	5.501.174,4	13.649.179,1	19.150.353,5
9	Pasaribu Tobing	7.929	685.065,6	1.613.055,1	2.298.120,7
10	Pinang Sori	26.753	2.311.459,2	83.098.657,6	85.410.116,8
11	Sangkulirik	23.919	2.066.601,6	1.647.983,4	3.714.585,0
12	Sibabangun	19.227	1.661.212,8	21.784.040,7	23.445.253,5
13	Sirandorung	17.842	1.541.548,8	64.016.068,3	65.557.617,1
14	Sitahuis	6.232	538.444,8	280.157,1	818.601,9
15	Sorkam	17.432	1.506.124,8	54.917.705,0	56.423.829,8
16	Sorkam Barat	18.709	1.616.457,6	28.767.142,3	30.383.599,9
17	Sosor Gadong	15.432	1.333.324,8	43.354.825,7	44.688.150,5
18	Sukabangun	4.155	368.992,0	30.185.245,9	30.544.237,9
19	Tapian Nauli	21.348	1.844.467,2	8.309.752,8	10.154.220,0
20	Tukka	15.368	1.327.795,2	2.927.585,4	4.255.380,6
Total		**386.895**	**33.427.728,0**	**746.122.016,3**	**779.549.744,3**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029

Dari hasil analisis ketersediaan dan kebutuhan air di kabupaten Tapanuli Tengah maka diketahui bahwa total ketersediaan air di kabupaten

Tapanuli Tengah adalah sebesar 1.758.257.465,97 m^3/th. Sedangkan total kebutuhan air terdapat sebesar 779.924.633,90 m^3/th. Dari hasil analisis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan di kabupaten Tapanuli Tengah status daya dukung air angka ketersediaan lebih besar dibanding dengan kebutuhan (surplus). Selisih antara ketersediaan dengan kebutuhan adalah sebesar 978.332.832,10 m^3/th. Dari 20 kecamatan yang ada di kabupaten Tapanuli Tengah yang mengalami status terlampaui hanya kecamatan Sukabangun dan selebihnya berstatus belum terlampaui. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.11 Status Daya Dukung Air Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023

No	Kecamatan	Ketersediaan Air (m^3/Th)	Total Kebutuhan Air (m^3/Th)	Selisih Ketersediaan dengan Kebutuhan Air (m^3/Th)	Status Daya Dukung Air
1	Andam Dewi	84.819.528,50	29.262.843,10	55.556.685,40	Belum Terlampaui
2	Badiri	116.735.671,00	62.214.187,00	54.521.484,00	Belum Terlampaui
3	Barus	13.308.342,40	11.227.628,90	2.080.713,60	Belum Terlampaui
4	Barus Utara	11.161.393,90	4.202.271,90	6.959.122,10	Belum Terlampaui
5	Kolang	175.027.514,40	89.561.741,10	85.465.773,30	Belum Terlampaui
6	Lumut	52.807.540,00	13.292.832,70	39.514.707,30	Belum Terlampaui
7	Manduamas	242.012.856,30	193.058.047,30	48.954.809,90	Belum Terlampaui
8	Pandan	42.265.858,40	19.230.100,70	23.035.757,70	Belum Terlampaui
9	Pasaribu Tobing	54.107.210,70	2.305.205,50	51.802.005,20	Belum Terlampaui
10	Pinang Sori	121.322.856,60	85.430.852,80	35.892.003,80	Belum Terlampaui
11	Sarudik	32.685.374,50	3.743.269,80	28.942.104,60	Belum Terlampaui
12	Sibabangun	90.057.644,80	23.459.336,70	66.598.308,10	Belum Terlampaui
13	Sirandorung	80.083.918,70	65.575.588,30	14.508.330,40	Belum Terlampaui
14	Sitahuis	39.923.384,20	824.390,70	39.098.993,50	Belum Terlampaui
15	Sorkam	116.063.380,40	56.439.727,40	59.623.653,00	Belum Terlampaui
16	Sorkam Barat	44.901.347,30	30.402.780,70	14.498.566,60	Belum Terlampaui

No	Kecamatan	Ketersediaan Air (m^3/Th)	Total Kebutuhan Air (m^3/Th)	Selisih Ketersediaan dengan Kebutuhan Air (m^3/Th)	Status Daya Dukung Air
17	Sosor Gadong	180.427.747,20	44.702.492,90	135.725.254,30	Belum Terlampaui
18	Sukabangun	29.142.087,90	30.549.508,30	-1.407.420,50	Terlampaui
19	Tapian Nauli	142.121.694,30	10.168.735,20	131.952.959,10	Belum Terlampaui
20	Tukka	89.282.114,40	4.273.092,60	85.009.021,70	Belum Terlampaui
	Total	**1.758.257.465,90**	**779.924.633,90**	**978.332.832,10**	**Belum Terlampaui**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029

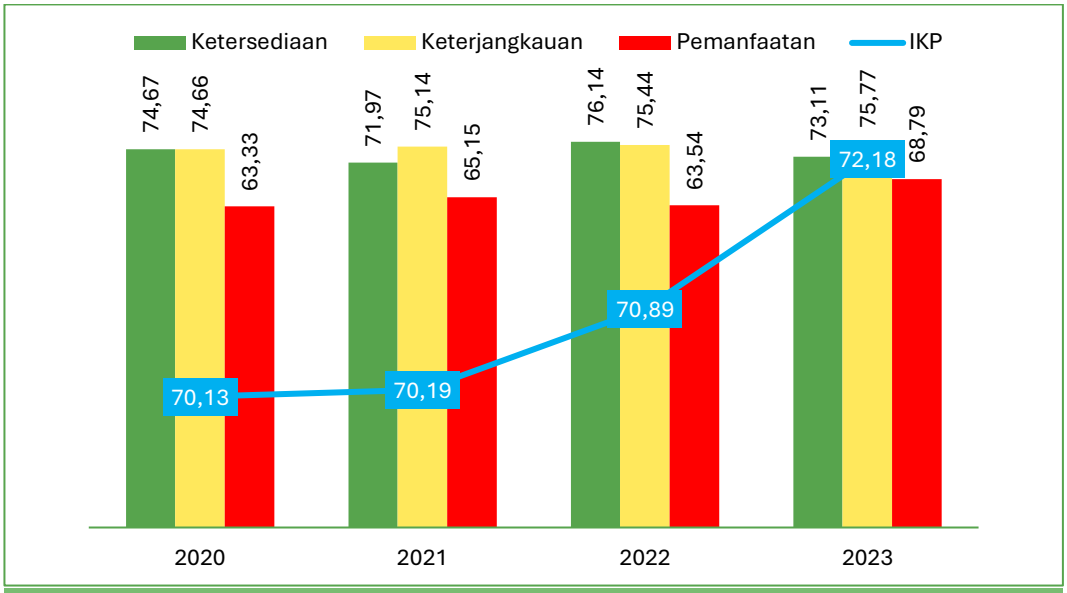
2.1.4 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan merupakan pilar utama bagi keberlanjutan pembangunan yang tangguh dan inklusif. Ketahanan energi memastikan ketersediaan pasokan listrik dan sumber daya energi yang stabil dan ramah lingkungan, mendukung kelangsungan aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat sehari-hari. Sementara itu, ketahanan air menjadi elemen vital untuk memenuhi kebutuhan domestik, pertanian, dan industri, sekaligus menjaga keberlangsungan ekosistem. Kemandirian pangan tidak hanya menjamin ketersediaan bahan pangan yang cukup dan bergizi, tetapi juga meminimalisasi ketergantungan pada impor yang rentan terhadap gejolak pasar global. Secara sinergis, ketiganya membentuk fondasi yang kuat untuk memperkuat daya tahan sosial dan ekonomi menghadapi berbagai tantangan seperti perubahan iklim, krisis energi, serta gangguan pasokan pangan.

A Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk menjaga kesehatan dan produktivitas masyarakat. Kemandirian pangan menjadi faktor penting dalam menjamin ketahanan nasional, di mana produksi bahan pangan dalam negeri mampu mencukupi kebutuhan masyarakat tanpa sangat bergantung pada impor. Hal ini mencakup pengembangan sektor pertanian secara produktif dan berkelanjutan,

peningkatan teknologi budidaya, serta pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana. Ketahanan pangan adalah kondisi di mana semua individu memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk hidup sehat dan aktif. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada gambar berikut:

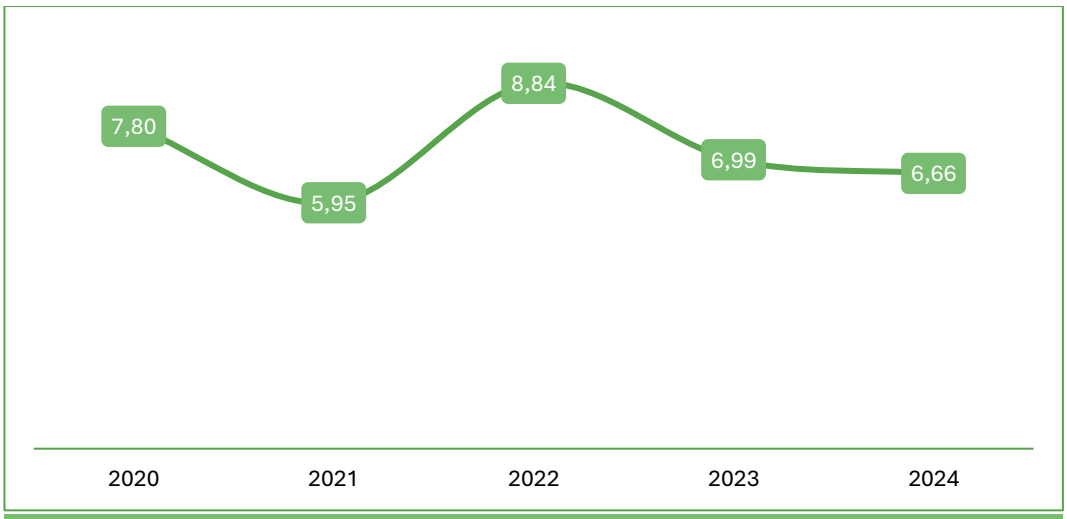


Gambar 2.3 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Nasional

Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah meningkat dari 70,13 poin pada tahun 2020 menjadi 72,18 poin pada tahun 2023. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa secara komposit ketahanan pangan daerah semakin baik. Namun, perlu diperhatikan juga dimensi penyusunnya, di mana dimensi ketersediaan pangan menurun dari 74,67 poin menjadi 73,11 poin dan dimensi keterjangkauan menurun dari 74,66 poin menjadi 75,77 poin. Sementara itu, pada dimensi pemanfaatan meningkat dari 63,33 poin menjadi 68,79 poin. Hal ini menandakan bahwa pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat bermutu baik dan mampu memenuhi kebutuhan gizi dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Namun, penurunan pada dimensi ketersediaan dan keterjangkauan harus menjadi perhatian bagi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah perlu menjamin ketersediaan pangan melalui peningkatan produktivitas produk pangan lokal

dan meningkatkan kualitas infrastruktur dan transportasi dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan.



Gambar 2.4 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)

Sumber: BPS

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan merupakan indikator yang mengukur persentase masyarakat yang tidak mengonsumsi pangan yang cukup pada suatu daerah. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan relatif menurun dari 7,80 persen pada tahun 2020 menjadi 6,66 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat sebanyak 26.301 orang pada tahun 2024 yang kebutuhan pangan hariannya tidak tercukupi. Pemerintah perlu memetakan masyarakat yang tidak mampu mengonsumsi pangan yang cukup dan meningkatkan distribusi pangan kepada masyarakat yang membutuhkan.

B Konsumsi Listrik

Konsumsi listrik per kapita menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kemajuan dan kualitas hidup masyarakat serta tingkat perkembangan ekonomi suatu wilayah. Tingginya konsumsi listrik biasanya mencerminkan aktivitas ekonomi yang produktif dan ketersediaan infrastruktur energi yang memadai, yang pada gilirannya mendukung sektor industri, pendidikan, maupun pelayanan publik. Namun, pola konsumsi listrik juga harus diimbangi dengan efisiensi dan penggunaan sumber energi terbarukan agar tidak menimbulkan dampak lingkungan yang merugikan.

Pemerintah dan pelaku industri perlu mendorong peningkatan akses listrik yang merata ke seluruh lapisan masyarakat, khususnya di daerah-daerah terpencil. Pengembangan energi bersih dan teknologi hemat energi akan membantu menekan biaya sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

C Kapasitas Air Baku

Kapasitas air baku menunjuk pada ketersediaan sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan domestik, pertanian, dan industri. Memastikan kapasitas air baku yang cukup sangat penting untuk menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat sekaligus menjaga aktivitas ekonomi yang bergantung pada air. Pengelolaan sumber daya air yang efektif harus memperhatikan kualitas dan kuantitas air, serta pelestarian lingkungan untuk menghindari masalah kekeringan dan degradasi ekosistem. Pemanfaatan kapasitas air baku secara berkelanjutan juga menuntut adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menjaga sumber daya air dari pencemaran dan eksploitasi berlebihan. Infrastruktur yang memadai seperti waduk, irigasi, dan sistem distribusi air bersih harus terus dikembangkan agar pasokan air dapat menjangkau seluruh wilayah. Dengan kapasitas air baku yang terjaga, sektor pertanian dan industri dapat berjalan lancar sekaligus memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga akan air.

D Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman

Akses air minum aman bagi rumah tangga merupakan indikator penting dalam meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Air minum yang aman bebas dari kontaminan biologis dan kimiawi dapat mencegah berbagai penyakit menular dan menurunkan beban kesehatan masyarakat. Penyediaan air minum yang aman juga mencerminkan keberhasilan suatu daerah dalam membangun infrastruktur sanitasi dan pelayanan dasar yang inklusif.

Upaya memperluas akses air minum aman harus melibatkan peningkatan teknologi pengolahan air, pemeliharaan jaringan distribusi, serta

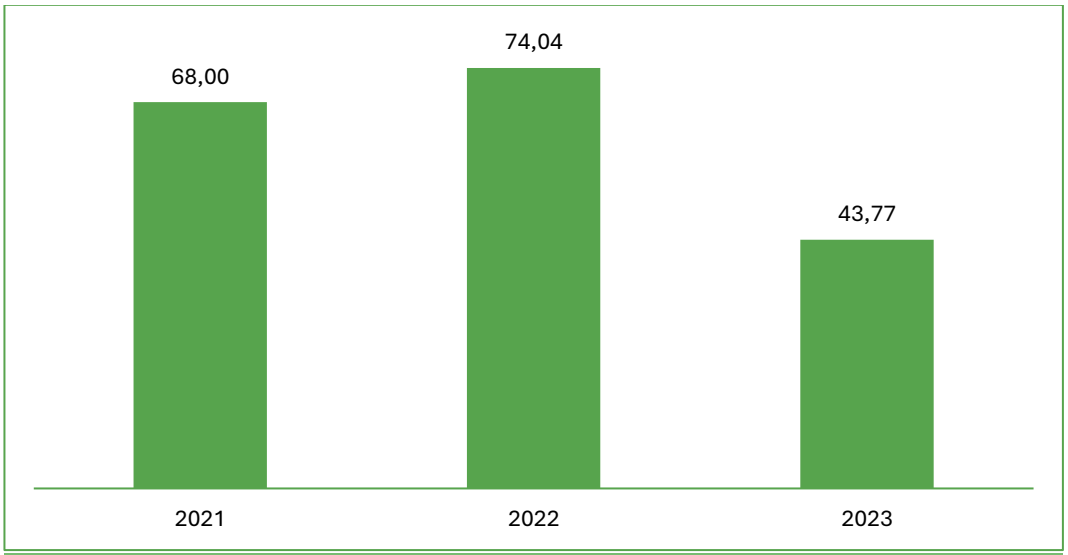
edukasi masyarakat mengenai pentingnya kebersihan dan pemanfaatan air. Fokus pada penyediaan air minum yang mudah dijangkau dan terjangkau akan membantu mengurangi kesenjangan sosial serta meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan keluarga. Akses air minum aman menjadi fondasi penting bagi pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

2.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Lingkungan Hidup Berkualitas mengacu pada kondisi lingkungan yang mampu mendukung kehidupan secara berkelanjutan melalui keseimbangan ekosistem, kualitas udara dan air yang baik, serta pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab.

A Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah berdasarkan berbagai parameter lingkungan, seperti kualitas udara, air, dan tutupan lahan. IKLH menggabungkan data dari berbagai aspek lingkungan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang seberapa baik atau buruk kondisi lingkungan suatu daerah. Indeks Kualitas lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Tengah

Sumber: Statistik KLHK

Indeks Kualitas lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Tengah mengalami peningkatan dari 68,00 poin pada tahun 2021 menjadi 74,04 poin pada tahun 2022, namun menurun drastis pada taun 2023 menjadi 43,77 poin. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup Kabupaten Tapanuli Tengah semakin menurun secara keseluruhan. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah perlu meyusun dan mengimplementasikan kebijakan dan regulasi lingkungan yang ketat, seperti pengendalian polusi, pengelolaan limbah, dan perlindungan kawasan hijau.

B Emisi Gas Rumah Kaca

Emisi gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer dari berbagai aktivitas manusia di bumi menimbulkan efek rumah kaca di atmosfer. Gas-gas rumah kaca itu adalah karbon dioksida (CO_2), belerang dioksida (SO_2), nitrogen monoksida (NO), nitrogen dioksida (NO_2), gas metana (CH_4), dan klorofluorokarbon (CFC).

Tabel 2.12 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Ton CO_2 Eq)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Isu Gas Rumah Kaca menjadi permasalahan yang diperhatikan dalam Tingkat global dan menjadi isu nasional juga. Maka dari itu, Kabupaten Tapanuli Tengah juga berupaya untuk menekan angka emisi gas rumah kaca di wilayahnya.

C Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman mengacu pada persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi dasar yang memenuhi standar kesehatan dan keamanan lingkungan. Akses sanitasi aman merupakan indikator penting dalam menilai kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat suatu wilayah.

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

D Pengelolaan Sampah

Sistem Pengelolaan Sampah merupakan suatu rangkaian terintegrasi yang mencakup seluruh tahap pengelolaan sampah dari sumber hingga pemrosesan akhir, dengan tujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Tabel 2.13 Indikator Kinerja Pengelolaan Sampah

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Timbulan Sampah Terolah mengacu pada persentase total sampah yang dihasilkan masyarakat yang berhasil diolah secara benar di fasilitas pengolahan sampah seperti TPA (Tempat Pemrosesan Akhir), TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu), atau fasilitas daur ulang. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah mengukur persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan pengumpulan sampah secara teratur dan menyeluruh dari dinas terkait.

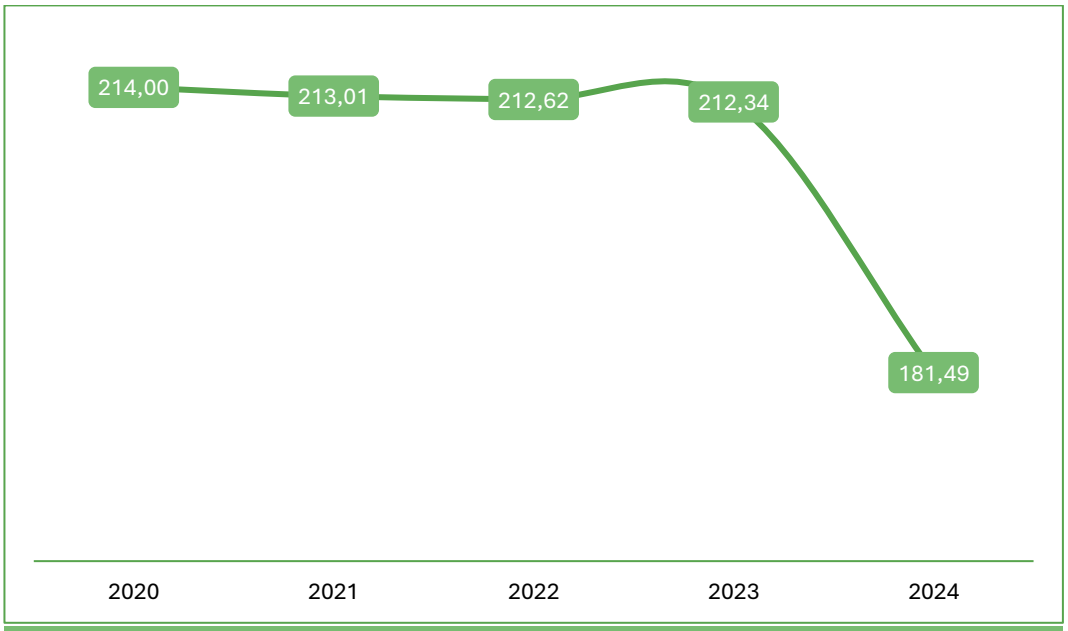
2.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Wilayah rawan bencana adalah daerah yang memiliki potensi tinggi terhadap kejadian bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, dan badai. Kondisi geografis, iklim, serta aktivitas manusia yang tidak terkontrol seringkali menjadi faktor penyebab kerawanan tersebut. Daerah-daerah ini sering mengalami kerugian material dan korban jiwa yang signifikan akibat bencana yang terjadi. Untuk memahami dan mengelola risiko di wilayah-wilayah ini, digunakanlah Indeks Risiko Bencana (IRB).

Indeks Risiko Bencana bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana di setiap kabupaten/kota di Indonesia. Perhitungan tingkat

risiko setiap kabupaten/kota dilakukan dengan memperhatikan faktor hazard, vulnerability, dan capacity. Selanjutnya, disajikan tingkat risiko bencana di kabupaten/kota sesuai dengan bahaya yang dimiliki dan gabungan dari bahaya tersebut. Dengan demikian, Indeks Risiko Bencana ini merupakan penilaian seluruh kabupaten/kota di Indonesia berdasarkan risiko bencana yang ada, termasuk risiko bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Terlihat dari data indeks risiko bencana bahwa Kabupaten Tapanuli Tengah berada pada status risiko bencana Tinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir dimana pada tahun 2020-2023 memiliki indeks risiko bencana di atas 200 poin dan pada tahun 2024 menurun menjadi 181,49 dengan status risiko bencana yang sama.



Gambar 2.6 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tapanuli Tengah

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Penentuan kawasan rawan bencana alam dilakukan dengan metode scoring terhadap informasi geologi. Caranya dengan membobot parameter geologi yang berperan dalam penentuan masing-masing kawasan rawan bencana dan mengalikan dengan nilai kemampuan dari masing-masing parameter geologi sesuai situasi kondisi wilayahnya. Pola ruang untuk kawasan rawan bencana berdasarkan

tingkat kerawaannya dapat dimanfaatkan sebagai kawasan/fungsi budidaya. Sedangkan analisa tingkat kerawanan dilakukan dengan menganalisis aspek fisik geologi dengan metode skoring.

1. Kawasan Rawan Bencana Longsor

   Aspek geologi yang mengontrol terjadinya longsor adalah kemiringan lereng, litologi/batuan, bidang lemah atau struktur geologi dengan faktor pemicu adalah curah hujan. Pembobotan dari masing-masing informasi geologi seperti pada tabel dibawah ini. Berdasarkan pembobotan tersebut diperoleh tiga tingkat kerentanan, yaitu kerentanan longsor tinggi, sedang dan rendah.

Tabel 2.14 Pembobotan Informasi Geologi Untuk Kawasan Rawan Bencana Longsor Kabupaten Tapanuli Tengah

Komponen	Klas Komponen	Nilai Kemampuan	Bobot	Skor
Kemiringan Lereng	1. Kemiringan 0% – 8%	1	5	5
	2. Kemiringan 8% - 25%	2		10
	3. Kemiringan 25% - 40%	3		15
	4. Kemiringan 40%	5		5
Batuan	1. Kode: Qh, Qp	1	4	4
	2. Kode: Qvt, Trnvak, Trnvp	3		12
	3. Kode: Trnba, Tlsb	5		20
	4. Kode: Mpisl, Puk	2		8
Curah Hujan	1. 2500 - 3000 mm/thn	1	4	4
	2. 3000 - 3500 mm/thn	2		8
	3. 3500 - 4000 mm/thn	3		12
	4. > 4000 mm/thn	5		20
Struktur Geologi	1. < 100 m	5	3	15
	2. 100 - 1000 m	3		9
	3. > 1000 m	1		3

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dari kondisi alamnya disimpulkan bahwa di Kabupaten Tapanuli Tengah potensi bencana longsor sangat tinggi. Faktor pengontrol utama dalah kemiringan lereng dan curah hujan yang cukup tinggi. Berdasarkan hal tersebut, maka pola ruang untuk kawasan rawan bencana longsor sangat tinggi harus difungsikan sebagai kawasan lindung. Sedangkan kawasan dengan kerentanan tinggi, sedang dan rendah dapat difungsikan sebagai kawasan budidaya yang dalam pembangunannya harus memenuhi

prasyarat. Bahkan akan lebih baik bila kawasan dengan kerentanan tinggi juga dijadikan kawasan lindung. Sebaran luas kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi dan sedang paling dominan dibanding dengan tingkat kerawanan tinggi.

Tabel 2.15 Distribusi Sebaran Tingkat Kerawanan Bencana Longsor Per Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah (Ha)

Kecamatan	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Jumlah Total
Pinangsori	86,83	7.088,91	10.430,21	781,71	18.387,66
Badiri	732,27	4.044,02	9.945,92	1.606,05	16.328,26
Sibabangun	2.632,22	6.982,71	3.355,12	230,29	13.200,33
Lumut	1.037,75	2.127,59	4.636,96	446,58	8.248,88
Sukabangun	-	381,84	3.660,85	546,43	4.589,12
Pandan	1,79	1.870,82	3.389,06	543,46	5.805,14
Tukka	3.421,15	6.464,57	2.508,58	34,13	12.428,43
Sarudik	230,82	2.809,22	1.634,05	72,31	4.746,40
Tapian Nauli	-	3.203,22	5.964,74	8.822,04	17.990,00
Sitahuis	1.527,12	3.265,03	1.387,82	-	6.179,97
Kolang	520,43	9.360,22	12.803,52	2.991,80	25.675,97
Sorkam	205,59	6.631,76	6.667,55	1.002,81	14.507,72
Sorkam Barat	59,64	982,47	4.208,26	28,63	5.279,00
Pasaribu Tobing	1.730,56	4.403,35	189,9	-	6.323,81
Barus	-	35,57	914,24	568,94	1.518,75
Sosorgadong	8.535,44	7.575,46	4.707,63	282,23	21.100,76
Andam Dewi	2.284,03	2.194,62	3.226,52	623,48	8.328,65
Barus Utara	-	246,15	750,39	77,12	1.073,67
Manduamas	3.569,50	3.847,54	10.600,63	13.858,80	31.876,48
Sirandorung	386,75	2.014,37	5.078,39	2.141,59	9.621,11
Jumlah Total	**26.961,92**	**75.529,45**	**96.060,33**	**34.658,41**	**233.210,10**

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2. Kawasan Rawan Banjir

Kawasan Rawan Banjir, adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana banjir yang disebabkan oleh alam maupun kegiatan manusia secara tidak langsung, yaitu pada dataran di bagian hilir dan muara sungai, kawasan cekungan di sepanjang bantaran sungai. Daerah yang berpotensi tinggi mengalami bencana banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah meliputi Kecamatan Pandan, Kecamatan Sarudik, Kecamatan Sorkam, Kecamatan Barus, Kecamatan Sorkam Barat, dan Kecamatan Kolang.

3. Kawasan Rawan Gelombang Pasang Surut

   Kawasan rawan gelombang pasang air laut meliputi seluruh wilayah pantai khususnya Kecamatan Badiri, Kecamatan Pandan, Kecamatan Sarudik, Kecamatan Sorkam, Kecamatan Sosorgadong, Kecamatan Barus dan Kecamatan Andam Dewi.

4. Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi

   Kawasan lindung geologi di Kabupaten Tengah terdiri dari kawasan rawan bencana alam geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah. Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi terdiri atas:

   a. Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi

      Parameter geologi yang digunakan dalam penentuan kawasan rawan bencana gempa bumi adalah sifat fisik batuan, kemiringan lereng, struktur geologi serta kondisi kegempaan. Data kegempaan yang digunakan dalam menganalisis data kejadian gempa selama sepuluh tahun (2000-2009). Dari hasil *scoring* akan diperoleh peta kawasan rawan bencana gempa bumi dan akan menggambarkan sebaran dari masing-masing tingkat kerawanan bencana gempa bumi yang dibagi atas tiga tingkat kerawanan, yaitu kawasan rawan bencana gempa tinggi, sedang, dan rendah.

Tabel 2.16 Pembobotan Informasi Geologi Untuk Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Tapanuli Tengah

Komponen	Klas Komponen	Nilai Kemampuan	Bobot	Skor
Batuan	1. Kode: Qh, Qp	5	4	20
	2. Kode: Qvit, Tmba, Tmvak, Tmvp, Tlsb	4		16
	3. Kode: Mpisl, Puk	1		4
Struktur	1. < 100 m	5	3	15
	2. 100 - 1000 m	3		9
	3. > 1000 m	1		3
Kegempaan	1. Intensitas tinggi	5	5	25
	2. Intensitas sedang	3		15
	3. Intensitas rendah	2		10
	4. Intensitas sangat rendah	1		5
Kemiringan	1. 0% – 8%	1	3	3

Komponen	Klas Komponen	Nilai Kemampuan	Bobot	Skor
Lereng	2. 8% – 25%	2		6
	3. 25% – 40%	3		9
	4. > 40%	4		12

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Data kegempaan yang dianalisis hanya data kejadian gempa (di darat dan di laut pantai barat) kurun waktu sepuluh tahun dengan kekuatan gempa yang secara umum tergolong rendah. Artinya bila kekuatan gempa yang bersumber dari patahan di laut dan di darat meningkat, maka tingkat kerentanan di masing-masing juga akan meningkat. Berdasarkan hal tersebut, maka pola ruang untuk kawasan rawan bencana gempa tinggi difungsikan sebagai kawasan lindung, hal ini lebih bersifat antisipasi. Sedangkan untuk tingkat kerawanan sedang, rendah dan sangat rendah difungsikan sebagai kawasan budi daya. Penyebaran masing-masing tingkat kerentanan per kecamatan seperti yang terlihat pada tabel dibawah. Pada tabel terlihat tingkat kerentanan rendah sebarannya lebih luas dibandingkan tingkat kerentanan lainnya.

Tabel 2.17 Distribusi Sebaran Tingkat Kerawanan Bencana Gempa Bumi Per Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah

Kecamatan	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Total
Pinangsori	7,65	4.032,04	14.447,98	0	18.487,67
Badiri	415,16	3.111,59	12.774,59	26,92	16.328,26
Sibabangun	64,52	3.037,77	10.098,03	0	13.200,33
Lumut	87,13	1.808,22	6.353,52	0	8.248,88
Sukabangun	0	679,68	4.569,45	449,93	4.589,11
Pandan	0	934,87	4.508,23	361,95	5.805,14
Tukka	504,71	4.848,29	6.376,80	695,61	12.423,41
Sarudik	4,38	536,08	3.897,48	308,46	4.746,30
Tapian Nauli	0	818,95	7.566,84	8.414,26	8.844,05
Sitahuis	0	480,16	3.573,07	2.126,75	6.179,97
Kolang	9,38	4.332,18	18.391,11	2.943,29	25.675,97
Sorkam	0	1.111,56	13.396,12	0	14.507,72
Sorkam Barat	0	740,89	4.509,48	28,63	5.279,00
Pasaribu	152,71	3.759,99	2.399,78	11,33	6.323,81

Kecamatan	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Total
Tobing					
Barus	0	118,21	1.400,54	0	1.518,75
Sosorgadong	247,64	5.439,49	13.525,55	1.541,44	23.354,12
Andam Dewi	59,39	1.303,43	6.826,86	138,97	8.328,65
Barus Utara	0	146,75	926,93	0	1.073,67
Manduamas	102,92	3.313,90	22.566,91	5.892,74	31.876,46
Sirandorung	0	633,46	3.608,95	906,26	9.621,11

Sumber:

b. Kawasan Bencana Tsunami

Penentuan kawasan rawan bencana tsunami di dasarkan pada beda tinggi dataran pantai terhadap garis pantai, bentuk morfologi pantainya serta bentuk geometri pantainya (bentuk teluk atau pantai lurus). Berdasarkan hal tersebut tingkat kerawanan kawasan rawan bencana tsunami dibagi atas tiga tingkat, yaitu kerawanan tinggi, sedang dan rendah.

1) Kawasan Rawan Bencana Tsunami Tinggi, berada persis di sepanjang pantai yang memiliki ketinggian atau elevasi < 12.5 m dari garis pantai dengan morfologi dataran atau dengan kemiringan antara 0 % - 8 %. Potensi bahaya pada kawasan ini terutama akibat run up yang dapat menyapu apapun yang ada di permukaan pantai, serta bahaya dari energi limpasan air run up bila terjadi tsunami.
2) Kawasan Rawan Bencana Tsunami Sedang, Sebaran dari kawasan ini persis di sisi belakang dari kawasan rawan bencana tsunami tinggi. Kawasannya memiliki ketinggian atau elevasi > 12,5 m dari garis pantai dan dengan bentuk morfologi yang dominan dataran dengan kemiringan dominan 0 % - 8 % dan sebagian kecil memiliki kemiringan 8 % - 15 %. Bila terjadi tsunami, energi run up mulai berkurang namun tetap memiliki potensi bencana tinggi akibat perluasan limpasan air.
3) Kawasan Rawan Bencana Tsunami Rendah, Kawasan ini memiliki

tingkat kerawanan yang rendah bahkan sampai sangat rendah, karena morfologinya dominan miring dengan kemiringan > 15 %. Kondisi demikian dapat memperlemah energi *rup up* saat terjadi tsunami sehingga potensi bencana yang ditimbulkan jauh lebih rendah.

Tabel 2.18 Distribusi Sebaran Tingkat Kerawanan Bencana Tsunami Per-Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah

Kecamatan	Rendah (Ha)	Sedang (Ha)	Tinggi (Ha)	Jumlah Total (Ha)
Pinangsori	12.682,12	4.554,93	1.150,61	18.387,66
Badiri	4.681,35	9.493,86	2.153,04	16.328,26
Sibabangun	13.200,33	-	-	13.200,33
Lumut	8.248,88	-	-	8.248,88
Sukabangun	4.589,12	-	-	4.589,12
Pandan	2.538,94	2.211,69	1.054,51	5.805,14
Tukka	11.687,14	741,29	-	12.428,43
Sarudik	3.199,83	1.191,02	355,55	4.746,40
Tapian Nauli	3.943,29	2.372,65	11.674,06	17.990,00
Sitahuis	6.069,00	110,98	-	6.179,97
Kolang	16.631,49	6.434,51	2.609,97	25.675,97
Sorkam	11.348,06	2.299,93	859,74	14.507,72
Sorkam Barat	1.262,98	2.676,48	1.339,54	5.279,00
Pasaribu Tobing	6.237,60	86,21	-	6.323,81
Barus	58,56	704,03	756,16	1.518,75
Sosorgadong	16.835,04	2.279,52	1.986,20	21.100,76
Andam Dewi	5.697,06	1.387,77	1.243,83	8.328,65
Barus Utara	878,86	194,81	-	1.073,67
Manduamas	16.433,22	9.123,99	6.319,27	31.876,48
Sirandorung	5.668,46	3.066,15	886,5	9.621,11
Jumlah Total (Ha)	**151.891,32**	**48.929,95**	**32.388,84**	**233.210,11**

Sumber:

Berdasarkan hal tersebut maka pola ruang untuk kawasan rawan bencana tsunami tinggi harus difungsikan sebagai kawasan lindung. Sedangkan pola ruang kawasan rawan bencana tsunami sedang dan rendah dapat difungsikan sebagai kawasan budidaya yang dalam pengembangan atau pembangunannya harus memenuhi prasyarat. Dari uraian ketiga kawasan rawan bencana yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah, dapat disimpulkan bahwa pola ruang untuk semua kawasan rawan bencana yang tingkat kerentanannya tergolong tinggi

- sangat tinggi difungsikan sebagai kawasan lindung. Sedangkan yang memiliki tingkat kerawanan sedang, rendah dan sangat rendah dapat difungsikan sebagai kawasan budidaya.

Tabel 2.19 Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Tapanuli Tengah

Kawasan Rawan Bencana	Tingkat Kerawanan	Pola Ruang
Longsor	Tinggi	Kawasan fungsi lindung
	Sedang	Kawasan fungsi budi daya
	Rendah	
	Sangat rendah	
Gempa Bumi	Sangat Tinggi	Kawasan fungsi lindung
	Tinggi	Kawasan fungsi budi daya
	Sedang	
	Rendah	
Tsunami	Tinggi	Kawasan fungsi lindung
	Sedang	Kawasan fungsi budi daya
	Rendah	

Sumber: -

Adanya potensi bahaya geologi yang berpotensi terhadap terjadinya bencana, maka sangat perlu ditetapkan strategi perencanaan di masa yang akan datang. Perencanaan kegiatan yang harus dilakukan adalah kegiatan Pemetaan dan Mitigasi Bencana Alam Geologi Detail di masing-masing kecamatan.

c. Kawasan Rawan Gerakan Tanah

Kawasan Rawan Gerakan Tanah yang mempunyai tingkat kerentanan tinggi adalah kawasan di sepanjang Jalan Sibolga – Tarutung Kecamatan Sitahuis.

2.1.7 Aspek Demografi

Demografi merupakan gambaran kondisi kependudukan di Kabupaten Tapanuli Tengah, meliputi jumlah, kepadatan, jenis kelamin, kelompok usia, dan gambaran kependudukan lainnya.

A Penduduk menurut Kecamatan

Data dari BPS menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2024 sebanyak 394.910 jiwa. Jumlah penduduk

meningkat sebanyak 29.733 jiwa dari 365.177 jiwa pada tahun 2020 lalu. Data jumlah penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.20 Penduduk menurut Kecamatan

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Pinangsori	25.552	25.728	25.993	26.753	27.198
Badiri	27.237	27.502	27.862	28.757	29.318
Sibabangun	18.412	18.523	18.697	19.227	19.530
Lumut	12.749	12.847	12.989	13.380	13.613
Sukabangun	3.849	3.940	4.046	4.155	4.267
Pandan	59.056	60.047	61.264	63.671	65.371
Tukka	14.343	14.554	14.817	15.368	15.745
Sarudik	22.258	22.651	23.129	23.919	24.530
Tapian Nauli	20.507	20.609	20.781	21.348	21.662
Sitahuis	5.897	5.956	6.036	6.232	6.355
Kolang	20.827	21.135	21.519	22.054	22.506
Sorkam	16.511	16.671	16.890	17.432	17.772
Sorkam Barat	17.598	17.810	18.085	18.709	19.117
Pasaribu Tobing	7.517	7.588	7.685	7.929	8.081
Barus	17.480	17.577	17.733	18.227	18.505
Sosorgadong	14.598	14.746	14.946	15.432	15.740
Andam Dewi	16.191	16.328	16.523	17.032	17.344
Barus Utara	4.844	4.891	4.955	5.114	5.213
Manduamas	22.951	23.200	23.531	24.314	24.817
Sirandorung	16.800	16.997	17.253	17.842	18.226
Tapanuli Tengah	**365.177**	**369.300**	**374.734**	**386.895**	**394.910**

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah paling banyak berasal dari Kecamatan Pandan sebanyak 67.081 jiwa atau sebesar 16,55 persen dari total penduduk, kemudian Kecamatan Badiri sebanyak 29.318 jiwa atau sebesar 7,42 persen dari total penduduk, dan Kecamatan Pinangsori sebanyak 27.198 atau sebesar 6,89 persen dari total penduduk.

B Penduduk menurut Kelompok Umur

Jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

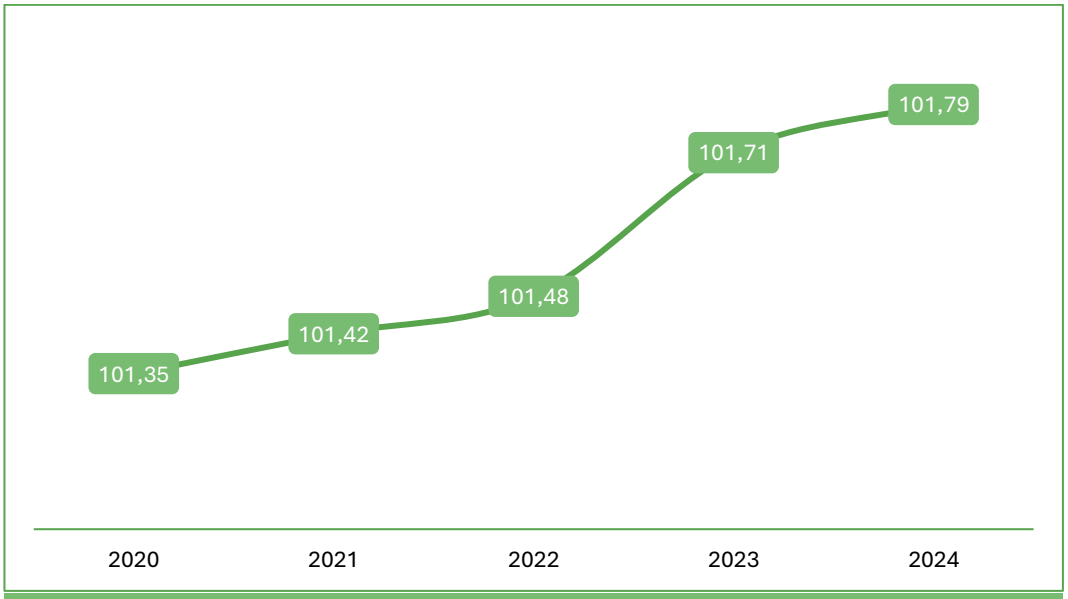
Tabel 2.21 Penduduk menurut Kelompok Umur					
Kelompok Usia	2020	2021	2022	2023	2024
0 - 4	29.647	29.647	29.757	37.760	40.945
5 - 9	34.317	34.392	34.570	31.612	30.776
10 - 14	36.761	36.877	37.133	35.440	34.896
15 - 19	37.939	37.882	38.028	37.332	37.012
20 - 24	35.701	35.450	35.292	37.397	37.799
25 - 29	32.735	32.872	33.092	34.762	35.568
30 - 34	31.131	31.429	31.816	32.546	32.955
35 - 39	26.007	26.344	26.772	29.364	30.527
40 - 44	22.651	23.024	23.448	24.289	25.020
45 - 49	19.570	20.031	20.567	21.156	21.729
50 - 54	16.433	16.878	17.384	17.936	18.503
55 - 59	13.693	14.160	14.678	14.836	15.274
60 - 64	10.865	11.316	11.815	11.994	12.389
65 - 69	7.956	8.426	8.896	9.007	9.371
70 - 74	5.045	5.528	6.067	6.022	6.346
75+	4.726	5.044	5.419	5.442	5.800
Total	**365.177**	**369.300**	**374.734**	**386.895**	**394.910**

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Mayoritas penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah pada usia produktif (15-64 tahun), di mana pada tahun 2024 terdapat sebanyak 266.776 jiwa penduduk usia produktif atau sebesar 67,55 persen dari total penduduk. Jumlah penduduk usia produktif yang banyak ini harus dimanfaatkan agar menjadi penopang bagi perkembangan wilayah.

C Sex Ratio

Sex Ratio menggambarkan proporsi antara penduduk laki-laki dengan penduduk wanita. Perkembangan sex ratio selama tahun 2020-2024 sebagai berikut:



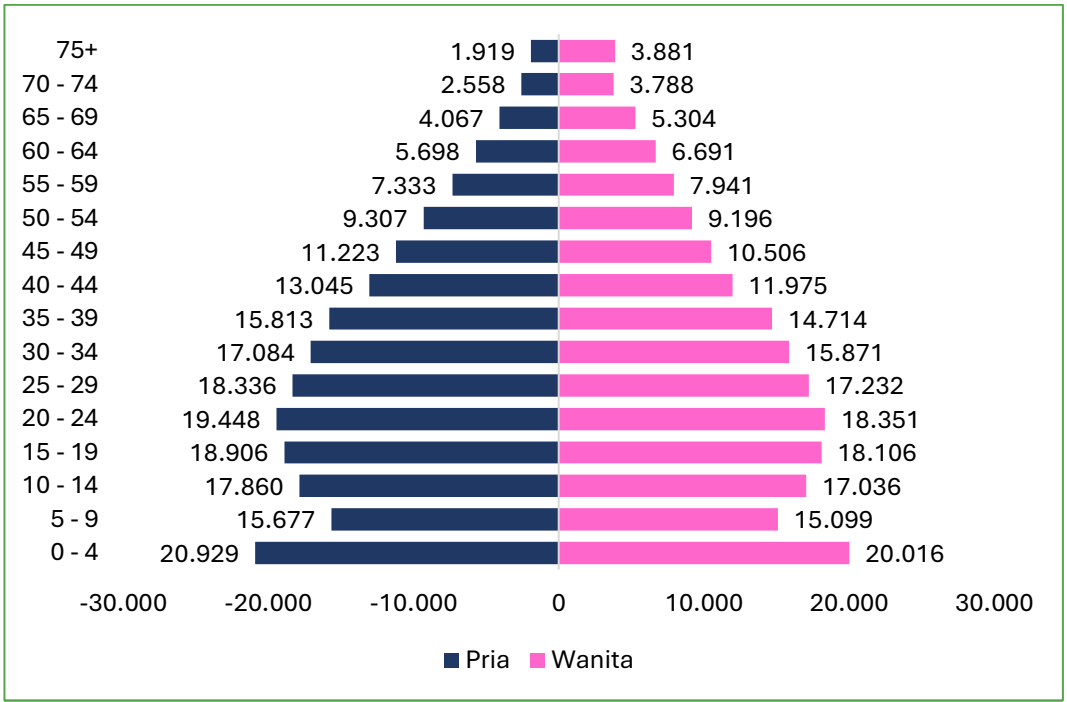
Gambar 2.7 Sex Ratio (Per 100 Orang)

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Sex Ratio di Kabupaten Tapanuli Tengah meningkat dari 101,35 per 100 orang menjadi 101,79 per 100 orang selama tahun 2020-2024. Hal ini mengindkasikan bahwa semakin banyaknya penduduk pria dibandingkan wanita di Kabupaten Tapanuli Tengah. Maka dari itu, pemerintah perlu memperhatikan hal ini agar pembangunan yang dilaksanakan berwawasan gender sehingga tidak menimbulka ketimpangan yang signifikan antara penduduk pria dan wanita.

D Piramida Penduduk

Piramida penduduk digunakan untuk mengilustrasikan komposisi penduduk antara penduduk pria dengan wanita berdasarkan kelompok umurnya. Piramida penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2024 sebagai berikut:



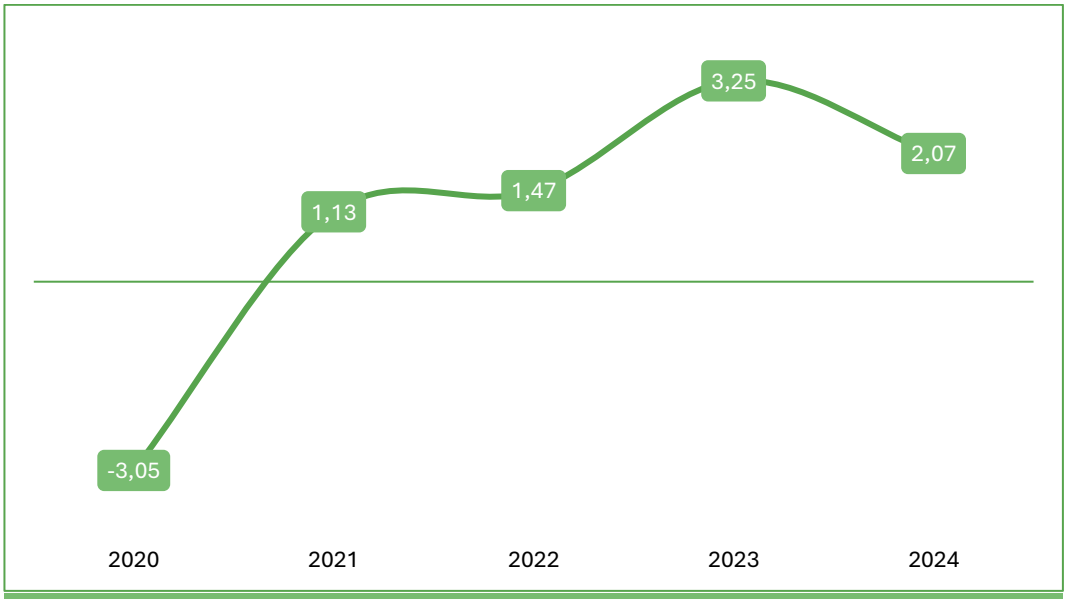
Gambar 2.8 Piramida Penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah (2024)

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah (Diolah, 2025)

Piramida Penduduk di Kabupaten Tapanuli Tengah berbentuk ekspansif, di mana hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak penduduk usia muda disandingkan dengan penduduk lansia. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya penduduk usia produktif yang brada di Kabupaten Tapanuli Tengah sehingga pemerintah perlu memperhatikan dan memanfaatkan sumber daya ini untuk mendukung kemajuan daerahnya.

E Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah selama tahun 2020-2024 sebagai berikut:



Gambar 2.9 Laju Pertumbuhan Penduduk (%)

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah (Diolah, 2025)

Laju pertumbuhan penduduk menunjukkan tren peningkatan selama tahun 2020-2024, di mana pada tahun 2024 penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah bertumbuh sebesar 2,07 persen. Peningkatan laju pertumbuhan penduduk ini perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, di mana hal ini menandakan semakin banyaknya kebutuhan Masyarakat yang harus dipenuhi.

F Kepadatan Penduduk

Data dari BPS menunjukkan bahwa kepadatan penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah semakin meningkat dari 166,37 jiwa/km^2 menjadi 176,26 jiwa/km^2 selama tahun 2020-2023. Data kepadatan penduduk menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.22 Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan (Jiwa/Km^2)

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Pinangsori	326,25	328,50	331,88	341,59	347,27
Badiri	210,34	212,39	215,17	222,08	226,41
Sibabangun	64,69	65,08	65,69	67,55	68,61
Lumut	120,30	121,22	122,56	126,25	128,45
Sukabangun	77,96	79,81	81,95	84,16	86,43
Pandan	1.721,75	1.750,64	1.786,12	1.856,30	1905,86
Tukka	95,03	96,43	98,17	101,82	104,32
Sarudik	858,72	873,88	892,32	922,80	946,37

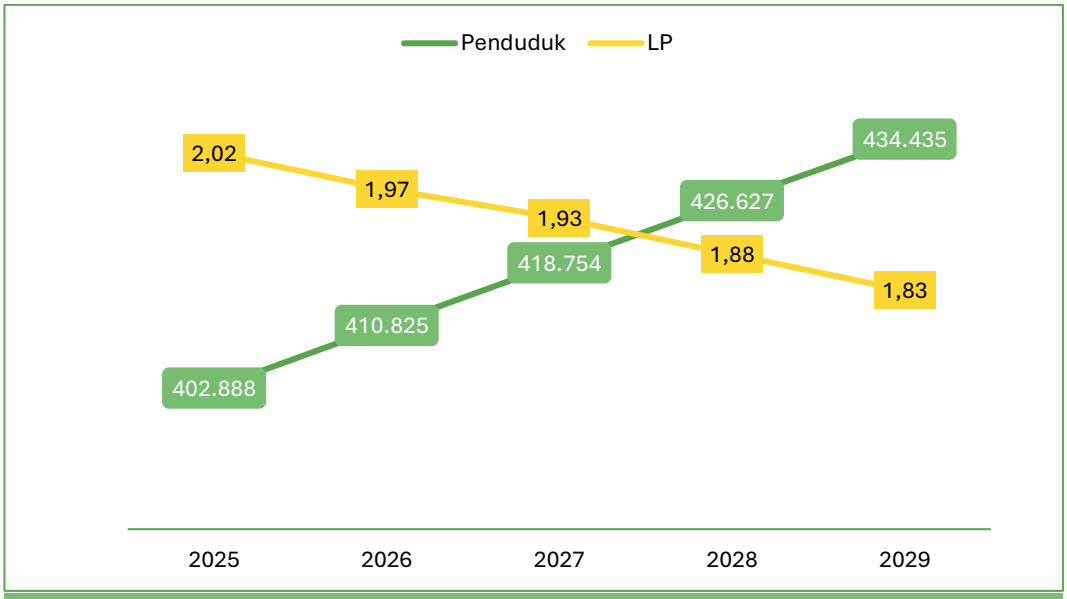
Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Tapian Nauli	247,04	248,27	250,34	257,17	260,96
Sitahuis	116,73	117,89	119,48	123,36	125,79
Kolang	47,74	48,44	49,32	50,55	51,58
Sorkam	204,83	206,81	209,53	216,25	220,47
Sorkam Barat	394,75	399,51	405,68	419,67	428,82
Pasaribu Tobing	72,73	73,41	74,35	76,71	78,18
Barus	801,47	805,91	813,07	835,72	848,46
Sosorgadong	101,99	103,03	104,42	107,82	109,97
Andam Dewi	132,26	133,38	134,97	139,13	141,68
Barus Utara	76,86	77,61	78,63	81,15	82,72
Manduamas	230,55	233,05	236,37	244,24	249,29
Sirandorung	191,52	193,76	196,68	203,40	207,77
Tapanuli Tengah	**166,37**	**168,25**	**170,72**	**176,26**	**179,92**

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah (Diolah)

Jumlah penduduk terpadat berada pada Kecamatan Pandan sebanyak 1.905,86 jiwa/km^2 pada tahun 2024, kemudian Kecamatan Sarudik sebanyak 946,37 jiwa/km^2 dan Kecamatan Barus sebanyak 848,46 jiwa/km^2. Semakin padatnya penduduk, terutama pada wilayah terpadat tersebut perlu diperhatikan pemerintah terkait kebutuhan tempat tinggal yang semakin meningkat. Pemerintah perlu merencanakan kawasan perumahan terkhusus pada wilayah yang padat penduduk.

G Proyeksi Penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah

Proyeksi penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah untuk tahun 2025-2029 dilakukan untuk melihat gambaran kondisi kependudukan di Kabupaten Tapanuli Tengah selama tahun 2025-2029. Proyeksi ini digunakan untuk menjadi salah satu landasan dalam merencanakan pembangunan daerah. Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah dapat diliaht pada gambar berikut:



Gambar 2.10 Proyeksi Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah (Diolah, 2025)

Penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah diproyeksikan meningkat dari 402.888 jiwa pada tahun 2025 menjadi 434.435 jiwa pada tahun 2024. Meskipun terjadi peningkatan, namun laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah diharapkan menurun dari 2,02 persen pada tahun 2025 menjadi 1,83 persen pada tahun 2029.

Tabel 2.23 Proyeksi Sex Ratio dan Rasio Ketergantungan

Indikator	2025	2026	2027	2028	2029
Penduduk	**402.888**	**410.825**	**418.754**	**426.627**	**434.435**
Laki-Laki	203.228	207.407	211.672	216.025	220.468
Perempuan	199.660	203.418	207.082	210.602	213.967
Sex Ratio	**101,79**	**101,96**	**102,22**	**102,57**	**103,04**
0-15	104.971	103.822	102.641	101.445	100.192
15-64	272.166	277.528	282.884	288.202	293.477
64+	21.831	21.593	21.347	21.098	20.838
Angka Ketergantungan	**46,59**	**45,19**	**43,83**	**42,52**	**41,24**

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah (Diolah, 2025)

Sex Ratio memberikan gambaran mengenai proporsi jumlah penduduk pria dibandingkan dengan wanita. Pada tahun 2029 sex ratio diperkikarakn mencapai 103,04 artinya terdapat sekitar sebanyak 103 orang penduduk pria pada setiap 100 orang wanita. Kemudian Angka Ketergantungan penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah diproyeksikan menurun dari 46,59 per 100 orang

pada tahun 2025 menjadi 41,24 per 100 orang pada tahun 2029. Hal ini menandakan bahwa semakin banyaknya penduduk usia produktif di Kabupaten Tapanuli Tengah hingga tahun 2029. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah harus memastikan agar pembangunan yang dilaksanakan memperhatikan kebutuhan masing-masing gender. Peningkatan penduduk usia produktif juga perlu diperhatikan agar dapat dimanfaatkan dengan baik. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah harus memastikan ketersediaan lapangan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan lapangan pekerjaan akibat peningkatan penduduk usia produktif di masa mendatang.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan fondasi utama dalam pencapaian pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Kesejahteraan tidak hanya diukur dari kemampuan ekonomi individu atau keluarga, melainkan juga dari akses yang adil terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan yang berkualitas. Peningkatan pendapatan per kapita dan pengurangan angka kemiskinan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi, sementara pelayanan kesehatan yang merata memastikan masyarakat memiliki kapasitas fisik dan mental untuk berkontribusi aktif dalam pertumbuhan negara. Pendidikan juga berperan penting dalam membentuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman dan meningkatkan kualitas hidup secara holistik.

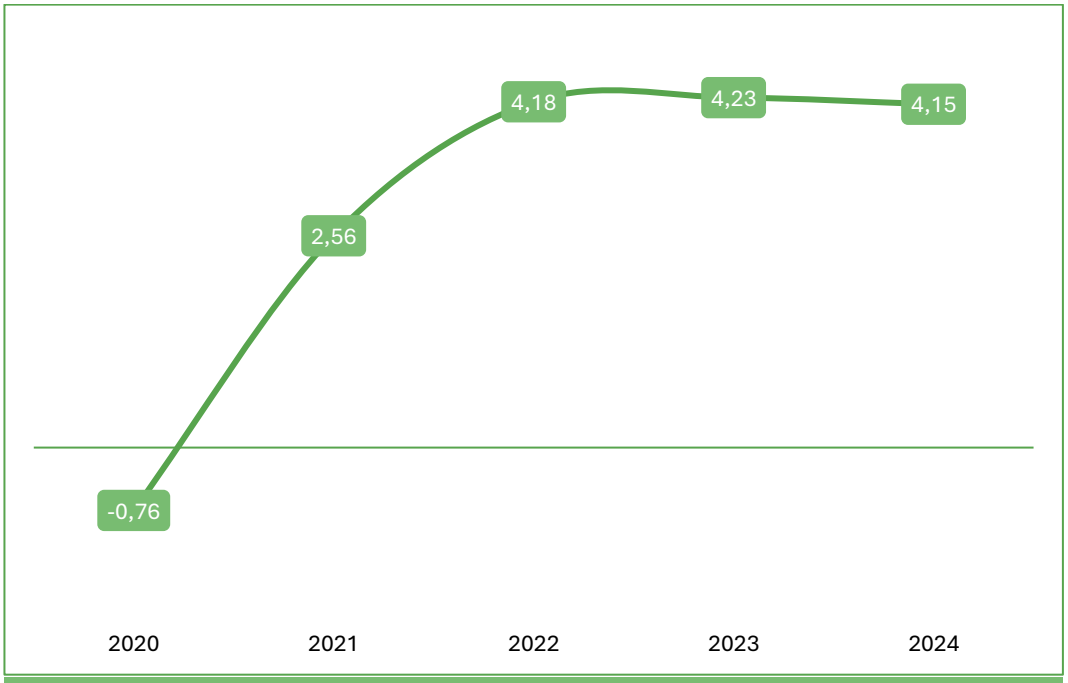
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sosial yang berkelanjutan, mencerminkan kondisi di mana masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar secara memadai dan memiliki peluang untuk berkembang secara ekonomi. Peningkatan kesejahteraan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) semata, melainkan juga dari distribusi

pendapatan yang merata sehingga mampu mengurangi kesenjangan sosial dan kemiskinan.

A Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan indikator makro yang menggambarkan peningkatan ekonomi daerah diukur dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK). Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai berikut:



Gambar 2.11 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Tengah mengalami kontraksi sebesar 0,76 persen akibat krisis global pandemi Covid-19, namun secara perlahan kembali pulih hingga tahun 2023 mencapai 4,23 persen, namun menurun pada tahun 2024 menjadi 4,15 persen. Hal ini disebabkan oleh adanya program pemulihan ekonomi sehingga Kabupaten Tapanuli Tengah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Secara spesifik, laju pertumbuhan ekonomi menurut sektor dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.24 Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Lapangan Usaha (%)

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,02	2,34	4,06	3,21	2,61
Pertambangan dan Penggalian	-2,28	5,14	5,03	5,18	0,53
Industri Pengolahan	-2,78	4,13	1,87	4,04	4,23
Pengadaan Listrik dan Gas	0,84	3,53	4,74	1,89	5,56
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-	0,54	7,74	3,71	4,40
Konstruksi	-5,12	-	3,01	5,21	7,16
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-1,53	5,73	7,91	5,59	5,11
Transportasi dan Pergudangan	-7,13	-9,82	11,77	12,64	2,80
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-6,61	1,03	-	7,85	6,90
Informasi dan Komunikasi	7,15	7,73	7,48	5,06	4,75
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,15	6,25	4,36	4,47	4,29
Real Estat	1,29	0,92	5,70	5,45	3,61
Jasa Perusahaan	-1,77	0,95	7,19	-	7,41
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,74	-0,58	-0,02	3,48	7,99
Jasa Pendidikan	0,04	4,46	-	6,75	5,25
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-0,22	-0,93	5,92	6,41	6,00
Jasa lainnya	-1,34	2,98	6,33	7,82	8,59
Produk Domestik Regional Bruto	**-0,76**	**2,56**	**4,18**	**4,23**	**4,15**

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Pada tahun 2024, laju pertumbuhan ekonomi tertinggi berasal pada Sektor Jasa Lainnya sebesar 8,59 persen, kemudian Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 7,99 persen, dan Sektor Jasa Perusahaan sebesar 7,41 persen. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga sektor tersebut memiliki prospek ke depannya untuk meningkatkan perekonomian daerah.

B Distribusi Perekonomian

Distribusi Perekonomian dilihat dari kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) dari masing-masing lapangan usaha. Dengan melihat distribusi perekonomian, maka akan diperoleh gambaran sektor mana yang paling berperan bagi perekonomian daerah. Distribusi perekonomian menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.25 Distribusi Perekonomian menurut Lapangan Usaha				
Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	46,18	46,20	46,76	46,80
Pertambangan dan Penggalian	0,26	0,26	0,26	0,26
Industri Pengolahan	11,18	11,61	11,60	11,25
Pengadaan Listrik dan Gas	0,57	0,56	0,56	0,53
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	0,12	0,12	0,12
Konstruksi	11,55	11,74	11,70	12,00
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,29	12,50	12,57	12,55
Transportasi dan Pergudangan	2,56	2,18	2,41	2,74
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,37	1,33	1,33	1,32
Informasi dan Komunikasi	0,64	0,67	0,66	0,65
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,98	1,03	0,99	0,96
Real Estat	2,06	2,03	1,98	1,94
Jasa Perusahaan	0,33	0,33	0,33	0,34
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,50	8,06	7,36	7,20
Jasa Pendidikan	0,98	0,98	0,95	0,93
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,35	0,33	0,33	0,33
Jasa lainnya	0,09	0,09	0,09	0,09
Produk Domestik Regional Bruto	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Pada tahun 2023, Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memiliki kontribusi terbesar bagi perekonomian Kabupaten Tapanuli Tengah, di mana pada tahun 2023 kontribusi sektor ini sebesar 46,80 persen, kemudian Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,55 persen, Sektor Konstruksi sebesar 12,00 persen, dan Sektor Industri Pengolahan sebesar 11,25 persen. Hal ini menunjukkan bahwa keempat sektor tersebut merupakan sektor basis yang menjadi penopang perekonomian daerah. Sektor tersebut harus terus ditingkatkan karena berperan penting bagi perekonomian daerah

C Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah dalam periode tertentu, biasanya satu tahun. PDRB terbagi atas 2 jenis, yaitu:

1. PDRB Harga Berlaku
    a. Menggambarkan nilai tambah barang dan jasa menggunakan harga pada tahun berjalan
    b. Digunakan untuk melihat struktur ekonomi suatu daerah
2. PDRB Harga Konstan
    a. Menunjukkan nilai tambah barang dan jasa berdasarkan harga pada tahun dasar tertentu
    b. Digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi secara riil

Perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.26 PDRB ADHB Kabupaten Tapanuli Tengah (Rp Miliar)

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.682,30	4.906,09	5.440,65	5.911,56	6.427,98
Pertambangan dan Penggalian	26,20	27,62	29,90	32,42	33,17
Industri Pengolahan	1.133,10	1.232,82	1.350,04	1.421,54	1.539,45
Pengadaan Listrik dan Gas	57,53	59,82	64,88	66,79	70,10
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12,56	12,77	13,89	14,59	16,13
Konstruksi	1.170,78	1.246,27	1.361,31	1.515,55	1.658,38
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.246,49	1.327,07	1.462,36	1.584,87	1.698,63
Transportasi dan Pergudangan	259,80	231,17	280,50	346,06	363,17
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	138,99	140,84	154,21	166,99	181,37
Informasi dan Komunikasi	65,35	70,94	77,26	81,67	85,54
Jasa Keuangan dan Asuransi	98,92	108,86	115,48	121,03	123,47
Real Estat	208,59	215,09	230,82	245,46	253,89
Jasa Perusahaan	33,08	34,68	38,66	43,04	44,97
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	861,53	856,01	856,28	909,66	992,21
Jasa Pendidikan	99,16	103,83	110,17	117,19	125,19
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	35,16	35,22	38,26	41,70	44,89
Jasa lainnya	9,30	9,63	10,62	11,66	12,74
Produk Domestik Regional Bruto	**10.138,83**	**10.618,75**	**11.635,30**	**12.631,78**	**13.671,28**

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

PDRB ADHB Kabupaten Tapanuli Tengah meningkat dari sebesar Rp 10.138,83 miliar pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp 13.671,28 miliar pada tahun 2024. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sektor yang memiliki PDRB ADHB terbesar di Kabupaten Tapanuli Tengah, di mana PDRB sektor ini mengalami peningkatan nilai PDRB ADHB dari sebesar Rp 4.628,30 miliar pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp 6.427,98 miliar pada tahun 2024, kemudian Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor juga mengalami peningkatan dari sebesar Rp 1.246,49 miliar pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp 1.698,63 miliar pada tahun 2024, lalu Sektor Konstruksi juga meningkat dari Rp 1.170,78 miliar pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp 1.658,38 miliar pada tahun 2024, dan Sektor Industri Pengolahan dari sebesar Rp 1.133,10 miliar pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp 1.539,45 miliar pada tahun 2024.

PDRB ADHK menurut lapangan usaha pada Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.27 PDRB ADHK Kabupaten Tapanuli Tengah (Rp Miliar)

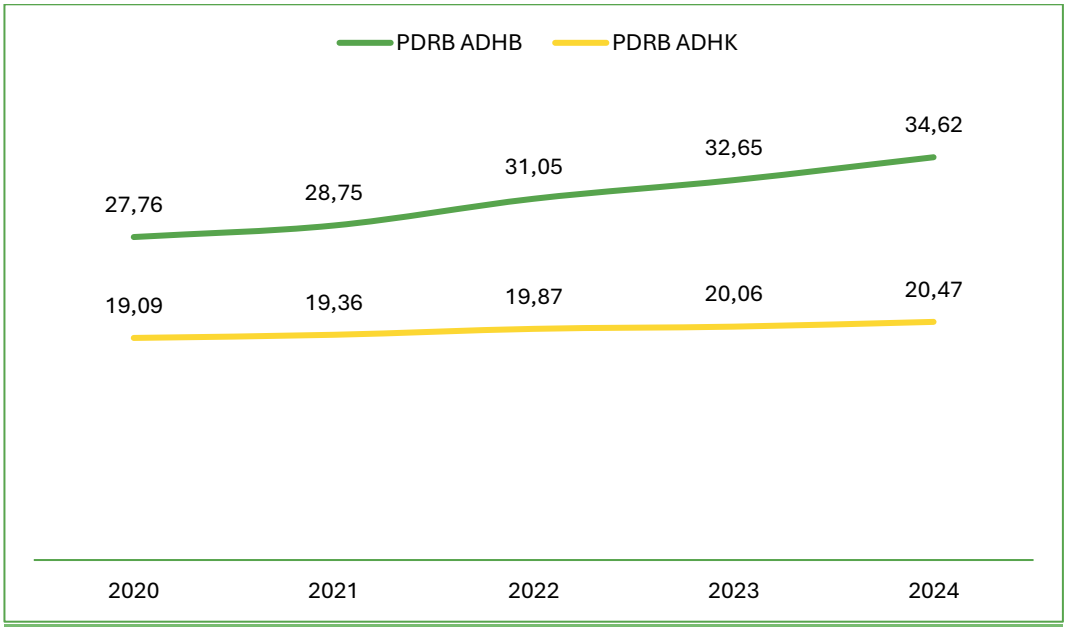
Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.444,86	3.525,39	3.668,69	3.786,33	3.885,07
Pertambangan dan Penggalian	20,30	21,34	22,42	23,58	23,70
Industri Pengolahan	743,46	774,13	788,61	820,46	855,16
Pengadaan Listrik dan Gas	38,76	40,12	42,03	42,82	45,20
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,02	8,06	8,69	9,01	9,41
Konstruksi	698,52	722,26	744,00	782,73	838,74
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	798,55	844,34	911,13	962,02	1.011,15
Transportasi dan Pergudangan	161,41	145,56	162,70	183,27	188,41
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	101,75	102,80	110,72	119,41	127,65
Informasi dan Komunikasi	56,20	60,55	65,07	68,37	71,61
Jasa Keuangan dan Asuransi	68,52	72,80	75,98	79,38	82,78
Real Estat	148,89	150,27	158,83	167,48	175,53
Jasa Perusahaan	20,21	20,40	21,87	23,62	25,37
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	554,02	550,78	550,65	569,79	615,34
Jasa Pendidikan	76,30	79,70	83,84	89,50	94,20

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	24,36	24,14	25,57	27,20	28,84
Jasa lainnya	6,45	6,64	7,06	7,62	8,27
Produk Domestik Regional Bruto	**6.970,58**	**7.149,28**	**7.447,83**	**7.762,59**	**8.084,42**

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

PDRB ADHK Kabupaten Tapanuli Tengah meningkat dari sebesar Rp 6.970,58 miliar pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp 8.084,42 miliar pada tahun 2024. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sektor dengan nilai PDRB ADHK tertinggi, yaitu sebesar Rp 3.444,86 miliar pada tahun 2020 meningkat hingga tahun 2024 mencapai Rp 3.885,07 miliar, kemudian Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp 798,55 miliar meningkat pada tahun 2024 mencapai Rp 1.011,15 miliar, kemudian Sektor Konstruksi sebesar Rp 698,52 miliar pada tahun 2020 meningkat pada tahun 2024 mencapai Rp 838,74 miliar, dan Sektor Industri Pengolahan sebesar Rp 743,46 miliar pada tahun 2020 meningkat pada tahun 2024 mencapai Rp 855,16 miliar.

PDRB Per Kapita merupakan indikator yang mengukur berapa besar jumlah PDRB pada setiap satu orang penduduk. Indikator ini dijadikan sebagai ukuran untuk melihat pendapatan rata-rata pada setiap penduduknya.



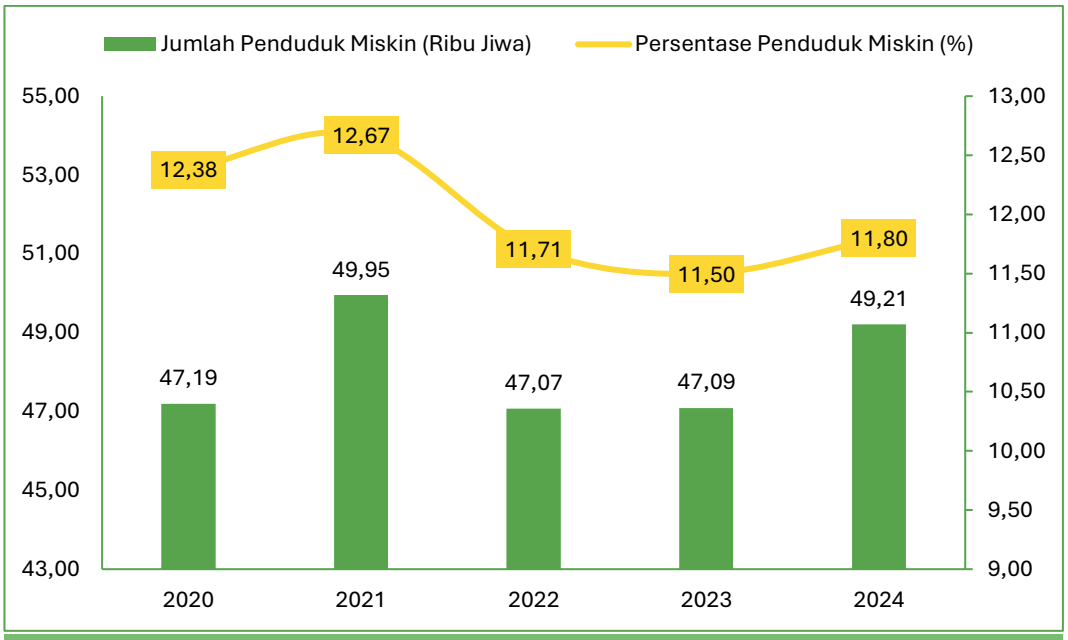
Gambar 2.12 PDRB Per Kapita Kabupaten Tapanuli Tengah (Rp juta)

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

PDRB per kapita baik ADHB dan ADHK meningkat sejak tahun 2020 hingga tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pendapatan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah mengalami peningkatan.

D Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Penduduk dikategorikan sebagai miskin apabila berada di bawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.13 Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin (Maret)

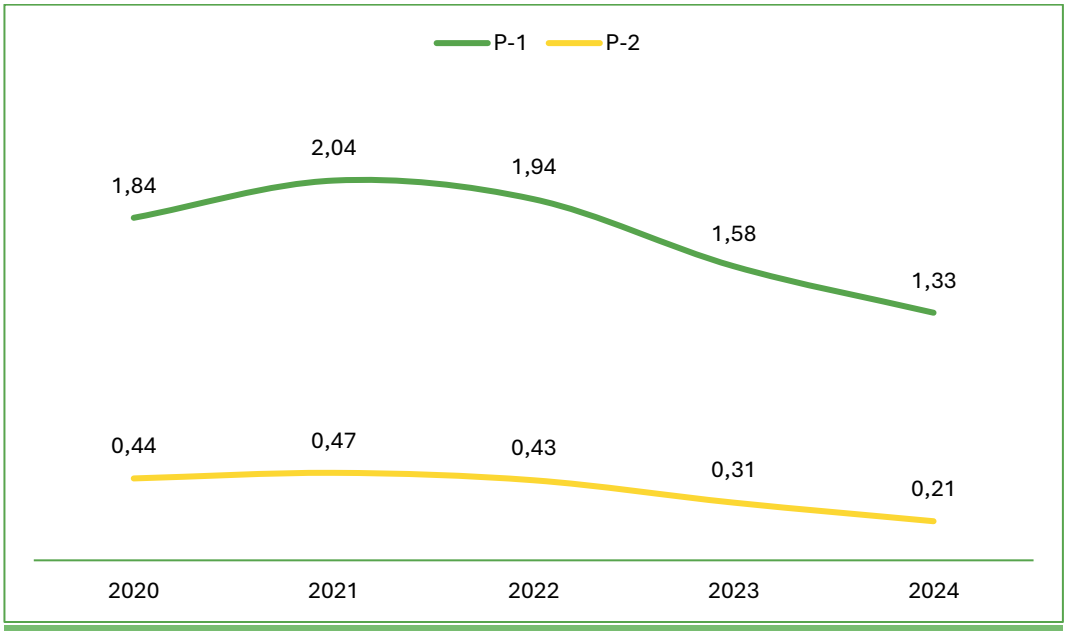
Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Persentase penduduk miskin relatif menurun dari 12,38 persen pada tahun 2020 mnenjadi 11,80 persen pada tahun 2024. Namun, capaian ini meningkat dibandingkan tahun 2023. Begitu juga dengan jumlah penduduk miskin yang cenderung meningkat dari 47,19 ribu jiwa pada tahun 2020 menjadi sebanyak 49,21 ribu jiwa pada tahun 2024. Jika dibandingkan secara persentase penduduk miskin pada tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan tahun 2024, sebaliknya jumlah penduduk miskin lebih rendah pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2024. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa adanya peningkatan jumlah penduduk yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Tengah sehingga persentasenya lebih kecil dibandingkan tahun 2020. Kemiskinan

masih menjadi fokus pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah mengingat angkanya yang masih tinggi sehingga Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah harus memetakan penduduk miskin dan kebutuhannya, serta melasanakan bantuan sosial yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan agar penduduk miskin dapat menurun.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P-1) atau *Poverty Gap Index* merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks ini menggambarkan seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P-1, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Penurunan nilai P-1 mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (P-2) atau *Poverty Severity Index* memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai P-2, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan dapat dilihat pada gambar berikut:



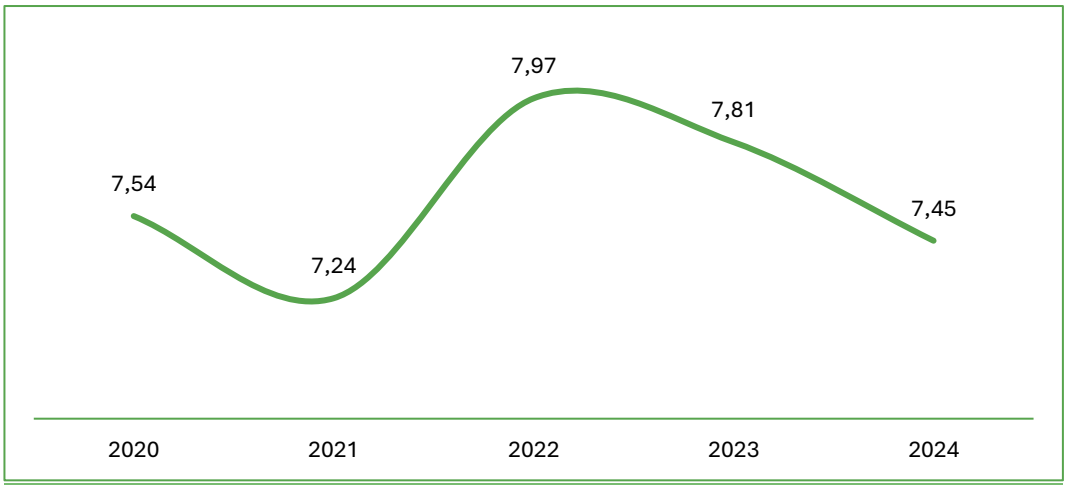
Gambar 2.14 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P-1) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P-2)

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Kedua indeks mengalami pergerakan yang relatif sama, di mana mengalami penurunan sejak tahun 2021 hingga tahun 2024. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P-1) meningkat dari 1,84 persen pada tahun 2020 menjadi 2,04 persen pada tahun 2021 dan menurun hingga tahun 2024 menjadi 1,33 persen, sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (P-2) mengalami peningkatan dari 0,44 persen pada tahun 2020 menjadi 0,47 persen pada tahun 2021 dan menurun hingga tahun 2020 menjadi 0,21 persen. Hal ini menggambarkan bahwa program-program pengentasan kemiskinan Kabupaten Tapanuli Tengah semakin baik dalam mengatasi permasalahan, namun pemerintah tetap harus terus mengurangi penduduk miskin melalui identifikasi permasalahan kemiskinan dan bantuan yang tepat.

E Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja/sedang mencari kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan indikator makro yang menggambarkan kondisi pengangguran di suatu daerah. Tingkat Pengangguran Terbuka adalah penduduk yang termasuk angkatan kerja (15-64 tahun) yang tidak/belum/sedang mencari pekerjaan. Tingginya tingkat pengangguran terbuka dapat berdampak buruk bagi perkembangan ekonomi daerah. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai berikut:



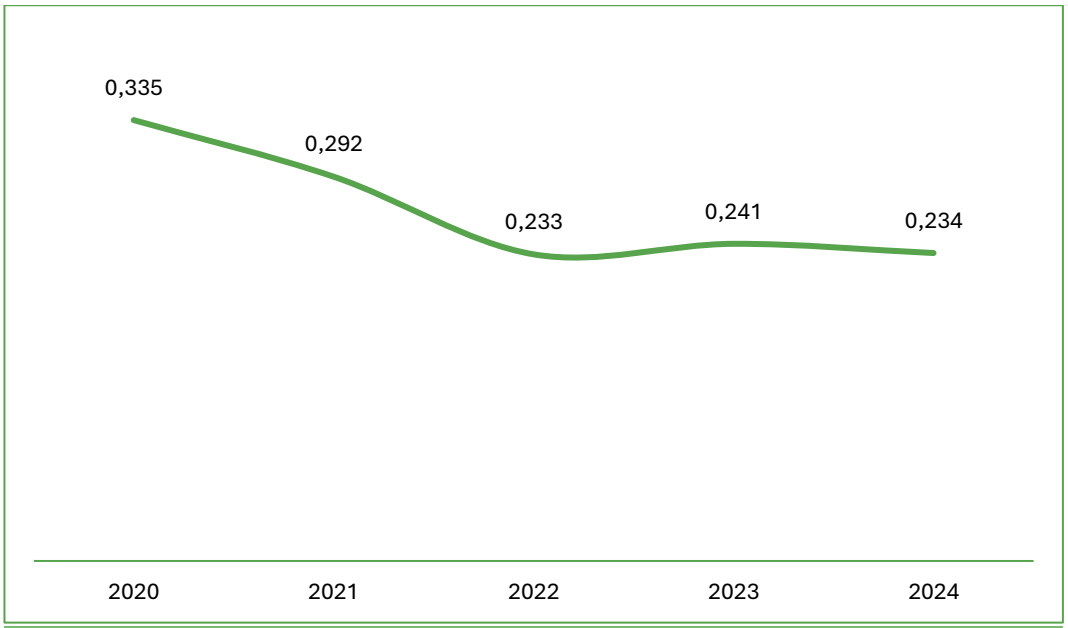
Gambar 2.15 Tingkat Pengangguran Terbuka (Agustus)

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tapanuli Tengah cenderung meningkat dari 7,54 persen pada tahun 2020 menjadi 7,97 persen pada tahun 2022, namun kembali menurun menjadi 7,45 persen pada tahun 2024. Meskipun terjadi penurunan, namun hal ini masih menunjukkan bahwa masih banyak angkatan kerja yang menganggur di Kabupaten Tapanuli Tengah. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia atau tenaga kerja yang belum mampu memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja. Maka dari itu, hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan sekaligus meningkatkan kapasitas calon tenaga kerja.

F Indeks Gini

Indeks Gini adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi, dengan nilai berkisar antara 0 hingga 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sempurna (setiap orang memiliki pendapatan/kekayaan yang sama), sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan absolut (satu orang menguasai semua pendapatan/kekayaan)



Gambar 2.16 Indeks Gini (Poin)

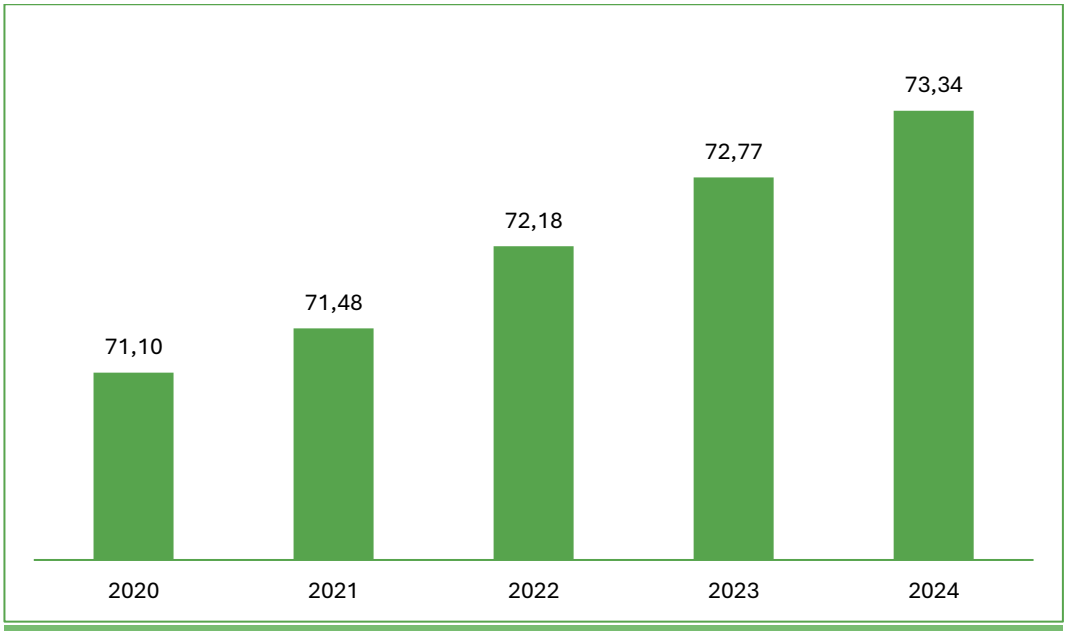
Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Indeks Gini Kabupaten Tapanuli Tengah mengalami penurunan dari

0,335 poin pada tahun 2020 menjadi 0,234 poin pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan antar penduduk semakin rendah. Namun, perlu diperhatikan apakah indeks yang semakin menurun ini menunjukkan semakin menurunnya pendapatan masyarakat sehingga mendekati masyarakat yang berpendapatan rendah atau sebaliknya.

G Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indeks yang mengukur capaian hasil pembangunan suatu daerah yang terdiri dari tiga dimensi, yaitu 1) pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah); 2) kesehatan (usia harapan hidup); dan 3) standar hidup layak (pengeluaran per kapita). Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai berikut:



Gambar 2.17 Indeks Pembangunan Manusia (Poin)

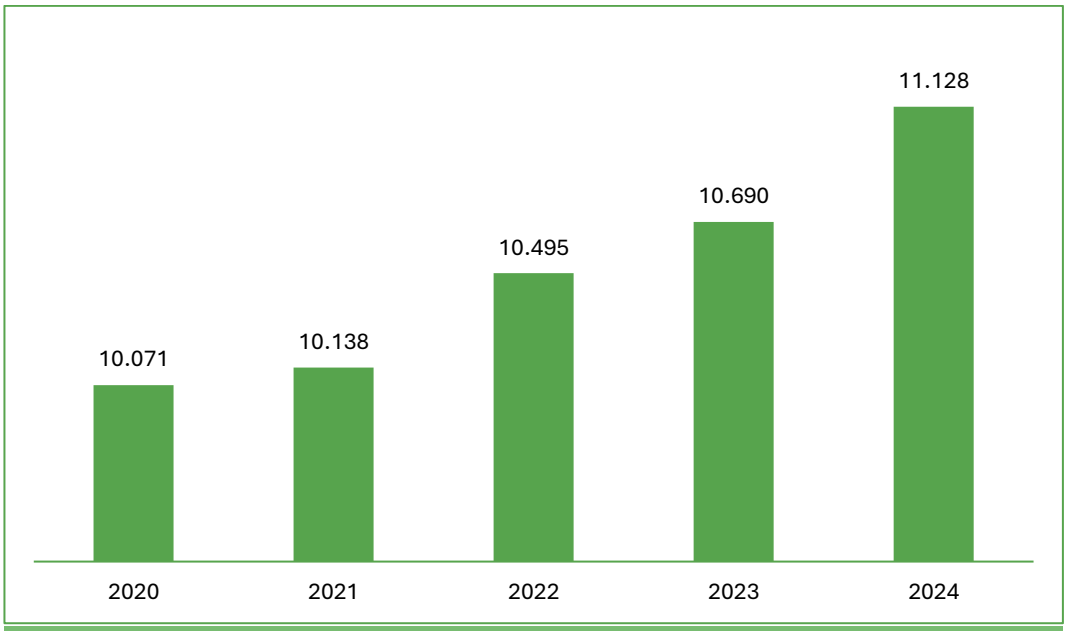
Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah terus meningkat selama 5 tahun terakhir dari 71,10 poin pada tahun 2020 mencapai 73,34 poin pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat semakin baik setiap tahunnya. Namun, pemerintah harus memperkuat program-program peningkatan akses terhadap pendidikan dan

kesehatan masyarakat.

H Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita merupakan biaya yang dikeluarkan oleh seluruh anggota rumah tangga untuk konsumsi dalam setahun. Pengeluaran per kapita menggambarkan standar hidup layak di Kabupaten Tapanuli Tengah. Semakin tinggi pengeluaran per kapita, maka mengindikasikan semakin baik standar hidup layak masyarakat. Perkembangan pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai berikut:



Gambar 2.18 Pengeluaran Per Kapita (Rp Ribu)

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Pengeluaran per kapita masyarakat mengalami peningkatan dari Rp 10,071 ribu pada tahun 2020 menjadi Rp 11,128 ribu pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa semakin meningkat. Hal ini juga mengindikasikan bahwa pembangunan ekonomi masyarakat semakin baik setiap tahunnya.

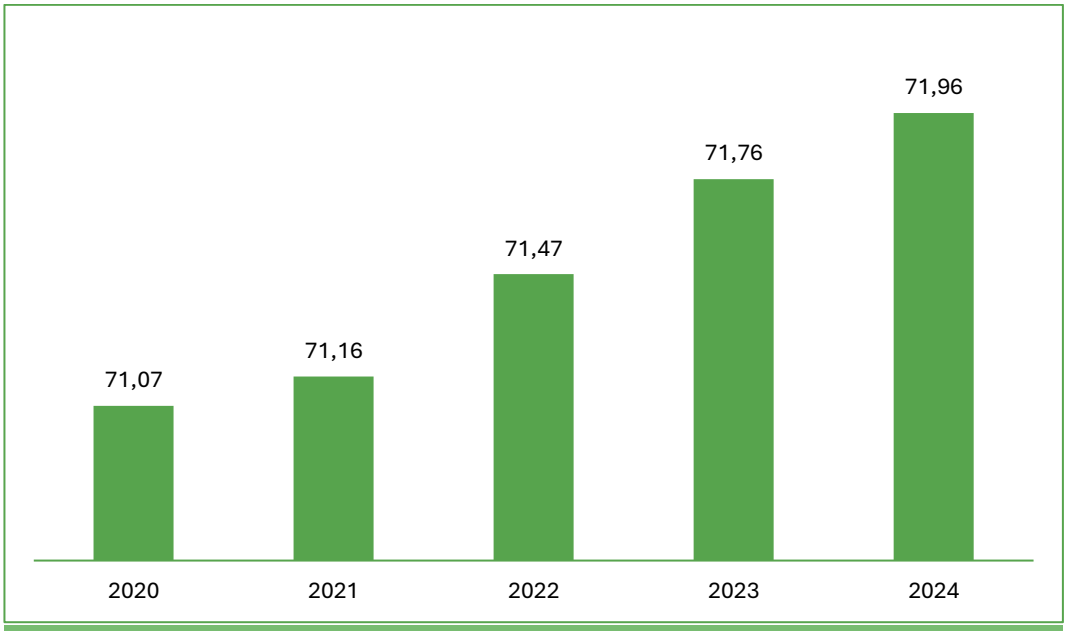
2.2.2 Kesehatan untuk Semua

Kesehatan untuk Semua merupakan komitmen pembangunan yang menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan berkualitas bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali, melalui penguatan sistem kesehatan

primer berbasis Puskesmas dan Posyandu, perluasan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta peningkatan kualitas tenaga medis dan ketersediaan obat esensial di seluruh wilayah, termasuk daerah tertinggal dan perbatasan dengan fokus pada upaya promotif-preventif untuk menciptakan masyarakat sehat yang produktif dan berdaya saing.

A Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup merupakan indikator pada dimensi kesehatan. Usia Harapan Hidup merupakan perkiraan rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak lahir. Usia Harapan Hidup menjadi indikator yang menggambarkan capaian dari pembangunan kesehatan. Semakin baik akses masyarakat terhadap pembangunan kesehatan, maka semakin meningkat usia harapan hidup masyarakat. Perkembangan usia harapan hidup Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai berikut:



Gambar 2.19 Usia Harapan Hidup (Tahun)

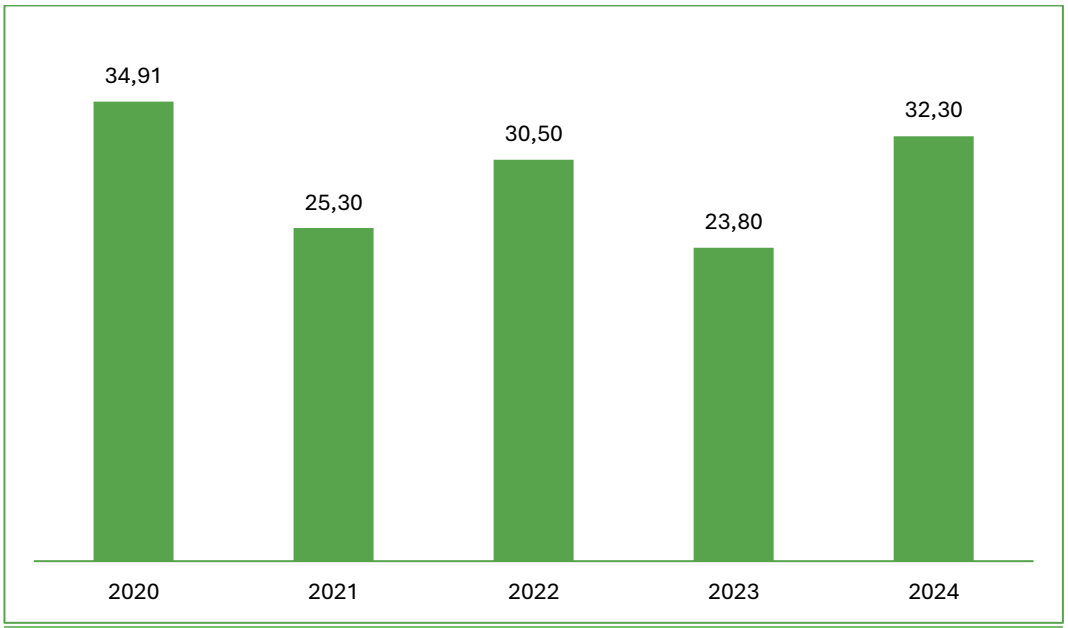
Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Usia Harapan Hidup Kabupaten Tapanuli Tengah meningkat dari 71,07 tahun pada tahun 2020 menjadi 71,96 tahun pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa masyarakat semakin merasakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Hal ini dapat tercapai akibat program-program peningkatan akses dan kualitas kesehatan yang dilakukan

oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Pemerintah harus menjaga dan berupaya untuk meningkatkan pembangunan kesehatan agar usia harapan hidup masyarakat semakin meningkat.

B Prevalensi Stunting

Stunting adalah permasalahan gizi kronis karena kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang cukup lama. Prevalensi stunting adalah jumlah keseluruhan permasalahan stunting yang terjadi pada waktu tertentu. Perkembangan prevalensi stunting di Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai berikut:



Gambar 2.20 Prevalensi Stunting (%)

Sumber: SSGI & Siperindu

Prevalensi stunting di Kabupaten Tapanuli Tengah meningkat dari 25,30 persen pada tahun 2021 menjadi 30,50 persen pada tahun 2022, namun menurun pada tahun 2023 menjadi 23,80 persen, lalu pada tahun 2024 meningkat kembali menjadi 32,30 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyaknya Balita yang mengalami stunting di Kabupaten Tapanuli Tengah sehingga pemerintah perlu memperhatikan akses dan layanan kesehatan kepada masyarakat serta distribusi pangan yang merata agar seluruh masyarakat dapat mengonsumsi gizi yang seimbang.

C Tuberkulosis

Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang menyerang paru-paru dan dapat berdampak pada organ lain. Penyakit ini merupakan penyakit menular yang perlu diperhatikan karena dadat berdampak bagi kualitas kesehatan masyarakat.

Tabel 2.28 Capaian Kinerja Penanganan Tuberkulosis

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*) (%)	28,74	28,14	38,89	52,58	38,86
Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*) (%)	84,25	79,62	86,27	90,60	68,57

Sumber: Dinas Kesehatan

Penemua kasus tuberkulosis di Kabupaten Tapanuli Tengah mash rendah, di mana pada tahun 2024 sebesar 38,86 persen. Sementara, penanganan penyakit tuberkulosis di Kabupaten Tapanuli Tengah masih di bawah 100 persen hingga selama 5 tahun terakhir. Pemerintah Kabupaten Tapnuli Tengah perlu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan dalam mengatasi penyakit tuberkulosis.

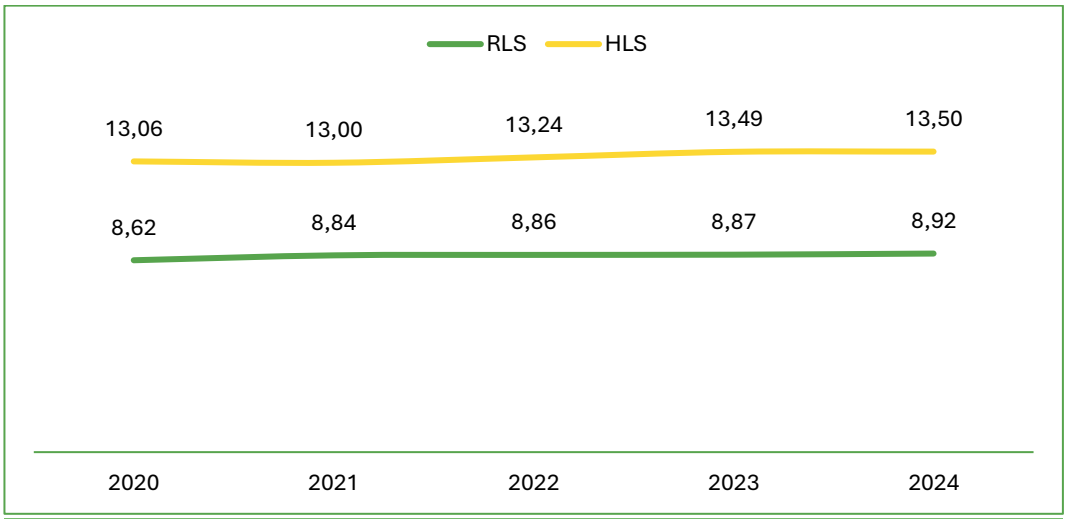
2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan Berkualitas yang Merata merupakan upaya sistematis untuk menjamin akses pendidikan inklusif dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pendidikan dasar hingga tinggi, melalui pemerataan infrastruktur pendidikan yang memadai, peningkatan kompetensi guru berbasis kurikulum modern, serta penerapan teknologi digital untuk menjangkau daerah terpencil dengan fokus pada pengembangan keterampilan untuk menciptakan generasi unggul yang mampu bersaing di tingkat global.

A Rata-Rata Lama Sekolah & Harapan Lama Sekolah

Dimensi pendidikan diukur dari 2 indikator, yaitu: 1) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) merupakan tingkat pendidikan tertinggi yang dicapai oleh penduduk secara rata-rata; dan 2) Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan

kesempatan penduduk secara rata-rata dalam mencapai suatu tingkat pendidikan di masa mendatang. Perkembangan RLS dan HLS Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai berikut:



Gambar 2.21 Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah (Tahun)
Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Tapanuli Tengah meningkat dari 8,62 tahun pada tahun 2020 menjadi 8,92 tahun pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pendidikan tertinggi penduduk mencapai kurang lebih 9 tahun atau kelas 3 SMP. Harapan Lama Sekolah meningkat dari 13,06 tahun pada tahun 2020 menjadi 13,50 tahun pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa peluang seseorang tetap menempuh pendidikan hingga tingkat Diploma-I pada tahun 2024. Data tersebut meunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat penddikan masyarakat secara umum, meskipun meiliki peluang untuk menempuh pendidika yang lebih tinggi. Maka dari itu, pemerintah harus berupaya untuk meningkatkan akses pendidikan masyarakat agar masyarakat dapat menempuh pendidikan yang lebih tinggi.

B Literasi dan Numerasi

Literasi merupakan kemampun seseorang untuk membaca, menulis, dan memahami informasi yang diberikan, sementara numerasi merpakan kemampuan untuk berpikir secara logis dengan menerapkan konsep matematika. Data literasi dan numerasi siswa di Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai berikut:

Tabel 2.29 Literasi dan Numerasi					
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Literasi SD	N/A	N/A	N/A	52,84	53,81
Literasi SMP	N/A	N/A	N/A	57,25	62,39
Numerasi SD	N/A	N/A	N/A	49,60	56,17
Numerasi SMP	N/A	N/A	N/A	59,54	63,04

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah

Secara keseluruhan, data menunjukkan literasi dan numerasi baik untuk jenjang SD maupun SMP dari tahun 2023 ke 2024. Peningkatan skor numerasi SD adalah yang paling besar, yaitu tumbuh 6,57 poin dari tahun sebelumnya dan literasi SMP tumbuh 5,14 poin menjadi 62,39 poin. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam kualitas pendidikan dasar dan menengah pada aspek literasi dan numerasi selama periode tersebut. Peningkatan ini harus terus didorong untuk menghasilkan SDM yang unggul dan berkualitas. Pemerintah perlu mengembangkan kurikulum yang adaptif agar mempercepat peningkatan literasi dan numerasi siswa.

C Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan indeks yang mengukur upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. IPLM Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.30 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah (Poin)				
UPLM	Keterangan	2022	2023	2024
UPLM 1	Pemerataan Layanan Perpustakaan	0,0011	0,1771	N/A
UPLM 2	Pemerataan Koleksi Perpustakaan	0,3817	0,0841	N/A
UPLM 3	Pemerataan Tenaga Perpustakaan	0,0013	0,0000	N/A
UPLM 4	Tingkat Kunjungan Pustaka	0,2782	0,0296	N/A
UPLM 5	Perpustakaan Ber-SNP	0,6682	0,5462	N/A
UPLM 6	Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Perpustakaan	0,3920	1,0000	N/A
UPLM 7	Jumlah Pemustaka	0,3818	1,0000	N/A
IPLM		**30,06**	**40,53**	**N/A**

Sumber: Perpusnas

Berdasarkan hasil evaluasi, IPLM Kabupaten Tapanuli Tengah meningkat dari 30,06 poin pada tahun 2022 menjadi 40,53 poin pada tahun 2023. Hal ini didorong oleh peningkatan 2 aspek penyusunnya, yaitu UPLM 6 dan UPLM 7, di mana UPLM 6 merupakan keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan yang meningkat dari 0,3920 poin pada tahun 2022 menjadi 1 poin pada tahun 2023. Hal ini menandakan bahwa banyak masyarakat yang berperan aktif dalam menyosialisasikan perpustakaan kepada orang lain. Kemudian, UPLM 7 merupakan jumlah pemustaka yang meningkat dari 0,3818 poin pada tahun 2022 menjadi 1 poin pada tahun 2024, hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang menjadi anggota perpustakaan dan memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Namun, yang menjadi masalah adalah pada UPLM 3 yang merupakan pemerataan tenaga perpustakaan, di mana capaiannya menurun dari 0,0013 poin pada tahun 2022 menjadi 0 poin pada tahun 2023, hal ini menandakan bahwa kurang meratanya jumlah tenaga perpustakaan secara umum untuk melayani pemustaka.

2.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial yang adaptif memastikan jaminan sosial yang diberikan kepada masyarakat mencakup berbagai tantangan dan perubahan, termasuk guncangan ekonomi, bencana alam, atau krisis kesehatan seperti pandemi. Sistem ini dirancang untuk memberikan respon cepat dan tepat sasaran kepada kelompok rentan dengan mekanisme yang fleksibel dan berbasis kebutuhan.

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan jaminan kesehatan nasional (%)	74,37	69,30	85,51	89,70	91,41
Cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	N/A	N/A	18,01	40,72	40,72

Sumber: Dinas Kesehatan

Cakupan jaminan keseatan nasional meningkat dari 74,37 persen pada

tahun 2020 menjadi 91,41 persen pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa semakin banyaknya masyarakat yang berpartisipasi dalam program jaminan kesehatan nasional. Seentara, cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan meningkat dari 18,01 persen pada tahun 2022 menjadi 40,72 persen pada tahun 2024. Data ini menunjukkan bahwa masih adanya masyarakat atau pun tenaga kerja yang belum memperoleh perlindungan sosial.

2.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Pembangunan menyinergikan nilai-nilai keagamaan yang membawa kemaslahatan dengan kemajuan budaya yang inklusif dan adaptif. Konsep ini menekankan praktik beragama yang tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat melalui penanaman nilai toleransi, keadilan sosial, sekaligus mendorong kemajuan budaya dengan melestarikan kearifan lokal sembari beradaptasi dengan perkembangan zaman. Implementasinya mencakup penguatan peran lembaga keagamaan dalam pemberdayaan masyarakat, pendidikan berbasis kebuadyaan yang menguatkan kebhinekaan, serta pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya yang berdaya saing global. Konflik yang berkaitan dengan agama, ras, atau budaya belum pernah terjadi hingga saat ini. Selain itu, Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki Forum Kerukuna Umat Beragama (FKUB) ya berperan sebagai organisasi yang menjaga kerukunan antar umat di Kabupaten Tapanuli Tengah.

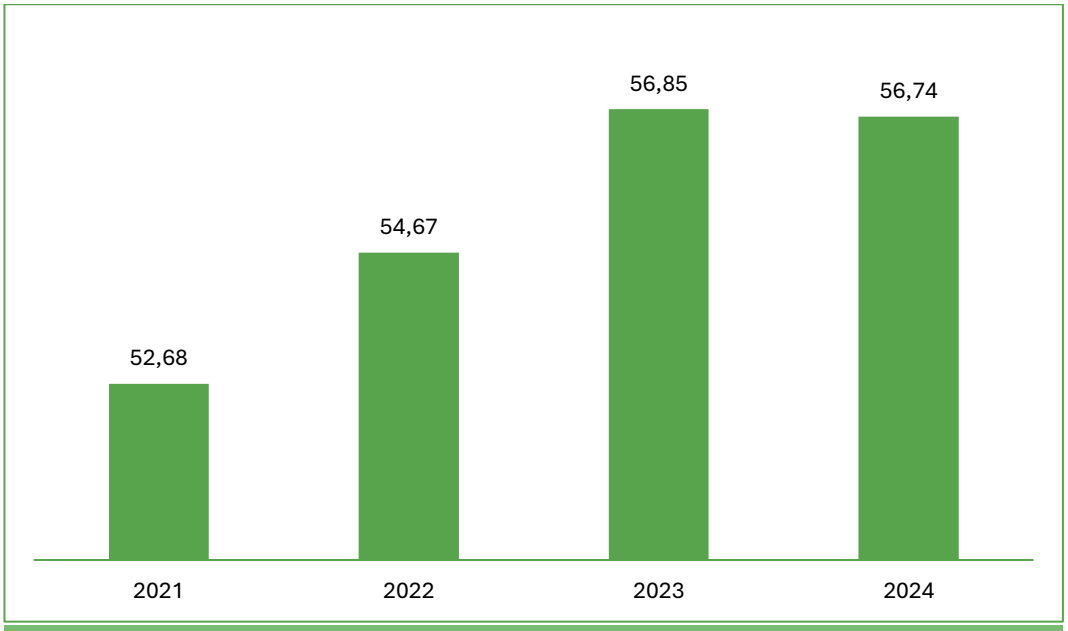
2.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif merupakan tiga pilar utama dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan berkelanjutan. Keluarga berkualitas dicirikan oleh kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, pendidikan, dan kesehatan seluruh anggotanya, serta menjadi fondasi pembentukan generasi unggul. Melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender, amanat terkait

Kesetaraan gender diwujudkan melalui penghapusan diskriminasi, peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan, dan pembagian peran yang adil dalam keluarga dan masyarakat. Sedangkan masyarakat inklusif dibangun dengan menjamin akses dan kesempatan yang sama bagi semua kelompok, termasuk penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok marginal lainnya, dalam menikmati hasil pembangunan.

A Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan indeks yang mengukur kualitas pembangunan keluarga dari 3 indeks, yaitu: 1) Indeks Ketentraman; 2) Indeks Kemandirian; dan 3) Indeks Kebahagiaan. Perkembangan Indeks Pembangunan Keluarga di Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai berikut:



Gambar 2.22 Indeks Pembangunan Keluarga (Poin)

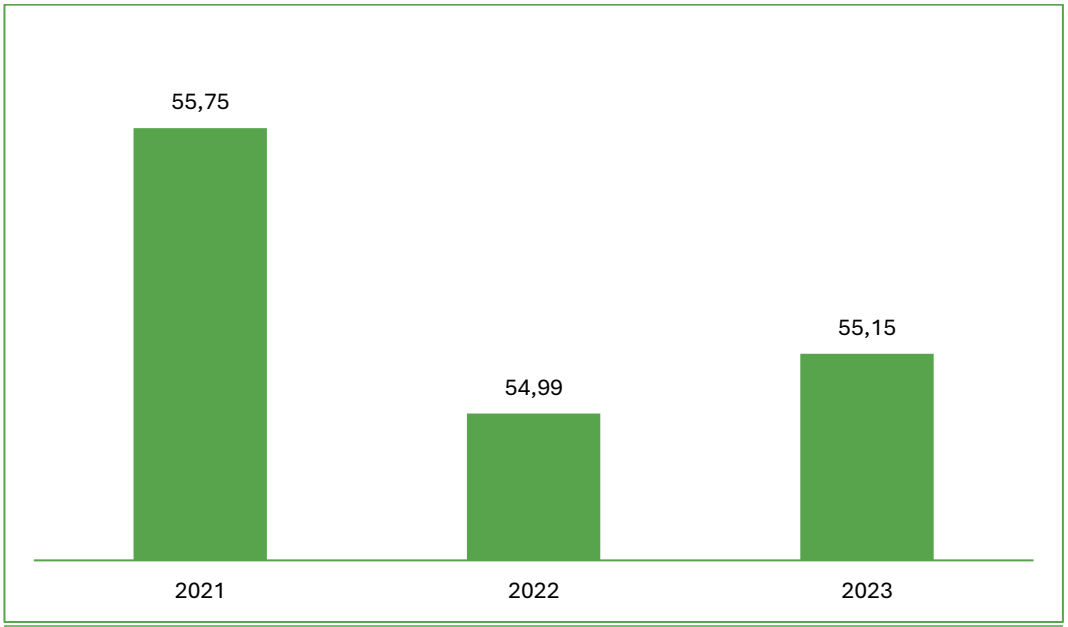
Sumber: Siperindu

Indeks Pembangunan Keluarga di Kabupaten Tapanuli Tengah meningkat dari 52,68 poin pada tahun 2021 menjadi 56,74 poin pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan keluarga di Kabupaten Tapanuli Tengah semakin baik. Hal ini dikarenakan implementasi yang baik dari program-program pembangunan keluarga dari pemerintah dan pemerintah daerah dalam mendukung keluarga agar dapat melaksanakan

fungsi keluarga secara optimal.

B Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak adalah ukuran penting yang menggambarkan sejauh mana sebuah daerah atau negara mampu menyediakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Indeks ini mencakup berbagai aspek perlindungan, mulai dari pemenuhan hak-hak dasar anak seperti pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Tingginya indeks perlindungan anak menandakan keberhasilan kebijakan dan program yang mampu memastikan anak-anak tumbuh dalam kondisi yang aman dan mendapatkan peluang yang adil untuk berkembang.



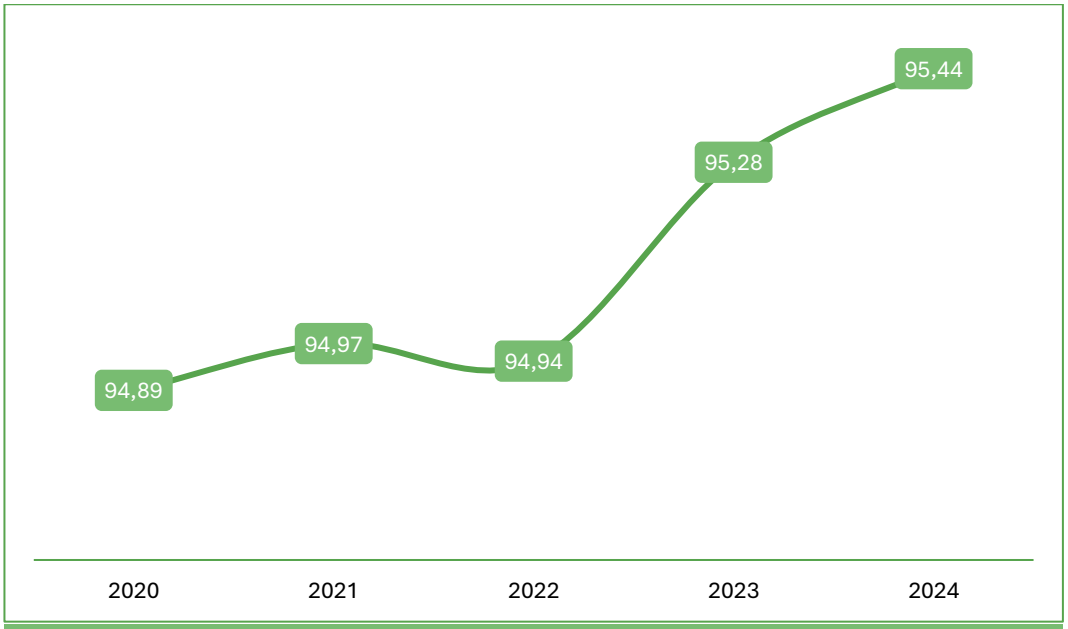
Gambar 2.23 Indeks Perlindungan Anak (Poin)

Sumber: Siperindu

Indeks Perlindungan Anak menurun adri 55,75 poin pada tahun 2021 menjadi 55,15 poin padaw tahun 2023. Hal ini menandakan bahwa penegakan hukum dan regulasi terkait perlindungan hak-hak anak semakin berkurang. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah harus lebih perhatian terhadap kondisi ini. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah perlu menyusun regulasi dan kebijakan yang kuat terkait perlindungan hak-hak anak di daerahnya.

C Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks yang menggambarkan kesetaraan akses pembangunan antara penduduk perempuan dengan penduduk laki-laki. Indeks Pembangunan Gender secara formula membandingkan antara IPM perempuan dan IPM laki-laki. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai berikut:



Gambar 2.24 Indeks Pembangunan Gender (Poin)

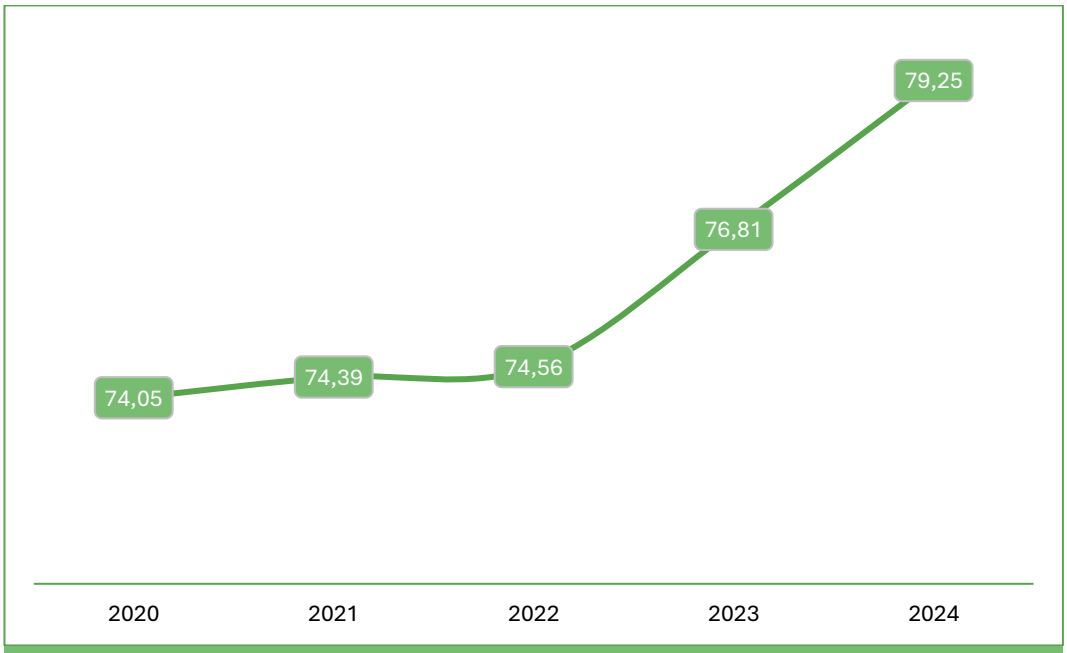
Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Indeks Pembangunan Gender meningkat dari 94,89 poin pada tahun 2020 menjadi 95,44 poin pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin meratanya akses pembangunan manusia yang dirasakan oleh penduduk perempuan terhadap penduduk laki-laki. Peningkatan ini harus berkelanjutan agar penduduk perempuan juga mendapatkan akses yang sama dengan penduduk laki-laki.

D Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menggambarkan partisipasi penduduk perempuan dalam pembangunan ekonomi daerah. Semakin tinggi indeks ini, maka menandakan semakin tingginya peran perempuan dalam perekonomian daerah. Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender dapat

dilihat pada gambar berikut



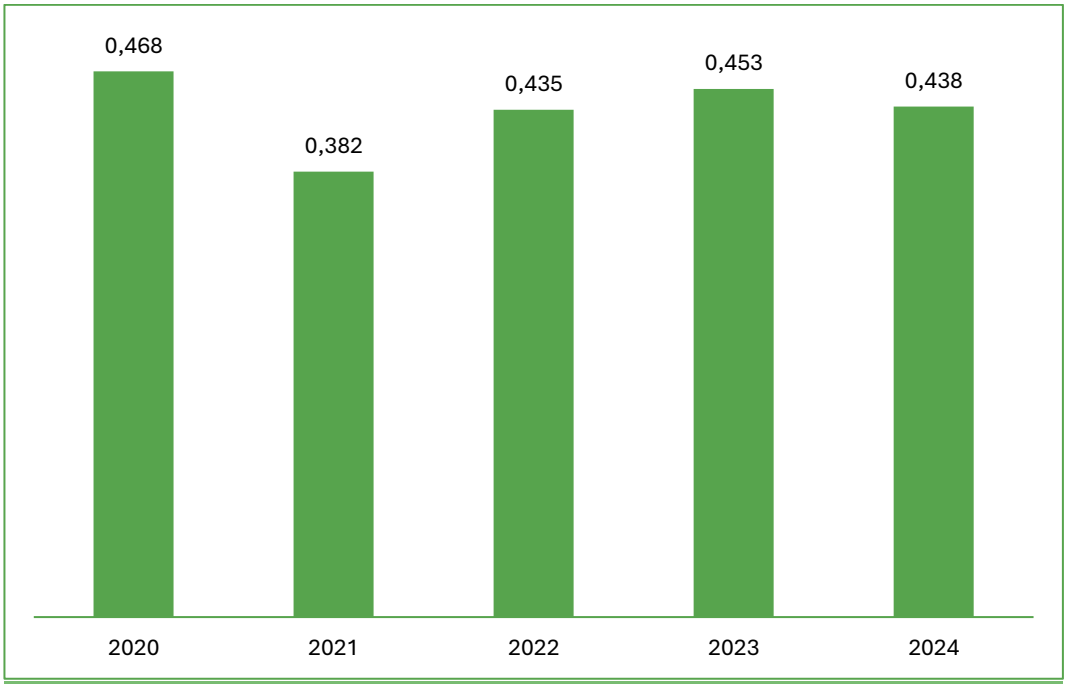
Gambar 2.25 Indeks Pemberdayaan Gender (Poin)

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Indeks Pemberdayaan Gender meningkat dari 74,05 poin pada tahun 2020 menjadi 76,81 poin pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tingginya peran perempuan pada pembangunan ekonomi Kabupaten Tapanuli Tengah. Peningkatan ini harus terus dijaga secara berkelanjutan melalui peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta perluasan lapangan kerja bagi penduduk wanita di Kabupaten Tapanuli Tengah.

E Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) ukuran yang menunjukkan tingkat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi, yaitu: 1) Kesehatan reproduksi; 2) Pemberdayaan gender; 3) Pasar tenaga kerja. IKG dapat digunakan untuk mengukur capaian pembangunan berbasis gender dan memberikan gambaran tentang capaian program-program pengarusutamaan gender. Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.26 Indeks Ketimpangan Gender (Poin)

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Pada tahun 2021, Indeks Ketimpangan Gender menurun dari 0,468 poin pada tahun sebelumnya menjadi 0,382 poin, namun kemudian meningkat hingga tahun 2024 mencapai 0,438 poin. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum ketimpangan gender di Kabupaten Tapanuli Tengah semakin meningkat. Maka dari itu, pemerintah daerah harus mengupayakan program-program pengarusutamaan gender, seperti peningkatan akses dan layanan kesehatan terhadap penduduk perempuan, pemberdayaan penduduk perempuan, dan peningkatan partisipasi tenaga kerja perempuan.

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek Daya Saing Daerah menggambarkan tingkat daya saing Kabupaten Tapanuli Tengah yang diukur dari 4 fokus, yaitu: 1) Daya Saing Ekonomi Daerah; 2) Daya Saing Sumber Daya Manusia; 3) Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah; dan 4) Daya Saing Iklim Investasi.

2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing Sumber Daya Manusia memberikan gambaran terkait kondisi sumber daya manusia yang tersedia di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Daya saing sumber daya manusia penting untuk ditingkatkan agar dapat bersaing dan mengikuti perkembangan dunia yang dinamis serta memenuhi tuntutan tenaga kerja di masa mendatang.

A Angka Ketergantungan

Angka Ketergantungan merupakan indikator yang melihat perbandingan antara penduduk usia non produktif dengan usia produktif. Indikator ini menggambarkan berapa banyak penduduk usia non produktif yang ditanggung oleh penduduk usia produktif. Semakin besar rasio ini mengindikasikan bahwa semakin banyak penduduk yang tidak produktif di suatu daerah. Perkembangan angka ketergantungan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.27 Rasio Ketergantungan (Per 100 Penduduk)

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah (Diolah, 2024)

Rasio ketergantungan menurun dari 48,01 per 100 penduduk pada tahun 2020 menjadi 48,03 per 100 penduduk pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa pada tahun 2024 sebanyak 100 orang penduduk usia produktif menanggung sekitar 48 orang penduduk usia non produktif. Meskipun demikian, capaian ini sebenarnya masih relatif sama dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk mengantisipasi dampak jangka panjang,

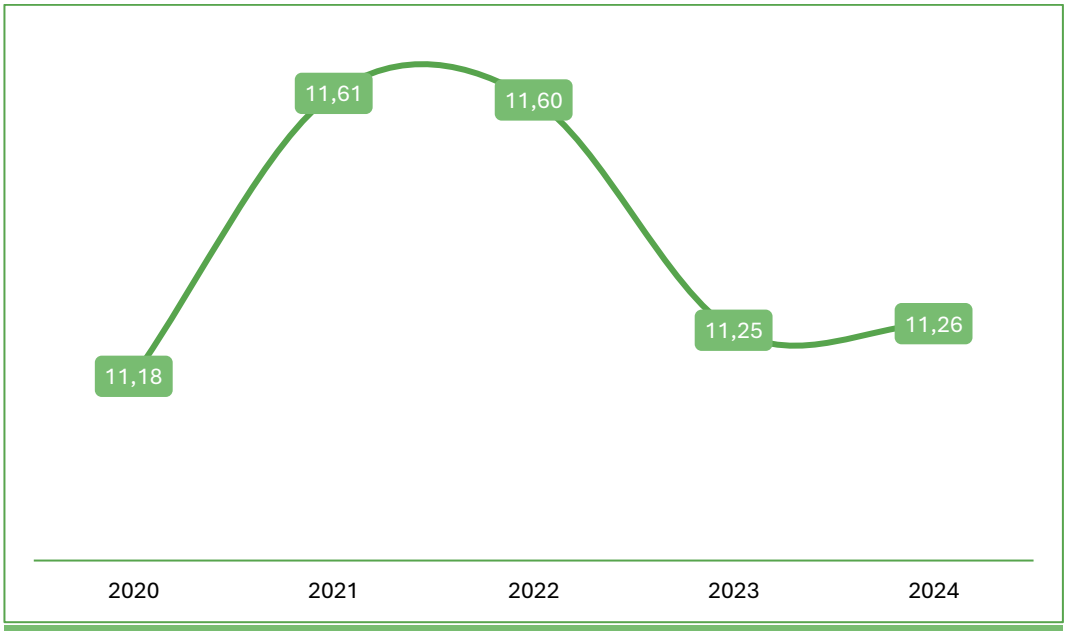
penting bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk terus fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, serta mempertimbangkan kebijakan terkait keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan.

2.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi merupakan tiga pilar yang saling terkait dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, di mana penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) menjadi landasan untuk menciptakan inovasi produk, proses, maupun model bisnis yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas ekonomi melalui optimalisasi sumber daya. Implementasinya memerlukan sinergi antara lembaga riset, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan ekosistem inovasi yang didukung oleh adopsi teknologi terkini, peningkatan kapasitas SDM berbasis kompetensi digital, serta kebijakan yang mendukung komersialisasi hasil penelitian sehingga mampu menghasilkan nilai tambah tinggi, memperkuat daya saing, dan menciptakan lapangan kerja.

A Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio PDRB Industri Pengolahan menggambarkan seberapa besar peran industri pengolahan dalam perekonomian daerah. Industri pengolahan diharapkan bertumbuh karena berperan penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Perkembangan rasio PDRB Industri Pengolahan sebagai berikut:



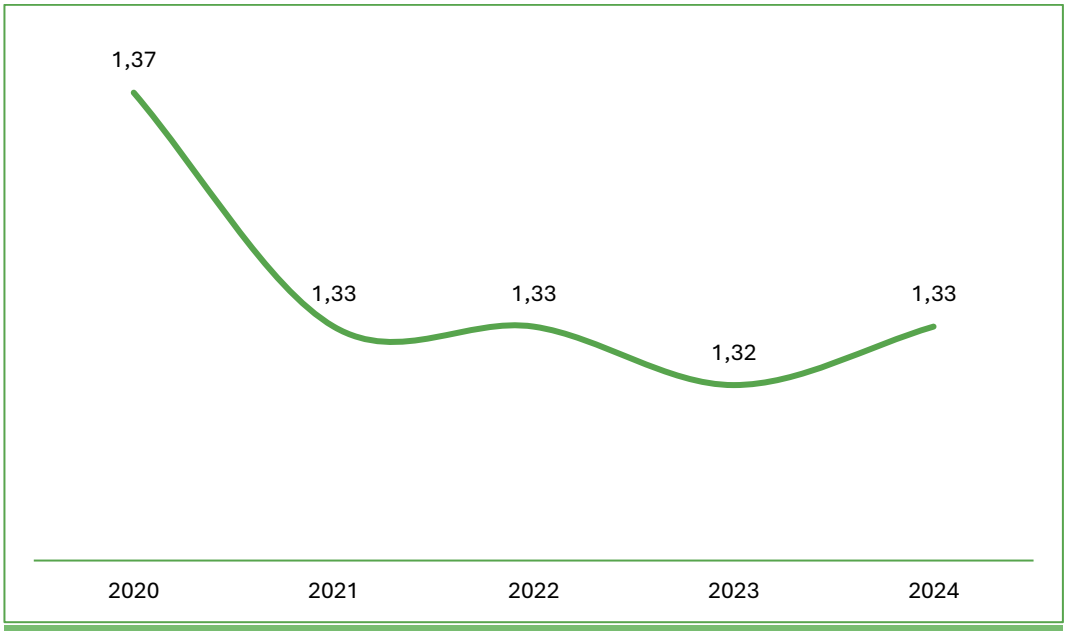
Gambar 2.28 Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Tapanuli Tengah relatif stabil pada angka 11 persen, di mana sektor ini mengalami penurunan kontribusi sejak tahun 2022 dari sebesar 11,60 persen menjadi 11,26 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran Industri Pengolahan bagi perekonomian Kabupaten Tapanuli Tengah masih relatif sedikit. Maka dari itu, pemerintah perlu mendorong pertumbuhan industri daerah melalui kebijakan-kebijakan yang mendorong hilirisasi produk-produk berbasis keunggulan daerah.

B Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum menggambarkan kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan minum terhadap perekonomian daerah. Sektor ini dijadikan indikator untuk Sektor Pariwisata karena berkaitan dengan rumah makan, restoran, perhotelan atau penginapan. Perkembangan Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum dapat dilihat pada gambar berikut:



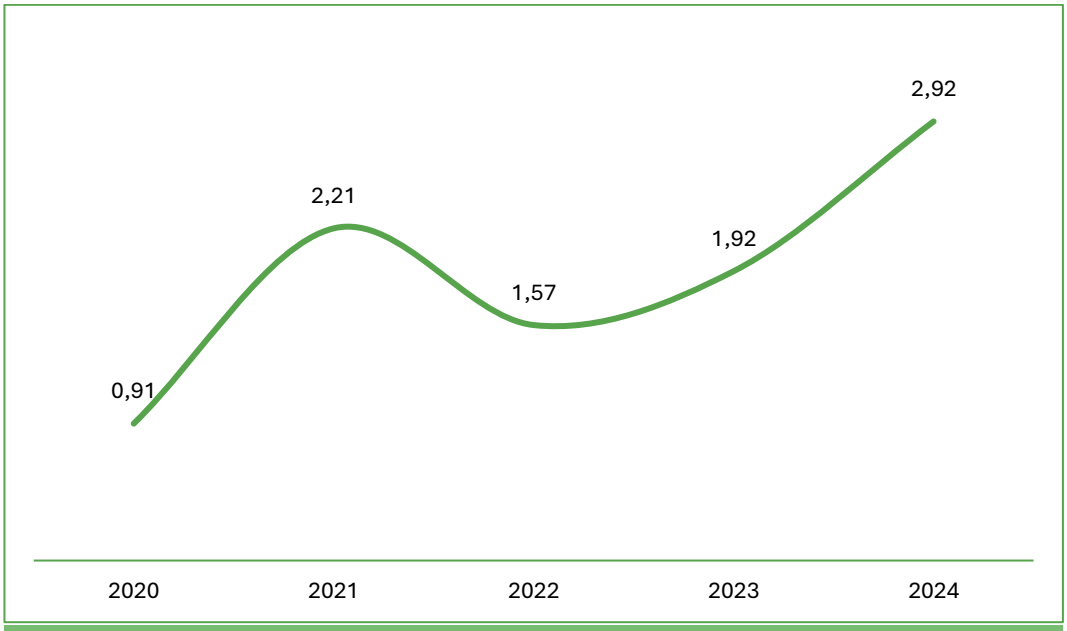
Gambar 2.29 Rasio PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum (%)

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Rasio PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Tapanuli tengah mengalami penurunan dari 1,37 persen pada tahun 2020 menjadi 1,33 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa semakin menurunnya daya tarik pariwisata daerah yang ditunjukkan dari menurunnya kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum terhadap perekonomian. Oleh karena itu, perlu peningkatan daya tarik pariwisata daerah mengingat sektor ini merupakan sektor yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.

C Rasio Kewirausahaan

Wirausaha adalah seseorang yang membuka usaha untuk menopang perekonomiannya secara mandiri. Rasio Kewirausahaan adalah indikator yang mengukur proporsi wirausaha dari seluruh tenaga kerja yang ada. Rasio ini diukur dengan melihat proporsi antara penduduk bekerja yang berstatus berusaha sendiri dengan setidaknya satu orang buruh/karyawan tetap dari seluruh angkatan kerja yang ada. Perkembangan rasio kewirausahaan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.30 Rasio Kewirausahaan (%)

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah (Diolah, 2024)

Rasio kewirausahaan cenderung meningkat dari 0,91 persen pada tahun 2020 menjadi 2,92 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyaknya masyarakat yang berminat untuk menjadi wirausaha sekaligus meningkatnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Peningkatan ini perlu terus didorong agar semakin banyak masyarakat yang mampu meningkatkan perekonomiannya secara mandiri, serta berkontribusi bagi perluasan lapangan pekerjaan. Pemerintah daerah dapat mendukung melalui program kemudahan akses permodalan dan insentif terhadap UMKM, serta bantuan dan fasilitas lainnya yang menunjang aktivitas UMKM dalam menghasilkan produknya.

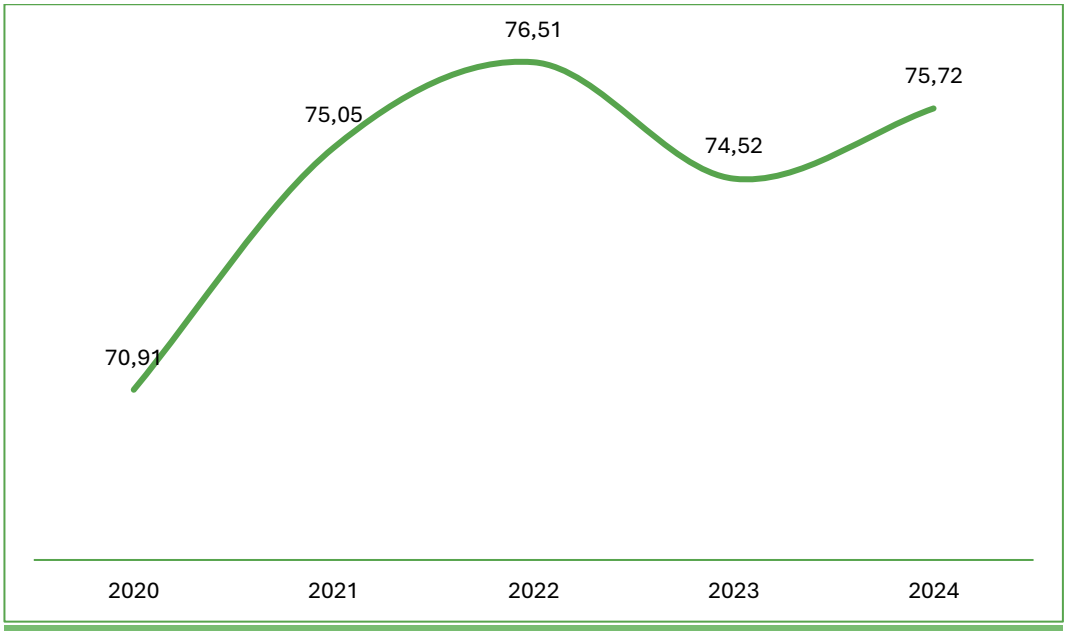
D Indeks Akses Keuangan Daerah

Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) merupakan indeks komposit yang dikembangkan untuk menyediakan indikator kuantitatif dalam kerangka pengukuran yang lebih komprehensif sehingga dapat memperkuat pemantauan TPAKD di daerah. IKAD memanfaatkan data dari sisi penawaran (*supply side*) dan permintaan (*demand side*) untuk menilai kinerja akses, penggunaan layanan, serta kedalaman keuangan. Indeks ini memberikan gambaran yang informatif bagi pemangku kepentingan di tingkat daerah

maupun nasional dalam merumuskan program dan kebijakan yang lebih efektif. Pada tahun 2024, IKAD Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar 3,19 poin dengan kategori “Berkembang”. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah akan meningkatkan akses keuangan daerah melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan.

E Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator makro yang mengukur jumlah ketersediaan penduduk yang termasuk angkatan kerja dari seluruh penduduk yang berusia produktif (15-64 tahun). Indikator ini dijadikan sebagai acuan untuk melihat ketersediaan tenaga kerja di suatu daerah. Perkembangan TPAK Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.31 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)

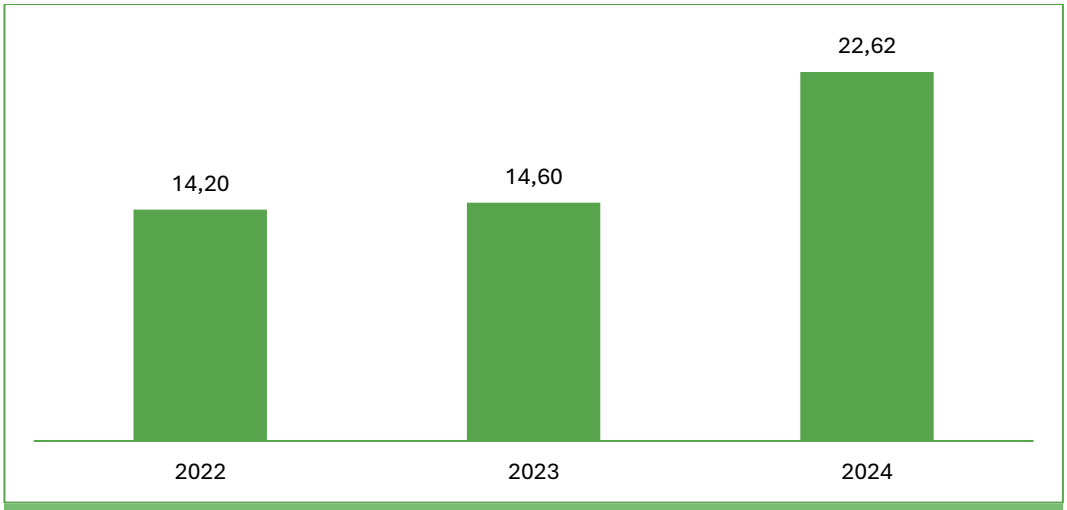
Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Tapanuli Tengah meningkat dari 70,91 persen pada tahun 2020 menjadi 76,51 persen pada tahun 2022, namun sedikit menurun pada tahun 2024 menjadi 75,72 persen. Hal ini disebabkan oleh terjadinya peningkatan penduduk usia angkatan kerja yang memilih untuk melanjutkan pendidikannya, ibu rumah tangga, pensiunan, atau tidak ikut serta dalam kegiatan ekonomi daerah. Pemerintah

harus mendorong peningkatan TPAK karena angkatan kerja menjadi pendorong produktivitas daerah.

F Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) merupakan alat ukur yang menilai kapasitas dan kinerja inovasi di tingkat regional dengan mempertimbangkan faktor input (sumber daya inovasi) dan output (hasil inovasi). IID mengintegrasikan tujuh dimensi kunci: (1) kapasitas SDM penelitian, (2) anggaran riset, (3) infrastruktur teknologi, (4) kolaborasi triple helix, (5) output paten/hak kekayaan intelektual, (6) adopsi teknologi industri, dan (7) dampak ekonomi inovasi.



Gambar 2.32 Indeks Inovasi Daerah (Poin)

Sumber: Kemendagri

Indeks Inovasi Daerah meningkat dari 14,20 poin pada tahun 2022 menjadi 22,62 poin pada tahun 2024. Meskipun terjadi peningkatan, status Kabupaten Tapanuli Tengah masih berada pada kategori “Kurang Inovatif”. Pemerintah perlu mendorong dan meningkatkan kapasitas inovasinya sehingga menghasilkan program-program yang inovatif bagi kemajuan daerah.

2.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru merupakan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip lingkungan dalam aktivitas ekonomi melalui dua pendekatan komplementer.

Ekonomi Hijau berfokus pada pengurangan jejak ekologis sektor daratan melalui efisiensi energi, energi terbarukan dan praktik industri rendah karbon, sementara Ekonomi Biru mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan melalui pengelolaan perikanan berbasis kuota, ekowisata bahari, dan pengembangan bioteknologi kelautan.

2.3.4 Transformasi Digital

Transformasi Digital merupakan proses strategis yang mengintegrasikan teknologi digital secara menyeluruh dalam pemerintahan, bisnis, dan masyarakat untuk menciptakan efisiensi dan inovasi, yang diwujudkan melalui penguatan infrastruktur digital

A Indeks Masyarakat Digital

Indeks Masyarakat Digital merupakan indeks yang mengukur tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya. Indeks Masyarakat Digital Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2022 sebesar 40,31 poin meningkat pada tahun 2023 menjadi 43,45 poin, namun menurun pada tahun 2024 menjadi 40,34 poin. Secara spesifik, Indeks Masyarakat Digital Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.31 Indeks Masyarakat Digital Kabupaten Tapanuli Tengah (Poin)

Pilar	2022	2023	2024	Sub Pilar	2022	2023	2024
Infrastruktur dan Ekosistem	45,77	55,77	48,23	Akses dan Adopsi Teknologi	48,78	53,21	63,95
				Ekosistem Pembelajaran	42,76	50,26	39,29
				Digitalisasi Pemerintah	-	70,30	41,56
Keterampilan Digital	70,69	56,59	51,39	Komplementaritas	58,16	42,31	51,25
				Pengenalan	91,07	60,68	50,42
				Keamanan TIK	62,72	66,33	52,46
Pemberdayaan	18,89	26,65	27,45	Konsumen/ Pengguna	18,21	32,28	32,51
				Penjual/Penyedia	19,56	21,02	22,39
Pekerjaan	27,19	34,94	34,57	Permintaan	47,31	53,65	56,66
				Penawaran	7,06	16,23	12,48
Indeks Masyarakat Digital					**40,31**	**43,45**	**40,34**

Sumber: imdi.sdmdigital.id

Berdasarkan hasil evaluasi, Pilar pemberdayaan mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 18,89 poin pada tahun 2022 menjadi 27,45 poin pada tahun 2024 dan merupakan pilar dengan capaian tertinggi, sementara pilar lainnya mengalami penurunan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada Pilar Infrastruktur dan Ekosistem, sub-pilar pertama, yaitu Akses dan Adopsi Teknologi meningkat dari 48,78 poin pada tahun 2022 menjadi 63,95 poin pada tahun 2024, di mana hal ini menggambarkan bahwa semakin banyak masyarakat dan bisnis yang mengakses dan mengadopsi teknologi. Sub-pilar kedua, yaitu Ekosistem Pembelajaran cenderung menurun dari 42,76 poin pada tahun 2022 menjadi 39,29 poin pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin rendahnya tingkat adopsi teknologi pada sekolah. Menurunnya capaian ini disebabkan oleh kurang terawatnya sarana dan prasarana teknologi di sekolah. Sub-pilar ketiga, yaitu Digitalisasi Pemerintah, di mana sub-pilar ini baru dimasukkan ke dalam formula pada tahun 2023. Capaian Digitalisasi Pemerintah menurun dari 70,30 poin pada tahun 2023 menjadi 41,56 poin pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat adopsi teknologi di lingkungan pemerintah semakin buruk, di mana hal ini disebabkan oleh kurangnya perawatan dan pengembangan terhadap sistem pada aplikasi pemerintah.

Pada Pilar Keterampilan Digital, sub-pilar pertama, yaitu Komplementaritas memiliki capaian sebesar 58,16 poin pada tahun 2022 menurun pada tahun 2024 menjadi sebesar 51,25 poin. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat dalam menggunakan beragam perangkat digital dan merespon informasi secara kritis semakin menurun. Pada sub-pilar kedua, yaitu Pengenalan menurun dari 91,07 poin pada tahun 2022 menjadi 50,42 poin pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi dan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta kemampuan dalam mengartikulasi kebutuhan

informasi dan mencari data atau konten digital semakin menurun. Pada sub-pilar ketiga, yaitu Keamanan TIK menurun dari 62,72 poin pada tahun 2022 menjadi 52,46 poin pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat dalam memahami risiko dan bahaya digital, serta proteksi terhadap data pribadi dan konten digital semakin menurun.

Pada Pilar Pemberdayaan, Sub-Pilar Konsumen/Pengguna meningkat dari 18,21 poin pada tahun 2022 menjadi 32,51 poin pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi oleh masyarakat, seperti layanan keuangan digital, *e-commerce*, *marketplace*, dan layanan digital lainnya semakin meningkat, sementara pada Sub-Pilar Penjual/Penyedia meningkat dari 19,56 poin pada tahun 2022 menjadi 22,39 poin pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa semakin meningkatnya masyarakat yang memanfaatkan platform digital untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Pada Pilar Pekerjaan, Sub-Pilar pertama, yaitu Permintaan meningkat dari 47,31 poin pada tahun 2022 menjadi 56,66 poin pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyaknya permintaan perusahaan atau bisnis terhadap tenaga kerja yang memiliki keterampilan digital. Sub-Pilar kedua, yaitu Penawaran juga meningkat dari 7,06 poin pada tahun 2022 menjadi 12,48 poin pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa ketersediaan tenaga kerja dengan keterampilan digital semakin meningkat. Namun, masih belum memenuhi permintaan pasar terhadap tenaga kerja dengan keterampilan digital.

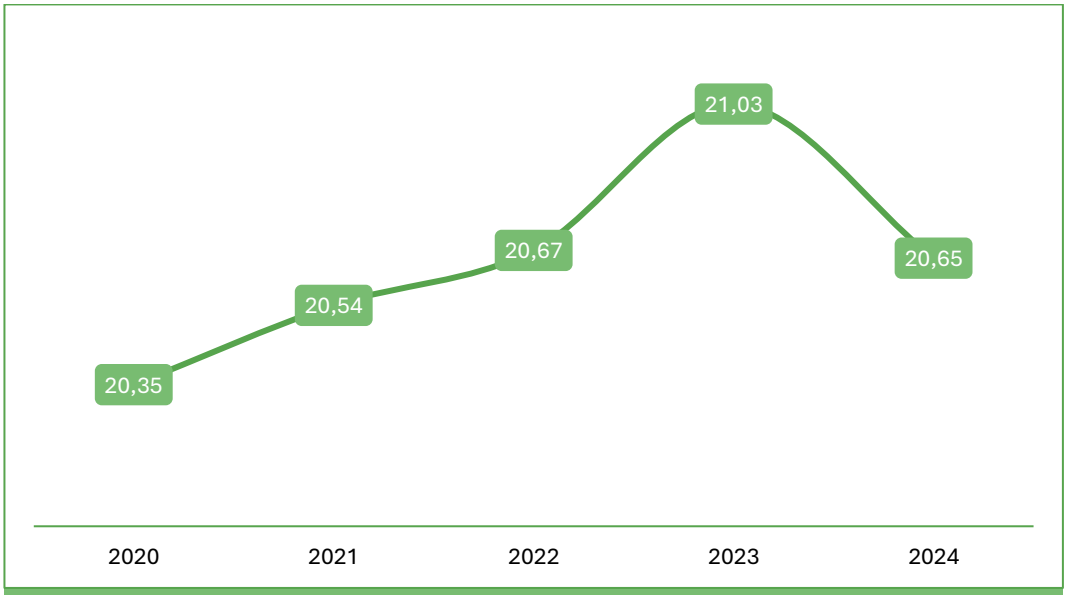
2.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi Ekonomi Domestik dan Global merupakan proses strategis untuk memperkuat konektivitas dan daya saing ekonomi nasional dalam sistem perdagangan internasional melalui sinergi antara kekuatan ekonomi dalam negeri dan peluang pasar global.

A Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merujuk pada total nilai

investasi dalam aset fisik baru yang digunakan untuk proses produksi selama periode tertentu, meliputi pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, waduk), pembelian mesin dan peralatan, serta pengembangan teknologi produktif. PMTB mencerminkan upaya suatu negara atau daerah dalam memperluas kapasitas produksi dan meningkatkan produktivitas ekonomi jangka panjang



Gambar 2.33 Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB (%)

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Rasio PMTB terhadap PDRB cenderung meningkat dari 20,35 persen pada tahun 2020 menjadi 20,65 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa investasi semakin berperan dalam peningkatan ekonomi Kabupaten Tapanuli Tengah. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah perlu menggali potensi daerah dan mempromosikannya kepada investor sehingga investor menjadi tertarik untuk menanamkan modal di daerah.

B Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB

Ekspor barang dan jasa merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kontribusi sektor eksternal terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Rasio ekspor terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan sejauh mana perekonomian daerah terhubung dengan pasar global dan kapasitasnya dalam menghasilkan produk dan jasa yang kompetitif

di tingkat internasional. Tingginya proporsi ekspor dalam PDRB mencerminkan kemampuan suatu wilayah untuk menarik devisa, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing ekonomi melalui pemanfaatan keunggulan komparatifnya. Ekspor menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang dapat membawa dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Namun, ketergantungan berlebihan pada ekspor juga perlu diimbangi dengan diversifikasi produk dan penguatan sektor domestik agar ekonomi bersifat lebih stabil dan tahan terhadap gejolak pasar global. Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan harus mendorong peningkatan kualitas dan inovasi produk ekspor, memperbaiki infrastruktur logistik, serta membangun jejaring perdagangan internasional yang kuat. Kontribusi ekspor terhadap PDRB tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghasilkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

2.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi merupakan konsep pembangunan yang mengoptimalkan potensi khas masing-masing wilayah melalui sinergi yang saling memperkuat. Perkotaan berperan sebagai penggerak utama dengan konsentrasi industri, jasa keuangan, dan inovasi teknologi, sementara perdesaan menjadi basis ketahanan pangan dan energi terbarukan.

A Indeks Infrastruktur

Indeks Infrastruktur merupakan indikator komposit yang mengukur kualitas dan ketersediaan jaringan infrastruktur fisik suatu wilayah dalam mendukung aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

B Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan

Akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan

menciptakan lingkungan tempat tinggal yang aman serta nyaman. Hunian layak tidak hanya meliputi aspek fisik seperti struktur bangunan yang kokoh dan fasilitas dasar yang memadai, tetapi juga harus dapat dijangkau secara finansial oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketersediaan rumah yang terjangkau penting agar tidak terjadi ketimpangan dan eksklusi sosial, terutama di wilayah perkotaan yang sering menghadapi tekanan harga properti yang tinggi. Selain keterjangkauan, prinsip keberlanjutan dalam hunian harus diperhatikan dengan menerapkan konsep ramah lingkungan dan hemat energi guna mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Tabel 2.32 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan

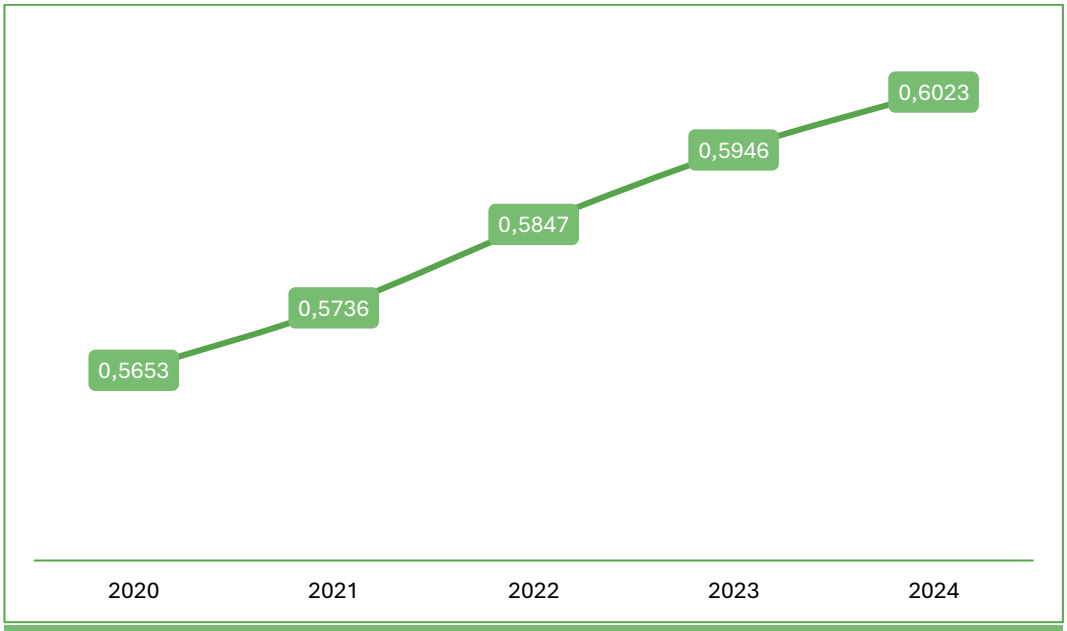
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	82,94	83,06	83,20	83,35	83,53

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Perhubungan

Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan meningkat dari 82,94 persen pada tahun 2020 menjadi 83,53 persen pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap rumah layak huni sudah baik. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah perlu meningkatkan anggaran untuk menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat.

C Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah alat ukur komprehensif yang menilai tingkat kemandirian dan kemajuan pembangunan desa berdasarkan tiga dimensi utama: (1) Dimensi Sosial (meliputi kualitas pendidikan, kesehatan, dan partisipasi masyarakat), (2) Dimensi Ekonomi (mencakup produktivitas, akses pasar, dan ketahanan pangan), serta (3) Dimensi Lingkungan (termasuk pengelolaan sumber daya alam dan adaptasi perubahan iklim).



Gambar 2.34 Indeks Desa Membangun (Poin)

Sumber: Kemendes

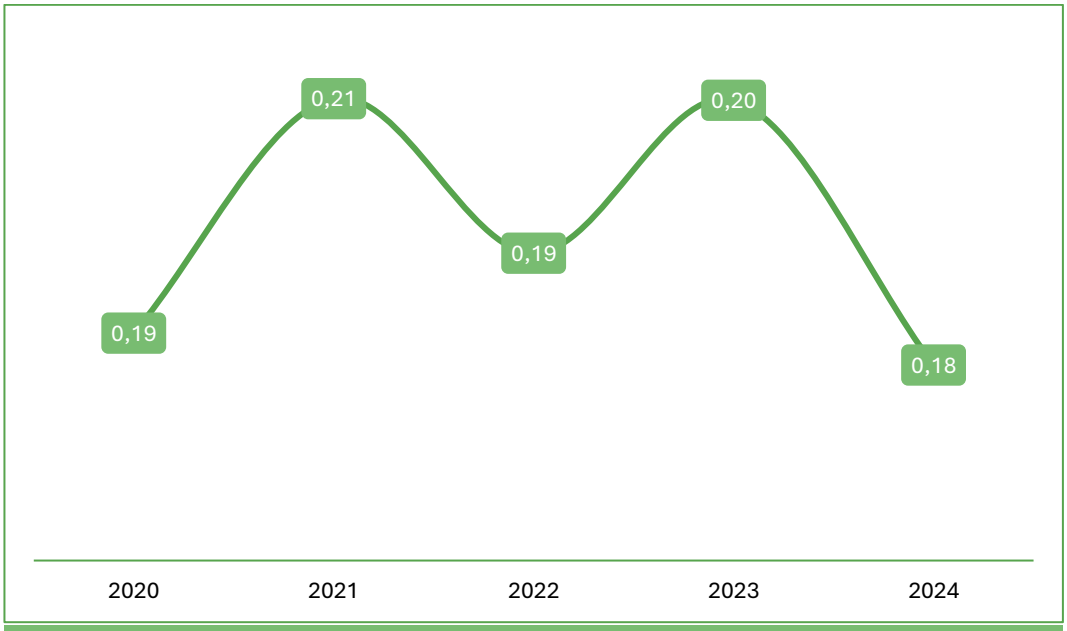
Indeks Desa Membangun Kabupaten Tapanuli Tengah meningkat dari 0,5653 poin pada tahun 2020 menjadi 0,6023 poin pada tahun 2024. Capaian ini masih menunjukkan bahwa secara umum desa di Kabupaten Tapanuli Tengah berada pada klasifikasi "Berkembang". Kabupaten Tapanuli Tengah hingga tahun 2024 belum memiliki Desa Mandiri. Maka dari itu perlu bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana desa dalam membangun desa sehingga mampu mencapai status Mandiri.

2.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas Ekonomi Makro mengacu pada kondisi fundamental perekonomian suatu daerah yang seimbang dan terkendali.

A Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB menggambarkan berapa besar kontribusi dari pajak yang diterima oleh pemerintah terhadap perekonomian daerah. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.35 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (diolah, 2025)

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB masih sangat rendah di mana pada tahun 2024 menurun menjadi 0,18 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah masih belum mampu mendorong perekonomian daerah. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah perlu mengoptimalkan pendapatan pajak daerah sehingga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

2.4 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum merupakan aspek pelayanan pemerintah yang menjadi dasar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien, dan berkualitas. Aspek Pelayanan Umum berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 terdiri atas 4 urusan, yaitu: 1) Layanan Urusan Wajib Dasar; 2) Layanan Urusan Wajib Non Dasar; 3) Layanan Urusan Pilihan; dan 4) Penunjang Urusan.

2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif merupakan sistem pengelolaan pemerintahan yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan fleksibilitas dalam merespons perubahan melalui penyederhanaan regulasi, penguatan pengawasan, serta penerapan teknologi

untuk menciptakan tata kelola yang efektif, bersih, dan mampu beradaptasi dengan dinamika pembangunan.

Tabel 2.33 Capaian Kinerja Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	N/A	C	C	C	CC
Indeks SPBE (Poin)	1,50	1,52	1,62	1,87	2,38
Indeks Pelayanan Publik (Poin)	N/A	N/A	N/A	2,28	2,26
Indeks Integritas Nasional (Poin)	N/A	70,02 (Rentan)	67,36 (Rentan)	73,99 (Waspada)	70,44 (Rentan)

Sumber: Pan-RB & SPI

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tapanuli Tengah masih berada pada kategori C, di mana hal ini menunjukkan bahwa belum ada peningkatan dari reformasi birokrasi. Kemudian, Indeks SPBE meningkat dari 1,50 poin pada tahun 2020 menjadi 1,87 poin pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kualitas sistem pemerintahan berbasis elektronik. Indeks Pelayanan Publik pada taun 2023 mencapai nilai 2,28 poin. Indeks Integritas Nasional relatif stabil di mana pada tahun 2023 sempat mengalami peningkatan menjadi 73,99 poin atau berada pada kategori Waspada, namun pada tahun 2024 kembali menurun menjadi 70,44 poin dengan kategori Rentan. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah perlu meningkatkan kualitas sistem pemerintahannya dengan mengadopsi teknologi dan menjaga sistem berbasis teknologi tersebut agar memberikan pelayanan publik yang optimal. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas ASN yang profesional serta pengawasan agar mencegah praktik-praktik yang buruk dalam tata kelola pemerintah.

2.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Hukum Berkeadilan diwujudkan melalui penegakan hukum yang imparsial dan konsisten dengan prinsip keadilan sosial, menjamin perlindungan hak dasar warga negara serta kepastian hukum bagi semua lapisan masyarakat. Keamanan Nasional yang Tangguh dibangun melalui

sistem pertahanan komprehensif yang mengintegrasikan aspek militer, siber, dan ketahanan masyarakat, mampu mengantisipasi ancaman multidimensi baik konvensional maupun non-tradisional. Demokrasi Substansial tidak hanya terbatas pada prosedur elektoral, tetapi termasuk partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab, serta mekanisme check and balance antar lembaga negara. Ketiganya bersinergi menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan berkelanjutan, di mana hukum yang adil menjadi fondasi, keamanan nasional menyediakan ruang stabil, dan demokrasi substansial menjamin inklusivitas proses pembangunan. Tantangan implementasi mencakup konsistensi penegakan hukum di daerah, evolusi ancaman keamanan hybrid, dan kualitas partisipasi demokratis yang diatasi melalui penguatan kapasitas institusi, edukasi kewarganegaraan, dan inovasi tata kelola berbasis teknologi.

Tabel 2.34 Capaian Kinerja Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penegakan Perda (%)	N/A	75,00	75,00	75,00	75,00
Persentase Capaian Aksi HAM (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	N/A	97,00	97,00	97,00	97,00

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penegakan Perda relatif sama dari tahun 2021-2024 sebesar 75,00 persen. Sementara untuk Persentase Capaian Aksi HAM dan Indeks Demokrasi Indonesia belum dapat dihitung oleh daerah. Persentase gangguan Trantibum sebesar 97,00 persen hingga tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah perlu meningkatkan sinergi dengan aparat penegak hukum untuk menjaga keamanan daerah.

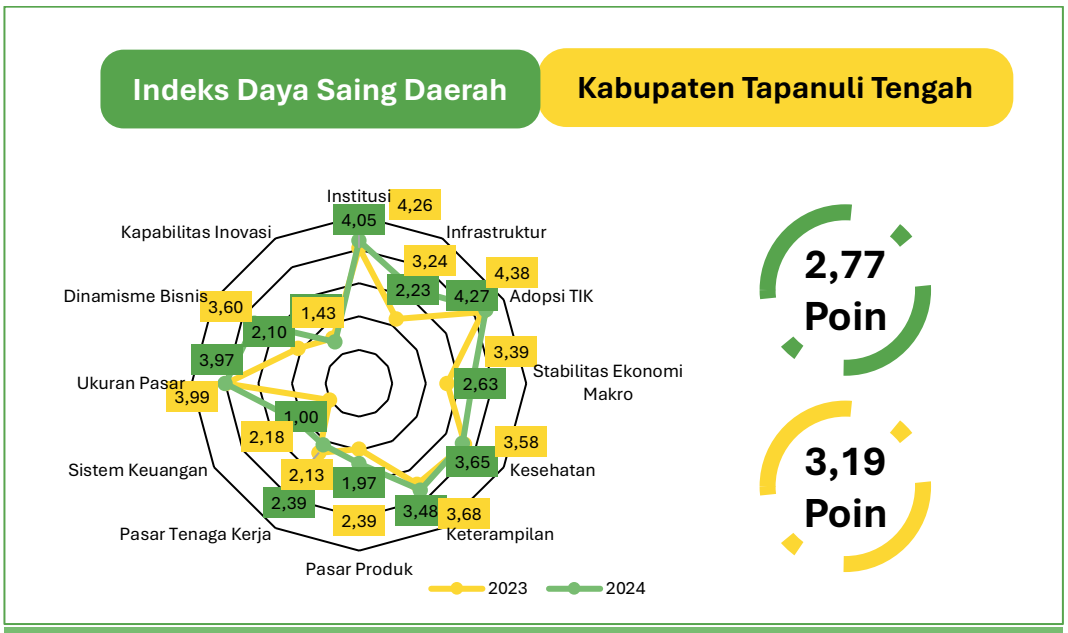
2.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan merupakan pendekatan strategis yang mengintegrasikan kekuatan diplomasi dan pertahanan untuk menciptakan stabilitas keamanan regional. Pendekatan ini memadukan *soft power diplomacy* melalui jalur multilateral

dan kerja sama ekonomi, dengan *hard power* deterrence berupa penguatan kapasitas pertahanan yang kredibel, guna mencegah konflik dan mempertahankan kedaulatan.

A Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan indeks yang mengukur daya saing daerah yang terdiri dari 4 pilar penyusun, yaitu 1) Lingkungan Pendukung; 2) Sumber Daya Manusia; 3) Pasar; dan 4) Ekosistem Inovasi. Pada tahun 2024, Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar 2,77 poin hal ini menunjukkan bahwa daya saing daerah masih dinilai rendah secara keseluruhan. Secara detail hasil evaluasi Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.36 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah

Sumber: BRIN

Berdasarkan hasil evaluasi, Adopsi TIK merupakan komponen dengan nilai tertinggi sebesar 4,38 poin, di mana hal ini mengindikasikan bahwa adopsi TIK sudah tinggi di Kabupaten Tapanuli Tengah. Pembangunan infrastruktur digital, pemanfaatan, dan adopsi TIK pada bisnis atau pemerintahan sudah baik. Kemudian komponen dengan nilai tertinggi kedua adalah Institusi sebesar 4,26 poin. Hal ini menandakan bahwa institusi di Kabupaten Tapanuli Tengah baik dari pemerintah, kepolisian, dan lembaga

lainnya berperan dalam menciptakan iklim bisnis yang kondusif.

Di samping itu, Kapabilitas Inovasi memiliki nilai sebesar 1,43 poin, di mana hal ini menandakan bahwa Kabupaten Tapanuli Tengah masih kurang dalam hal riset dan inovasi di daerah. Kurangnya fasilitas dalam riset dan inovasi serta dorongan kepada masyarakat untuk menghasilkan produk yang inovatif menjadi penyebab dari rendahnya capaian tersebut. Selanjutnya adalah Pasar Tenaga Kerja dengan nilai sebesar 2,13 poin yang menandakan bahwa kurangnya efisiennya pasar tenaga kerja di Kabupaten Tapanuli Tengah yang diukur dari tingkat upah, kebijakan terkait tenaga kerja, serta kesetaraan antara upah tenaga kerja laki-laki dan perempuan. Terakhir, yaitu Sistem Keuangan dengan nilai 2,18 poin. Hal ini menandakan bahwa sistem keuangan di Kabupaten Tapanuli Tengah masih belum mampu berperan dalam meningkatkan perekonomian daerah. Nilai yang sangat rendah ini disebabkan oleh terbatasnya layanan keuangan yang tersedia di Kabupaten Tapanuli Tengah sehingga masyarakat atau pun bisnis sulit memperoleh akses permodalan. Selain itu, Selanjutnya,

2.4.4 Layanan Urusan Wajib Dasar

Layanan Urusan Wajib Dasar merupakan pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

A Pendidikan

Pendidikan merupakan layanan dasar yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, kemampuan, dan karakter individu melalui pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan sikap. Pendidikan berperan penting dalam membentuk individu yang mampu berkontribusi secara positif bagi masyarakat. Dalam memberikan layanan pendidikan, pemerintah membangun sekolah dan menyediakan tenaga pengajar dan sarana-prasarana pendidikan agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar.

Angka Partisipasi Siswa (APS) adalah indikator pendidikan yang

menunjukkan persentase anak atau siswa pada kelompok usia tertentu yang sedang bersekolah di tingkat pendidikan tertentu. APS digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal pada berbagai jenjang, seperti SD, SMP, SMA, atau pendidikan tinggi. Angka Partisipasi Siswa terdiri atas 2 jenis, yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK mengukur jumlah siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu, tanpa memperhatikan apakah usia siswa sesuai dengan jenjang tersebut. Perkembangan APK Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada gambar berikut:



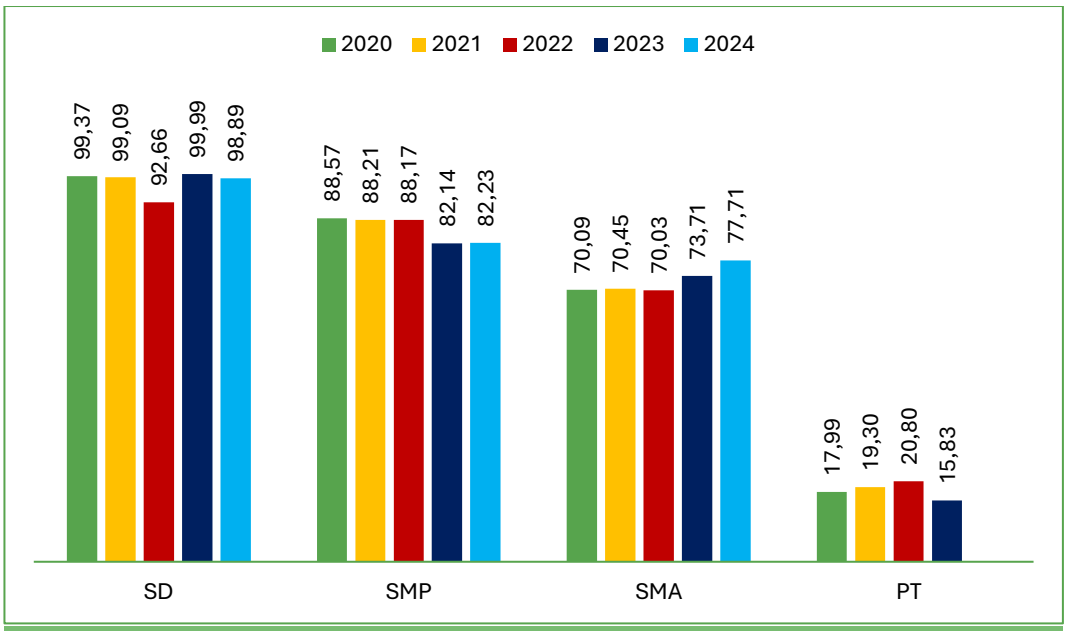
Gambar 2.37 Angka Partisipasi Kasar

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Berdasarkan data tersebut selama tahun 2020-2024, pada jenjang pendidikan SD, APK relatif stabil dari 115,62 persen menjadi 111,80 persen, kemudian pada jenjang pendidikan SMP terjadi penurunan dari 102,75 persen menjadi 85,36 persen. Selanjutnya, pada jenjang pendidikan SMA terjadi peningkatan setiap tahunnya dari 80,91 persen pada tahun 2020 menjadi 101,34 persen pada tahun 2024, dan pada jenjang Pendidikan Tinggi cenderung meningkat dari 25,27 persen pada tahun 2020 menjadi 32,54 persen pada tahun 2023.

APM mengukur jumlah siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan

tertentu dengan usia yang sesuai untuk jenjang tersebut. Perkembangan APM Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.38 Angka Partisipasi Murni

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Selama tahun 2020-2024, APM pada jenjang pendidikan SD relatif stabil dari 99,37 persen menjadi 98,99 persen, kemudian pada jenjang pendidikan SMP mengalami penurunan setiap tahunnya dari 88,57 persen menjadi 82,23 persen. Sementara, pada pendidikan SMA relatif meningkat dari 70,09 persen menjadi 77,71 persen. Namun, pada Pendidikan Tinggi relatif menurun dari 17,99 persen menjadi 15,83 persen pada tahun 2023.

Tabel 2.35 Capaian Kinerja Pendidikan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)	9,42	9,20	9,50	9,34	11,95

Sumber: Dinas Pendidikan & BPS Kabupaten Tapanuli Tengah (diolah, 2025)

Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualitas pendidikan tinggi mengalami peningkatan dari 9,42 persen pada tahun 2020 menjadi 11,95 persen pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa semakin banyak ketersediaan penduduk yang telah menempuh jenjang pendidikan tingkat universitas atau perguruan tinggi di Kabupaten Tapanuli tengah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah perlu meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam menempuh pendidikan tinggi untuk meningkatkan ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas melalui program-program peningkatan partisipasi pendidikan masyarakat.

B Kesehatan

Kesehatan adalah kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap. Kesehatan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini juga berkaitan dengan peningkatan daya saing SDM. Masyarakat yang sehat akan memiliki daya pikir yang lebih baik sehingga mendorong produktivitas suatu daerah. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Salah satunya adalah pembangunan fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan merupakan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Jumlah fasilitas kesehatan yang tersedia di Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai berikut:

Tabel 2.36 Fasilitas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Sakit Umum	1	1	1	1	1
Puskesmas Rawat Inap	6	6	6	6	6
Puskesmas Non Rawat Inap	19	19	19	19	19
Klinik Pratama	16	16	16	16	14
Posyandu	393	393	385	385	377

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat berbagai fasilitas kesehatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, meliputi Rumah Sakit Umum, Puskesmas, Klink Pratama, dan Posyandu. Namun, jumlah Posyandu mengalami penurunan dari 393 unit pada tahun 2021 menjadi 385 unit pada tahun 2022. Fasilitas kesehatan memerlukan tenaga dokter dan kesehatan sebagai SDM dalam mendukung peningkatan kesehatan masyarakat. Berikut adalah data tenaga kesehatan yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2023:

Tabel 2.37 Tenaga Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023

Kecamatan	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kefarmasian	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Tenaga Gizi	Tenaga Medis	Psikologi Klinis	Tenaga Keterapian Fisik	Tenaga Kesehatan Medis
Pinangsori	15	45	1	10	1	1	5		
Badiri	36	49	2	3	2	2	3		
Sibabangun	19	45	1	5	2	1	5		
Lumut	10	24	1	6	-	1	5		
Sukabangun	9	18	1	2	1	1	5		
Pandan	153	173	14	21	5	10	79	9	2
Tukka	19	44	2	4	1	2	5		
Sarudik	22	45	3	9	3	3	5		
Tapian Nauli	23	33	1	4	5	3	7		
Sitahuis	5	15	-	2	1	1	4		
Kolang	17	29	3	5	1	3	3		
Sorkam	41	60	1	8	1	1	3		
Sorkam Barat	11	22	2	4	-	-	3		
Pasaribu Tobing	5	21	3	3	2	1	3		
Barus	27	59	3	4	1	2	3	1	
Sosorgadong	17	28	1	4	1	-	2		
Andam Dewi	30	35	5	11	1	1	5		
Barus Utara	11	20	2	4	1	-	4		
Manduamas	29	55	2	3	1	2	5		
Sirandorung	15	32	-	2	-	-	3		
Tapanuli Tengah	**514**	**852**	**48**	**114**	**30**	**35**	**157**	**10**	**2**

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Tenaga medis merupakan dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. Tenaga medis yang tersedia di Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 35 orang. Namun, perlu menjadi perhatian bahwa terdapat 4 Kecamatan yang tidak memiliki tenaga medis, yaitu Kecamatan Sorkam Barat, Sosorgadong, Barus Utara, dan Sirandorung. Maka dari itu, pemerintah perlu melakukan pemerataan jumlah tenaga medis terutama ke wilayah yang sulit memperoleh akses kesehatan.

Tabel 2.38 Capaian Kinerja Kesehatan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Kasus kematian ibu (kasus)	10	23	12	4	4

Sumber: Dinas Kesehatan

C Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan urusan pemerintah terkait pembangunan infrastruktur dan pengaturan tata ruang wilayah. Hal ini merupakan pelayanan umum yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk infrastruktur dasar untuk mendukung aktivitas masyarakat.

Tabel 2.39 Capaian Kinerja Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jalan dalam kondisi baik (%)	50,28	54,14	55,62	42,36	43,76
Saluran irigasi dalam kondisi baik (%)	67,48	70,38	72,54	73,29	74,00

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Jalan dalam kondisi baik mengalami penurunan dari 50,28 persen pada tahun 2020 menjadi 43,76 persen pada tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perawatan terhadap jalan yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Tengah. Maka dari itu, pemerintah perlu meningkatkan anggaran untuk perawatan jalan.

D Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan urusan pemerintah dalam memberikan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat. Hal ini berkaitan dengan kualitas hidup masyarakat, apabila tempat tinggal yang tersedia layak huni, maka masyarakat akan merasa nyaman untuk melakukan aktivitasnya. Capaian kinerja Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman sebagai berikut:

Tabel 2.40 Capaian Kinerja Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah tangga dengan akses sanitasi layak (%)	50,85	57,56	58,52	60,86	N/A
Rumah tangga dengan akses air minum layak (%)	80,70	68,81	79,28	78,31	N/A

Sumber: Dinas PUPR, Siperindu

Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, dari 50,85% pada tahun 2020 naik menjadi 60,86 persen pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam penyediaan fasilitas sanitasi yang memadai bagi masyarakat, meskipun masih terdapat ruang perbaikan agar akses sanitasi yang layak dapat dinikmati oleh lebih banyak rumah tangga. Sementara itu, persentase rumah tangga dengan akses air minum layak mengalami fluktuasi dengan angka tertinggi mencapai 80,70 persen pada tahun 2020 dan sempat turun menjadi 68,81 persen pada tahun 2021, kemudian kembali naik ke 78,31 persen pada tahun 2023. Data ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar rumah tangga telah memiliki akses kepada air minum yang layak, terdapat tantangan dalam menjaga konsistensi dan kualitas penyediaan air yang aman dan memadai secara merata. Upaya peningkatan akses air minum layak perlu terus diprioritaskan guna mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

E Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat merupakan urusan pemerintah dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas kesehariannya. Capaian kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.41 Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)	78,38	73,53	68,75	82,86	53,85
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	N/A	0,21	0,31	0,31	0,32
Indeks Risiko Bencana (IRB)	N/A	191,2	191,2	187,85	181,49

Sumber: Satpol PP dan BPBD

Tingkat waktu tanggap WMK menurun dari 78,38 persen pada tahun 2020 menjadi 53,85 persen pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa adanya permasalahan pada tingkat respon pemadam kebakaran untuk menuju ke lokasi kebakaran. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah akan memfasilitasi.

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) meningkat dari 0,21% pada tahun 2021 menjadi 0,32% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa daerah harus semakin siap siaga dalam menghadapi bencana yang akan terjadi di kabupaten Tapanuli Tengah.

Indeks Resiko Bencana (IRB) menurn dari 191,2% pada tahun 2021 menjadi 181,49% pada tahun 2024. Maka hal ini menunjukkan upaya mitigasi sudah dilakukan walaupun belum optimal karena Kabupaten Tapanuil Tengah masih berada di angka indeks yang berisiko bencana.

F Sosial

Urusan sosial adalah urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan menjadi kewenangan daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Capaian kinerja Urusan Sosial sebagai berikut:

Tabel 2.42 Capaian Kinerja Urusan Sosial

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase PPKS yang tertangani (%)	N/A	N/A	N/A	79,03	83,98

Sumber: Dinas Sosial

2.4.5 Layanan Urusan Wajib Non-Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib Non-Dasar adalah urusan pemerintahan

konkuren yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah namun tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

A Tenaga Kerja

Urusan Tenaga Kerja merupakan urusan pemerintah dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi calon tenaga kerja. Capaian kinerja Urusan Tenaga Kerja sebagai berikut:

Tabel 2.43 Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	2,51	2,62	2,73	2,85	2,98

Sumber: Dinas Tenaga Kerja

Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi menggambarkan kesesuaian pekerjaan yang dijalankan oleh penduduk yang berpendidikan tinggi dengan pekerjaannya. Indikator ini menggambarkan peningkatan *link and match* tenaga kerja antara dunia pendidikan (*supply*) dan lapangan kerja (*demand*) dengan klasifikasi keahlian yang sesuai dengan tingkat pendidikan.

B Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan urusan pemerintahan wajib non-dasar yang melaksanakan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah dan meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Capaian kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

Tabel 2.44 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Partisipasi Angkatan kerja Perempuan (%)	63,23	65,57	69,89	68,60	66,75
Indeks Perlindungan Khusus Anak (Poin)	N/A	59,59	48,62	46,28	N/A

Sumber: BPS

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan mengalami peningkatan dari 63,23 persen pada tahun 2020 menjadi 66,75 persen pada tahun 2024. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah meningkat dari 5,71 persen pada tahun 2020 menjadi 20,00 persen pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa semakin banyak perempuan yang terlibat dalam pembangunan daerah. Indeks Perlindungan Khusus Anak menurun dari 59,59 poin pada tahun 2021 menjadi 46,28 poin pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendahnya perlindungan terhadap anak berkebutuhan khusus. Pemerintah sebaiknya meningkatkan perlindungan terhadap anak berkebutuhan khusus melalui penyusunan regulasi dan kebijakan yang melindungi, serta mempertegas hukum terkait perlindungan anak sehingga memberikan mereka rasa aman dan nyaman.

C Pangan

Urusan Pangan adalah urusan pemerintah yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan, di mana ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi masyarakat yang tecermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau. Pemerintah berupaya untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan untuk menjamin pasokan pangan dalam memenuhi kebutuhan seluruh penduduk baik dari segi kualitas, kuantitas, keragaman dan keamanannya sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau, serta meningkatkan pendapatan petani dan keluarganya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera. Capaian kinerja Urusan Pangan sebagai berikut:

Tabel 2.45 Capaian Kinerja Urusan Pangan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Skor Pola Pangan Harapan (Poin)	N/A	77,50	77,90	77,10	N/A

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Nasional

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan

masyarakat berdasarkan kelompok bahan pangan yang dikonsumsi. Skor ini menggambarkan seberapa dekat pola konsumsi pangan masyarakat dengan pola ideal yang direkomendasikan untuk memenuhi kebutuhan gizi. Skor PPH Kabupaten Tapanuli Tengah menurun dari 77,50 poin ada tahun 2021 menjadi 77,10 poin pada tahun 2023. Hal ini menggambarkan bahwa masih adanya ketergantungan pada satu atau beberapa jenis pangan sehingga skor PPH tidak meningkat. Hal ini dapat berisiko terhadap kekurangan gizi masyarakat. Pemerintah perlu meningkatkan diversifikasi pangan melalui peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi pangan dengan gizi seimbang dan menjaga ketersediaan pangan yang beragam.

D Pertanahan

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman senantiasa berpedoman kepada adanya keseimbangan antara kepentingan umum dengan kepentingan perseorangan dimana prinsip pengadaan tanah untuk pembangunan adalah mewujudkan pengadaan tanah yang memenuhi rasa keadilan, baik bagi masyarakat yang terkena pengadaan tanah dengan diberi ganti kerugian yang dapat menjamin kelangsungan hidupnya, dan bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang memerlukan tanah untuk dapat memperoleh tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 2.46 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kasus yang Diselesaikan (kasus)	1	1	2	1	3
Jumlah Kasus yang Terdaftar (kasus)	2	2	3	2	4

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Untuk menghindari adanya permasalahan di lapangan terhadap asset Tanah Pemerintah yang ada, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tapanuli Tengah membuat tanda patok dan plank asset Tanah Pemerintah sehingga asset tanah Pemerintah tersebut dapat diinventarisir dengan baik. Untuk kepentingan pembangunan yang digunakan sebagai fasilitas umum seperti pelebaran jalan, Dinas Perumahan dan Kawasan

Pemukiman Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan perubahan Sertifikat kepada Masyarakat yang tanahnya terkena pelebaran jalan sebagai perhatian Pemerintah Daerah kepada masyarakatnya.

E Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup merupakan urusan pemerintah dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Tujuannya adalah untuk melindungi wilayah dari pencemaran dan kerusakan lingkungan, menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat, menjamin kelestarian ekosistem, menjaga fungsi lingkungan hidup, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam, dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan, serta mengantisipasi isu lingkungan global. Capaian kinerja Urusan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

Tabel 2.47 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Timbulan Sampah Tahunan (ton/hari)	N/A	182,59	184,65	N/A	N/A

Sumber: SIPSN Kementerian Lingkungan Hidup

Timbulan sampah tahunan meningkat dari 182,59 ton/hari pada tahun 2021 menjadi 184,65 ton/hari pada tahun 2022. Maka dari itu, pemerintah harus konsisten dalam menjaga penurunan emisi setiap tahunnya dengan menerapkan pemanfaatan energi yang baru terbarukan dan pembangunan yang ramah lingkungan, serta meningkatkan pengelolaan sampah agar mengurangi dampak pencemaran lingkungan.

F Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Tujuan adalah

memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum melalui dokumen kependudukan dalam setiap peristiwa kependudukan yang dialami penduduk, memudahkan pemerintah dalam mengambil kebijakan dan perencanaan pembangunan, memastikan setiap penduduk memiliki akses terhadap hak-hak mereka seperti kesehatan, pendidikan, dan hak sosial lainnya. Capaian kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 2.48 Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio penduduk ber-KTP (%)	83,36	86,14	87,08	90,94	94,42
Persentase kepemilikan akta kelahiran (%)	34,96	41,09	44,29	47,95	50,81
Rasio pasangan berakte nikah (%)	42,88	53,14	61,71	65,05	68,20

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum melengkapi administrasi kependudukannya sehingga pemerintah perlu mendorong agar masyarakat meregistrasikan dirinya dan memenuhi kelengkapan dokumen administrasi kependudukannya.

G Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan urusan pemerintah dalam mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Hal ini bertujuan untuk mendorong kemandirian masyarakat dan desa dalam aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan dan penguatan kapasitas masyarakat, serta menciptakan pembangunan partisipatif yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan hingga pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

Data pada Kemendes menunjukkan bahwa belum ada desa yang

berstatus mandiri, bahkan masih terdapat 13 desa yang sangat tertinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah perlu melakukan pemerataan pembangunan terutama kepada wilayah yang sangat tertinggal.

H Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dalam pengendalian kuantitas penduduk dan program keluarga berencana melalui rangkaian kegiatan penataan, pembinaan, dan pengendalian program untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas. Pemerintah mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana yang berkualitas, meningkatkan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, melaksanakan advokasi dan edukasi tentang pengendalian penduduk, mengembangkan sistem informasi keluarga yang akurat, serta meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam program KB. Capaian kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

Tabel 2.49 Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Total Fertility Rate (Rata-Rata Anak Per Wanita)	2,92	N/A	2,92	2,74	2,73
Rasio Akseptor KB (%)	69,84	37,06	42,52	56,75	65,70

Sumber: BPS, Siperindu

Total Fertility Rate (TFR) mengalami penurunan dari 2,92 pada tahun 2020 menjadi 2,73 pada tahun 2024. Penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah masih banyak yang belum melaksanakan program KB, di mana pada tahun 2023 hanya sebesar 56,75 persen dari total Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi akseptor KB. Kesadaran PUS dalam melaksanakan program KB perlu ditingkatkan agar pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tapanuli Tengah tidak signifikan.

I Perhubungan

Urusan Perhubungan adalah urusan pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang transportasi dan perhubungan untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuannya adalah menyelenggarakan pelayanan, menjamin keselamatan dan keamanan transportasi, meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas sarana prasarana transportasi, melaksanakan pembinaan teknis, serta mengembangkan sistem transportasi yang efektif dan efisien untuk mendukung mobilitas penduduk, memperlancar arus barang dan jasa, serta meningkatkan pelayanan transportasi yang berkualitas bagi masyarakat. Capaian kinerja Urusan Perhubungan sebagai berikut:

Tabel 2.50 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Konektivitas (%)	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33

Sumber: Dinas Perhubungan

J Komunikasi dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika merupakan urusan pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur digital dan penyediaan akses jaringan telekomunikasi dan internet kepada masyarakat. Capaian kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.51 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Layanan Telekomunikasi (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase rumah tangga dengan akses internet (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

Hasil evaluasi Indeks SPBE menunjukkan peningkatan dari 1,50 poin menjadi 1,87 poin, namun meskipun demikian capaian ini masih berada pada kategori kurang. Hal ini disebabkan oleh masih belum optimalnya infrastruktur digital dan integrasi data antara Perangkat Daerah pada lingkup Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah.

K Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah

Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah merupakan urusan pemerintah dalam pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk

memberdayakan dan meningkatkan daya saing koperasi serta UMKM sebagai pilar utama perekonomian daerah. Tujuannya adalah untuk menciptakan ekosistem usaha yang inklusif, mendorong inovasi, serta meningkatkan kontribusi UMKM terhadap PDRB, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Tabel 2.52 Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Non Pertanian pada Level Kabupaten (%)	50,00	53,00	55,00	56,00	60,00
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

L Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal merupakan urusan pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, meliputi penyusunan kebijakan, regulasi, insentif fiskal/non-fiskal, penyederhanaan perizinan, serta jaminan kepastian hukum dan keamanan bagi investor. Pemerintah juga bertugas membangun infrastruktur pendukung, mempromosikan peluang investasi domestik dan asing, serta mengawasi kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan lingkungan dan sosial. Capaian kinerja Urusan Penanaman Modal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.53 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi Investasi PMDN (Rp miliar)	N/A	86.652,8	318	86.160,6	3.987,48
Realisasi Investasi PMA ($US ribu)	N/A	25,40	35,00	6.893,30	129,84

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Realisasi investasi PMDN meningkat dari Rp 86.652,80 juta pada tahun 2021 menjadi Rp 318.167,10 juta pada tahun 2022, namun menurun pada tahun 2023 menjadi Rp 86.160,60 juta. Sementara, investasi PMA meningkat dari $US 25,40 ribu pada tahun 2021 menjadi US$ 6.893,30 ribu pada tahun 2023. Pemerintah perlu membuat kebijakan dalam memfasilitasi iklim investasi, insentif fiskal, serta pembangunan infrastruktur.

M Kepemudaan dan Olahraga

Urusan Kepemudaan dan Olahraga merupakan urusan pemerintah dalam membentuk generasi muda yang sehat, berdaya saing, dan berkarakter. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengembangkan kebijakan dan program yang mendukung potensi pemuda serta memajukan sektor olahraga. Capaian kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga sebagai berikut:

Tabel 2.54 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional (%)	0	0	0	N/A	N/A
Rasio wirausaha pemuda (%)	N/A	N/A	1,76	1,74	1,75
Cakupan Pelatih yang besertifikasi (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga

N Statistik

Urusan statistik merupakan tulang punggung perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan berbasis data, di mana pemerintah melalui lembaga seperti Badan Pusat Statistik (BPS) bertugas mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyebarluaskan data kependudukan, ekonomi, sosial, serta lingkungan secara akurat dan tepat waktu.

Tabel 2.55 Capaian Kinerja Urusan Statistik

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Statistik (Poin)	N/A	N/A	N/A	N/A	1,90
Buku Kabupaten Dalam Angka (Ada/Tidak Ada)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: BPS

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Tengah selalu memublikasikan buku-buku statistik secara berkala. Kebutuhan data sosial dan ekonomi dapat diakses secara *online* melalui situs BPS.

O Persandian

Urusan persandian merupakan bidang strategis yang bertanggung jawab atas pengamanan informasi rahasia negara melalui teknik enkripsi, pengelolaan sistem kode, dan proteksi komunikasi sensitif dari ancaman

peretasan atau penyadapan.

Tabel 2.56 Capaian Kinerja Urusan Persandian

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat keamanan informasi pemerintah daerah (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

P Kebudayaan

Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan mencakup berbagai aspek pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya bangsa. Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi, mempromosikan, dan mengembangkan kekayaan budaya Indonesia, baik yang bersifat berwujud (*tangible*) maupun tak berwujud (intangible). Urusan ini mencakup pelestarian situs bersejarah, museum, bahasa daerah, seni tradisional, adat istiadat, dan nilai-nilai luhur budaya. Capaian kinerja Urusan Kebudayaan sebagai berikut:

Tabel 2.57 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Perlindungan, Pelestarian dan Pemanfaatan Cagar budaya (Benda dan Tak Benda) (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Pariwisata

Q Perpustakaan

Urusan Perpustakaan merupakan urusan pemerintah yang mencakup berbagai aspek penting dalam upaya meningkatkan literasi dan akses informasi bagi masyarakat. Urusan ini mencakup pengembangan infrastruktur perpustakaan dari tingkat nasional hingga desa, pengadaan dan pengelolaan koleksi, digitalisasi sumber daya, pengembangan sumber daya manusia, promosi literasi, membangun kerjasama antar perpustakaan, menyusun kebijakan dan regulasi yang mendukung, mengembangkan layanan inovatif, memastikan inklusi dan aksesibilitas bagi semua kalangan.

Tabel 2.58 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip

R Kearsipan

Urusan kearsipan merupakan aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang meliputi pengelolaan, penyimpanan, dan pelestarian dokumen-dokumen penting negara. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengembangkan sistem kearsipan yang efisien dan modern, melakukan digitalisasi arsip untuk memudahkan akses dan preservasi jangka panjang, serta menjamin keamanan informasi yang terkandung dalam arsip-arsip tersebut. Selain itu, urusan kearsipan juga mencakup pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang kearsipan, pembangunan infrastruktur penyimpanan arsip yang memadai, serta perumusan kebijakan dan standar dalam pengelolaan arsip.

Tabel 2.59 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip

2.4.6 Layanan Urusan Pilihan

Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan yang terdiri atas pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, transmigrasi, dan kelautan dan perikanan.

A Pariwisata

Urusan pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam pengembangan ekonomi dan sosial budaya yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Ini mencakup perencanaan, pengembangan, dan promosi destinasi wisata, baik yang bersifat alam, budaya, maupun buatan. Pemerintah berperan dalam membangun infrastruktur pendukung pariwisata, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di industri pariwisata, menjaga kelestarian lingkungan dan warisan budaya di lokasi wisata, serta memfasilitasi investasi di Sektor Pariwisata. Kabupaten Tapanuli Tengah dalam hal ini Dinas Pariwisata mendorong untuk pengembangan sektor pariwisata dan peningkatan kualitas kepariwisataan Kabupaten Tapanuli Tengah sehingga dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan

perekonomian daerah yang berkelanjutan, namun penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata tahun 2023 tidak menjadi prioritas dikarenakan kurangnya anggaran sehingga berdampak pada nihilnya objek wisata terbangun dan kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana di objek wisata yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah, semoga di tahun selanjutnya Pemkab Tapanuli Tengah dapat menjadikan sektor pariwisata sebagai prioritas kinerja Pemkab Tapanuli Tengah untuk peningkatan perekonomian daerah yang berkelanjutan

Tabel 2.60 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (orang)	N/A	N/A	11	36	44
Jumlah Tamu Wisatawan Nusantara (orang)	331.206	335.678	371.132	302.210	340.298
Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	7,23	19,22	36,33	29,98	34,13

Sumber: Dinas Pariwisata

Jumlah wisatawan mancanegara mengalami peningkatan setelah Pandemi Covid-19 dari 11 orang pada tahun 2022 menjadi 40 orang pada tahun 2023, wisatawan mancanegara banyak mengunjungi wisata sejarah yaitu makam mahligai dan papan tinggi. Sementara, wisatawan nusantara meningkat dari 331.206 orang pada tahun 2020 menjadi 384.100 orang pada tahun 2023.

B Kelautan dan Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan di Indonesia berfokus pada pengelolaan sumber daya laut dan perikanan secara berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Capaian urusan perikanan sebagai berikut:

Tabel 2.61 Capaian Kinerja Urusan Perikanan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	N/A	N/A	N/A	N/A	4.149.800,00
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	N/A	N/A	N/A	N/A	652,25

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Kabupaten Tapanuli Tengah akan berupaya untuk meningkatkan produksi perikanan melalui fasilitasi nelayan dan pembudidaya dengan sarana dan prasarana perikanan yang modern untuk meningkatkan produksi hasil tangkapannya. Selain itu, hasil perikanan juga akan diolah untuk memberikan nilai tambah pada produk perikanan yang dihasilkan sehingga diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C Pertanian

Pertanian merupakan sektor vital yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan, penyedia lapangan kerja, dan penggerak ekonomi terutama di daerah pedesaan.

Tabel 2.62 Produksi, Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Padi (ton)	41.930,98	52.962,33	48.181,74	48.693,65	47.940,19
Jagung (ton)	2.874,00	114,00	2.524,00	N/A	N/A
Ubi Kayu (ton)	327,00	321,00	233,00	N/A	N/A

Sumber: Dinas Pertanian, BPS

Populasi peternakan Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.63 Populasi Ternak di Kabupaten Tapanuli Tengah

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Sapi	2.736	2.958	2.803	2.925	1.784
Kerbau	10.927	11.638	10.518	10.917	6.581
Kambing	14.488	13.358	11.971	12.804	7.980
Domba	512	977	1.087	1.252	877
Babi	30.316	9.689	6.903	9.158	12.173
Ayam Kampung	435.689	412.674	397.509	407.334	N/A
Ayam Petelur	4.000	2.500	9.500	9.000	N/A
Ayam Pedaging	224.400	292.000	424.000	467.000	N/A
Itik Unggas	14.043	15.612	14.128	9.807	6.972
Itik Manila	9.419	18.177	10.316	11.020	7.073
Burung Puyuh	0	0	3.300	4.000	N/A
Merpati	1.928	2.000	2.320	2.177	N/A
Kelinci	343	104	132	0	N/A

Sumber: Dinas Pertanian, BPS

Capaian kinerja Urusan Pertanian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.64 Capaian Kinerja Urusan Pertanian

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024

Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan (%)	46,18	46,20	46,76	46,80	47,02
Produktivitas tenaga kerja Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (Rp juta/jiwa)	49,98	47,20	61,90	67,94	80,44

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli tengah (Diolah, 2024)

Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan meningkat dari 46,18 persen menjadi 47,02 persen dan produktivitas tenaga kerja dari Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan meningkat dari Rp 49,98 juta per jiwa menjadi Rp 80,44 juta per jiwa selama tahun 2020-2024.

D Energi dan Sumber Daya Mineral

Potensi investasi pertambangan di Kabupaten Tapanuli Tengah meliputi granit, pasir dan sirtu (pasir dan batu), kuarsa, lempung, tras, batu gamping, batu apung, andesit – basal. Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki potensi yang besar untuk bahan galian golongan "C" sehingga memudahkan dalam pelaksanaan konstruksi bangunan yang memerlukan bahan galian tersebut. Kabupaten Tapanuli Tengah juga memiliki potensi bahan galian golongan "A" seperti batubara, uranium, dan timah putih yang membutuhkan eksplorasi lebih lanjut untuk dapat menentukan deposit yang sebenarnya dari potensi bahan tambang tersebut. Untuk bahan tambang jenis batubara di Kabupaten Tapanuli Tengah masih sangat muda sehingga diperlukan waktu yang cukup lama agar batubara tersebut dapat dipakai. Sebaran potensi bahan galian secara umum digambarkan sebagai berikut:

1. Granit: >455.726.250 ton tersebar di Kecamatan Pandan, Kecamatan Sitahuis. Granit dikenal kuat dan tahan lama apabila dibandingkan dengan keramik lainnya. Selain itu, granit juga tidak mudah retak atau pecah meskipun termakan usia dan menghadapi segala cuaca. Selain itu, lantai granit tidak mudah pudar dan cocok digunakan di area-area yang sering terpapar sinar matahari seperti kolam, teras, atau gazebo. Keramik yang berkualitas baik juga tahan lama dan sulit dipecahkan. Bahkan, keramik yang baik dapat bertahan hingga 10-20 tahun lebih jika perawatannya tepat

2. Lempung: ± 31.500.000 ton tersebar di Kecamatan Pandan, Kecamatan Sitahuis, Kecamatan Tapian Nauli, Kecamatan Kolang, Kecamatan Sorkam, Kecamatan Pinangsori. Tanah lempung adalah agregat partikel-partikel yang berukuran mikroskopik dan submikroskopik yang berasal dari pembusukan kimiawi unsur-unsur penyusun bantuan. Tanah lempung memiliki ciri-ciri berupa bersifat plastis, kadar air sedang hingga luas, permeabilitas yang sangat rendah, memiliki ukuran < 0,002 mm, berbutir halus, dan akan mengeras dalam keadaan kering. Tanah lempung umum digunakan dalam kegiatan pembangunan seperti batu bata dan kerajinan gerabah, sebagai wadah untuk dijadikan piring, kendi, guci, kuali, dan sebagainya. Adapun dalam pembangunan, manfaat tanah lempung dikenal untuk pembuatan batu bata.
3. Tras: ± 18.900.000 ton tersebar di Kecamatan Tapian Nauli dan Kecamatan Kolang. Tras disebut pula sebagai pozolan, tergolong bahan galian industri atau golongan C yang cukup banyak mengandung silika amorf yang dapat larut di air atau dalam larutan asam. Tras dapat menjadi pengganti bahan semen setelah dicampur dengan bahan kapur (Lime).
4. Pasir Kuarsa dan Batu Pasir: ± 766.090.000 tersebar di Kecamatan Pandan, Kecamatan Tapian Nauli, Kecamatan Sorkam, Kecamatan Sitahuis, Kecamatan Pinangsori.
5. Sirtu (Pasir dan Batu): > 7.938.750 tersebar di Kecamatan Pandan, Kecamatan Sitahuis, Kecamatan Tapian Nauli, Kecamatan Kolang, Kecamatan Pinangsori, dan lain-lain.

Adapun potensi tambang golongan “B” yang teridentifikasi di Kabupaten Tapanuli Tengah meliputi timbal (Pb), seng (Zn), wolfram (W), niobium (Ni), dan zat radioaktif. Berdasarkan cakupan pelayanan prasarana jaringan listrik di Kabupaten Tapanuli Tengah pada Tahun 2013, terdapat keluarga yang belum mendapatkan fasilitas listrik perdesaan yang tersebar di beberapa kecamatan antara lain Kecamatan Sirandorung, Kecamatan Barus, Kecamatan Pasaribu Tobing, dan Kecamatan Andam Dewi. Di bidang energi,

Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki potensi Tenaga Air (PLTA) dan Tenaga Uap (PLTU).

Ketenagalistrikan di Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri dari:

1. PLTU Batubara Labuan Angin kapasitas 2 x 115 MW.
2. PLTA Sipan Sihaporas kapasitas 50 MW.
3. PLTMH Aek Bontar kapasitas 22 KW.
4. PLTMH Sipakpahi kapasitas 22 KW.
5. PLTS Terpusat Sitardas kapasitas 5 KW.
6. PLTS tersebar di beberapa wilayah desa tertinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai berikut:

Tabel 2.65 Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Porsi EBT dalam Bauran Energi (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Rasio Elektrifikasi (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: PLN, Dinas PUPR

E Perdagangan

Pasar tradisional merupakan wadah utama penjualan produk-produk kebutuhan pokok yang dihasilkan oleh para pelaku ekonomi berskala menengah kecil serta mikro. Mereka adalah para petani, nelayan, pengrajin dan industri rakyat yang sangat menyandarkan hidupnya kepada pasar tradisional. Meskipun harus bersaing dengan pasar modern, pasar tradisional masih tetap menjadi salah satu segmen ekonomi yang sangat diandalkan oleh suatu daerah. Pemerintah daerah yang masih memiliki masyarakat dengan daya beli yang rendah sangat mengandalkan keberadaan pasar tradisional untuk memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, keberadaan pasar tradisional menjadi salah satu bagian yang ikut mempengaruhi perputaran roda perekonomian suatu daerah melalui pajak yang bersumber dari retribusi lapak pedagang dan pungutan parkirnya. Pasar tradisional merupakan pondasi perekonomian masyarakat yang layak untuk dipertahankan eksistensinya dan dikembangkan agar tidak hilang semata

karena hadirnya pasar modern. Tahun 2023 terdapat 23 Pasar yang menyebar di 20 Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, 20 Pasar dikelola oleh Pemerintah Daerah dan 3 Pasar di kelola oleh swasta. Adapun Kondisi 20 Pasar yang dikelola Pemerintah Daerah masih tergolong kurang baik dan belum memenuhi persyaratan SNI dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Tidak adanya biaya pemeliharaan pasar mengakibatkan banyaknya atap pasar yang sudah mengalami kebocoran yang berakibat ketidaknyamanan Pedagang untuk berjualan yang berdampak juga kepada hasil Retribusi Pasar. Revitalisasi Pasar yang membutuhkan anggaran yang besar, dibutuhkan dukungan dana APBN melalui DAK atau Tugas Pembantuan dari Kementerian Perdagangan RI melalui usulan Proposal dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, akan tetapi untuk 3 (tiga) tahun terakhir ini Pembangunan/Revitalisasi Pasar tidak ada di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Capaian kinerja Urusan Perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.66 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pasar tradisional yang tergolong baik (%)	77,25	88,56	89,42	88,00	N/A
Persentase pasar yang memenuhi persyaratan (%)	56,00	65,00	74,00	72,00	N/A

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Persentase pasar tradisional yang tergolong baik meningkat dari 77,25 persen pada tahun 2020 menjadi 89,42 persen pada tahun 2022, namun menurun pada tahun 2023 menjadi 88,00 persen. Begitu juga dengan persentase pasar yang memenuhi persyaratan meningkat dari 56,00 persen pada tahun 2020 menjadi 74,00 persen pada tahun 2022 dan menurun pada tahun 2023 menjadi 72,00 persen. Untuk tahun 2023 tidak ada kegiatan Revitalisasi/ Pembangunan Pasar di Kabupaten Tapanuli Tengah hanya sebatas kegiatan pengelolaan pasar yaitu Monitoring Pasar dan Intensifikasi Retribusi Pasar di 20 Pasar di Kabupaten Tapanuli Tengah. Dalam hal pencapaian target angka ini menggambarkan bahwa capaian tidak sesuai dengan target.

F Perindustrian

Jumlah Usaha Industri (IKM) di Kabupaten Tapanuli Tengah selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 jumlah industri kecil menengah di Kabupaten Tapanuli Tengah berjumlah 2.129 usaha industri meningkat pada tahun 2023 menjadi sebanyak 2.467 usaha industri. Jumlah usaha industri di Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.67 Perkembangan Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Pinangsori	119	121	129	129	N/A
Badiri	105	105	109	110	N/A
Sibabangun	28	28	28	28	N/A
Lumut	21	21	21	21	N/A
Sukabangun	13	13	13	13	N/A
Pandan	607	612	620	629	N/A
Tukka	92	92	96	96	N/A
Sarudik	244	245	250	250	N/A
Tapian Nauli	98	99	100	100	N/A
Sitahuis	29	29	30	30	N/A
Kolang	94	94	94	100	N/A
Sorkam	118	123	137	151	N/A
Sorkam Barat	18	22	26	27	N/A
Pasaribu Tobing	48	50	50	51	N/A
Barus	173	179	180	186	N/A
Sosorgadong	62	62	62	66	N/A
Andam Dewi	55	67	81	88	N/A
Barus Utara	76	77	77	78	N/A
Manduamas	29	29	29	31	N/A
Sirandorung	193	239	260	283	N/A
Total	**2.129**	**2.222**	**2.307**	**2.392**	**N/A**

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Tengah

Capaian kinerja Urusan Perindustrian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.68 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

G Kelautan dan Perikanan

Berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan potensi perikanan laut yang cukup besar adalah dengan pemberdayaan nelayan, peningkatan sarana dan prasarana, bantuan modal dan bimbingan, penetapan kawasan pantai sebagai daerah pengembangan agribisnis berbasis usaha perikanan. Pengembangan komoditas perikanan darat dapat ditempuh melalui usaha penerapan teknologi tepat guna.

Pemanfaatan sawah untuk areal mina padi perlu terus ditingkatkan. Begitu juga dengan pemanfaatan perairan umum, baik melalui usaha budidaya ikan dengan sistem keramba, keramba jaring apung, merupakan alternatif yang dapat dikembangkan mengingat Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai potensi situ atau sungai yang cukup besar. Komoditas yang bisa dikembangkan dengan sistem ini adalah ikan mas, mujair dan nila.

Kegiatan restocking di perairan umum berupa lubuk larangan perlu terus ditingkatkan dengan melibatkan masyarakat sekitar situ atau sungai sebagai pengelola dan pengawas sehingga dapat diatur musim penangkapannya, dan alat yang boleh dioperasikan. Budidaya udang tambak juga merupakan prospek yang cukup bagus untuk dikembangkan di beberapa pantai Kabupaten Tapanuli Tengah, hal ini didukung oleh kondisi perairan yang belum tercemar bila dibandingkan dengan perairan pantai di daerah lain.

Sub sektor perikanan merupakan salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Tapanuli Tengah yang mampu mendorong perekonomian Kabupaten Tapanuli Tengah secara khusus dan Kawasan Pantai Barat Sumatera Utara pada umumnya. Hal ini didukung oleh potensi sumberdaya perikanan dan kelautan di Kawasan Pantai Barat Sumatera Utara yang terdiri dari sumber daya perikanan tangkap, perairan umum maupun budidaya perikanan baik budidaya di air tawar (kolam, sawah), budidaya ikan di air payau (tambak), budidaya ikan di laut maupun budidaya Keramba Jaring Apung (KJA).

Tabel 2.69 Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Kontribusi Sektor Perikanan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
terhadap PDRB (%)					
Nilai Tukar Nelayan (Poin)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (Poin)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Penangkapan Ikan					
a. Laut (ton)	42.321	41.453	41.468	41.468	N/A
b. Perairan Umum (ton)	1.290	1.300	N/A	N/A	N/A
Budidaya					
a. Kolam (ton)	801.271	813.720	345,60	345,60	N/A
b. Sawah (ton)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
c. Tambak (ton)	2.663	12.000	496,4	484,4	N/A
d. Budidaya Laut (ton)	1.210	1.240	N/A	N/A	N/A
e. Keramba Jaring Apung (KJA) (ton)	1.856	1.866	3	3	N/A

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, BPS

2.4.7 Penunjang Urusan

Urusan Penunjang Pemerintahan meliputi berbagai fungsi dan layanan pendukung yang memastikan operasional pemerintahan berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Bidang ini meliputi pengelolaan sumber daya manusia aparatur (seleksi, pelatihan, dan pengembangan kompetensi), administrasi keuangan negara (perencanaan anggaran, pengadaan barang/jasa, dan pelaporan keuangan), serta pengelolaan aset dan logistik pemerintah. Selain itu, urusan ini juga mencakup penyediaan teknologi informasi dan komunikasi (e-government), pengarsipan dokumen negara, dan layanan protokol serta hubungan masyarakat untuk mendukung koordinasi antar lembaga. Tujuannya adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik, sekaligus memastikan bahwa seluruh proses birokrasi mematuhi prinsip-prinsip *good governance*, seperti akuntabilitas, partisipasi, dan kepastian hukum. Dengan dukungan penunjang yang kuat, pemerintah dapat lebih fokus pada pencapaian tujuan pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

A Perencanaan Pembangunan

Urusan perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tapanuli Tengah. Menurut

amanat Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023, diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati dan Pejabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Berdasarkan pada pernyataan tersebut, maka jabatan Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2022–2024 diisi oleh penjabat Bupati sebagai pengganti Bupati yang masa jabatannya sudah berakhir di tahun 2022. Untuk menindaklanjuti amanat Undang–Undang tersebut mengenai penyusunan dokumen perencanaan daerah, maka berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022 menginstruksikan kepada Gubernur, Bupati dan Wali kota agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023–2026 berupa Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2023-2026 yang ditetapkan dengan Perkada.

Tabel 2.70 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Poin)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Peda					
Tersedianya dokumen perencanaan RTRW yang telah ditetapkan dengan Peda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bappeda

Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang lengkap mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, dan RTRW. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah selalu taat dan memiliki seluruh dokumen perencanaan yang dibutuhkan.

B Keuangan

Urusan keuangan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tapanuli Tengah. Untuk mendukung system prosedur pengelolaan keuangan Kabupaten Tapanuli Tengah maka dilaksanakan kegiatan penyusunan system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Tugas utama dari BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu melakukan penyusunan APBD dan P-APBD Kabupaten Tapanuli Tengah dan hal ini telah dilaksanakan walaupun pada beberapa penyusunan APBD tidak tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tapanuli Tengah maka BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah telah melaksanakan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pajak dan Retribusi.

Selain itu BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah juga melakukan pendampingan pengelolaan PBB secara online dengan menghadirkan pendamping dalam pelaksanaan pengelolaan PBB untuk meningkatkan kemampuan aparatur Bidang Pendapatan untuk mengelola PBB.

Tabel 2.71 Capaian Kinerja Urusan Keuangan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan (Level)	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP
Return on Aset (RoA) BUMD (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah

Pemeritnah Kabupaten Tapanuli Tengah akan mengoptimalkan laporan

keuangan daerah, serta melaksanakan digitalisasi sistem pembayaran daerah untuk memberikan data yang lebih akurat. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah akan meningkatkan kualtias tata kelola BUMD sehingga mampu memberikan kontribusi bagi daerah.

C Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Kebutuhan akan peningkatan strata pendidikan menjadi alasan bagi PNS untuk terus melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Tidak hanya melanjutkan ke tingkat Strata 1 tapi juga ke strata 2. Dalam hal ini BKPSDM telah mendata jumlah PNS yang melanjutkan pendidikan ke Strata 1 sebanyak 107 orang. Sementara untuk jumlah PNS yang melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata 2 adalah sebanyak 20 orang.

Tabel 2.72 Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Profesionalitas ASN (Poin)	N/A	N/A	N/A	75,73	62,23
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	70,00	73,00	80,00	97,85	84,57
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural (%)	11,29	9,91	10,73	10,08	10,49

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah

D Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan Pengembangan merupakan pilar penting dalam mendorong inovasi, kemajuan teknologi, dan pembangunan berkelanjutan melalui kegiatan riset ilmiah, pengembangan kebijakan, serta penerapan hasil penelitian untuk memecahkan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Tabel 2.73 Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Riset (% Total Belanja)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase kebijakan berbasis bukti (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Bappeda

E Pengawasan

Pengawasan memastikan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan kebijakan publik.

Pengawasan semakin diperkuat dengan penggunaan teknologi, seperti *big data* dan *artificial intelligence* untuk mendeteksi penyimpangan secara real-time. Tujuannya adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik, sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Dengan pengawasan yang kuat, pemerintah dapat memastikan bahwa sumber daya negara digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Tabel 2.74 Capaian Kinerja Urusan Pengawasan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase tindaklanjut temuan (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Maturitas SPIP (Level)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kapabilitas APIP (Level)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Inspektorat

F Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan fungsi pendukung yang memastikan kelancaran administrasi dan operasional pemerintahan di tingkat daerah, mencakup pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, aset, logistik, dan layanan administrasi umum. Sekretariat daerah bertugas menyelenggarakan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), memfasilitasi rapat-rapat pemerintah daerah, serta menyiapkan dokumen perencanaan dan pelaporan seperti RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah). Selain itu, urusan ini juga meliputi pengelolaan arsip, protokol, dan hubungan masyarakat untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan peran yang strategis, sekretariat daerah menjadi tulang punggung dalam memastikan efektivitas birokrasi, mendukung implementasi kebijakan publik, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 2.75 Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai SAKIP	N/A	C	C	C	CC
Jumlah kerja sama provinsi/kabupaten/ kota kembar/Bersaudara (*Sister Province / Sister City*)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Pan-RB, Tapem

Nilai SAKIP relatif tetap sejak tahun 2021 hingga tahun 2023, yaitu berada pada kategori C. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kinerja akuntabilitas OPD di Kabupaten Tapanuli Tengah masih belum optimal.

2.5 Gambaran Keuangan Daerah

Gambaran keuangan daerah merujuk pada informasi yang mencakup seluruh aspek keuangan suatu pemerintahan daerah. Ini termasuk pendapatan, pengeluaran, aset, dan kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut. Gambaran keuangan ini penting karena memberikan pandangan menyeluruh mengenai kesehatan finansial dan kemampuan fiskal dari daerah tersebut dalam rangka menjalankan dan membiayai roda Pembangunan. Mengelola keuangan daerah yang baik memerlukan pendekatan yang sistematis, transparan, dan akuntabel. Pendekatan proses perencanaan dan anggaran ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan dimanfaatkan dengan efisien dan efektif. Untuk itu prinsip transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah diharapkan untuk memberikan laporan keuangan yang jelas dan terbuka kepada publik, serta memastikan bahwa dana publik digunakan dengan tepat dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan kata lain, keuangan daerah tidak hanya merupakan aspek administratif, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan dan pembangunan masyarakat di tingkat lokal. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan mereka dengan hati-hati dan efisien untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang diinginkan. Dalam mengelola keuangan daerah kita perlu memerhatikan berbagai kondisi yang mampu mempengaruhi keuangan daerah khususnya perkembangan kondisi ekonomi global yang dapat berdampak pada perekonomian nasional dan daerah. Gejolak global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menjadi tantangan berat di hampir semua negara. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menciptakan krisis multidimensi dan menyebabkan kontraksi ekonomi global sebesar 2,8 persen di 2020 yang merupakan resesi terburuk sejak The Great

Depression 1930-an. Memasuki tahun 2021, ekonomi global mengalami pemulihan, namun menguatnya permintaan yang tidak diimbangi dengan kenaikan sisi suplai akibat gangguan rantai pasok menyebabkan peningkatan tekanan inflasi yang direspon dengan kebijakan pengetatan moneter di sejumlah negara maju. Konflik antara Rusia dan Ukraina di awal tahun 2022 semakin memperparah disrupsi sisi suplai, terutama pangan dan energi. Harga-harga komoditas global melonjak tajam sehingga menyebabkan semakin tingginya inflasi di banyak negara hingga mencapai rekor tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Risiko kerawanan pangan dan energi juga meningkat di banyak negara khususnya negara berpendapatan rendah. Pengetatan kebijakan moneter oleh bank sentral di berbagai negara untuk melawan inflasi yang tinggi menjadi semakin agresif, khususnya di Amerika Serikat (AS), yang menyebabkan semakin ketatnya likuiditas global, meningkatnya biaya utang serta gejolak pasar keuangan di banyak negara berkembang. Sebagai akibatnya, pemulihan ekonomi global mengalami perlambatan di tahun 2022 yang diperkirakan hanya tumbuh 3,4 persen, jauh dari perkiraan awal (Januari 2022) yang sebesar 4,4 persen. Lebih parah lagi dalam laporan WEO edisi Januari 2024, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global hanya sebesar 3,1 persen pada 2023 dan 2024. Sedangkan World Bank memprediksi perekonomian global tahun 2024 hanya tumbuh 2,4 persen di mana meskipun inflasi mengalami moderasi atau penurunan, namun belum serta merta menurunkan suku bunga yang melonjak cukup tinggi dalam 18 bulan terakhir. Namun, beberapa negara masih menunjukkan prospek pertumbuhan yang positif, seperti India, Indonesia, dan negara-negara berkembang di Asia Tenggara. Hal ini ditopang oleh konsumsi domestik yang kuat dan permintaan internal yang terus meningkat. Di tengah ekonomi global di tahun 2024 diwarnai dengan pertumbuhan yang melambat dan ketidakpastian yang tinggi, Indonesia masih memiliki peluang untuk tumbuh dengan baik. Ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh 5,2% di tahun 2024, ditopang oleh konsumsi domestik yang kuat dan investasi yang meningkat. Konsumsi masyarakat

maupun konsumsi Pemerintah, serta kebijakan sektor perumahan yang sudah digulirkan Pemerintah pada triwulan IV-2023 akan menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan 2024. Sementara itu, inflasi di Indonesia diperkirakan masih tinggi di awal tahun, namun akan gradually menurun dan stabil seiring dengan kebijakan moneter Bank Indonesia serta dampak dari penyelenggaraan Pemilu 2024 yang kondusif.

Adapun suku bunga Bank Indonesia diperkirakan akan naik secara bertahap untuk mengendalikan inflasi. Di sisi lain Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan ekspor dan menarik investasi asing di tengah melambatnya ekonomi global. Meskipun begitu Indonesia perlu mewaspadai risiko eksternal seperti perlambatan ekonomi global dan gejolak pasar keuangan.

Dalam skala lokal, Ekonomi makro Tapanuli Tengah menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan yang stabil yang didorong oleh sektor-sektor utama seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industry. Sebagai daerah pesisir, sektor perikanan memainkan peran penting dalam ekonomi lokal. Pertanian juga signifikan dengan produksi kelapa sawit, karet, dan kopi. Selain itu dengan keindahan alam seperti pantai, air terjun, dan budaya lokal, pariwisata memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekonomi daerah. Ke depan masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Inflasi di Kabupaten Tapanuli Tengah cukup tinggi yang sangat dipengaruhi oleh biaya transportasi. Sementara infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas umum memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Investasi dalam infrastruktur dapat mendorong perdagangan dan mobilitas penduduk. Investasi dari sektor swasta dan pemerintah adalah kunci untuk pengembangan ekonomi melalui kebijakan ramah investasi agar ekonomi semakin cepat berkembang. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu mengambil berbagai kebijakan dan upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kerjasama dan kolaborasi dengan semua pihak untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.5.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan masa lalu menggambarkan performa keuangan Daerah selama periode 5 (lima) tahun sebelumnya. Analisisnya mencakup berbagai aspek dari laporan keuangan Daerah yang digunakan untuk mengevaluasi kesehatan finansial dan kinerja entitas keuangan Daerah tersebut selama periode waktu 5 (lima) tahun. Kinerja keuangan masa lalu dievaluasi dengan menganalisis data-data historis seperti laporan realisasi keuangan, neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Dari data tersebut, berbagai metrik keuangan dapat dihitung dan dianalisis untuk memberikan gambaran tentang kinerja finansial entitas selama periode waktu 5 (lima) tahun. Sebagai tahap awal dalam menganalisis kinerja keuangan daerah pada masa-masa lalu perlu diketahui kemampuan kemandirian pendanaan pembangunan pemerintahan daerah selama ini. Derajat kemandirian fiskal mengacu pada tingkat kemandirian atau independensi pemerintahan daerah dalam mengelola keuangan dan anggarannya tanpa terlalu bergantung pada sumber pendapatan dari luar khususnya provinsi dan nasional. Dalam konteks pemerintahan daerah, ini sering kali mengacu pada kemampuan suatu pemerintah untuk menghasilkan pendapatan yang cukup dari sumber-sumber dalam Daerah seperti pajak, cukai, dan sumber-sumber lainnya sehingga tidak perlu terlalu bergantung pada bantuan atau transfer dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau sumber pendapatan luar lainnya. Semakin tinggi derajat kemandirian fiskal maka semakin mandiri atau independen keuangan mereka. Hal ini dianggap penting karena tingkat kemandirian fiskal yang tinggi dapat memberikan stabilitas dan keberlanjutan finansial bagi Pemerintahan Daerah, mengurangi risiko ketergantungan pada pihak lain yang mungkin memiliki kepentingan politik atau ekonomi yang berbeda. Adapun klasifikasi DOFD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.76 Skala Interval Otonomi Fiskal

Derajat Otonomi Fiskal (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00-10,00	Sangat Kurang Baik

10,01-20,00	Kurang Baik
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Kondisi kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan DOFD dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) mengalami fluktuasi dengan tren cenderung menurun yang menunjukkan tingkat kemandirian fiskal daerah semakin tidak baik. Di tahun 2020 DOFD Kabupaten Tapanuli Tengah mencapai 7,38% dan menurun hingga mencapai 6,65% di tahun 2023, lalu meningkat pada tahun 2023 menjadi 7,34%. Penurunan DOFD tersebut dipengaruhi oleh relatif menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dalam kurun waktu 2020-2022. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kemandirian fiskal Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah bergerak negatif dengan kategori 'Sangat Kurang" dari tahun 2020-2024. Agar tingkat kemandirian fiskal ke depan bisa meningkat maka Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah perlu menjaga konsistensi tumbuhnya PAD dengan terus menggali sumber-sumber keuangan daerahnya dengan cara yang lebih inovatif. Adapun perkembangan DOFD Kabupaten Tapanuli Tengah periode tahun 2020-2024, dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.77 Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, Tahun 2020-2024(Rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan	Persentase
2020	87.469.317.632,21	1.185.787.162.520,21	7,38
2021	84.353.108.262,39	1.161.137.921.202,39	7,26
2022	75.219.924.030,34	1.170.402.645.656,34	6,43
2023	79.065.197.857,00	1.188.605.039.527,00	6,65
2024	91.783.121.632,84	1.250.677.757.636,84	7,34

Sumber: BPKAD Kabupaten Tapanuli Tengah

2.5.2 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja keuangan daerah diukur dari kinerja pelaksanaan APBD. Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengacu pada sejauh mana pemerintah daerah berhasil menjalankan anggaran yang

telah disetujui dalam APBD. Kinerja ini dapat dinilai dari beberapa aspek, termasuk efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam penggunaan dana publik. Kinerja pelaksanaan APBD yang baik menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan manajerial yang baik dalam mengelola keuangan publik, serta mampu memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara efektif dan efisien. Untuk itu kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Tapanuli Tengah akan dilihat dari kinerja Pendapatan Daerah, kinerja Belanja Daerah, dan kinerja Pembiayaan Daerah.

Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

A Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

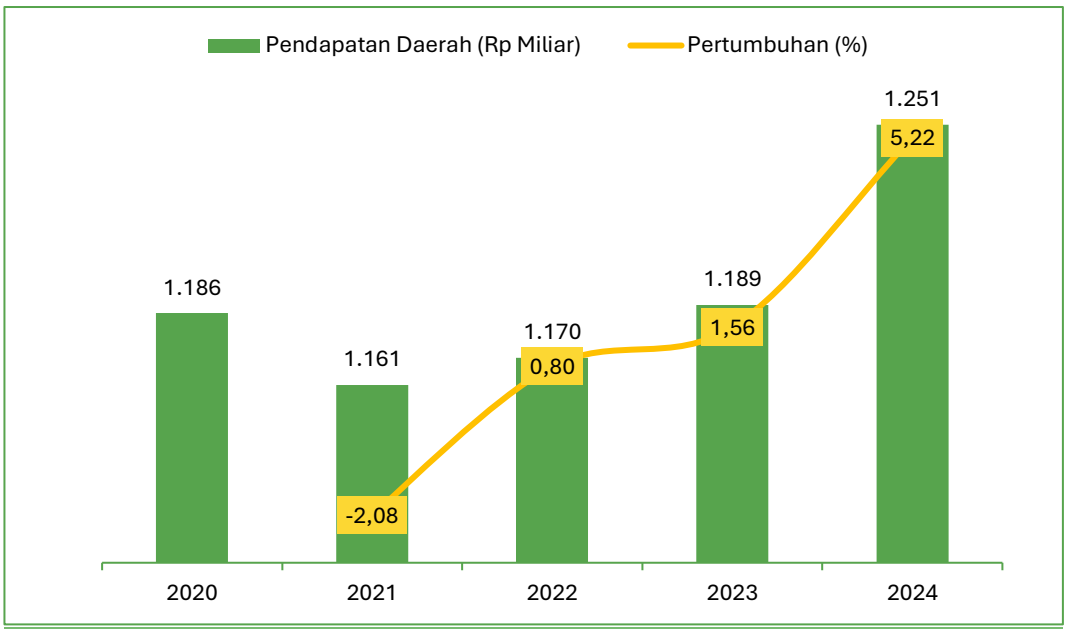
Kebijakan pendapatan daerah perlu diterjemahkan melalui serangkaian langkah atau strategi yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan yang diperolehnya dari berbagai sumber, termasuk pajak, retribusi, dana perimbangan dari pemerintah pusat, hasil investasi, dan lain sebagainya.

Berdasarkan PP No. 12 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, strukur pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah Yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;

2. Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa); dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan);
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Pendapatan Lainnya.



Gambar 2.39 Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2024

Sumber: BPKAD Kabupaten Tapanuli Tengah

Dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir perkembangan Pendapatan Kabupaten Tapanuli Tengah terus mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan mencapai 1,34% di mana Pendapatan tahun 2020 mencapai Rp 1,206 triliun menjadi Rp 1,251 triliun di tahun 2024 yang terutama didorong oleh menurunnya Lain-lain Pendapatan yang Sah dan PAD.



Gambar 2.40 Perkembangan Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2024

Sumber: BPKAD Kabupaten Tapanuli Tengah

Jika dilihat lebih dalam pada komponen Pendapatan Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024), terlihat bahwa baik Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,21% per tahun dan Pendapatan Transfer meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,55% per tahun, sementara Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penurunan sebesar 29,41% per tahun.

1. Pendapatan Asli Daerah

   Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi 4 (empat) yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah, dan Lain-lain PAD yang Sah.

   a. Pajak daerah

      Sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan pemerintah kabupaten meliputi: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Perkembangan pajak Daerah

mengalami tren positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,41% dari Rp 18,988 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 25,272 miliar pada tahun 2024. Rata-rata pertumbuhan pajak tersebut terutama didorong oleh Pajak Penerangan Jalan, PBB dan BPHTB, sementara kontribusi pajak lainnya masih relatif kecil. Untuk lebih mengoptimalkan PAD dari Pajak Daerah ke depan selain melalui optimalisasi pungutan pajak seperti pajak hotel, pajak restoran, dan optimalisasi opsen PKN dan BBNPKB.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah memungut retribusi jasa umum yang terdiri atas retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi dan/atau penyedotan kakus, retribusi pelayanan tera/tera ulang serta retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Retribusi daerah yang termasuk Retribusi Jasa Usaha yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, serta Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin trayek serta retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (MTA).

Pendapatan retribusi di Kabupaten Tapanuli Tengah mengalami tren menurun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11,63% per tahun dari Rp 1,609 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 2,499 miliar pada tahun 2024. Oleh karena itu untuk lebih mengoptimalkan PAD retribusi ke depan, perlu dilakukan optimalisasi sumber retribusi bisa

berupa biaya layanan seperti retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, parkir, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pemakaian kendaraan bermotor, dan retribusi persetujuan bangunan Gedung atau pelayanan lainnya yang diberikan oleh pemerintah daerah.

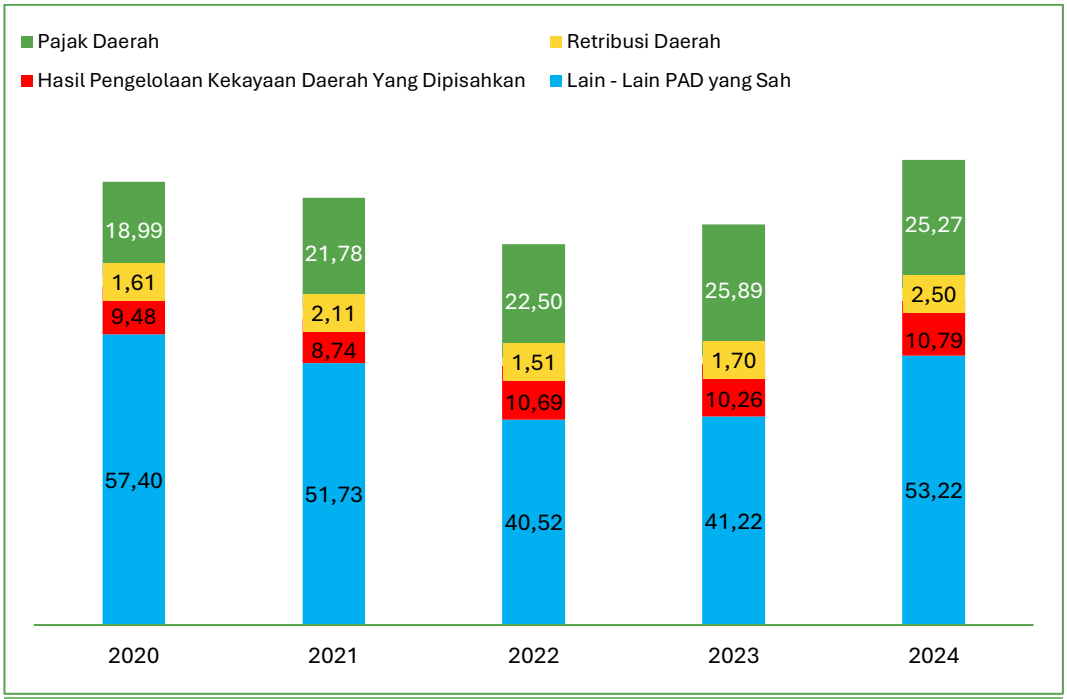
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Perkembangan pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami tren menurun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,30% per tahun dari Rp 9,475 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 10,790 miliar pada tahun 2024 akibat menurunnya deviden BUMD khususnya Lembaga keuangan. Untuk meningkatkannya ke depan maka diperlukan optimalisasi manajemen pengelolaan dan menjalin kerja sama dengan mitra usaha.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan signifikan dengan rata-rata penurunan sebesar 1,87% per tahun dari Rp 57,396 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 53,220 miliar pada tahun 2024 khususnya akibat menurunnya pendapatan BLUD dari jasa layanan. Untuk meningkatkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ke depan maka diperlukan pengawasan dan penguatan kinerja BLUD.

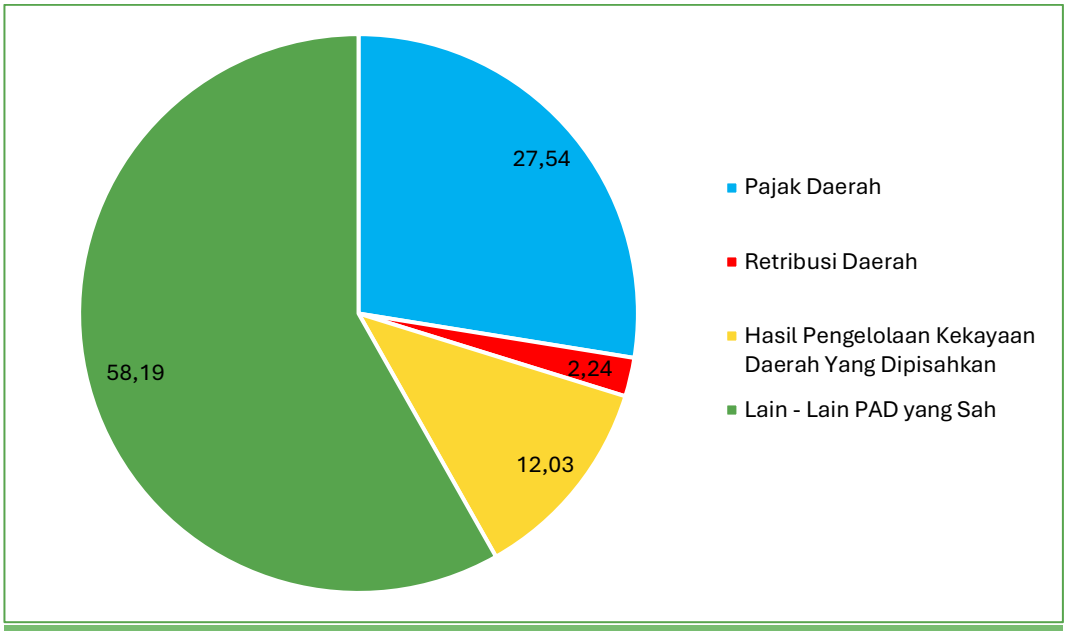
Secara nominal, keseluruhan komposisi struktur PAD dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.41 Perkembangan Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2024(Rp Miliar)

Sumber: BPKAD Kabupaten Tapanuli Tengah

Jika dilihat berdasarkan kontribusinya, seperti kita ketahui bahwa Lain-lain PAD yang Sah dan Pendapatan Pajak Daerah memiliki kontribusi terbesar dalam pembentukan PAD Kabupaten Tapanuli Tengah. Secara rata-rata kontribusi Lain-lain PAD yang Sah dalam 5 (lima) tahun terakhir mencapai 58,19% per tahun terutama dari BLUD, kemudian Pendapatan Pajak Daerah berkontribusi rata-rata 27,54% per tahun, berikutnya Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan kontribusinya sebesar 12,03% per tahun, dan terakhir Hasil-Hasil Retribusi Daerah kontribusinya sebesar 2,24% per tahun. Berdasarkan hal tersebut, untuk menguatkan kemandirian daerah maka penerimaan Lain-lain PAD yang Sah dan Pendapatan Pajak Daerah perlu lebih dikuatkan dengan disertai penggalian sumber-sumber potensial untuk mengakselerasi penerimaan dari Hasil Retribusi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

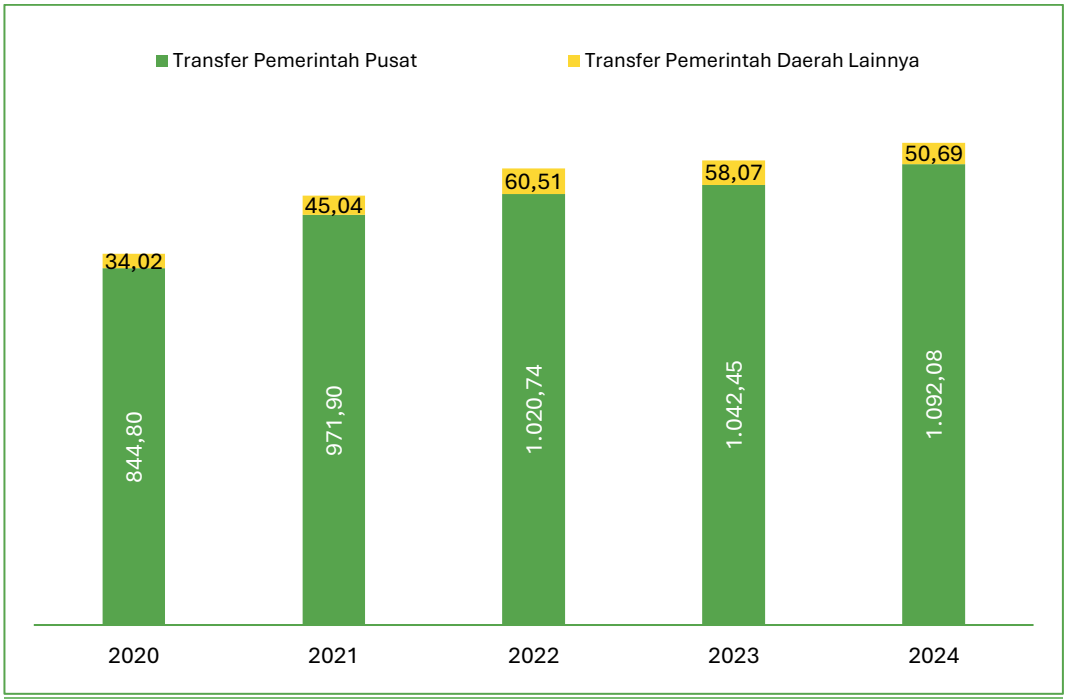


Gambar 2.42 Rata-Rata Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2024 (%)

Sumber: BPKAD Kabupaten Tapanuli Tengah

2. Pendapatan Transfer

   Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari: Dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa. Sementara transfer antar-daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

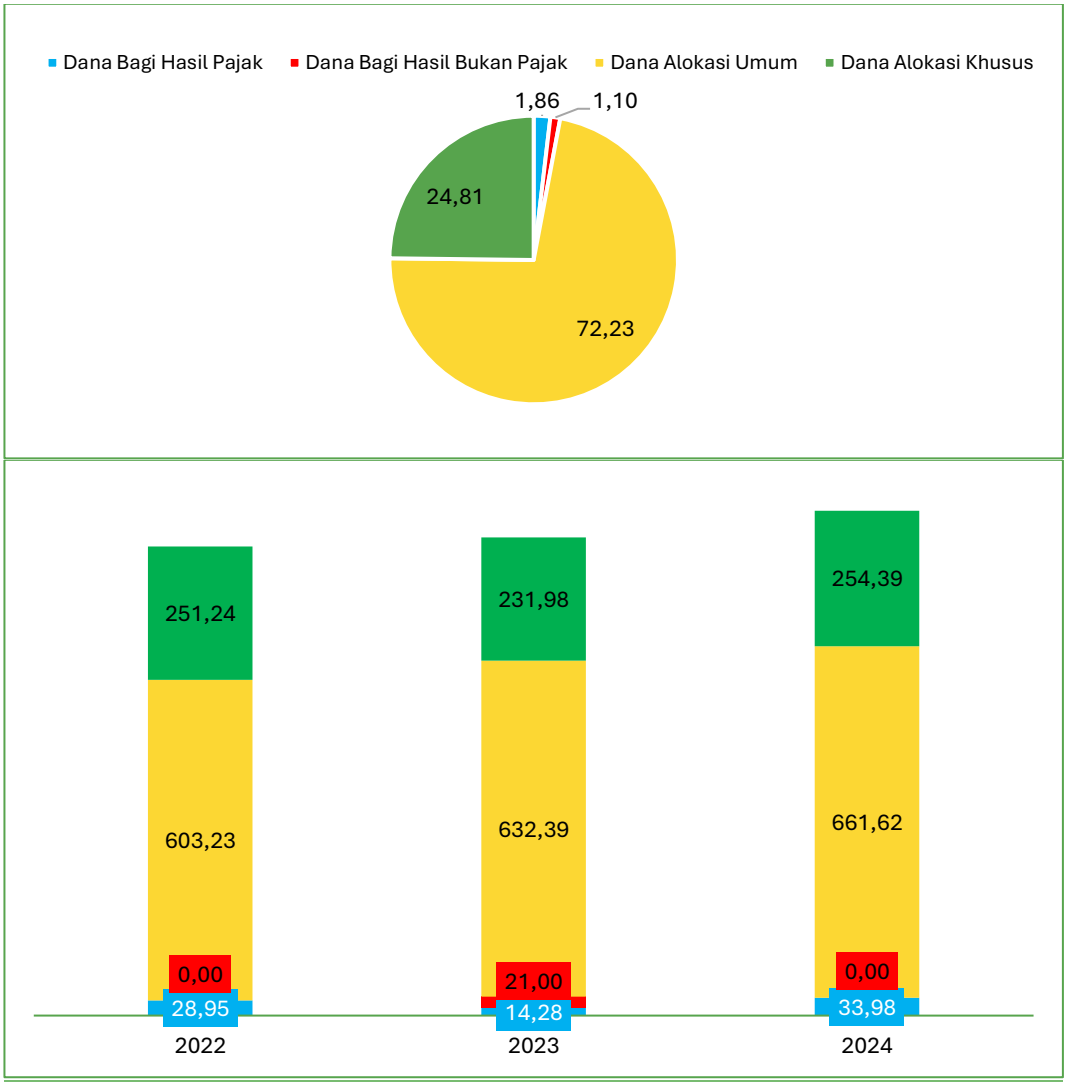


Gambar 2.43 Komponen Pendapatan Transfer Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2024 (Rp Miliar)

Sumber: BPKAD Kabupaten Tapanuli Tengah

Dalam 5 (lima) tahun terakhir pendapatan transfer Kabupaten Tapanuli Tengah mengalami tren meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,63% per tahun dari Rp 844,80 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp 1,092 triliun pada tahun 2024. Jika dilihat rata-rata kontribusinya maka rata-rata 92,40% Pendapatan Transfer disumbang oleh Transfer Pemerintah Pusat. Transfer Pemerintah Pusat menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, nilai transfer ini berada di angka Rp 844,80 miliar, dan mengalami kenaikan bertahap menjadi Rp 971,90 miliar pada 2021, Rp 1.020,74 miliar pada 2022, Rp 1.042,45 miliar pada 2023, dan mencapai puncaknya di Rp 1.092,08 miliar pada 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya upaya berkelanjutan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan alokasi dana, kemungkinan untuk mendukung program pembangunan atau kebutuhan daerah. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya menunjukkan fluktuasi yang lebih signifikan. Pada tahun 2020, nilai transfer ini hanya Rp 34,02 miliar, namun melonjak tajam menjadi Rp 45,04 miliar pada 2021 dan mencapai

puncak Rp 60,51 miliar pada 2022. Setelah itu, terjadi penurunan menjadi Rp 58,07 miliar pada 2023 dan sedikit menurun lagi menjadi Rp 50,69 miliar pada 2024. Fluktuasi ini mungkin mencerminkan kebijakan alokasi dana yang disesuaikan dengan kebutuhan atau prioritas tertentu di daerah lain, yang berbeda dari pola stabil Transfer Pemerintah Pusat.



Gambar 2.44 Rata-Rata Kontribusi dan Komposisi Dana Perimbangan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022-2024 (Rp Miliar)

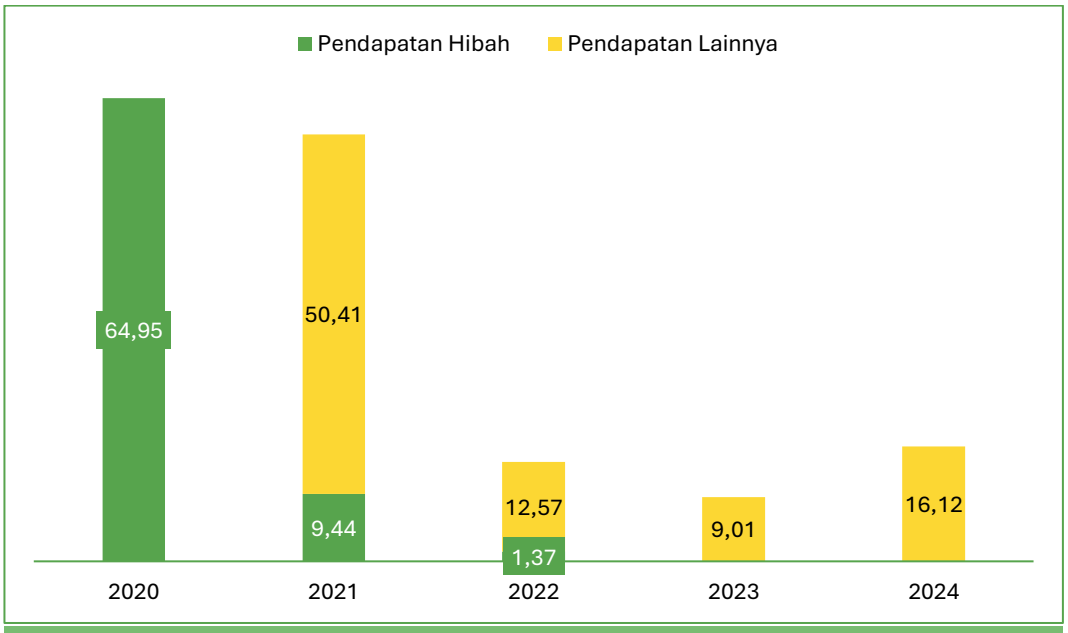
Sumber: BPKAD Kabupaten Tapanuli Tengah

Perkembangan Dana Perimbangan sendiri dalam 5 (lima) tahun terakhir telah tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,98 % dari Rp 844,796 miliar di tahun 2020 menjadi Rp 949,980 miliar di tahun 2024 dan di antaranya terjadi penurunan di tahun 2021 (Rp 829,271 miliar) sebagai dampak Covid-19. Dari komponen pembentuk Dana Perimbangan itu

sendiri tren Dana Bagi Hasil Pajak, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami tren relatif meningkat dimana secara berturut-turut tren peningkatannya sebesar 8,34%, 4,73% dan 0,63%. DAU masih menjadi kontributor terbesar Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dengan rata-rata kontribusi sebesar 72,23% kemudian DAK sebesar 24,81% dan sisanya dari DBH Pajak/Bukan Pajak Sebesar 2,96%. Melihat komposisi ini Keuangan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah cukup rentan sehingga memerlukan efisiensi dan efektivitas kebijakan Belanja Daerah yang besar kecilnya sangat tergantung pada Dana Transfer khususnya DAU.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.



Gambar 2.45 Struktur Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2024 (Rp Miliar)

Sumber: BPKAD Kabupaten Tapanuli Tengah

Dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) perkembangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencatatkan penurunan yang cukup signifikan dari Rp 64,947 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 16,124 miliar pada tahun 2024 atau rata-rata menurun sebesar 29,41% per tahun. Pencapaian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tertinggi diperoleh

pada tahun 2020 yang sebesar Rp 64,947 miliar dan kemudian terus menurun secara konsisten. Jika dilihat lebih dalam pada 5 (lima) tahun terakhir kecuali tahun 2023 sebagian besar sumber Lain-lain pendapatan daerah yang sah diperoleh dari pendapatan hibah yang nilainya menurun menjadi Rp 1,369 miliar pada tahun 2022 dan terakhir tahun 2023 tidak mendapat penerimaan dari pendapatan hibah. Sementara itu, sumber Pendapatan Lainnya meskipun trennya menurun sebesar 31,61% menggantikan Pendapatan Hibah sebagai sumber utama Lain-lain Pendapatan yang Sah, di mana pada tahun 2022 diperoleh sebesar Rp 12,57 miliar cenderung meningkat pada tahun 2024 menjadi sebesar Rp 16,12 miliar. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pendapatan hibah dan Pendapatan Lainnya secara bergantian merupakan penyumbang terbesar dan yang paling mempengaruhi baik turunnya Lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Jika dilihat dari perkembangan Pendapat Daerah dalam lima tahun terakhir maka beberapa kebijakan yang bisa diimplementasikan dalam mengelola pendapatan daerah:

1. Peningkatan Efisiensi: Pemerintah daerah dapat mengimplementasikan kebijakan untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya sehingga dapat menghasilkan lebih banyak pendapatan dengan biaya yang lebih rendah.
2. Diversifikasi Pendapatan: Upaya untuk mencari sumber pendapatan tambahan di luar pajak dan retribusi, seperti pengembangan aset daerah, kerja sama dengan sektor swasta, atau pendapatan dari investasi.
3. Pembangunan Infrastruktur: Investasi dalam infrastruktur yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah dapat menghasilkan pendapatan tambahan dalam jangka panjang melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan nilai properti.
4. Pengelolaan Utang: Manajemen utang yang baik dapat membantu pemerintah daerah memperoleh sumber pendapatan tambahan melalui

pinjaman yang diinvestasikan dalam proyek-proyek yang menghasilkan pendapatan.

5. Optimalisasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK): Memastikan penggunaan dana perimbangan dari pemerintah pusat sesuai dengan peruntukannya, serta mengoptimalkan penggunaan dana tersebut untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
6. Pengembangan Sektor Ekonomi: Mendorong pertumbuhan sektor ekonomi yang potensial di daerah, seperti pariwisata, pertanian, atau industri lokal, yang dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan penerimaan lainnya.
7. Transparansi dan Akuntabilitas: Memastikan transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah serta akuntabilitas dalam penggunaannya agar masyarakat dapat memonitor dan mengawasi penggunaan pendapatan tersebut secara efektif.
8. Kebijakan pendapatan daerah haruslah seimbang antara memastikan keberlanjutan keuangan pemerintah daerah dan memperhatikan keadilan serta kepentingan masyarakat dalam penggunaan dan penyaluran pendapatan tersebut.

Secara keseluruhan perkembangan pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.78 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2024 (dalam Rp)

No	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	**Pendapatan Asli Daerah**	**87.469.317.632,21**	**84.353.108.262,39**	**75.219.924.030,34**	**79.065.197.857,00**	**91.783.121.632,84**	**1,21**
1.1	Pajak Daerah	18.988.067.250,00	21.778.783.997,00	22.497.399.995,00	25.892.126.582,00	25.272.424.698,00	7,41
1.2	Retribusi Daerah	1.609.791.600,00	2.107.703.613,00	1.512.863.122,00	1.697.432.000,00	2.499.934.720,00	11,63
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.475.069.950,00	8.736.247.710,00	10.690.310.898,79	10.258.065.683,00	10.790.167.987,39	3,30
1.4	Lain - Lain PAD yang Sah	57.396.388.832,21	51.730.372.942,39	40.519.350.014,55	41.217.573.592,00	53.220.594.227,45	-1,87
2	**Pendapatan Transfer**	**1.033.370.841.373,00**	**1.016.941.042.886,00**	**1.081.248.050.473,00**	**1.100.529.446.315,00**	**1.142.770.433.109,00**	**0,85**
2.1	**Transfer Pemerintah Pusat**	**844.796.945.351,00**	**971.901.728.050,00**	**1.020.735.847.193,00**	**1.042.454.851.618,00**	**1.092.076.732.416,00**	6,63
2.1.1	**Dana Perimbangan**	844.796.945.351,00	971.901.728.050,00	883.412.530.193,00	899.665.373.618,00	949.980.765.416,00	**1,02**
2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak			28.948.050.143,00	14.284.552.177,00	33.975.341.000,00	8,34
2.1.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak				21.002.038.286,00		
2.1.1.3	Dana Alokasi Umum			603.228.847.000,00	632.394.053.000,00	661.616.467.747,00	4,73
2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus			251.235.633.050,00	231.984.730.155,00	254.388.956.669,00	0,63
2.1.2	**Transfer Pemerintah Pusat Lainnya**	154.553.399.600,00	0,00	137.323.317.000,00	142.789.478.000,00	142.095.967.000,00	-2,08
2.1.2.1	**Dana Otonomi Khusus**						
2.1.2.2	**Dana Insentif Daerah**			3.027.708.000,00			
2.1.2.3	**Dana Desa**			134.295.609.000,00	142.789.478.000,00	142.095.967.000,00	2,86
2.2	**Transfer Pemerintah Daerah Lainnya**	34.020.496.422,00	45.039.314.836,00	60.512.203.280,00	58.074.594.697,00	50.693.700.693,00	10,49
2.2.1	**Pendapatan Bagi**	34.020.496.422,00	45.039.314.836,00	48.626.292.143,00	54.161.743.097,00	50.693.700.693,00	10,49

No	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Hasil						
2.2.2	**Bantuan Keuangan**	0,00	0,00	11.885.911.137,00	3.912.851.600,00		-67,08
2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi			11.885.911.137,00			
2,2,2,2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota				3.912.851.600,00		
3	**Lain - lain Pendapatan daerah yang Sah**	**64.947.003.515,00**	**59.843.770.054,00**	**13.934.671.153,00**	**9.010.395.355,00**	**16.124.202.895,00**	**-29,41**
3.1	Pendapatan Hibah	64.947.003.515,00	9.436.622.908,00	1.368.525.818,00			-85,48
3.2	Pendapatan Dana Darurat						
3.3	Pendapatan Lainnya		50.407.147.146,00	12.566.145.335,00	9.010.395.355,00	16.124.202.895,00	-31,61
	Total	**1.185.787.162.520,21**	**1.161.137.921.202,39**	**1.170.402.645.656,34**	**1.188.605.039.527,00**	**1.250.677.757.636,84**	**1,34**

B Belanja

Belanja secara umum adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan berdasarkan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahkan sesuai amanat Pasal 50 ayat (2) jika daerah tidak memenuhi alokasi belanja sesuai kewenangannya maka dapat ditunda dan/atau dipotong dana transfer umum dari pemerintah pusat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri dari:

1. Belanja operasi

   Merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

2. Belanja modal

   Merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

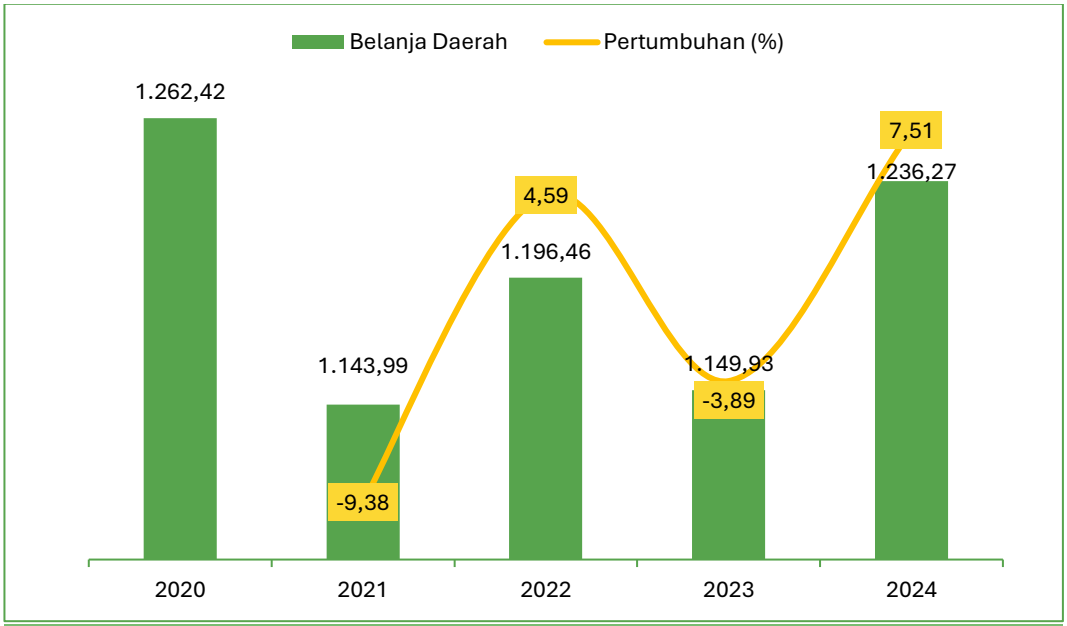
3. Belanja tidak terduga

   Merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi

sebelumnya.

4. Belanja transfer

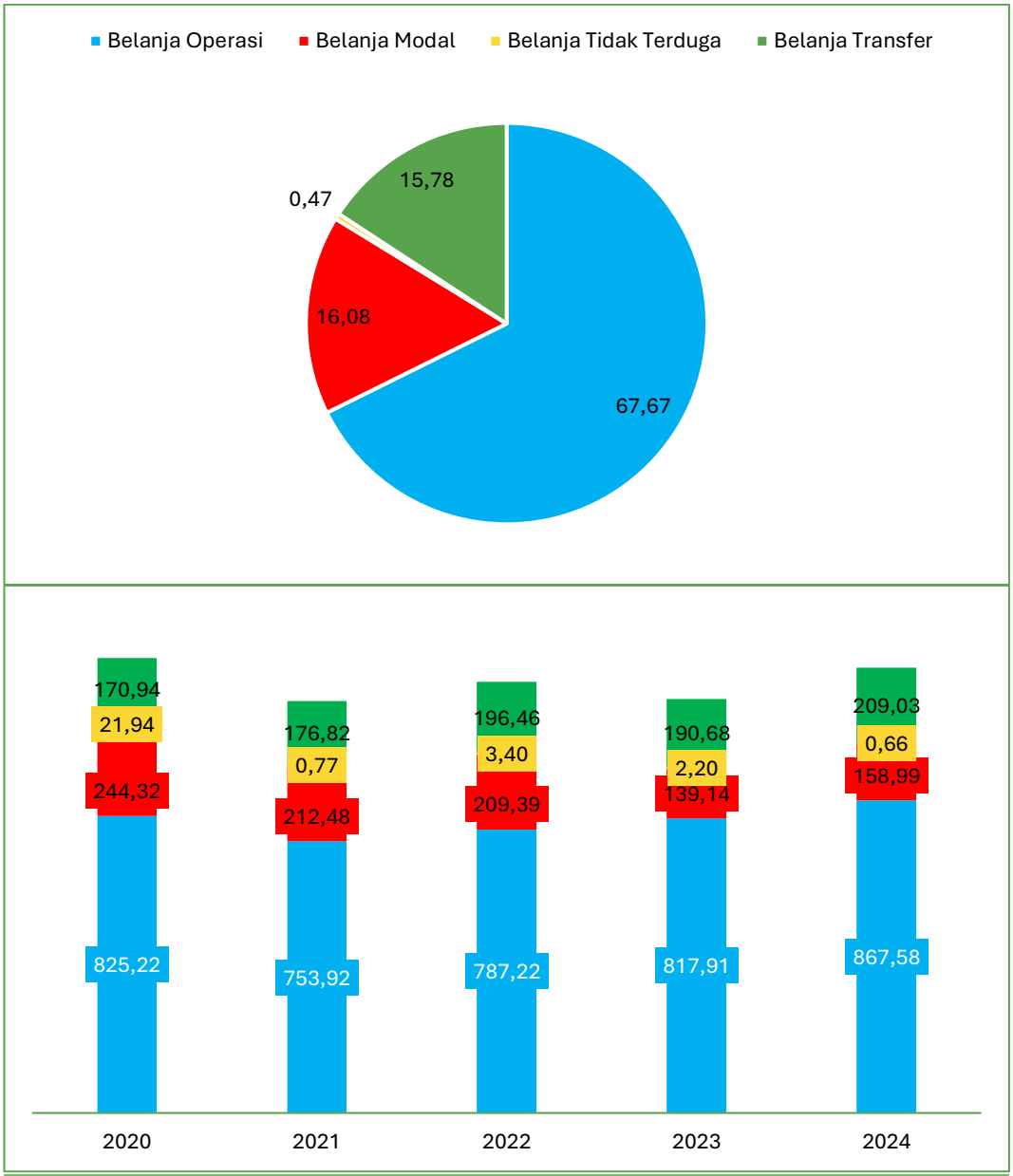
   Merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.



Gambar 2.46 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2024 (Rp Miliar)

Sumber: BPKAD Kabupaten Tapanuli Tengah

Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024) mengalami fluktuasi namun trennya menurun dengan rata-rata penurunannya sebesar 0,52% per tahun. Fluktuasi Belanja Daerah terjadi di tahun 2021 dan 2023 di mana realisasi Belanja Daerah pada tahun 2021 sebesar Rp 1,143 triliun dan kemudian meningkat hingga mencapai Rp 1,196 triliun di tahun 2022, kemudian menurun kembali pada tahun 2023 menjadi Rp 1,149 triliun, dan pada tahun 2024 mencapai Rp 1,236 triliun. Adapun fluktuasi di tahun 2021 karena adanya pandemi Covid-19 di tahun 2021 sehingga belanja daerah mengalami penurunan. Sementara, fluktuasi tahun 2023 lebih disebabkan kurang terserapnya anggaran belanja daerah khususnya belanja publik khususnya yang berbentuk belanja modal.



Gambar 2.47 Rata-rata Struktur dan Komponen Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2024

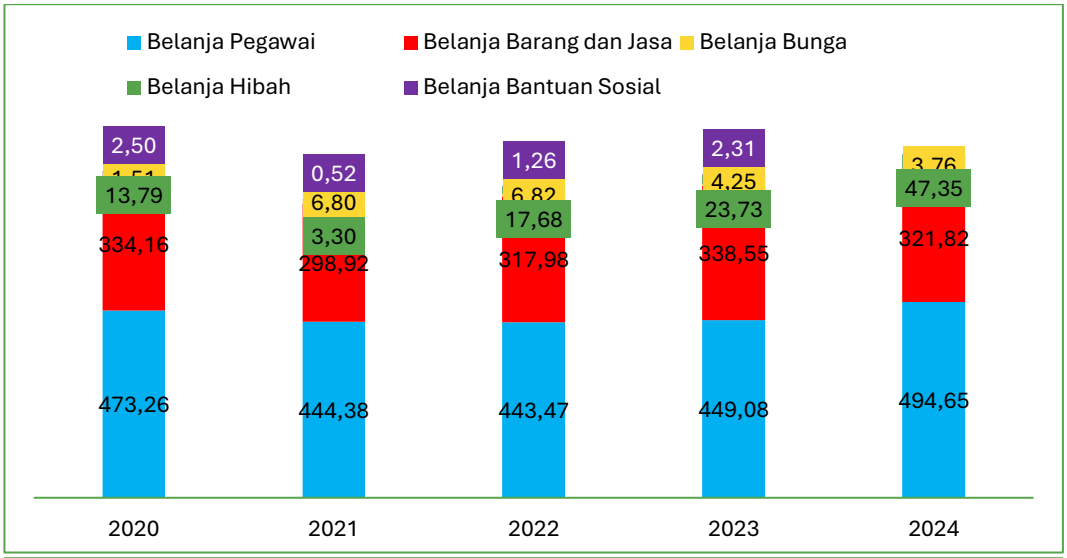
Sumber: BPKAD Kabupaten Tapanuli Tengah

Jika dilihat lebih rinci, Jenis belanja daerah yang mengalami pertumbuhan secara rata-rata, yaitu Belanja Transfer sebesar 5,16% per tahun dan Belanja Operasi sebesar 1,26% per tahun. Sementara, jenis belanja daerah yang mengalami penurunan adalah Belanja Tak Terduga yang mengalami penurunan cukup signifikan sebesar 58,35% per tahun, kemudian Belanja Modal yang menurun dengan rata-rata penurunan sebesar 10,18% per tahun. Jika dilihat dari komposisinya dalam 5 (lima) tahun terakhir maka

terlihat bahwa rata-rata 6767% Belanja Daerah digunakan untuk belanja operasi, kemudian 16,08% digunakan untuk belanja modal, 15,78% digunakan untuk belanja transfer dan kurang dari 0,47% digunakan untuk belanja tidak terduga.

1. Belanja Operasi

   Dalam 5 (lima) tahun terakhir belanja operasi Kabupaten Tapanuli Tengah mengalami peningkatan 1,26 % per tahun dari Rp 825 miliar (2020) menjadi Rp 867 miliar (2024). Sebagian besar atau lebih dari separuh belanja operasi yang ada digunakan untuk belanja pegawai kemudian digunakan untuk belanja barang dan jasa. Jika dilihat perkembangannya, proporsi belanja pegawai terbesar terjadi di tahun 2021 yaitu sebesar 58,94% dari total belanja operasi yang ada, kemudian terus ditekan hingga mencapai 54,91% di tahun 2023, namun kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 57,01%. Proporsi belanja barang dan jasa proporsinya relatif meningkat dari 40,49% pada tahun 2024 menjadi 41,39% pada tahun 2023, namun menurun pada tahun 2024 menjadi 37,09%. Sementara belanja operasi lainnya (belanja hibah dan bantuan sosial) proporsinya tidak pernah lebih dari 4% dan tertinggi terjadi di tahun 2024 yang mencapai 5,46%.



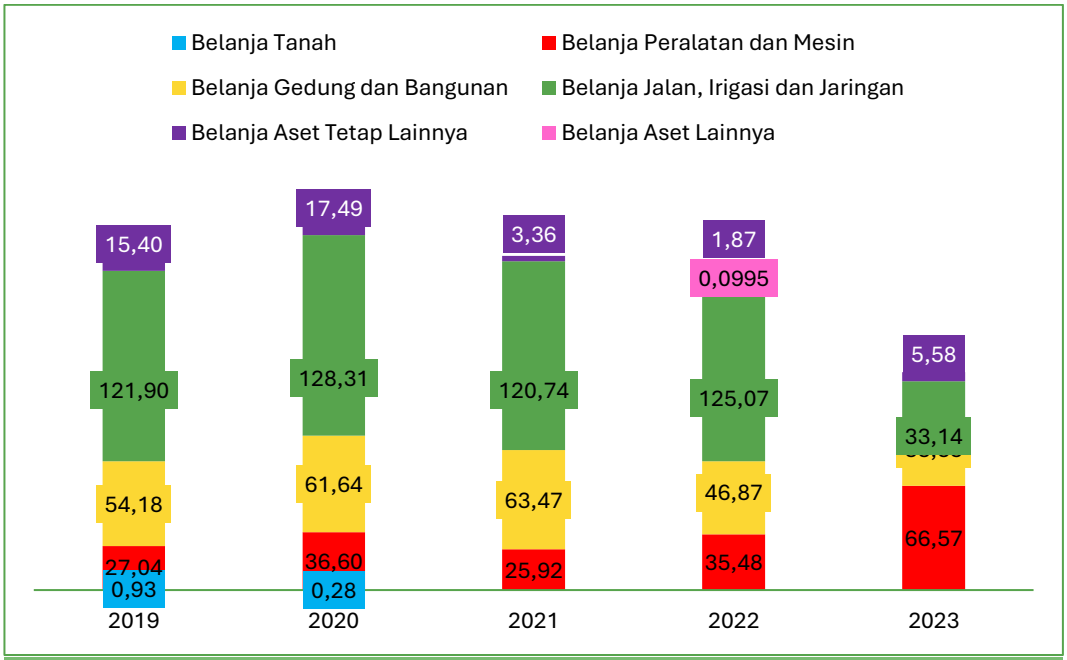
Gambar 2.48 Struktur Belanja Operasi Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2024

Sumber: BPKAD Kabupaten Tapanuli Tengah

Secara proporsi belanja pegawai terus menurun dan secara nominal nilainya mengalami fluktuasi dari Rp 473,26 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 494,65 miliar pada tahun 2024. Belanja Pegawai dari tahun 2022-2023 mengalami penurunan secara proposi namun secara nominal mengalami peningkatan. Peningkatan nominal belanja pegawai ini perlu menjadi perhatian agar ke depan tidak mengganggu alokasi proporsi dan kualitas belanja publik khususnya yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

2. Belanja Modal

   Dalam 5 (lima) tahun terakhir belanja modal Kabupaten Tapanuli Tengah mengalami tren menurun, yaitu sebesar 10,18% per tahun dari Rp 244,32 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 158,99 miliar pada tahun 2024. Menurunnya belanja modal tersebut disebabkan oleh menurunnya Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar 24,68% per tahun, kemudian Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan mengalami penurunan sebesar 15,01% per tahun dari Rp 17,49 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 5,63 miliar pada tahun 2024, lalu Belanja Bangunan dan Gedung mengalami penurunan sebesar 5,99% per tahun dari Rp 61,64 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 48,15 miliar pada tahun 2024. Sementara itu, Belanja Peralatan dan Mesin mengalami peningkatan, yaitu sebesar 1,13% per tahun dari Rp 36,60 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 38,28 miliar pada tahun 2024.



Gambar 2.49 Struktur Belanja Modal Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2024

Sumber: BPKAD Kabupaten Tapanuli Tengah

Dalam rangka mendorong perekonomian daerah maka struktur alokasi belanja modal masih perlu mendapatkan penguatan dari sisi besaran anggaran khususnya belanja modal untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, air minum, dan sistem transportasi umum yang dapat meningkatkan konektivitas dan efisiensi logistik, serta membuka peluang investasi dan perdagangan. Begitu juga dengan belanja peralatan dan mesin dalam rangka peningkatan produktivitas melalui teknologi dan inovasi yang dapat meningkatkan produktivitas di berbagai sektor ekonomi, memungkinkan untuk lebih efisien dan bersaing di pasar global. Selain itu Belanja modal dapat diarahkan ke daerah tertentu untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah yang kurang berkembang.

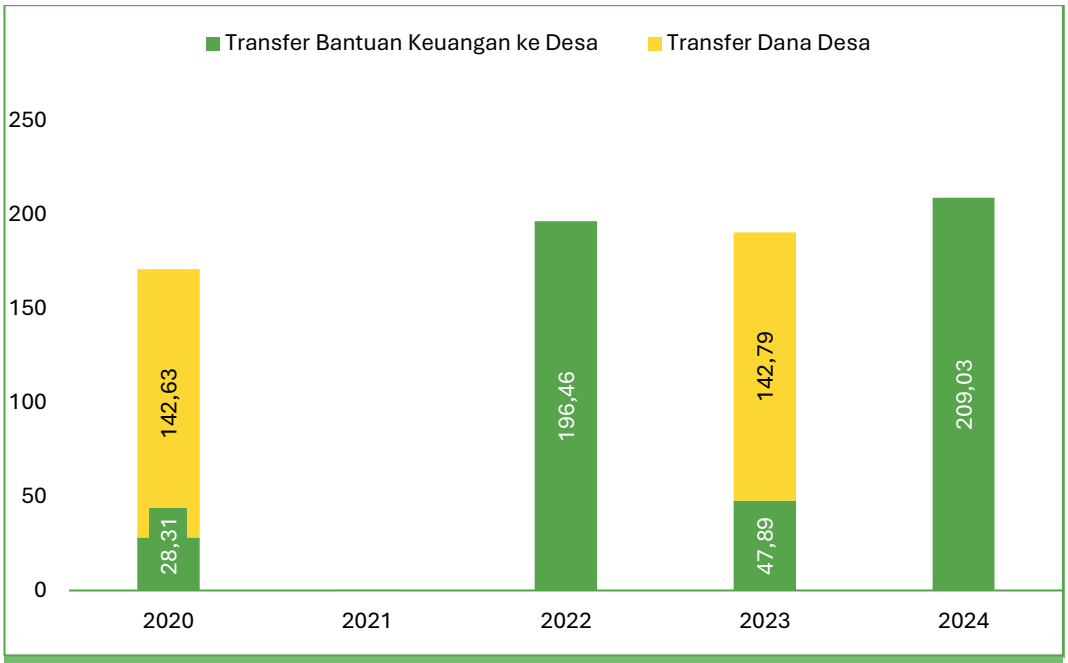
3. Belanja Tidak Terduga

Dalam 5 (lima) tahun terakhir realisasi belanja tak terduga Kabupaten Tapanuli Tengah mengalami fluktuasi dengan pertumbuhan yang cenderung menurun, yaitu sebesar 58,35% per tahun dari Rp 21,94 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 660 juta pada tahun 2024. Untuk Belanja

Tidak Terduga terbesar terjadi di tahun 2020 yaitu Rp 21,94 miliar. Belanja tak terduga ini dialokasikan untuk belanja yang sifatnya darurat sesuai peraturan perundang-undangan seperti bencana dan sejenisnya.

4. Belanja Transfer

Dalam 5 (lima) tahun terakhir belanja transfer Kabupaten Tapanuli Tengah relatif naik sekitar 5,16% per tahun dari Rp 170,94 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 209,03 miliar pada tahun 2024. Belana Transfer hanya berasal dari Belanja Transfer Bantuan Keuangan. Adapun belanja transfer bantuan keuangan terbesar terjadi pada tahun 2024 sebesar Rp 209,03 miliar.



Gambar 2.50 Perkembangan Struktur Belanja Transfer Keuangan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2024 (Rp Miliar)

Sumber: BPKAD Kabupaten Tapanuli Tengah

Pada tahun 2020, Transfer Dana Desa memiliki proporsi terbesar, yaitu sebesar 83,44% dari seluruh Belanja Transfer, kemudian pada tahun 2022 Belanja Transfer 100% berasal dari Transfer Bantuan Keuangan ke Desa, lalu pada tahun 2023,

Jika dilihat dari aspek surplus/defisit belanja, maka dalam 5 tahun terakhir defisit belanja terjadi di tahun 2020 dan 2022 yang nilai defisitnya secara berturut-turut sebesar Rp -76,630 miliar dan Rp -26,056 miliar. Meskipun terjadi defisit belanja namun besaran defisit tersebut masih dapat ditutup

SiLPA dan Penerimaan Pinjaman Daerah yang dapat digunakan di tahun 2021 dan 2022 yang secara berturut-turut sebesar Rp 112 miliar dan Rp 20,27miliar. Adapun tahun 2021, 2023, dan 2024 terjadi surplus anggaran belanja secara berturut-turut sebesar Rp 17,15 miliar, Rp 38,68 miliar, dan Rp 14,41 miliar.

Dengan melihat kinerja belanja daerah 5 (lima) tahun terakhir maka masih diperlukan strategi untuk memastikan pengeluaran yang efisien dan efektif, serta mengoptimalkan manfaat yang diperoleh dari anggaran belanja yang tersedia. beberapa strategi yang dapat diadopsi untuk tujuan tersebut:

1. Perencanaan Anggaran yang Cermat: Melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan dan prioritas daerah, serta menyusun anggaran dengan cermat berdasarkan hal tersebut. Ini termasuk mengidentifikasi area-area penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan masyarakat lainnya.
2. Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan mengadopsi praktik akuntabilitas yang kuat. Ini mencakup publikasi anggaran secara terbuka, pelaporan keuangan yang jelas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan anggaran.
3. Pengadaan Barang dan Jasa yang Efisien: Memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan, kompetitif, dan efisien. Ini dapat mencakup penggunaan sistem lelang terbuka, kerja sama dengan pihak swasta, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi proses pengadaan.
4. Pengelolaan Utang yang Bijaksana: Mengelola utang daerah dengan bijaksana, termasuk pemantauan tingkat bunga dan jangka waktu, serta memastikan bahwa pinjaman digunakan untuk proyek-proyek yang menghasilkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
5. Pengembangan Pendapatan Alternatif: Mencari sumber pendapatan alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada pendapatan dari

sumber-sumber konvensional seperti pajak dan dana pemerintah pusat. Ini bisa meliputi pengembangan sektor pariwisata, pengembangan kawasan industri, atau kemitraan dengan sektor swasta untuk proyek-proyek investasi.

6. Peningkatan Efisiensi Operasional: Mengidentifikasi area-area di mana efisiensi operasional dapat ditingkatkan, termasuk pengurangan biaya administratif, penggunaan teknologi untuk otomatisasi proses, dan peningkatan produktivitas pegawai.
7. Pemantauan dan Evaluasi yang Berkelanjutan: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus terhadap pelaksanaan anggaran dan proyek-proyek yang didanai oleh belanja daerah. Ini membantu dalam mengidentifikasi area-area di mana perbaikan dapat dilakukan dan memastikan bahwa dana digunakan secara efektif.

Secara keseluruhan Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

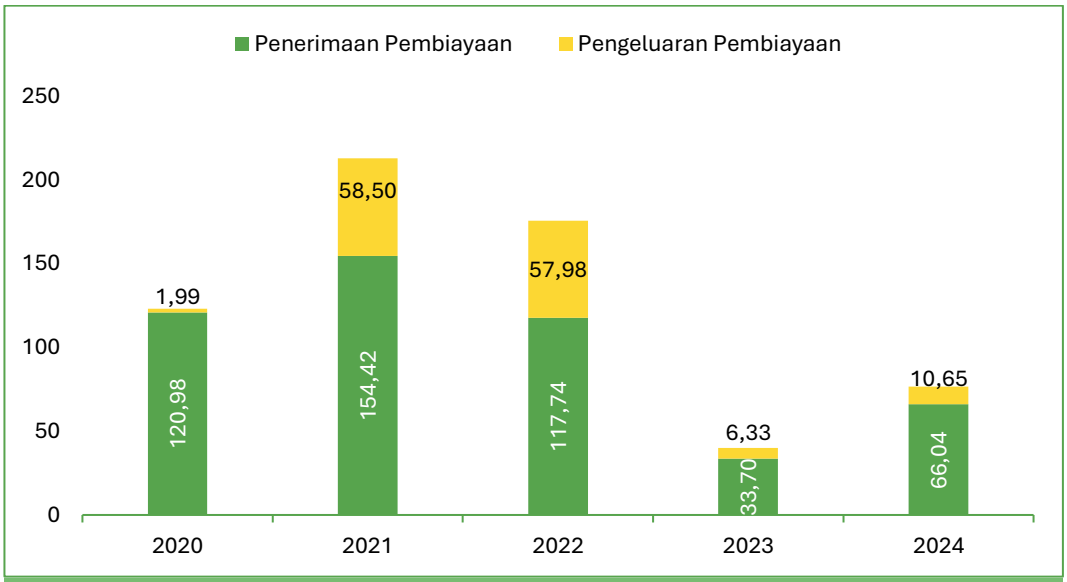
Tabel 2.79 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2024 (Rp)

No	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	**Belanja Operasi**	**825.217.500.890,59**	**753.922.388.185,20**	**787.215.026.534,00**	**817.906.120.669,14**	**867.583.454.207,04**	**1,26**
	Belanja Pegawai	473.257.666.798,00	444.375.484.308,00	443.473.619.320,00	449.075.408.836,00	494.647.477.536,00	1,11
	Belanja Barang dan Jasa	334.160.525.296,59	298.924.529.121,20	317.977.781.506,00	338.546.010.991,14	321.821.463.694,04	-0,94
	Belanja Bunga	1.509.784.796,00	6.804.191.856,00	6.823.546.409,00	4.248.013.228,00	3.759.608.863,00	25,62
	Belanja Subsidi						
	Belanja Hibah	13.792.695.100,00	3.296.682.900,00	17.682.079.299,00	23.728.687.614,00	47.354.904.114,00	36,12
	Belanja Bantuan Sosial	2.496.828.900,00	521.500.000,00	1.258.000.000,00	2.308.000.000,00		-2,59
	Belanja Bantuan Keuangan						
2	**Belanja Modal**	**244.316.439.358,00**	**212.482.130.975,00**	**209.387.823.621,00**	**139.143.692.601,00**	**158.988.280.436,62**	**-10,18**
	Belanja Tanah	280.620.000,00					
	Belanja Peralatan dan Mesin	36.601.874.824,00	25.714.766.608,00	35.476.873.354,00	66.572.512.792,00	38.277.188.041,00	1,13
	Belanja Gedung dan Bangunan	61.639.587.894,00	63.471.748.125,00	46.867.896.638,00	33.852.246.192,00	48.153.898.344,63	-5,99
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	128.307.582.366,00	120.741.170.542,00	125.070.942.487,00	33.143.127.767,00	66.930.322.826,99	-15,01
	Belanja Aset Tetap Lainnya	17.486.774.274,00	2.554.445.700,00	1.972.111.142,00	5.575.805.850,00	5.626.871.224,00	-24,68
	Belanja Aset Lainnya						
3	**Belanja Tidak Terduga**	21.942.105.987,33	768.338.650,00	3.397.562.410,00	2.196.941.835,16	660.296.320,00	-58,35
	Belanja Tidak Terduga	21.942.105.987,33	768.338.650,00	3.397.562.410,00	2.196.941.835,16	660.296.320,00	-58,35
4	**Belanja Transfer**	170.941.277.614,00	176.818.895.216,00	196.458.372.212,00	190.682.126.100,00	209.033.261.924,00	5,16
	Transfer Bagi Hasil						

No	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Transfer Bantuan Keuangan	170.941.277.614,00	176.818.895.216,00	196.458.372.212,00	190.682.126.100,00	209.033.261.924,00	5,16
	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	28.312.474.014,00	177.407,90	196.458.372.212,00	47.892.648.100,00	209.033.261.924,00	64,84
	Transfer Dana Desa	142.628.803.600,00			142.789.478.000,00		0,11
	Total Belanja	**1.262.417.323.849,92**	**1.143.991.753.026,20**	**1.196.458.784.777,00**	**1.149.928.881.205,30**	**1.236.265.292.887,66**	**-0,52**
	Defisit/Surplus	**-76.630.161.329,71**	**17.146.168.176,19**	**-26.056.139.120,66**	**38.676.158.321,70**	**14.412.464.749,18**	

C Pembiayaan

Perkembangan pembiayaan netto dalam 5 tahun terakhir relatif mengalami fluktuasi penurunan 16,73% per tahun dari Rp 118,99 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 55,39 miliar pada tahun 2024. Menurunnya pembiayaan tersebut dipengaruhi oleh menurunnya penerimaan pembiayaan dari sumber SiLPA, khususnya dari tahun 2022 ke tahun 2023. Sebenarnya jika dilihat lebih mendalam terlihat bahwa SiLPA dari tahun 2020 hingga 2021 mengalami peningkatan dan mulai menurun signifikan di tahun 2023. Hal itu menunjukkan ada peningkatan efektivitas penyerapan anggaran kegiatan di tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 SiLPA kembali meningkat. Sementara dari pos pengeluaran pembiayaan juga mengalami fluktuasi penurunan. Pengeluaran pembiayaan meningkat cukup tinggi dari tahun 2020-2021 kemudian mulai menurun di tahun 2022 dan 2023. Fluktuasi pengeluaran pembiayaan tersebut disebabkan oleh adanya pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo dan penyertaan modal untuk meningkatkan pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.



Gambar 2.51 Komposisi Pembiayaan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2024 (Rp Miliar)

Sumber: BPKAD Kabupaten Tapanuli Tengah

Secara keseluruhan perkembangan realisasi APBD Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.80 Realisasi APBD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi (Rp)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	**PENDAPATAN**	**1.185.787.162.520,21**	**1.161.137.921.202,39**	**1.170.402.645.656,34**	**1.188.605.039.527,00**	**1.250.677.757.636,84**	**1,34**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**87.469.317.632,21**	**84.353.108.262,39**	**75.219.924.030,34**	**79.065.197.857,00**	**91.783.121.632,84**	**1,21**
1.1.1	Pajak Daerah	18.988.067.250,00	21.778.783.997,00	22.497.399.995,00	25.892.126.582,00	25.272.424.698,00	7,41
1.1.2	Retribusi Daerah	1.609.791.600,00	2.107.703.613,00	1.512.863.122,00	1.697.432.000,00	2.499.934.720,00	11,63
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.475.069.950,00	8.736.247.710,00	10.690.310.898,79	10.258.065.683,00	10.790.167.987,39	3,30
1.1.4	Lain - Lain PAD yang Sah	57.396.388.832,21	51.730.372.942,39	40.519.350.014,55	41.217.573.592,00	53.220.594.227,45	-1,87
1.2	**Pendapatan Transfer**	**1.033.370.841.373,00**	**1.016.941.042.886,00**	**1.081.248.050.473,00**	**1.100.529.446.315,00**	**1.142.770.433.109,00**	**2,55**
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	844.796.945.351,00	971.901.728.050,00	1.020.735.847.193,00	1.042.454.851.618,00	1.092.076.732.416,00	6,63
1.2.1.1	Dana Perimbangan	844.796.945.351,00	971.901.728.050,00	883.412.530.193,00	899.665.373.618,00	949.980.765.416,00	2,98
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak			28.948.050.143,00	14.284.552.177,00	33.975.341.000,00	8,34
1.2.1.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak				21.002.038.286,00		
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum			603.228.847.000,00	632.394.053.000,00	661.616.467.747,00	4,73
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus			251.235.633.050,00	231.984.730.155,00	254.388.956.669,00	0,63
1.2.1.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	154.553.399.600,00	0,00	137.323.317.000,00	142.789.478.000,00	142.095.967.000,00	-2,08
1.2.1.2.1	Dana Otonomi Khusus						
1.2.1.2.2	Dana Insentif Daerah			3.027.708.000,00			
1.2.1.2.3	Dana Desa			134.295.609.000,00	142.789.478.000,00	142.095.967.000,00	2,86
1.2.2	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	34.020.496.422,00	45.039.314.836,00	60.512.203.280,00	58.074.594.697,00	50.693.700.693,00	10,49
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	34.020.496.422,00	45.039.314.836,00	48.626.292.143,00	54.161.743.097,00	50.693.700.693,00	10,49
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	11.885.911.137,00	3.912.851.600,00		-67,08

No	Uraian	Realisasi (Rp)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi			11.885.911.137,00			
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota				3.912.851.600,00		
1.3	**Lain - lain Pendapatan daerah yang Sah**	**64.947.003.515,00**	**59.843.770.054,00**	**13.934.671.153,00**	**9.010.395.355,00**	**16.124.202.895,00**	**-29,41**
1.3.1	Pendapatan Hibah	64.947.003.515,00	9.436.622.908,00	1.368.525.818,00			-85,48
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat						
1.3.3	Pendapatan Lainnya		50.407.147.146,00	12.566.145.335,00	9.010.395.355,00	16.124.202.895,00	-31,61
2	**Belanja**	**1.262.417.323.849,92**	**1.143.991.753.026,20**	**1.196.458.784.777,00**	**1.149.928.881.205,30**	**1.236.265.292.887,66**	**-0,52**
2.1	**Belanja Operasi**	**825.217.500.890,59**	**753.922.388.185,20**	**787.215.026.534,00**	**817.906.120.669,14**	**867.583.454.207,04**	**1,26**
2.1.1	Belanja Pegawai	473.257.666.798,00	444.375.484.308,00	443.473.619.320,00	449.075.408.836,00	494.647.477.536,00	1,11
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	334.160.525.296,59	298.924.529.121,20	317.977.781.506,00	338.546.010.991,14	321.821.463.694,04	-0,94
2.1.3	Belanja Bunga	1.509.784.796,00	6.804.191.856,00	6.823.546.409,00	4.248.013.228,00	3.759.608.863,00	25,62
2.1.4	Belanja Subsidi						
2.1.5	Belanja Hibah	13.792.695.100,00	3.296.682.900,00	17.682.079.299,00	23.728.687.614,00	47.354.904.114,00	36,12
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2.496.828.900,00	521.500.000,00	1.258.000.000,00	2.308.000.000,00		-2,59
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan						
2.2	**Belanja Modal**	**244.316.439.358,00**	**212.482.130.975,00**	**209.387.823.621,00**	**139.143.692.601,00**	**158.988.280.436,62**	**-10,18**
2.2.1	Belanja Tanah	280.620.000,00					
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	36.601.874.824,00	25.714.766.608,00	35.476.873.354,00	66.572.512.792,00	38.277.188.041,00	1,13
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	61.639.587.894,00	63.471.748.125,00	46.867.896.638,00	33.852.246.192,00	48.153.898.344,63	-5,99
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan	128.307.582.366,00	120.741.170.542,00	125.070.942.487,00	33.143.127.767,00	66.930.322.826,99	-15,01

No	Uraian	Realisasi (Rp)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Jaringan						
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	17.486.774.274,00	2.554.445.700,00	1.972.111.142,00	5.575.805.850,00	5.626.871.224,00	-24,68
2.2.6	Belanja Aset Lainnya						
2.3	**Belanja Tidak Terduga**	**21.942.105.987,33**	**768.338.650,00**	**3.397.562.410,00**	**2.196.941.835,16**	**660.296.320,00**	**-58,35**
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	21.942.105.987,33	768.338.650,00	3.397.562.410,00	2.196.941.835,16	660.296.320,00	-58,35
2.4	**Belanja Transfer**	**170.941.277.614,00**	**176.818.895.216,00**	**196.458.372.212,00**	**190.682.126.100,00**	**209.033.261.924,00**	**5,16**
2.4.1	Belanja Transfer Bagi Hasil						
2.4.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	170.941.277.614,00	176.818.895.216,00	196.458.372.212,00	190.682.126.100,00	209.033.261.924,00	5,16
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	28.312.474.014,00	177.407,90	196.458.372.212,00	47.892.648.100,00	209.033.261.924,00	64,84
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya						
2.4.2.3	Transfer Dana Desa	142.628.803.600,00			142.789.478.000,00		0,11
	Defisit/Surplus	**-76.630.161.329,71**	**17.146.168.176,19**	**-26.056.139.120,66**	**38.676.158.321,70**	**14.412.464.749,18**	
3	**Pembiayaan**						
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**120.984.279.939,21**	**154.416.512.041,15**	**117.737.852.477,69**	**33.697.902.597,88**	**66.040.021.746,72**	**-14,05**
3.1.1	SiLPA	74.539.099.939,21	42.413.127.041,15	97.463.852.477,69	33.697.902.597,88	66.040.021.746,72	-2,98
3.1.2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah						
3.1.3	Penerimaan pinjaman daerah		112.003.385.000,00	20.274.000.000,00			-81,90
3.1.4	Pinjaman Dalam Negeri	46.445.180.000,00					

No	Uraian	Realisasi (Rp)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**1.994.751.568,00**	**58.500.196.525,00**	**57.983.810.759,00**	**6.334.049.173,00**	**10.652.846.124,00**	**52,02**
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.994.751.568,00	3.200.196.525,00	3.804.760.759,00			38,11
3.2.2	Pembayaran Pokok Utang		55.300.000.000,00	54.179.050.000,00	6.334.049.173,00	10.652.846.124,00	-42,25
3.2.3	Pemberian Pinjaman Daerah						
	Pembiayaan Netto	**118.989.528.371,21**	**95.916.315.516,15**	**59.754.041.718,69**	**27.363.853.424,88**	**55.387.175.622,72**	**-16,73**
	SiLPA	**42.359.367.041,50**	**113.062.483.692,34**	**33.697.902.598,03**	**66.040.011.746,58**	**69.799.640.371,90**	**13,30**

2.5.3 Neraca Keuangan Daerah

Neraca Keuangan Daerah terdiri dari tiga elemen, yaitu Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Aset merepresentasikan seluruh sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah daerah, baik yang berwujud seperti tanah, gedung, dan peralatan, maupun yang tidak berwujud seperti piutang dan investasi. Sementara itu, Kewajiban menggambarkan segala bentuk utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi.

Nilai Ekuitas menjadi indikator penting bagi kesehatan dan *sustainability* keuangan daerah karena menggamarkan kemampuan daerah dalam membiayai pelayanan publik tanpa menciptakan beban utang yang berlebihan. Perkembangan Neraca Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.81 Neraca Keuangan Daerah Tahun 2020-2024

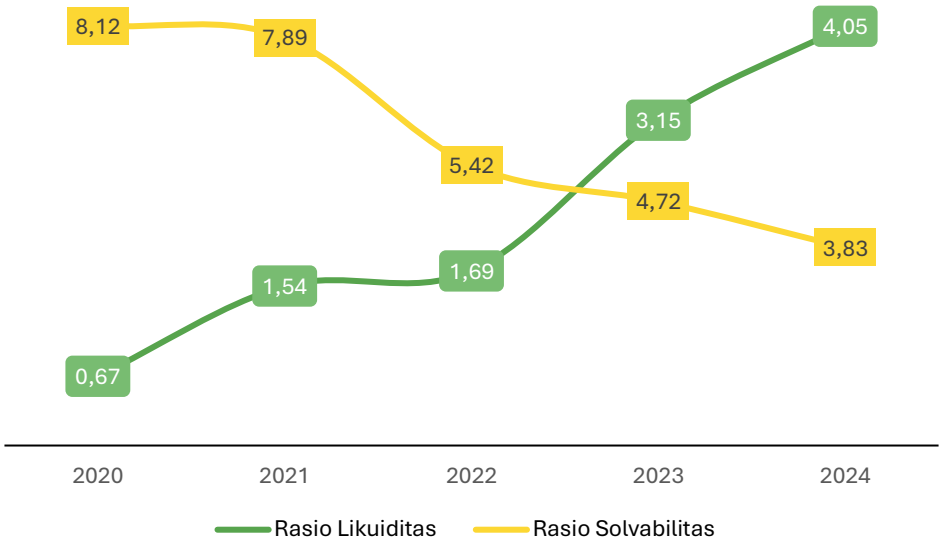
Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
ASET	**1.780.643.750.224,39**	**1.903.025.834.396,46**	**1.896.884.268.912,03**	**2.043.241.396.479,37**	**2.045.068.317.174,90**
Aset Lancar	**89.558.769.271,36**	**139.147.433.333,06**	**62.477.833.988,11**	**127.441.617.713,86**	**139.964.648.634,64**
Kas dan Setara Kas	**42.578.830.974,50**	**97.981.499.969,69**	**33.700.699.309,03**	**66.040.021.746,72**	**69.800.332.909,90**
Kas di Kas Daerah	40.916.165.500,50	95.850.087.258,49	33.504.998.573,03	65.599.770.269,72	64.610.311.786,04
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00	61.426.647,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	501.270.488,00	466.155.007,20	0,00	0,00	
Kas di FTKP					205.277.557,86
Kasdi BOK Puskesmas					4.249.686.678,00
Kas di BLUD	176.765.129,00	1.512.229.125,00	168.509.079,00	150.597.999,00	451.598.926,00
Kas Dana BOSP					30.549.696,00
Kas Lainnya	984.629.857,00	153.028.579,00	27.191.657,00	289.653.478,00	191.481.619,00
Setara Kas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investasi Jangka Pendek	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Piutang	**49.041.738.442,84**	**41.142.974.552,16**	**28.925.187.252,61**	**61.033.679.614,34**	**72.247.786.022,53**
Piutang Pendapatan	33.788.183.134,02	24.069.739.063,03	28.925.187.252,61	61.033.679.614,34	72.247.786.022,53
Piutang Lain-lain	15.253.555.308,82	17.073.235.489,13	0,00		0,00
Penyisihan Piutang	**12.130.641.279,97**	**13.429.084.051,32**	**14.755.081.636,41**	**16.484.552.416,28**	**-17.873.361.746,66**
Persediaan	**9.991.364.467,32**	**13.442.042.852,53**	**14.597.695.729,55**	**16.843.135.435,75**	**15.779.891.448,87**
Biaya Dibayar Dimuka	**77.476.666,67**	**10.000.000,00**	**9.333.333,33**	**9.333.333,33**	**10.000.000,00**

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Investasi Jangka Panjang	**47.166.328.257,01**	**49.854.550.502,01**	**53.424.846.562,01**	**58.797.290.029,30**	**60.181.037.382,30**
Investasi Non Permanen	0,00	0,00			0,00
Investasi Permanen	47.166.328.257,01	49.854.550.502,01	53.424.846.562,01	58.797.290.029,30	60.181.037.382,30
Pernyataan Modal pada PT Bank Sumut	41.357.084.583,30	44.557.281.108,30	48.362.041.867,30	48.096.951.108,30	48.098.951.108,30
Pernyataan Modal pada PDAM Mual Nauli	3.228.657.616,71	2.922.437.543,71	2.730.603.140,71	8.302.645.142,00	9.486.573.926,00
Pernyataan Modal pada PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli	2.209.893.059,00	2.030.186.782,00	2.003.002.891,00	2.132.377.696,00	2.412.176.965,00
Pernyataan Modal pada PT. Mansalar Tapian Nauli	370.692.998,00	344.645.068,00	329.198.663,00	265.316.083,00	183.335.383,00
Aset Tetap	**1.578.001.840.958,91**	**1.649.852.883.774,28**	**1.708.943.881.404,02**	**1.784.054.914.186,57**	**1.771.724.238.748,86**
Tanah	147.831.264.723,86	153.237.880.673,86	156.215.191.473,86	153.242.257.223,86	152.331.564.728,86
Peralatan dan Mesin	370.307.769.170,36	398.475.731.885,51	427.996.092.294,67	472.837.313.430,53	492.088.518.622,25
Gedung dan Bangunan	713.419.550.602,11	804.871.226.190,11	796.506.996.162,00	863.333.632.633,72	890.969.962.413,98
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.359.963.523.556,04	1.439.341.599.448,38	1.573.259.326.305,17	1.705.325.731.927,40	1.741.008.270.895,30
Aset Tetap Lainnya	20.127.467.103,00	20.140.167.103,00	20.157.403.103,00	20.304.024.604,00	20.514.873.512,04
Konstruksi Dalam Pengerjaan	56.023.352.144,58	46.665.532.280,87	77.804.092.480,45	82.635.596.645,66	120.028.135.020,14

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Akumulasi Penyusutan	1.089.671.086.341,04	1.212.879.253.807,45	1.342.995.220.415,13	1.513.623.642.278,60	-1.645.217.086.443,71
Dana Cadangan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Lainnya	**65.916.811.737,11**	**64.170.966.787,11**	**72.037.706.957,89**	**72.947.574.549,64**	**69.093.893.209,10**
Aset Tidak Berwujud	2.375.897.500,00	2.375.897.500,00	2.582.623.900,00	2.582.623.900,00	2.782.523.900,00
Aset Lain-lain	65.884.740.137,11	64.154.930.987,11	71.851.653.197,89	72.782.193.429,64	68.769.274.729,10
Akumulasi Amortisasi	2.343.825.900,00	2.359.861.700,00	2.396.570.140,00	2.417.242.780,00	-2.457.905.420,00
Properti Investasi					**4.104.499.200,00**
Properti Investasi Tanah					22.400.000,00
Properti Investas Gedung dan Bangunan					5.133.600.000,00
Properti Investasi Jalan, Irigasi, dan Jembatan					0,00
Properti Investasi Akumulasi Penyusutan					-1.051.500.800,00
KEWAJIBAN	**133.716.907.746,56**	**139.196.762.170,65**	**97.595.363.162,65**	**92.005.309.489,23**	**75.360.833.204,50**
Kewajiban Jangka Pendek	**133.716.907.746,56**	**90.227.247.170,65**	**37.007.287.537,65**	**40.516.538.029,23**	**34.524.907.868,50**

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	219.463.933,00	517.647.492,00	2.796.711,00	0,00	892.538,00
Utang Bunga	0,00	117.880.504,72	369.087.169,26	335.963.969,00	279.181.340,07
Utang Belanja	17.772.505.252,57	18.747.803.480,32			22.314.960.789,43
Utang Beban			17.421.864.558,36	18.186.872.485,65	0,00
Pendapatan diterima dimuka	50.212.895,83	60.787.208,83	30.789.375,00	48.776.926,00	389.289.900,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	115.674.725.665,16	70.783.128.484,78	19.182.749.724,03	21.944.924.648,58	11.540.583.301,00
Kewajiban Jangka Panjang	**0,00**	**48.969.515.000,00**	**60.588.075.625,00**	**51.488.771.460,00**	**40.835.925.336,00**
Utang Pada PT SMI	0,00	48.969.515.000,00	60.588.075.625,00	51.488.771.460,00	40.835.925.336,00
EKUITAS	**1.646.926.842.477,83**	**1.763.829.072.225,81**	**1.799.288.905.749,38**	**1.951.238.086.990,13**	**1.969.707.483.970,41**
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	**1.780.643.750.224,39**	**1.903.025.834.369,46**	**1.896.884.268.912,03**	**2.043.243.396.479,37**	**2.045.068.317.174,91**

Berdasarkan tabel tersebut dapt dilihat bahwa Aset Keuangan Daerah mengalami peningktan dari Rp 1.780 miliar pada tahun 2020 mencapa Rp 2.045 miliar pada tahun 2024. Apabila dilihat dari struktur modalnya, permodalan Kabupaten Tapanuli Tengah paling besar bersumber dari ekuitas. Untuk melihat kinerja keuangan daerah, maka dapat diliahat dari Rasio Likuiditas dan Rasio Solvablitas. Rasio Likuiditas. Rasio Likuiditas menggambarkan keampuan daerah dalam meluniasi hutang jangka pendeknya menggunakan aset lancar, sementara rasio solvabilitas mengukur kemampuan daaerah untuk melunasi seluruh kewajibannya. Perkembangan rasio tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.52 Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas Kabupaten Tapanuli Tengah

Sumber: BPKAD (Diolah, 2025)

Rasio Likuditas Kabupaten Tapanuli Tengah meningkat dari 0,67 kali pada tahun 2020 mencapai 4,05 kali pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa kemampuan Kabupaten Tapanuli Tengah dalam melunasi hutang lancarnya menggunakan aset lancar semakin meningkat. Sementara, Rasio Solvabilitas menurun dari 8,12 persen pada tahun 2020 menjadi 3,83 persen pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa Kabupaten Tapanuli Tengah lebih banyak memanfaatkan ekuitas dibandingkan liabilitas untuk membiayai kegiatan operasionalnya.

2.5.4 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Analisis kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan penggunaan anggaran dan baik untuk belanja maupun pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah 2020-2024 tergambar pada dua aspek penting yaitu proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan. Fokus analisis dilakukan pada orientasi alokasi belanja daerah dan pembiayaan daerah pada kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dijalankan. Oleh karena itu berbagai belanja aparatur perlu ditekan seefisien mungkin agar dapat meningkatkan belanja publik

A Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran menguraikan sekurang-kurangnya mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan realisasi belanja. Oleh karena itu Analisis proporsi penggunaan anggaran dilakukan melalui analisis sebagai berikut:

1. Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur;
2. Analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Belanja pemenuhan aparatur terdiri dari belanja pegawai meliputi gaji dan tunjangan dan belanja pegawai lainnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama terdiri dari seluruh biaya yang harus dikeluarkan baik itu berupa belanja maupun pengeluaran pembiayaan yang wajib untuk dibayarkan.

Proporsi belanja pemenuhan untuk pemenuhan aparatur terhadap total pengeluaran dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif

dengan rata-rata persentasenya sebesar 37,13%. Proporsi belanja aparatur terbesar terjadi di tahun 2023 yang mencapai 38,84%. Jika dilihat dari keseluruhan perkembangan proporsinya yang tidak pernah lebih dari 39% bisa dikatakan proporsi belanjanya masih cukup sehat namun perlu diturunkan rasionya agar dapat memenuhi amanat Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan keuangan Pusat dan Daerah yang mengamanatkan besaran rasio belanja pegawai di tahun 2027 maksimal adalah 30%. Untuk itu Pemerintah Daerah tetap harus memperhatikan proporsi belanja aparatur agar tidak melebihi batas yang dapat memengaruhi keseimbangan anggaran dan keberlanjutan keuangan jangka panjang. Dalam beberapa kasus, peningkatan belanja pegawai yang signifikan tanpa pertumbuhan yang sesuai dalam pendapatan bisa menjadi beban fiskal yang besar bagi pemerintah sehingga memerlukan pengelolaan dan perencanaan yang cermat agar belanja publiknya bisa dijaga kualitas maupun kuantitasnya.

Rincian proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.82 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Tapanuli Tengah

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp miliar)	473,26	444,38	443,47	449,08	494,65
Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp miliar)	1.264,41	1.202,49	1.254,44	1.156,26	1.246,92
Persentase (%)	**37,43**	**36,95**	**35,35**	**38,84**	**39,67**

Sumber: BPKAD Kabupaten Tapanuli Tengah

Untuk menghitung kemampuan belanja daerah, maka diperlukan analisis terhadap pengeluaran periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Pada dasarnya analisis terhadap realisasi pengeluaran periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama bertujuan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari dan ditunda sehingga harus dibayar dalam suatu tahun anggaran pemerintah

daerah, seperti gaji dan tunjangan pegawai, serta anggota dewan, bunga, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya serta pengeluaran pembiayaan yang wajib dibayarkan. total belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.

Realisasi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama selama tahun 2020-2024 cenderung sedikit meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,50% per tahun dari Rp 685,94 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 766,11 miliar pada tahun 2024. Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh naiknya belanja hibah dari Rp 13,79 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 47,35 miliar pada tahun 2024 dan Belanja Transfer Bantuan Keuangan dari Rp 170,94 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 209,03 miliar pada tahun 2024. Jika dikaitkan dengan rata-rata belanja daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir yang sebesar Rp 1,198 triliun maka rata-rata proporsi Total Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas mencapai 57,31%. Itu artinya masih ada ruang fiskal untuk belanja publik sekitar 42,69%. Hal ini perlu mendapatkan perhatian pemerintah Daerah agar ruang fiskal untuk belanja publik ke depan bisa ditingkatkan kembali. Oleh karena itu diperlukan strategi khususnya untuk menekan biaya aparatur antara lain:

1. Evaluasi Kebutuhan Pegawai: Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan dan belanja pegawai di setiap unit organisasi Ini termasuk peninjauan terhadap struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab, serta kinerja pegawai yang sudah ada. Dengan memahami kebutuhan yang sebenarnya, pemerintah dapat menghindari pengadaan pegawai yang tidak perlu.
2. Optimalisasi Produktivitas: Mendorong produktivitas pegawai dengan memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan, menggunakan

teknologi informasi dan sistem manajemen kinerja yang efisien, serta menerapkan praktik kerja yang efektif. Dengan meningkatkan produktivitas, pemerintah daerah dapat mencapai hasil yang lebih baik dengan jumlah pegawai yang lebih sedikit.

3. Pengendalian Pengadaan Pegawai Baru: Mengendalikan pengadaan pegawai baru dengan membatasi jumlah penerimaan pegawai baru atau memperlambat proses rekrutmen. Pemerintah dapat memprioritaskan pengisian posisi yang kritis atau strategis, sambil mempertimbangkan opsi untuk menutup atau menggabungkan posisi yang tidak terlalu penting.
4. Peningkatan Efisiensi Administrasi: Mengurangi birokrasi dan proses administrasi yang berlebihan yang dapat menghambat efisiensi pelayanan publik. Memperkenalkan inovasi dalam sistem administrasi, seperti penggunaan teknologi informasi untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin atau integrasi layanan online dapat membantu mengurangi belanja pegawai.
5. Pengendalian Tunjangan dan Insentif: Mengkaji ulang dan menyesuaikan tunjangan dan insentif yang diberikan kepada pegawai, seperti tunjangan kinerja atau bonus. Memastikan bahwa insentif tersebut sesuai dengan kinerja dan kontribusi yang sebenarnya, serta terkait dengan pencapaian tujuan organisasi.
6. Penghapusan atau Penyederhanaan Jabatan: Melakukan peninjauan terhadap struktur jabatan dan mempertimbangkan untuk menghapus atau menyederhanakan jabatan yang tidak lagi relevan atau diperlukan. Ini dapat membantu mengurangi jumlah pegawai secara keseluruhan.

Secara keseluruhan perkembangan pengeluaran Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.83 Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020-2024 (Rp)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	**Belanja Operasi Wajib dan Mengikat**	**491.056.975.594,00**	**454.997.859.064,00**	**469.237.245.028,00**	**479.360.109.678,00**	**545.761.990.513,00**	**2,68**
1.1	Belanja Pegawai	473.257.666.798,00	444.375.484.308,00	443.473.619.320,00	449.075.408.836,00	494.647.477.536,00	1,11
1.2	Belanja Bunga	1.509.784.796,00	6.804.191.856,00	6.823.546.409,00	4.248.013.228,00	3.759.608.863,00	25,62
1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
1.4	Belanja Hibah	13.792.695.100,00	3.296.682.900,00	17.682.079.299,00	23.728.687.614,00	47.354.904.114,00	36,12
1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.496.828.900,00	521.500.000,00	1.258.000.000,00	2.308.000.000,00	-	-2,59
1.6	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-
2	**Belanja Tidak Terduga**	**21.942.105.987,33**	**768.338.650,00**	**3.397.562.410,00**	**2.196.941.835,16**	**660.296.320,00**	**-58,35**
2.1	Belanja Tidak Terduga	21.942.105.987,33	768.338.650,00	3.397.562.410,00	2.196.941.835,16	660.296.320,00	-58,35
3	**Belanja Transfer**	**170.941.277.614,00**	**176.818.895.216,00**	**196.458.372.212,00**	**190.682.126.100,00**	**209.033.261.924,00**	**5,16**
3.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	-	-	-	-	-	
3.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	170.941.277.614,00	176.818.895.216,00	196.458.372.212,00	190.682.126.100,00	209.033.261.924,00	5,16
3.2.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	28.312.474.014,00	177.407,90	196.458.372.212,00	47.892.648.100,00	209.033.261.924,00	64,84
3.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-	-	
3.2.3	Transfer Dana Desa	142.628.803.600,00	-	-	142.789.478.000,00	-	0,04

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
4	**Pengeluaran Pembiayaan**	**1.994.751.568,00**	**58.500.196.525,00**	**57.983.810.759,00**	**6.334.049.173,00**	**10.652.846.124,00**	**52,02**
4.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.994.751.568,00	3.200.196.525,00	3.804.760.759,00	-	-	38,11
4.2	Pembayaran Pokok Utang	-	55.300.000.000,00	54.179.050.000,00	6.334.049.173,00	10.652.846.124,00	-42,25
4.3	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	
Total Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas		**685.935.110.763,33**	**691.085.289.455,00**	**727.076.990.409,00**	**678.573.226.786,16**	**766.108.394.881,00**	**3,50**

B Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan menguraikan sekurang-kurangnya mengenai besaran nilai penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit riil anggaran daerah. Defisit riil anggaran terjadi jika pendapatan yang ada tidak sebanding dengan nilai belanja dan pengeluaran pembiayaan yang ada pada tahun yang sama. Oleh karena itu besaran defisit riil anggaran daerah juga harus memperhatikan besaran nilai pembiayaan netto yang dapat digunakan untuk menutupnya yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, serta penerimaan piutang daerah.

Dalam lima tahun terakhir (2020-2024) defisit riil anggaran terjadi pada tahun 2020-2022 dimana defisit riil pada tahun tersebut secara berturut-turut sebesar Rp 78,62 miliar, Rp 41,35 miliar dan Rp 84,04 miliar, sementara pada tahun 2023 dan 2024 terjadi surplus anggaran masing-masing sebesar Rp 32,34 miliar and Rp 3,76 miliar.

Tabel 2.84 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tapanuli Tengah (Rp Miliar)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Daerah	1.185,79	1.161,14	1.170,40	1.188,61	1.250,68
Belanja Daerah	1.226,31	1.262,42	1.143,99	1.196,46	1.149,93
Pengeluaran Pembiayaan	1,99	58,50	57,98	6,33	10,65
Defisit/Surplus	**-78,62**	**-41,35**	**-84,04**	**32,34**	**3,76**

Sumber: BPKAD Kabupaten Tapanuli Tengah

Jika dibandingkan antara defisit riil anggaran daerah dan komponen penutupnya diketahui bahwa semua defisit riil anggaran yang terjadi di tahun 2020-2024 dapat ditutup semua oleh total Komposisi Penutup Defisit (SiLPA dan Penerimaan Pinjaman Daerah) pada tahun 2020-2024 yang secara berturut-turut sebesar Rp 120,984 miliar, Rp 154,42 miliar, Rp 117,74 miliar. Rp 33,70 miliar, dan Rp 66,04 miliar. Dari hal ini dapat dikatakan bahwa target defisit riil yang ditetapkan masih sangat aman bahkan masih bisa dimaksimalkan selama tidak melebihi target SiLPA atau komponen penutup

lainnya yang ditetapkan.

Tabel 2.85 Nilai Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tapanuli Tengah (Rp Miliar)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
SiLPA	74,54	42,41	97,46	33,70	66,04
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan pinjaman daerah	-	112,00	20,27	-	-
Total Komposisi Penutup Defisit	**120,98**	**154,42**	**117,74**	**33,70**	**66,04**

Sumber: BPKAD Kabupaten Tapanuli Tengah

Jika dilihat dari sumber SiLPA di Kabupaten Tapanuli Tengah dari tahun 2020-2024 terlihat bahwa nilai SiLPA tersebut berasal dari Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa sisa penghematan belanja atau akibat lainnya merupakan komponen utama penutup defisit rill anggaran bersama dengan Penerimaan Pinjaman Daerah yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah.

2.5.5 Proyeksi Keuangan Daerah

Proyeksi keuangan daerah adalah perkiraan atau estimasi mengenai pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dalam suatu periode tertentu, biasanya disusun untuk mendukung perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Proyeksi ini mencakup analisis terhadap sumber pendapatan daerah, seperti pajak daerah, retribusi, dana perimbangan, dan hibah), perkiraan pengeluaran untuk program dan kegiatan, serta strategi pembiayaan untuk menutup defisit atau mengelola surplus. Tujuannya adalah untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan sesuai dengan visi pembangunan daerah.

A Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan daerah adalah perkiraan atau estimasi pendapatan yang akan diperoleh pemerintah daerah dalam periode tahun 2025-2029. Proyeksi ini penting untuk perencanaan keuangan serta untuk memastikan keberlanjutan keuangan pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah. Berdasarkan data beberapa tahun sebelumnya,

anggaran pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Tapanuli Tengah masih bertumpu pada dana transfer pemerintah pusat khususnya dari sumber dana perimbangan. Kenyataan ini membuat Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunannya, sehingga dalam merumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos pendapatan dalam APBD benar-benar memperhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah dan upaya-upaya yang ditempuh dalam mencapai target tersebut serta dasar hukum penerimaannya. Dalam memproyeksi pendapatan, proyeksi lebih difokuskan pada penerimaan yang bersumber dari daerah sendiri (PAD) dengan melihat berbagai variabel yang berkaitan dengannya. Demi memastikan kemandirian daerah melalui sumber-sumber PAD yang baru, maka akan dilakukan penyusunan Roadmap Optimalisasi PAD 2025-2030. Adapun rincian proyeksi pendapatan daerah sebagai berikut:

Tabel 2.86 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029

No	Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	**PENDAPATAN**	1,267,320,258,946.00	1,265,832,807,430.00	1,290,140,771,747.00	1,315,917,558,365.00	1,343,371,256,770.00	1,372,745,546,292.00
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**103,832,046,741.00**	**109,675,419,225.00**	**116,438,981,606.00**	**124,286,775,495.00**	**133,412,350,726.00**	**144,044,076,600.00**
1.1.1	Pajak Daerah	36,516,570,374.00	41,120,607,713.00	46,553,371,773.00	52,964,033,364.00	60,528,614,042.00	69,454,819,241.00
1.1.2	Retribusi Daerah	2,530,183,930.00	2,985,617,037.00	3,523,028,104.00	4,157,173,163.00	4,905,464,332.00	5,788,447,912.00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10,920,729,020.00	11,052,869,841.00	11,186,609,566.00	11,321,967,542.00	11,458,963,349.00	11,597,616,805.00
1.1.4	Lain - Lain PAD yang Sah	53,864,563,417.00	54,516,324,634.00	55,175,972,163.00	55,843,601,426.00	56,519,309,003.00	57,203,192,642.00
1.2	**Pendapatan Transfer**	**1,140,142,624,097.00**	**1,131,539,465,546.00**	**1,147,742,190,698.00**	**1,164,256,385,257.99**	**1,181,092,603,763.00**	**1,198,261,953,936.99**
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1,085,980,881,000.00	1,099,990,034,364.00	1,114,179,905,807.00	1,128,552,826,591.00	1,143,111,158,054.00	1,157,857,291,992.00
1.2.2	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	54,161,743,097.00	31,549,431,182.00	33,562,284,891.00	35,703,558,667.00	37,981,445,709.00	40,404,661,945.00
1.3	**Lain - lain Pendapatan daerah yang Sah**	23,345,588,108.00	24,617,922,659.00	25,959,599,443.00	27,374,397,612.00	28,866,302,281.00	30,439,515,755.00
1.3.1	Pendapatan Hibah						
1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	23,345,588,108.00	24,617,922,659.00	25,959,599,443.00	27,374,397,612.00	28,866,302,281.00	30,439,515,755.00

B Proyeksi Belanja Daerah

Belanja daerah mengacu pada pendekatan yang direncanakan dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah untuk mengelola anggaran belanja dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas serta asas kepatutan dan kewajaran. Untuk itu pemerintah daerah harus memiliki rencana anggaran yang matang yang mencakup identifikasi kebutuhan, prioritas, dan alokasi dana yang tepat untuk setiap program pembangunan. Diharapkan dapat menjamin seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kebijakan pengalokasian belanja daerah yang pertama adalah menetapkan pada belanja yang wajib di luar Pagu OPD antara lain belanja transfer, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia (penerimaan) dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Adapun kebijakan perencanaan pagu indikatif OPD diarahkan pada:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Tapanuli Tengah yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
2. Belanja penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

3. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
4. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah yaitu:
    a. Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tugas pokok fungsi OPD.
    b. Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan OPD dan program/kegiatan prioritas yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah
5. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Kabupaten Tapanuli Tengah, termasuk investasi bidang pendidikan, keuangan persewaan & jasa perusahaan, perdagangan, hotel & restoran.

Secara keseluruhan Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.87 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029

No	Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2039
2	**Belanja**	**1.226.207.680.984,00**	**1.307.169.513.560,32**	**1.319.959.567.426,45**	**1.336.452.025.683,76**	**1.358.183.720.560,21**	**1.390.367.426.895,37**
2.1	**Belanja Operasi**	**890.692.143.006,40**	**949.501.159.845,42**	**958.791.592.994,61**	**970.771.376.857,04**	**986.556.834.884,13**	**1006409850086,81**
2.1.1	Belanja Pegawai	528.542.438.969,00	563.440.087.317,56	568.953.090.024,84	576.061.970.720,26	585.429.162.910,50	599.301.572.050,68
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	343.897.535.418,40	366.603.782.588,22	370.190.832.376,48	374.816.244.397,32	380.911.032.763,42	389.937.152.450,10
2.1.3	Belanja Bunga	3.108.426.269,00	3.313.663.840,96	3.346.086.521,10	3.387.894.765,56	3.442.984.431,26	
2.1.4	Belanja Subsidi						
2.1.5	Belanja Hibah	15.143.742.350,00	16.143.626.098,68	16.301.584.072,19	16.505.266.973,90	16.773.654.778,95	17.171.125.586,03
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial						
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan						
2.2	**Belanja Modal**	**123.417.417.758,59**	**131.566.200.765,36**	**132.853.515.667,75**	**134.513.476.408,63**	**136.700.764.668,82**	**143464614456,856**
2.2.1	Belanja Tanah						
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	25.277.178.033,40	26.946.134.024,85	27.209.789.581,45	27.549.766.903,43	27.997.746.416,92	28.661.184.827,41
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	51.428.155.498,19	54.823.761.136,39	55.360.186.482,00	56.051.893.703,34	56.963.338.804,10	58.313.149.834,96
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	43.291.604.227,00	46.149.984.310,36	46.601.540.729,88	47.183.811.569,22	47.951.055.118,87	52611879707,7016
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	3.420.480.000,00	3.646.321.293,76	3.681.998.874,42	3.728.004.232,65	3.788.624.328,93	3.878.400.086,79

No	Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2039
2.3	**Belanja Tidak Terduga**	**4.733.524.619,01**	**5.046.061.258,31**	**5.095.434.652,23**	**5.159.100.423,04**	**5.242.991.198,07**	**5.367.229.831,24**
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	4.733.524.619,01	5.046.061.258,31	5.095.434.652,23	5.159.100.423,04	5.242.991.198,07	5.367.229.831,24
2.4	**Belanja Transfer**	**207.364.595.600,00**	**221.056.091.691,23**	**223.219.024.111,88**	**226.008.071.995,05**	**229.683.129.809,19**	**235.125.732.520,45**
2.4.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	2.904.793.800,00	3.096.586.294,01	3.126.884.969,95	3.165.954.363,53	3.217.435.114,73	3.293.675.895,20
2.4.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	204.459.801.800,00	217.959.505.397,22	220.092.139.141,92	222.842.117.631,52	226.465.694.694,46	231.832.056.625,25
3	Total Surplus/ (Defisit)	-3.157.174.876,00	-41.336.706.130,32	-29.818.795.679,46	-20.534.467.318,76	-14.812.463.790,21	-17.621.880.603,37

C Proyeksi Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan pembiayaan daerah pada proyeksi pembiayaan Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2025-2029 adalah dengan menekan dan menurunkan atau membuat nilai SiLPA konstan sebagaimana target APBD 2024 sebagai sumber penerimaan Daerah sekaligus menekan seluruh bentuk pengeluaran pembiayaan. Hasil yang ingin dicapai adalah bagaimana menciptakan pembiayaan netto bernilai positif agar dapat menutup defisit anggaran yang ada.

Pada proyeksi penerimaan pembiayaan yang paling berkontribusi adalah besaran SiLPA. Nilai SiLPA kurun waktu 2025-2029 adalah konstan sesuai target APBD 2024 yaitu sebesar Rp. 19,632 miliar. Sementara pada pos pengeluaran pembiayaan hanya ada pos untuk Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo yang nilainya konstan sebagaimana target APBD 2024 sebesar Rp. 10,451 miliar pertahun hingga 2029.

Secara keseluruhan terdapat beberapa arah kebijakan pembiayaan terkait kondisi surplus atau desifit anggaran. Kebijakan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

1. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Darah dalam keadaan surplus maka akan dilakukan pemberdayaan kas sebagai investasi jangka pendek dalam bentuk deposito sehingga akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari pendapatan bunga deposito
2. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam keadaan defisit maka akan dilakukan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya untuk menutup defisit. Untuk menutup defisit maka akan dilakukan rasionalisasi belanja program dan kegiatan yang diusulkan oleh OPD.

Adapun proyeksi pembiayaan dan keseluruhan APBD Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.88 Proyeksi Pembiayaan Daerah

No	Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**69,799,440,317.90**	**55,839,552,254.32**	**44,671,641,803.46**	**35,737,313,442.76**	**28,589,850,754.21**	**22,871,880,603.37**
3.1.1	SiLPA	69,799,440,317.90	55,839,552,254.32	44,671,641,803.46	35,737,313,442.76	28,589,850,754.21	22,871,880,603.37
3.1.2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah						
3.1.3	Penerimaan pinjaman daerah						
3.1.4	Pinjaman Dalam Negeri						
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**14,152,846,124.00**	**14,502,846,124.00**	**14,852,846,124.00**	**15,202,846,124.00**	**13,777,386,964.00**	**5,250,000,000.00**
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3,500,000,000.00	3,850,000,000.00	4,200,000,000.00	4,550,000,000.00	4,900,000,000.00	5,250,000,000.00
3.2.2	Pembayaran Pokok Utang	10,652,846,124.00	10,652,846,124.00	10,652,846,124.00	10,652,846,124.00	8,877,386,964.00	0
3.2.3	Pemberian Pinjaman Daerah						
	Pembiayaan Netto	**55,646,594,193.90**	**41,336,706,130.32**	**29,818,795,679.46**	**20,534,467,318.76**	**14,812,463,790.21**	**17,621,880,603.37**
	SiLPA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2.6 Permasalahan dan Isu Strategis

Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah selalu memiliki dinamika permasalahan dan isu yang selalu mengiringi. Permasalahan merupakan gap antara rencana dan realisasi, permasalahan dapat diartikan belum tercapainya tujuan dari perencanaan pembangunan daerah. Dalam merumuskan permasalahan perlu adanya identifikasi dan analisis dari evaluasi pencapaian-pencapaian pembangunan sebelumnya, sebagai gambaran apa yang menjadi sumber/akar masalah dan bagian mana yang harus diperbaiki. Perumusan permasalahan pembangunan merupakan bagian penting dalam perencanaan. Dengan mengidentifikasi permasalahan yang tepat, diharapkan akan mampu memberikan arah pijakan dalam perencanaan untuk menyusun dan merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Sehingga kebijakan daerah sebagai tindak lanjut, diharapkan mampu mengatasi permasalahan secara efektif dan efisien. Selain permasalahan, dalam perencanaan pembangunan perlu adanya antisipasi isu strategis baik berupa ancaman maupun peluang yang berdampak besar dalam pembangunan daerah.

Memahami dinamika permasalahan dan gejolak pembangunan dengan memperhatikan isu yang berpotensi akan dihadapi oleh Kabupaten Tapanuli Tengah, maka perlu mengidentifikasi isu strategis pembangunan. Dalam mengidentifikasi isu strategis perlu menelaah isu Internasional, Nasional, dan daerah serta masukan dari masyarakat sebagai satu kesatuan utuh dalam penyelenggaraan pembangunan. Dengan memperhatikan dari seluruh aspek, maka diharapkan pembangunan bisa lebih responsif dan adaptif. Dengan ini diharapkan permasalahan dan isu strategis mampu menjadi pijakan yang tepat dalam merumuskan kebijakan dan menentukan tujuan dan sasaran pembangunan.

2.6.1 Permasalahan

Dengan berbagai analisis yang telah dijabarkan pada bab gambaran

umum daerah, maka dalam perumusan permasalahan pembangunan daerah, dapat identifikasi faktor-faktor yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah. Setelah menelaah kajian data dan informasi pada gambaran umum kondisi daerah serta menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, maka diidentifikasi permasalahan utama pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah adalah "Masih Belum Optimalnya Kesejahteraan Masyarakat yang Berkualitas dan Berkeadilan" dengan 6 (enam) permasalahan pokok yaitu:

1. Belum optimalnya perekonomian daerah yang tumbuh dan tangguh

   Belum optimalnya perekonomian di Kabupaten Tapanuli Tengah, yang tumbuh dan tangguh, menjadi tantangan utama bagi pengembangan wilayah ini. Meskipun potensi alam yang melimpah seperti pertanian, kehutanan, dan pariwisata, namun masih terdapat hambatan dalam infrastruktur dasar dan akses pasar yang memadai. Hal ini menghambat pertumbuhan sektor ekonomi lokal serta kesempatan kerja bagi penduduk setempat. pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Tengah selama tiga tahun terakhir menunjukkan tren yang lebih lambat dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan, serta dengan Kabupaten Tapanuli Selatan dan Pakpak Bharat. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama dalam sektor pertanian, kehutanan, dan pariwisata, namun masih menghadapi beberapa tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya. Faktor utama yang mempengaruhi meliputi infrastruktur yang belum memadai, terutama akses transportasi dan jaringan komunikasi yang terbatas, serta kurangnya investasi yang cukup dalam pengembangan sumber daya manusia.

   Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya yang komprehensif dari pemerintah daerah bersama dengan sektor swasta dan masyarakat

lokal. Pertama, peningkatan infrastruktur harus menjadi prioritas utama, dengan memperbaiki jaringan jalan dan sarana transportasi lainnya untuk memudahkan akses ke pasar dan distribusi hasil produksi. Kedua, perlunya dorongan investasi yang lebih besar dalam sektor-sektor ekonomi potensial seperti pariwisata yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi lokal secara signifikan. Langkah ini akan membantu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Tengah.

2. Belum optimalnya peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur pembangunan

   Belum optimalnya peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur pembangunan di Kabupaten Tapanuli Tengah telah menarik perhatian baik masyarakat maupun pemerintah setempat. Meskipun telah dilakukan upaya untuk memperbaiki kondisi infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan sarana publik lainnya. Jalan dalam kondisi baik mengalami penurunan dari 55,62 persen pada tahun 2022 menjadi 43,76 persen, di mana hal ini menunjukkan bahwa belum optimalnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.

3. Belum optimalnya pemerataan kualitas Sumber Daya Manusia

   Belum optimalnya pemerataan kualitas Sumber Daya Manusia mencerminkan sebuah tantangan yang signifikan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan pendidikan dan akses layanan kesehatan, masih terdapat kesenjangan yang mencolok dalam kemampuan dan kesempatan yang diperoleh oleh penduduk setempat. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Tapanuli Tengah masih selama 8,92 tahun di mana hal ini lebih kecil dibandingkan Rata-Rata Lama Sekolah tingkat provinsi dan nasional. Selain itu, umur harapan hidup yang bervariasi di wilayah ini juga menjadi indikator penting dalam mengevaluasi kesejahteraan masyarakat dan dampak dari ketimpangan

dalam akses pendidikan. Usia Harapan Hidup Kabupaten Tapanuli Tengah terus mengalami peningkatan hingga tahun 2024 mencapai 71,96 tahun. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa permaslaahan dalam bidang kesehatan, seperti stunting yang masih sebesar 32,30 persen apda tahun 2024. Penyakit tuberkulosis juga masih menjadi permasalahan, di mana pada tahun 2024 sebesar 38,86 persen penemuan kasus tuberkulosis dan penanganannya yang berhasil hanya sebesar 68,57 persen.

4. Belum optimalnya pengentasan kemiskinan secara masif dan terstruktur

   Belum optimalnya pengentasan kemiskinan secara masif dan terstruktur menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi Kabupaten Tapanuli Tengah. Meskipun telah dilakukan upaya untuk mengurangi angka kemiskinan, tantangan seperti ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial, kurangnya kesempatan kerja yang layak, serta pembangunan infrastruktur yang belum merata, masih menjadi hambatan utama.

   Kabupaten Tapanuli Tengah menunjukkan perbandingan pengeluaran per kapita yang lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Hal ini mencerminkan tantangan yang masih dihadapi dalam upaya pengentasan kemiskinan secara menyeluruh dan terstruktur di Kabupaten Tapanuli Tengah. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan langkah-langkah lebih lanjut guna meningkatkan efektivitas program-program pembangunan dan bantuan sosial agar dapat memberikan dampak yang lebih signifikan bagi pengurangan tingkat kemiskinan di daerah tersebut.

5. Belum optimalnya implementasi Reformasi Birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik

   Tantangan utama yang dihadapi Kabupaten Tapanuli Tengah adalah belum optimalnya implementasi Reformasi Birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini tecermin dari indeks reformasi birokrasi

yang masih berada pada predikat C hingga tahun 2023. Angka ini mencerminkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam birokrasi, masih terdapat ruang besar untuk perbaikan yang lebih lanjut. Salah satu kendala utama adalah kurangnya koordinasi yang efektif antara unit-unit birokrasi di tingkat kabupaten. Sistem koordinasi yang belum terintegrasi dengan baik dapat menghambat proses implementasi kebijakan reformasi birokrasi secara menyeluruh. Selain itu, rendahnya kapasitas dan keterampilan administratif di beberapa unit kerja pemerintahan juga menjadi faktor penghambat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, aspek budaya organisasi yang belum sepenuhnya mendukung reformasi birokrasi juga turut berperan. Adopsi nilai-nilai seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan di seluruh tingkatan birokrasi. Di sisi lain, beberapa gedung kantor juga masih banyak yang kurang layak dan belum tertata dengan baik, sementara itu Gedung kantor yang baik dengan tata ruang yang ergonomis dan fasilitas yang memadai termasuk kelanjutan pembangunan Kantor Induk Pemerintahan / Kantor Bupati, dapat menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas pegawai. Selain itu, nilai Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang didapatkan oleh PNS di lingkungan Kabupaten Tapanuli Tengah masih tergolong cukup rendah dibandingkan dengan pada masa sebelum pandemi *Covid-19*, sementara itu TPP merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mendorong kinerja dan kesejahteraan pegawai dalam konteks reformasi birokrasi mengingat dinamika tugas-tugas di lingkungan pemerintahan membutuhkan kinerja yang maksimal dari tiap pegawai. Dibutuhkan komitmen yang kuat dari pimpinan pemerintahan kabupaten untuk memastikan bahwa reformasi birokrasi bukan hanya menjadi agenda formal, tetapi juga diimplementasikan dengan sungguh-sungguh untuk

menghasilkan perubahan yang nyata dalam pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya secara efektif.

6. Meningkatnya potensi penurunan kualitas lingkungan hidup sebagai dampak aktivitas ekonomi

   Kabupaten Tapanuli Tengah, meningkatnya aktivitas ekonomi berpotensi menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup yang signifikan. Salah satu permasalahan utama adalah degradasi lingkungan akibat dari eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol, seperti deforestasi dan pertambangan ilegal. Praktik-praktik ini sering kali dilakukan tanpa memperhatikan dampak jangka panjang terhadap ekosistem lokal, termasuk hilangnya keanekaragaman hayati dan kerusakan habitat satwa liar yang ada di wilayah tersebut.

   Selain itu, pertumbuhan infrastruktur yang pesat juga berpotensi mempengaruhi kualitas lingkungan secara negatif. Pembangunan jalan raya, pemukiman baru, dan fasilitas industri dapat menyebabkan peningkatan polusi udara, air, dan tanah. Hal ini bisa mengancam kesehatan masyarakat setempat serta memperburuk kondisi ekologis di sekitar area tersebut.

   Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi antara pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Pemerintah daerah perlu menerapkan regulasi yang ketat terkait dengan pengelolaan lingkungan dan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat, termasuk pemangku kepentingan lokal dan komunitas adat, juga penting untuk memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan mempertimbangkan dampak lingkungan secara serius dan mengikuti prinsip pembangunan berkelanjutan.

Permasalahan pembangunan berdasarkan urusan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.89 Permasalahan Pembangunan menurut Urusan Pemerintahan

No.	Urusan Pembangunan Daerah	Permasalahan Per Urusan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB DASAR		
1	Pendidikan	- Belum optimalnya peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan daerah, khususnya sarana dan prasarana fisik serta sistem pendukung.
		- Angka partisipasi sekolah semakin rendah di setiap jenjang pendidikan.
		- Belum optimalnya kualitas dan kualifikasi tenaga pendidikan dan kependidikan yang merata.
		- Rata-rata lama sekolah penduduk masih cukup rendah dan di bawah angka Provinsi Sumut.
2	Kesehatan	- Belum optimalnya peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat.
		- Masih cukup tingginya prevalensi stunting.
		- Belum meratanya fasilitas dan pelayanan kesehatan pada seluruh wilayah dan lapisan masyarakat.
		- Pemerataan tenaga kesehatan yang berkualitas belum optimal.
		- Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat.
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	- Belum optimalnya kapasitas maupun kualitas jalan.
		- Belum optimalnya pengelolaan jaringan irigasi dan drainase.
		- Belum optimalnya peningkatan penyediaan infrastruktur air minum, akses masyarakat terhadap air minum bersih, dan pengelolaan air limbah domestik.
		- Belum optimalnya implementasi rencana pembangunan infrastruktur berdasarkan RTKW.
4	Perumahan dan Pemukiman	- Belum optimalnya penanganan pemukiman kumuh.
		- Belum optimalnya penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
		- Belum optimalnya pemenuhan dan kelayakan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk perumahan dan permukiman.
5	Ketertiban dan Ketentraman Umum	- Belum optimalnya pencegahan pelanggaran PERDA oleh masyarakat.
		- Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketentraman umum.
		- Belum optimalnya mitigasi dan penanganan bencana, khususnya banjir dan longsor.
6	Sosial	- Belum optimalnya pelayanan, pemberdayaan, dan rehabilitasi PPKS.
		- Belum optimalnya ekspansi perlindungan dan jaminan sosial masyarakat.
		- Belum optimalnya pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi dalam perlindungan sosial.

No.	Urusan Pembangunan Daerah	Permasalahan Per Urusan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON-DASAR		
7	Tenaga Kerja	- Belum optimalnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja (banyak berpendidikan SD ke bawah).
		- Belum optimalnya dukungan pemerintah dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas usaha mandiri.
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	- Belum optimalnya peran, partisipasi, dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan.
		- Belum optimalnya antisipasi dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
9	Pangan	- Masih adanya wilayah rawan pangan di beberapa wilayah.
		- Belum optimalnya konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman.
10	Pertanahan	- Belum optimalnya pelayanan administrasi pertanahan.
11	Lingkungan Hidup	- Meningkatnya potensi kerusakan lingkungan sebagai dampak aktivitas ekonomi.
		- Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.
12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	- Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan.
		- Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan.
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	- Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa dalam pemberdayaan masyarakat.
URUSAN PILIHAN		
25	Kelautan dan Perikanan	- Pengelolaan sumber daya perikanan budidaya belum optimal.
		- Belum optimalnya produktivitas penangkapan ikan di laut.
26	Pariwisata	- Belum optimalnya kualitas infrastruktur pendukung pariwisata dan promosi destinasi.
		- Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif berbasis produk unggulan daerah.
27	Pertanian	- Belum optimalnya tingkat produksi dan produktivitas komoditas pertanian.
		- Belum optimalnya hilirisasi produk pertanian.
28	Perdagangan	- Belum optimalnya daya saing produk unggulan daerah.
		- Belum optimalnya pengendalian harga kebutuhan pokok.
		- Belum optimalnya jangkauan jaringan perdagangan.
29	Perindustrian	- Belum optimalnya pengembangan sentra industri berbasis produk unggulan.
		- Belum optimalnya peningkatan nilai tambah produk melalui hilirisasi.
URUSAN PENUNJANG		
30	Penelitian dan Pengembangan	- Belum optimalnya penelitian dan pengembangan untuk akselerasi pembangunan.

No.	Urusan Pembangunan Daerah	Permasalahan Per Urusan
31	Perencanaan	- Belum optimalnya integrasi dan sinkronisasi dokumen perencanaan.
		- Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan yang komprehensif.
32	Keuangan	- Belum optimalnya pengelolaan aset daerah.
		- Belum optimalnya kemandirian fiskal daerah.
33	Kepegawaian	- Belum optimalnya pemetaan kebutuhan pegawai sesuai kompetensi.
		- Belum optimalnya pengembangan kompetensi ASN berbasis kinerja.
		- Belum optimalnya sistem *reward and punishment* untuk ASN.
34	Pengawasan	- Belum optimalnya fungsi pengawasan internal pemerintahan.
		- Belum optimalnya tindak lanjut temuan pengawasan.
35	Sekretariat Dewan	- Belum optimalnya tata kelola kesekretariatan DPRD.
36	Kesatuan Bangsa dan Politik	- Tingginya potensi penurunan pemahaman ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
		- Belum optimalnya fasilitas pendidikan politik.

2.6.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis mencakup berbagai permasalahan yang menjadi perbincangan di tingkat internasional, nasional, dan regional karena relevansinya terhadap kondisi dan perihal yang sangat penting dalam pembangunan daerah, baik pada masa kini maupun masa mendatang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memandang isu-isu strategis sebagai panduan utama dalam merancang program kegiatan yang menjadi prioritas dalam pembangunan jangka panjang. Hal ini bertujuan agar pencapaian tujuan pembangunan daerah dapat dilakukan secara terstruktur, tepat, dan efisien.

Dengan memberikan prioritas pada penanganan dan antisipasi terhadap isu-isu strategis, kita dapat menciptakan keunggulan tersendiri dalam meningkatkan peluang mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Namun, sebaliknya, jika isu-isu strategis diabaikan, kemungkinan terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan tahapan pembangunan daerah dapat menjadi kenyataan. Oleh karena itu, identifikasi permasalahan pembangunan daerah

yang bersifat strategis dari berbagai bidang dan memiliki pengaruh terhadap agenda pembangunan jangka panjang menjadi langkah awal dalam merumuskan isu strategis.

Rumusan isu strategis melibatkan identifikasi isu internasional, isu nasional, dan isu regional yang saling terkait dan terintegrasi. Dengan demikian, dapat dipahami kompleksitas isu-isu tersebut dan merancang strategi yang holistik untuk menghadapinya. Dengan mengakui pentingnya isu-isu strategis, kita dapat meminimalkan risiko kegagalan dan mendorong kemajuan yang berkelanjutan dalam pembangunan daerah.

A Isu Strategis Internasional

Isu strategis internasional menjadi isu global yang penting dalam pembangunan nasional pada jangka menengah yang dapat memberikan pengaruh pada pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah.

1. Cuaca Ekstrem

   Cuaca ekstrem yang terkait dengan perubahan iklim menjadi perhatian global karena dampaknya yang merusak dan lintas negara. Cuaca ekstrem memicu bencana alam seperti badai tropis, banjir yang menghancurkan infrastruktur, dan kekeringan yang mengancam ketahanan pangan, menimbulkan kerugian besar bagi kehidupan manusia, ekonomi, dan lingkungan. Selain itu, perubahan iklim menyebabkan migrasi massal akibat kerusakan lingkungan atau hilangnya mata pencaharian. Isu ini berdampak signifikan di Kabupaten Tapanuli Tengah, yang kaya akan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam. Perubahan pola cuaca seperti hujan deras dan periode kekeringan mengancam ekosistem, menyebabkan banjir dan tanah longsor yang merusak habitat satwa liar serta mengancam spesies endemik. Kekeringan berkepanjangan juga mempengaruhi sumber daya air yang penting bagi sektor pertanian dan peternakan—sektor unggulan di Tapanuli Tengah. Tanaman padi, jagung, serta hasil peternakan seperti sapi dan kambing menghadapi tantangan serius, mengancam ketahanan

pangan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Perubahan Kritikal terhadap Ekosistem

   Perubahan kritikal terhadap ekosistem merupakan isu signifikan dalam pembangunan global yang perlu mendapat perhatian serius dalam rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Tapanuli Tengah 2025-2029. Perubahan ini mencakup peningkatan suhu global, penurunan keanekaragaman hayati, serta degradasi lingkungan akibat deforestasi, penambangan, dan polusi. Dampaknya meluas ke sektor-sektor vital seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal, dengan potensi gangguan terhadap pola musim tanam, penurunan hasil panen, dan kerusakan ekosistem yang mendukung sumber daya perikanan. Oleh karena itu, penting bagi Tapanuli Tengah untuk mengintegrasikan strategi mitigasi dan adaptasi dalam perencanaan pembangunan, melalui upaya rehabilitasi hutan, penggunaan energi terbarukan, pelestarian keanekaragaman hayati, serta pengembangan teknologi pertanian dan perikanan yang adaptif terhadap perubahan iklim. Pendekatan holistik dan berkelanjutan ini tidak hanya akan mengurangi dampak negatif perubahan ekosistem, tetapi juga membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi hijau yang menjamin kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

3. Biodiversity Loss dan Gangguan Ekosistem

   Hilangnya keanekaragaman hayati atau biodiversity loss menjadi isu serius di Kabupaten Tapanuli Tengah, yang dikenal dengan kekayaan hutan dan keanekaragaman hayatinya. Dengan upaya peningkatan ekonomi yang pesat di wilayah ini, penurunan keanekaragaman hayati mengancam ketahanan pangan lokal melalui berkurangnya pilihan makanan dan memicu eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam. Kabupaten Tapanuli Tengah, yang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, menghadapi tantangan serius dari gangguan ekosistem yang dapat mengganggu pola tanam, hasil panen,

serta keseimbangan ekosistem yang mendukung sumber daya perikanan dan hasil hutan. Untuk mengatasi masalah ini, kerjasama antara pemerintah, masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan sangat penting. Kebijakan yang efektif, insentif, serta manajemen sumber daya alam yang berkelanjutan perlu diterapkan untuk melindungi keanekaragaman hayati dan mencegah eksploitasi yang merugikan keberlanjutan lingkungan. Mengingat kompleksitas sosial, politik, dan ekonomi yang terlibat, pendekatan ekologi politik dapat membantu memahami dan mengatasi kehilangan keanekaragaman hayati serta kesulitan dalam diversifikasi sumber pangan lokal. Dengan mengakui peran penting masyarakat adat dan lokal dalam pelestarian keanekaragaman hayati serta memperbaiki kebijakan integrasi, diharapkan Kabupaten Tapanuli Tengah dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara lebih efektif.

4. Krisis Sumber Daya Alam

   Krisis Sumber Daya Alam menjadi isu global yang memberikan dampak strategis bagi pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah. Krisis ini mencakup penurunan cadangan air bersih, degradasi kualitas tanah, deforestasi, dan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam. Dampaknya sangat terasa di Kabupaten Tapanuli Tengah, yang ekonominya bergantung pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Penurunan kualitas tanah dapat mengurangi produktivitas pertanian, sementara penipisan cadangan air bersih dapat mengancam ketersediaan air untuk kebutuhan rumah tangga dan pertanian. Selain itu, deforestasi dapat merusak ekosistem hutan yang mendukung keanekaragaman hayati serta mengurangi kemampuan hutan dalam menyerap karbon. Untuk menghadapi tantangan ini, perencanaan pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah harus mengintegrasikan strategi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Langkah-langkah tersebut meliputi rehabilitasi hutan, konservasi sumber daya air,

dan penerapan praktik pertanian serta perikanan yang ramah lingkungan. Rehabilitasi hutan dapat memperbaiki kualitas tanah dan mendukung ekosistem yang sehat, sedangkan konservasi air akan memastikan ketersediaan sumber air untuk kebutuhan masyarakat. Selain itu, praktik pertanian dan perikanan yang berkelanjutan dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung ketahanan pangan lokal. Langkah-langkah ini tidak hanya penting untuk mengatasi krisis sumber daya alam tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tapanuli Tengah.

5. Misinformasi dan Disinformasi

   Misinformasi dan disinformasi telah menjadi isu global yang berdampak signifikan pada pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah. Di era digital ini, penyebaran informasi yang tidak akurat atau sengaja dipalsukan melalui media sosial dan platform online lainnya dapat menghambat berbagai aspek pembangunan, termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan. Masyarakat yang terpapar informasi yang salah dapat membuat keputusan yang tidak berdasarkan fakta, yang dapat mengakibatkan kebijakan publik yang tidak efektif serta potensi konflik sosial. Di Tapanuli Tengah, disinformasi yang menyasar isu-isu sensitif seperti perubahan iklim, kesehatan, dan penggunaan sumber daya alam dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi lokal. Oleh karena itu, penting bagi Kabupaten Tapanuli Tengah untuk meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat dan memperkuat mekanisme verifikasi informasi. Langkah ini akan membantu memastikan bahwa keputusan pembangunan didasarkan pada informasi yang akurat, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis pada kebenaran.

6. Dampak Buruk Teknologi AI

   Dampak buruk teknologi *Artificial Intelligence* (AI) dalam skala global juga mempengaruhi pembangunan di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Meskipun AI memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dalam berbagai sektor seperti layanan publik, pertanian, dan pendidikan, penggunaan yang tidak hati-hati dapat menimbulkan risiko signifikan. Salah satu isu utama adalah potensi pengangguran akibat otomatisasi pekerjaan. Dengan mesin dan algoritma AI yang menggantikan peran manusia, banyak pekerja di Tapanuli Tengah terutama yang terlibat dalam sektor yang mengandalkan tenaga kerja manual berisiko kehilangan pekerjaan. Hal ini dapat memperburuk kemiskinan dan memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi di wilayah tersebut. Selain itu, AI juga menghadapi tantangan serius terkait privasi dan keamanan data. Di era digital, data merupakan aset berharga yang sering dimanfaatkan oleh teknologi AI untuk analisis dan pengambilan keputusan. Namun, tanpa regulasi dan sistem keamanan yang memadai, data pribadi masyarakat Tapanuli Tengah berpotensi rentan terhadap penyalahgunaan dan pelanggaran privasi. Kebocoran data dapat menyebabkan masalah seperti penipuan identitas dan penurunan kepercayaan publik terhadap teknologi. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah perlu mengembangkan kebijakan yang memastikan penggunaan AI secara etis dan bertanggung jawab. Kebijakan ini harus melindungi hak-hak individu dan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan bahwa teknologi AI memberikan manfaat tanpa menimbulkan dampak negatif yang merugikan

7. Involuntary Migration

   Migrasi paksa merupakan isu global yang juga mempengaruhi pembangunan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Fenomena ini sering kali dipicu oleh konflik, bencana alam, atau ketidakstabilan ekonomi, yang memaksa banyak orang meninggalkan tempat tinggal mereka dan mencari perlindungan di daerah lain. Di Tapanuli Tengah, kedatangan migran paksa dapat menimbulkan tantangan tersendiri dalam penyediaan layanan dasar seperti perumahan, kesehatan, dan pendidikan.

Peningkatan jumlah penduduk mendadak dapat membebani infrastruktur dan sumber daya yang ada sehingga pemerintah setempat perlu mempersiapkan diri untuk menangani beban ini dan memastikan migran dapat berintegrasi dengan baik ke dalam komunitas lokal. Selain itu, migrasi paksa dapat mempengaruhi dinamika sosial dan ekonomi di Kabupaten Tapanuli Tengah. Sementara kehadiran migran dapat memperkenalkan keanekaragaman budaya dan tenaga kerja baru yang mungkin mendukung pembangunan daerah, ketidakmampuan untuk mengelola proses ini dengan baik dapat menimbulkan ketegangan sosial antara penduduk asli dan pendatang. Hal ini berpotensi mengarah pada konflik sosial dan ketidakstabilan yang dapat menghambat pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan untuk menangani migrasi paksa, termasuk program integrasi sosial dan ekonomi yang memastikan kesejahteraan semua pihak, serta upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tapanuli Tengah.

8. *Cyber Insecurity*

Ketidakamanan siber adalah isu global yang semakin memengaruhi pembangunan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya akses internet, daerah ini memperoleh banyak manfaat, tetapi juga menghadapi ancaman baru yang harus diwaspadai. Serangan siber seperti peretasan, pencurian data, dan malware dapat menyebabkan kerugian signifikan bagi pemerintah, bisnis, dan masyarakat. Di Tapanuli Tengah, ketidakamanan siber dapat menghambat efisiensi layanan pemerintah, mengganggu kegiatan ekonomi, dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap teknologi. Selain itu, ancaman siber dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan keamanan lokal. Serangan terhadap infrastruktur kritis seperti jaringan listrik, sistem air, dan transportasi dapat menyebabkan kekacauan dan

kerugian besar. Dengan tingkat kesadaran dan kapasitas yang masih terbatas dalam menghadapi ancaman siber, Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi rentan terhadap serangan semacam ini. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk meningkatkan literasi digital dan keamanan siber di masyarakat dan institusi. Upaya seperti pelatihan keamanan siber, penerapan kebijakan perlindungan data yang ketat, dan kerja sama dengan ahli keamanan siber dapat membantu mengurangi risiko dan memastikan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Tengah berlangsung dengan aman dan berkelanjutan.

9. Polarisasi Sosial

   Polarisasi sosial merupakan isu global yang semakin dirasakan di Kabupaten Tapanuli Tengah dan mempengaruhi pembangunan daerah ini secara signifikan. Polarisasi sosial, yang sering kali dipicu oleh perbedaan politik, agama, dan ideologi, dapat memecah belah masyarakat dan menciptakan ketegangan antar kelompok. Di Kabupaten Tapanuli Tengah, perbedaan pandangan dan kepentingan antara berbagai kelompok masyarakat bisa menghambat kerjasama yang diperlukan untuk pembangunan. Ketegangan internal dan ketidakpercayaan antar komunitas dapat menghambat berbagai inisiatif pembangunan, mengurangi efektivitas kebijakan publik, serta memperlambat kemajuan ekonomi dan sosial. Selain itu, polarisasi sosial juga dapat mengancam stabilitas politik dan keamanan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Ketika masyarakat terpecah dan saling curiga, risiko terjadinya konflik terbuka meningkat, yang dapat menyebabkan kerusuhan dan ketidakstabilan. Hal ini tidak hanya merusak tatanan sosial tetapi juga mengalihkan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan menjadi penanganan konflik dan pemulihan pasca-konflik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan di Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menerapkan strategi yang mempromosikan dialog, inklusi sosial, dan penguatan kohesi komunitas. Program-program yang

mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan menciptakan ruang bagi berbagai kelompok untuk berkolaborasi dapat membantu meredakan ketegangan dan memastikan pembangunan yang lebih harmonis dan berkelanjutan.

10. Polusi

    Polusi di Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi masalah yang semakin mendesak seiring dengan perkembangan daerah dan peningkatan aktivitas ekonomi. Polusi udara, yang sebagian besar disebabkan oleh emisi kendaraan bermotor dan aktivitas industri, mulai mengancam kualitas hidup masyarakat setempat. Selain itu, polusi air, yang disebabkan oleh limbah rumah tangga dan industri yang tidak dikelola dengan baik, mengancam kesehatan ekosistem sungai dan ketersediaan air bersih. Masalah sampah plastik dan limbah padat lainnya juga dapat mencemari lingkungan dan merusak keindahan alam. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam menerapkan kebijakan pengelolaan limbah yang lebih efektif, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya lingkungan, dan mengadopsi teknologi ramah lingkungan. Langkah-langkah ini penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di Kabupaten Tapanuli Tengah dan memastikan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat.

B Isu Strategis Nasional

Isu-isu strategis nasional merupakan isu-isu yang memiliki potensi untuk menghambat pembangunan nasional sehingga perlu adanya antisipasi khusus dalam menghadapinya. Masih adanya isu-isu strategis nasional yang belum terselesaikan menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah untuk berusaha lebih keras dalam menyelesaikannya. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika isu strategis nasional belum terselesaikan dan muncul isu strategis baru yang tentu saja perlu adanya treatment khusus dalam mengantisipasinya. Isu jangka menengah Nasional yang tertuang dalam RPJMN Teknokratik digambarkan dan dijabarkan sebagai berikut:

1. Dampak Hilirisasi Mulai Terlihat Positif Bagi Perekonomian Indonesia

   Hilirisasi industri mengacu pada proses meningkatkan nilai tambah dalam suatu sektor industri melalui peningkatan kegiatan produksi, pengolahan, dan pemasaran produk yang lebih kompleks dan bernilai tinggi. Ini melibatkan transformasi produk mentah atau setengah jadi menjadi produk jadi dengan menggunakan teknologi, pengetahuan, dan keterampilan yang lebih tinggi. Pemerintah melalui Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI) mencatat bahwa realisasi investasi dalam bidang hilirisasi sepanjang Januari hingga Desember 2023 mencapai Rp 375,4 triliun, yang merupakan 26,5% dari total investasi pada periode tersebut. Investasi terbesar terjadi pada sektor smelter mineral, terutama nikel, dengan realisasi mencapai Rp 216,8 triliun. Selain itu, sektor minyak dan gas, kehutanan, pertanian, dan ekosistem kendaraan listrik juga menerima investasi signifikan dalam proses hilirisasi. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa surplus perdagangan pada November 2023 mencapai USD2,41 miliar, dengan surplus akumulatif periode Januari-November 2023 mencapai USD33,63 miliar.

   Hilirisasi menjadi kunci dalam mempercepat sektor industri dan ekspor khususnya di Kabupaten Tapanuli Tengah. Kabupaten Tapanuli Tengah dapat fokus pada peningkatan nilai tambah pada komoditas sumber daya alam. Pemerintah telah menyediakan infrastruktur, insentif fiskal, dan lingkungan bisnis yang kondusif untuk mendukung perkembangan industri hilir. Investasi dalam smelter mineral telah terbukti mendorong ekspor dan meningkatkan pendapatan nasional secara signifikan.

2. Sinkronisasi Kebijakan Makro dan Sektoral

   Sinkronisasi antara kebijakan makro dan sektoral menjadi landasan penting dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan stabil. Koordinasi yang efektif antara kebijakan makro dengan kebijakan yang berfokus pada sektor-sektor spesifik akan memastikan konsistensi

tujuan pembangunan nasional. mengarah pada alokasi sumber daya yang lebih efisien dan efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta pemerataan manfaat ekonomi. Dengan demikian, integrasi yang kokoh antara kedua jenis kebijakan ini tidak hanya menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih stabil, tetapi juga mengoptimalkan potensi pertumbuhan dalam berbagai sektor, menyokong visi pembangunan jangka panjang yang berorientasi pada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, koordinasi kebijakan juga memungkinkan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan mengurangi risiko ketidakseimbangan ekonomi. Misalnya, pengendalian inflasi yang dilakukan melalui kebijakan moneter harus didukung oleh kebijakan sektoral yang memastikan ketersediaan pasokan barang dan jasa yang memadai dengan harga stabil. Dengan demikian, melalui integrasi yang baik antara kebijakan makro dan sektoral, pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia. Integrasi ini harus terjalin dari pusat sampai ke level daerah, yakni Kabupaten Tapanuli Tengah.

3. Penerapan Standar Sustainability yang Tinggi di Level Global

   Dalam era di mana sustainability semakin diakui sebagai komponen penting dalam pengambilan keputusan kebijakan dan pembangunan daerah, penting bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk melaporkan dampak keberlanjutan masyarakat dengan transparan dan akuntabel. Inilah sebabnya mengapa standar keberlanjutan tingkat global menjadi sangat penting. Dalam konteks global, adopsi standar sustainability yang tinggi membantu menciptakan lingkungan yang lebih konsisten dan dapat diandalkan, di mana organisasi dapat dibandingkan dan dievaluasi. Hal ini memungkinkan stakeholders untuk membuat keputusan yang lebih informatif dan berkelanjutan.

4. Tantangan Transisi Energi, namun Ada Peluang Untuk Pemerataan

   Transisi energi menghadapi berbagai tantangan, termasuk infrastruktur mapan yang bergantung pada keterbatasan sumber daya, ketidakpastian ekonomi, dan resistensi politik dari pihak yang terpengaruh secara ekonomi. Meskipun begitu, transisi energi juga membawa peluang besar untuk pemerataan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan. Pengembangan energi terbarukan dapat menciptakan lapangan kerja baru, memajukan teknologi, dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang terbatas. Dengan memperhatikan aspek ini secara serius, transisi energi bisa menjadi sarana untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan akses energi bagi masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, kolaborasi global dalam menghadapi tantangan transisi energi dapat memperkuat solidaritas internasional dan membangun kerangka kerja yang inklusif untuk mendukung negara-negara berkembang dalam mengadopsi teknologi dan praktik terbaru. Tantangan Transisi Energi menggarisbawahi perlunya pendekatan yang holistik dan inklusif dalam mengelola perubahan energi. Hal ini, tidak hanya melibatkan kebijakan yang mendukung investasi dalam energi terbarukan dan efisiensi energi, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan politik untuk memastikan bahwa manfaat dari transisi energi dapat dirasakan secara merata oleh semua lapisan masyarakat, baik di tingkat lokal maupun global.

5. *Aging Population* Negara Maju

   Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengindikasikan bahwa sejumlah provinsi di Indonesia, termasuk Kabupaten Tapanuli Tengah, akan segera mengalami fase penuaan populasi pada tahun 2024. Aging population, yang ditandai dengan peningkatan proporsi penduduk berusia 65 tahun ke atas melebihi 7% dari total populasi, menjadi perhatian serius. Tantangan penuaan penduduk yang dini di Indonesia menjadi fokus perencanaan strategis pemerintah,

terutama dalam upaya mencapai target menjadi Indonesia Emas 2045. Untuk mengantisipasi dampak penuaan populasi, pemerintah telah menyusun upaya strategis melalui Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan. Strategi ini mencakup langkah-langkah untuk memperkuat program perlindungan sosial, pembangunan masyarakat, dan lingkungan yang ramah bagi penduduk lanjut usia. Melalui kesempatan ini, diharapkan kesadaran dan komitmen untuk mempersiapkan Indonesia yang maju, sejahtera, dan inklusif semakin meningkat, terutama dalam rangka merayakan 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada tahun 2045.

C Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara mempersiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan pembangunan. Permasalahan tersebut merupakan *gap expectation* antara kinerja yang dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan. Oleh karena ada kesenjangan yang terjadi, maka perlu diidentifikasi permasalahan yang mengakibatkan kesenjangan tersebut. Dengan adanya permasalahan, pemerintah daerah dapat menetapkan program-program ke depannya sehingga terjadi akselerasi pencapaian tujuan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi Provinsi Sumatera Utara meliputi:

1. Permasalahan Kondisi Geografi
    a. Kondisi topografi wilayah Sumatera Utara khususnya di kawasan Pantai Barat dan Kepulauan Nias sangat berbukit dan bergelombang dengan kondisi struktur tanah yang tidak stabil mengakibatkan tingginya biaya pembangunan infrastruktur;
    b. Sebagian besar wilayah termasuk ke dalam kawasan rawan bencana alam (banjir, tsunami, abrasi, longsor, kebakaran hutan, angin puting beliung, letusan gunung berapi, gempa tektonik dan vulkanik dan lain-lain) sehingga menimbulkan limitasi pengembangan wilayah dan

mitigasi bencana;

c. Adanya konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang antara fungsi lindung dan budidaya (pertambangan, energi, infrastruktur, dan lain-lain) yang berpotensi menimbulkan terjadinya konflik sosial, ekonomi, lingkungan hidup, pertanahan dan pemerintahan.

2. Permasalahan Kondisi Demografi

   a. Masih cukup tingginya angka pertumbuhan penduduk dan adanya kecenderungan peningkatan pertumbuhan selama periode 2025-2029

   b. Ketimpangan distribusi penduduk yang mengakibatkan kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, budaya, ekonomi, infrastruktur dan birokrasi yang cenderung lebih berkembang di daerah yang padat/perkotaan;

   c. Migrasi penduduk mengakibatkan banyak migrasi keluar yang besar dilakukan oleh usia produktif. Sementara Angka Ketergantungan Sumatera Utara masih sebesar 48.65 persen (2024) artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 48-49 jiwa penduduk usia tidak produktif;

   d. Angka usia produktif terus bertambah. Sementara penyediaan lapangan kerja bagi mereka yang memasuki masa produktif tidak balance (seimbang). Kalau ini terus terjadi, kesenjangan ekonomi, kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan akan semakin sulit.

3. Permasalahan Kesejahteraan Ekonomi

   a. Belum Optimalnya Produktivitas Tenaga Kerja

      Tingkat pengangguran Provinsi Sumatera Utara menunjukkan penurunan dalam kurun waktu 2 dekade terakhir yang dapat dilihat dari persentase tingkat pengangguran terbuka Tahun 2005 sebesar 10,98% dan menurun menjadi 5,60% pada Tahun 2024, namun kondisi ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan nasional yang tercatat sebesar 4,91%. Tingginya tingkat pengangguran sangat

mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja menunjukkan besaran kontribusi tenaga kerja dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan ekonomi. Tingkat Produktivitas tenaga kerja Sumatera Utara pada Tahun 2023 sebesar Rp 79,77 juta/tenaga kerja, kondisi ini lebih rendah dibandingkan dengan nasional yang tercatat sebesar Rp 87,96 juta/tenaga kerja.

Tingkat pengangguran yang tinggi dan produktivitas tenaga kerja yang rendah didorong oleh beberapa permasalahan antara lain rendahnya *Human Capital* (pendidikan dan kesehatan), penguasaan teknologi yang kurang, inovasi yang terbatas, kondisi budaya dan etos kerja yang masih minim, dan infrastruktur yang tidak merata.

b. Belum Optimalnya Daya Saing Perekonomian Sumatera Utara

Daya Saing Perekonomian Sumatera Utara yang belum optimal dapat dilihat dari:

1) Sektor industri pengolahan berbasis produk unggulan daerah yang belum berkembang secara maksimal, hal ini dapat dilihat dari stagnannya kontribusi industri pengolahan di Sumatera Utara meskipun kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta perdagangan terus meningkat. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya hilirisasi industri sektor riil (pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan), serta tingginya biaya produksi antara lain bahan baku, bahan bakar, tenaga listrik dan gas, barang lainnya (di luar bahan baku/penolong) serta sewa gedung, mesin dan alat-alat
2) Daya saing ekonomi kreatif yang masih rendah. Perkembangan ekonomi kreatif di Sumatera Utara belum mencapai tingkat kemajuan yang ideal, sektor ini juga memiliki potensi untuk meningkatkan ekonomi lokal. Kualitas sumber daya manusia yang belum optimal, kurangnya promosi dan pemasaran produk ekonomi kreatif, kelembagaan dan jaringan ekonomi kreatif yang

belum maksimal, sistem pembiayaan yang belum memadai, dan kekurangan infrastruktur fisik dan non-fisik yang cukup. Selain itu, peraturan ekonomi kreatif, penghargaan masyarakat terhadap kreativitas, perlindungan hak kekayaan intelektual, jejaring kreatif, pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam dan warisan budaya lokal, dan standarisasi produk juga perlu ditingkatkan. Salah satu faktornya disebabkan oleh rendahnya pertumbuhan UMKM dan IKM baru, dan kualitas produk IKM dan UMKM juga masih tertinggal khususnya dalam hal pemenuhan standarisasi dan sertifikasi yang bersifat wajib seperti Izin Edar BPOM, PIRT, Halal, Batas Maksimal Residu Pestisida dan Batas Kontaminasi (melalui Sertifikasi Analisis atau COA) maupun standarisasi dan sertifikasi yang bersifat umum seperti Good Agricultural Practices (GAP), Good Manufacturing Practices (GMP), Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), Standar Nasional Indonesia (SNI), ISO tertentu, serta terkait HKI (Hak Kekayaan Intelektual) seperti Merek dan Paten. Selain itu juga dalam pemenuhan standarisasi dan sertifikasi yang bersifat khusus seperti Organik, Eco-friendly, Fair Trade, atau Vegan masih sangat terbatas.

3) Daya saing sektor pariwisata yang rendah. Sektor pariwisata di Sumatera Utara menjadi salah satu penyokong perekonomian daerah dan berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah serta menyediakan lapangan pekerjaan dan pemberdayaan masyarakat melalui usaha kecil dan menengah. Namun, kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah dan PDRB belum optimal. Meskipun memiliki Kawasan Danau Toba yang telah ditetapkan sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas sekaligus bagian dari UNESCO Global Geopark. Rendahnya daya saing sektor Pariwisata ditunjukkan melalui

kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir dan masih berada pada nilai yang cukup rendah, yaitu di bawah 3%. Hal ini disebabkan antara lain: (i) masih terbatasnya aksesibilitas, amenitas, atraksi, aktivitas, ancillary dan available packages di destinasi wisata; (ii) masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM pariwisata serta kemitraan dalam pengembangan destinasi wisata, desa wisata dan usaha wisata; dan (iii) belum optimalnya penerapan pariwisata berkelanjutan di destinasi wisata, desa wisata dan usaha wisata. Selain itu, disrupsi dan perubahan preferensi pasar disebabkan oleh digitalisasi, teknologi, dan bencana. Karena transformasi digital yang tidak merata dan kurangnya dukungan dan kebijakan yang memadai, potensi ekonomi kreatif belum dimanfaatkan dengan baik. Serta, belum ada ekosistem yang mendukung komersialisasinya, kurangnya inovasi dan pengembangan produk, marketing digital, serta kurangnya branding dan investasi infrastruktur pariwisata sehingga terbatasnya akses ke pasar global.

4) Rendahnya investasi pada sektor riil seperti industri pengolahan (agroindustri), industri kemaritiman, industri makanan, dan industri manufaktur. Kondisi ini dapat dilihat dari lambatnya perkembangan investasi pada KEK Sei Mangkei, Kawasan Industri Kuala Tanjung, KIM Medan dan DPSP Danau Toba serta Kawasan Strategis Ekonomi lainnya.

c. Disparitas Penduduk Miskin Perkotaan dan Perdesaan Masih Sangat Tinggi.

Walaupun tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera utara menunjukkan tren penurunan dan lebih bagus dari capaian nasional, namun jika dilihat berdasarkan tempat tinggal maka jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan lebih banyak jika dibandingkan

daerah perkotaan. Beberapa faktor penyebabnya antara lain masih tingginya tingkat pengangguran, masih terbatasnya akses dan infrastruktur serta sektor-sektor ekonomi pedesaan yang masih didominasi oleh sektor primer dengan nilai tambah yang rendah.

Selain itu tingginya beban pengeluaran mempengaruhi kesejahteraan masyarakat termasuk masyarakat miskin yang disebabkan masih tingginya harga kebutuhan pokok, biaya kesehatan, biaya pendidikan dan biaya perumahan.

4. Permasalahan Kesejahteraan Sosial dan Budaya
    a. Pembangunan kesehatan dihadapkan pada permasalahan masih rendahnya cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, baik kesehatan ibu dan anak, usia sekolah, usia produktif, lansia dan layanan Kesehatan mental. Pengendalian penyakit dan kapasitas ketahanan kesehatan juga belum optimal. Penyakit menular masih tinggi, penyakit tidak menular terus meningkat, penyakit tropis terabaikan belum dapat dieliminasi, adanya ancaman penyakit berpotensi wabah/kejadian luar biasa, dan perilaku hidup sehat belum membudaya. Selain itu, disparitas kapasitas sistem kesehatan terjadi di seluruh wilayah yang menyebabkan permasalahan pada kualitas pelayanan kesehatan di masyarakat.
    b. Permasalahan pendidikan antara lain belum meratanya akses pendidikan yang menyebabkan ketimpangan partisipasi pendidikan antarwilayah dan sosial-ekonomi. Selain itu, kualitas pendidikan masih rendah yang disebabkan oleh sarana-prasarana pendidikan yang belum memadai, serta kuantitas, kualitas dan distribusi guru yang masih terbatas.
    c. Belum optimalnya penurunan tingkat kemiskinan dan perlindungan dalam menjaga kesinambungan kesejahteraan, khususnya untuk penduduk rentan. Integrasi program bantuan sosial belum maksimal,

terbatasnya layanan dan pengasuhan bagi kelompok rentan, belum meratanya kesempatan kerja dan berusaha bagi penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan, serta rendahnya akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Sementara itu, penyelenggaraan program jaminan sosial belum optimal akibat rendahnya kepesertaan aktif dan literasi masyarakat serta program yang belum sepenuhnya konvergen memberikan perlindungan yang inklusif khususnya bagi pekerja informal dan jaminan hari tua bagi seluruh penduduk.

d. Belum terjaminnya kebebasan dan kesetaraan sipil, belum meratanya informasi dan komunikasi publik, serta Pancasila dan Konstitusi yang belum terinternalisasi. Kelembagaan demokrasi masih bersifat prosedural akibat politik uang dan politisasi SARA dalam pemilu, serta belum optimalnya fungsi lembaga perwakilan.
e. Belum maksimalnya kemampuan literasi keagamaan yang inklusif, moderat, dan berorientasi kemaslahatan serta belum optimalnya penguatan dan penanaman nilai-nilai agama di masyarakat.
f. Belum optimalnya peran dan fungsi keluarga menyebabkan ancaman krisis moral dan karakter di kalangan generasi muda, selain itu Pemenuhan hak dan perlindungan anak, pemuda, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia juga belum optimal.
g. Ketimpangan gender yang masih tinggi sehingga kesetaraan gender dan pembangunan yang inklusif menjadi sulit terwujud.
h. Degradasi karakter dan jati diri serta belum optimalnya implementasi kearifan lokal dan nilai budaya sebagai modal dasar pembangunan masyarakat. Ancaman negatif budaya asing berdampak kepada hilangnya karakter dan jati diri asli masyarakat Sumatera Utara. Selain itu belum optimalnya pemanfaatan nilai budaya dan kearifan lokal dalam mendukung pembangunan.

5. Permasalahan Infrastruktur dan Lingkungan

a. Pembangunan wilayah dan pembangunan sarana dan prasarana yang belum merata

Disparitas ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur merupakan salah satu penyebab ketimpangan antar daerah di Provinsi Sumatera Utara. Konektivitas wilayah yang masih belum terhubung dan kondisi jaringan jalan yang rusak, merupakan salah satu penyebab belum meratanya pembangunan di Sumatera Utara. Selanjutnya infrastruktur lain seperti irigasi juga belum optimal di beberapa wilayah.

Berdasarkan perhitungan kebutuhan fasilitas pendidikan, diperkirakan pada tahun 2025 hingga 2035 fasilitas sekolah dasar (SD/MI dan SMP/MTs) masih mencukupi jumlah penduduk yang diproyeksikan. Dibutuhkan penambahan menjadi 11.653 unit SD/MI dan 4.360 unit SMP/MTs di tahun 2045. Sementara itu, jumlah SMA/SMK/MA diperkirakan yang tersedia saat ini masih mencukupi hingga tahun 2025 dan dibutuhkan penambahan menjadi 3.454 unit di tahun 2045. Untuk fasilitas kesehatan, diproyeksikan dibutuhkan sekitar 152 puskesmas dan 607 puskesmas pembantu/balai pengobatan lingkungan di seluruh Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2045.

Penyediaan infrastruktur dasar lainnya seperti penyediaan air minum, ditandai dengan cakupan layanan akses air minum layak tahun 2024 sebesar 92,94 persen di mana berada di atas capaian nasional sebesar 92,64. Sanitasi, ditandai dengan cakupan layanan air limbah perkotaan dan perdesaan tahun 2022 sebesar 77,69 persen di mana masih berada di bawah capaian nasional sebesar 86,03 persen. rumah layak huni, persampahan juga masih cukup rendah di beberapa wilayah di Sumatera Utara terutama di daerah afirmasi 3T. Masalah banjir juga belum dapat dituntaskan secara komprehensif dan infrastruktur yang belum tangguh bencana, rasio luas kawasan

permukiman rawan banjir terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir pada tahun 2024 sebesar 52,92 persen dan diharapkan menjadi 64,51 persen pada tahun 2026 sesuai dengan dokumen RPA Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026.

Layanan ketenagalistrikan Sumatera masih kekurangan pasokan daya atau beberapa sistem, atau cadangan di pembangkit eksisting yang tidak efisien serta kekurangan pasokan daya untuk daerah perbatasan serta pulau terluar. Hal ini ditandai dengan konsumsi listrik Provinsi Sumatera tahun 2022 sebesar 850-1.050 kWh di mana konsumsi tersebut berada dibawah rata-rata konsumsi listrik nasional pada tahun yang sama sebesar 1.173 kWh. Penyediaan tenaga listrik di Wilayah Sumatera masih belum menjangkau seluruh penduduk secara berkualitas.

Pembangunan infrastruktur transportasi terutama di daerah Metropolitan Medan juga sangat dibutuhkan keberadaannya untuk menunjang mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Infrastruktur digital juga sangat dibutuhkan sebagai sarana komunikasi dan informasi bagi masyarakat mengingat masih ditemukannya daerah yang masih belum terjangkau jaringan komunikasi. Keterbatasan sarana dan prasarana konektivitas antar daerah di wilayah daratan dan kepulauan. Pelabuhan yang menjadi simpul utama sebagai hub domestik memiliki kendala seperti keterbatasan kedalaman alur dan kolam pelabuhan. Bandara perairan belum dikembangkan secara optimal untuk mendukung pariwisata dan aksesibilitas di provinsi/kabupaten perairan. Kapasitas dan kualitas jaringan jalan lintas utama dan daerah belum memadai. Moda angkutan kereta api, belum memadai untuk angkutan barang seperti batu bara dan belum terhubung dengan simpul transportasi pelabuhan serta perkotaan di Sumatera. Transportasi sungai dan danau belum dikembangkan serta belum dimanfaatkan sebagai angkutan pendukung pariwisata.

Rasio konektivitas Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2024 mempunyai nilai 0,604 dan diharapkan akan meningkat menjadi 0,683 pada tahun 2026 (sesuai dengan target dokumen RPA Tahun 2024-2026).

b. Belum Optimalnya Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup

Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya alam masih rendah, ditandai dengan masih tingginya Indeks Risiko Bencana di Provinsi Sumatera Utara di tahun 2023 mencapai 140,65 dibandingkan dengan Indeks Risiko Bencana nasional sebesar 131,85. Dalam hal pengelolaan lingkungan hidup, Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 memiliki nilai indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 73,96 poin (Baik). Pengelolaan lingkungan hidup yang perlu diperhatikan adalah kualitas lahan dan air mengingat indeks kualitas lahan Provinsi Sumatera Utara berada pada nilai 48,69% (Kurang), dan indeks kualitas air dengan nilai 61,09 poin (Sedang). Namun untuk kualitas lingkungan lain seperti indeks kualitas udara (92,26 poin), Indeks kualitas air laut (70,82 poin) memiliki nilai yang baik. Lebih lanjut, permasalahan pembangunan yang dirasakan terkait pengelolaan SDA dan lingkungan hidup ialah menurunnya ketersediaan air, keanekaragaman hayati seperti flora dan fauna, masalah limbah dan persampahan, Iklim dan cuaca ekstrim saat ini harus menjadi perhatian di sektor Pertanian, selain dari aktivitas manusia di darat, kerusakan juga muncul di daerah pesisir sebagai akibat pemanasan global seperti tingkat kerentanan wilayah pesisir Sumatera.

1. Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang belum optimal dan berkualitas. Berdasarkan capaian indeks reformasi birokrasi, Provinsi Sumatera Utara masih membutuhkan optimalisasi capaian dimana pada tahun 2023 kategori predikat kinerja indeks reformasi birokrasi adalah BB

dengan nilai 75,18 poin dari target yang ditetapkan yakni predikat kinerja BB dengan nilai 75,00 poin.

Tata kelola pemerintahan Sumatera Utara belum optimal dilihat dari birokrasi yang ada belum kolaboratif, transformasi digital yang masih belum optimal, penyederhanaan struktur dan mekanisme kerja baru yang belum tuntas, integritas penyelenggaraan negara yang masih menghadapi kendala serta budaya birokrasi belum terimplementasi dengan baik, kualitas akuntabilitas kinerja dan profesionalisme ASN masih perlu ditingkatkan. Di samping itu, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik belum optimal dalam menciptakan sistem pelayanan publik yang berkualitas dan Riset/inovasi belum cukup mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyusunan kebijakan yang efektif.

Dengan memedomani upaya penyelesaian permasalahan pembangunan, Provinsi Sumatera Utara mengangkat isu-isu strategis pembangunan sebagai berikut:

1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

   Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia dihadapkan pada pembangunan dan Pembentukan modal manusia. Modal manusia tersebut dapat terwujud apabila setiap individu sehat, terdidik, dan terlindungi dari berbagai risiko siklus hidup. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan Transformasi Sosial yang menitikberatkan pada penuntasan pemenuhan layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Transformasi Sosial diperlukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus hidup sehingga mampu melahirkan manusia sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing. Pembangunan kesehatan dihadapkan pada peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit, penguatan dan pemerataan kapasitas ketahanan kesehatan, serta responsiveness/ketanggapan sistem kesehatan di

seluruh wilayah. Pembangunan pendidikan dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di berbagai bidang sedangkan Perlindungan sosial yang adaptif ditujukan untuk percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif.

Selanjutnya sistem demokrasi masih prosedural ditandai dengan kapasitas dan kemandirian masyarakat sipil belum kuat; belum terjaminnya kebebasan dan kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik; informasi dan komunikasi publik belum merata; permasalahan politik elektoral seperti politik uang, politisasi isu SARA; nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi yang belum terinternalisasi serta sistem kaderisasi partai politik belum maksimal.

Selain hal di atas nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan konservasi lingkungan menjadi dimensi dasar dalam proses pembangunan kualitas sumber daya manusia. Agama dan kebudayaan harus menjadi landasan spiritual, etika, dan moral dalam penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Dalam hal ini, sumber daya manusia berperan sebagai katalisator transformasi pembangunan dengan dukungan keluarga sebagai institusi internalisasi nilai positif dan pembangunan integritas karakter individu. Selain itu, perlu dipastikan terselenggaranya kebijakan pemerintah yang ramah gender serta inklusif bagi kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas dan lanjut usia, untuk pemerataan pembangunan dan layanan dasar yang optimal.

2. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

   Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas ke destinasi wisata unggulan seperti Danau Toba, Nias, dan Bukit Lawang. Untuk meningkatkan daya tarik wisata, diperlukan pembangunan dan perbaikan jalan, bandara,

serta transportasi publik yang lebih terintegrasi. Selain itu, penyediaan fasilitas pendukung seperti hotel, restoran, dan pusat informasi wisata yang berkualitas juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kenyamanan wisatawan dan memperpanjang durasi kunjungan mereka.

Selain infrastruktur, penguatan ekonomi kreatif juga menjadi kunci dalam mendukung sektor pariwisata. Pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang bergerak di bidang kerajinan tangan, kuliner khas, serta seni pertunjukan perlu mendapatkan pembinaan dan akses permodalan yang lebih baik. Digitalisasi usaha ekonomi kreatif, seperti pemasaran berbasis e-commerce dan promosi melalui platform media sosial, juga harus diperkuat agar produk-produk lokal dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan demikian, ekonomi kreatif tidak hanya mendukung industri pariwisata tetapi juga memberikan peluang kerja yang lebih besar bagi masyarakat lokal.

Keberlanjutan lingkungan dan pelestarian budaya harus menjadi fokus dalam pengembangan sektor ini. Pariwisata berbasis alam dan budaya perlu dikembangkan dengan tetap menjaga ekosistem dan kearifan lokal agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Edukasi kepada masyarakat dan pelaku wisata mengenai pentingnya ekowisata serta pengelolaan sampah di kawasan wisata harus ditingkatkan.

3. Pembangunan sarana dan prasarana yang merata dan berkeadilan

   Pembangunan sarana dan prasarana yang belum memadai masih menjadi persoalan pembangunan yang perlu direspons ke depan. Luasan permukiman kumuh, rumah tangga dengan akses air minum layak, rumah tangga dengan akses sanitasi layak infrastruktur SDA dalam kondisi baik, penanganan banjir merupakan isu-isu penyediaan infrastruktur yang perlu direspons dalam jangka panjang ke depan. Cakupan rumah tangga yang menempati hunian layak yang terpadu dengan akses air minum, sanitasi dan penanganan persampahan juga masih cukup rendah. Selain itu, kondisi kawasan perkotaan di Provinsi Sumatera Utara menghadapi

perkotaan arah perkembangan yang tidak terstruktur (urban sprawl). Kelayakan dan keandalan perumahan yang dibangun secara swadaya juga perlu menjadi perhatian mengingat tingginya risiko bencana di Provinsi Sumatera Utara.

Layanan ketenagalistrikan Provinsi Sumatera Utara masih kekurangan pasokan daya atau beberapa sistem, atau cadangan di pembangkit eksisting yang tidak efisien serta kekurangan pasokan daya untuk daerah perbatasan serta pulau terluar. Penyediaan tenaga listrik di Wilayah Sumatra masih belum menjangkau seluruh penduduk secara berkualitas. Fleksibilitas operasi masih belum optimum terutama saat kondisi di luar waktu beban puncak sebagai akibat dari minimum operasi PLTG. Infrastruktur ketenagalistrikan terdiri dari Sistem Interkoneksi Sumatra dan sistem-sistem yang terisolasi. Sistem transmisi ekstra tinggi belum tersambung untuk mengevakuasi daya energi yang tersebar di seluruh wilayah. Konsumen tenaga listrik masih didominasi oleh rumah tangga. Jangkauan jaringan seluler di Provinsi Sumatera Utara belum diimbangi dengan pemanfaatannya untuk mendukung kegiatan produktif (masih terbatas untuk penggunaan telekomunikasi). Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan komunikasi di Provinsi Sumatera Utara sudah cukup merata dan hampir menjangkau seluruh area wilayah pemukiman dan pusat-pusat pertumbuhan.

Provinsi Sumatera Utara juga memiliki tantangan dalam penyediaan pelayanan dasar, yaitu belum terpenuhi dan meratanya penyediaan sarana dan prasarana dasar di seluruh daerah, khususnya di daerah afirmasi 3T. Permasalahan yang dihadapi di antaranya penyediaan air bersih, irigasi, banjir, dan abrasi. Jumlah kejadian bencana banjir masih tinggi terutama di Metropolitan Medan, pulau-pulau kecil di Provinsi Sumatera Utara juga terdampak risiko abrasi akibat perubahan iklim tersebut. Permasalahan dari pelayanan dasar mencakup tiga aspek, yakni aspek perumahan dan permukiman, aspek kesehatan dan aspek

ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Aspek perumahan dan permukiman mencakup akses terhadap layanan sumber air minum, sanitasi dan pengolahan air limbah dan lumpur tinja. Aspek kesehatan mencakup Jaminan Kesehatan Sosial, ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas dan distribusi tenaga kesehatan. Sedangkan aspek kasus kejahatan, rasa aman dan penyalahgunaan narkoba.

Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri belum memenuhi target, hal ini mempengaruhi akses terhadap layanan air minum dan sanitasi. Pada sisi lain ketersediaan air di Provinsi Sumatera Utara secara total masih surplus, termasuk pada daerah kabupaten/kota. Namun pada lokasi-lokasi tertentu terjadi defisit air seperti pada sebagian wilayah Kota Tanjungbalai, Kota Medan, Tebing Tinggi, Pematangsiantar, Kabupaten Asahan, Batubara, Serdang Bedagai dst. Kondisi defisit dipengaruhi oleh ketersediaan dan tingkat konsumsi. Ketersediaan air cenderung menurun dari waktu ke waktu, selain karena dampak perubahan iklim juga karena makin terdegradasinya daerah hulu baik karena deforestasi, maupun karena alih fungsi hutan dan lahan. Luasan hutan pada wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) dimana kota-kota utama di Sumatera Utara berada, pada umumnya sudah berada di bawah 30%. Hal ini akan menambah ancaman keberlanjutan ketersediaan air pada masa yang akan datang. Kekurangtersediaan air akan menyebabkan ketidaktercapaian target sanitasi dan akan mempengaruhi kesehatan masyarakat.

Peningkatan kualitas lingkungan, pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dipengaruhi oleh sampah yang belum tertangani, juga disebabkan oleh sanitasi, air peningkatan kualitas lingkungan juga belum memadai, yang tercermin dari belum tercapainya jumlah perusahaan yang menerapkan manajemen lingkungan yang baik (sertifikasi SNI ISO 14001) serta masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai.

Penurunan kualitas air permukaan cenderung meningkat seiring waktu, mengingat pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat. Timbulan sampah akan meningkat, juga limbah cair dan lumpur tinja serta limbah B3. Peningkatan beban lingkungan ini harus dibarengi dengan peningkatan pengelolaan untuk meningkatkan kualitas lingkungan.

4. Pembangunan antar daerah serta desa-kota

   Keterkaitan antar daerah serta desa-kota di Provinsi Sumatera Utara belum mencerminkan keterkaitan tidak bisa mengabaikan rantai pasok sehingga wilayah kota dan kawasan-kawasan perlu memiliki rantai nilai dengan wilayah-wilayah lain untuk mendorong perekonomian yang merata. Pembangunan wilayah Mebidangro (Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Karo) masih menghadapi permukiman kumuh seperti air bersih dan sanitasi, penurunan kualitas lingkungan hidup, dan infrastruktur transportasi massal yang belum mendukung mobilitas penduduk. Permasalahan ini muncul sebagai akibat dari urbanisasi yang tidak terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang berpusat di inti bisnis dan perdagangan. wilayah pertumbuhan ekonomi yang pesat menjadi pull factor manusia bermigrasi ke wilayah dengan ekonomi yang relatif baik.

5. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Berkelanjutan

   Dalam upaya pengelolaan SDA berkelanjutan menjadi perhatian terhadap pengelolaan investasi berbasis lahan yang belum seluruhnya mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik terutama kelestarian lingkungan dan menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat dalam jangka panjang. Pengoptimalan pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup berkelanjutan juga berkaitan dengan: adaptasi perubahan iklim; pengawasan terhadap deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan dan harmonisasi antara manusia dengan satwa liar; akses dan partisipasi masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok marginal; dukungan dalam mewujudkan kelestarian dan

kesejahteraan yang rendah; belum maksimalnya akses seluruh masyarakat terhadap energi, dan peningkatan pemanfaatan sumber energi terbarukan.

Pengentasan kemiskinan dan penguatan ketahanan pangan yang berkaitan erat dengan keberadaan pangan. Defisit air pada beberapa wilayah dapat menyebabkan gangguan terhadap ketahanan pangan. Secara umum ketersediaan air di Sumatera Utara melebihi kebutuhan (surplus) namun ketersebarannya tidak selalu bersesuaian dengan ketersebaran kebutuhan, hal inilah yang menyebabkan defisit air pada beberapa wilayah, dan status defisit ini akan mempengaruhi ketahanan pangan. Dari aspek ketersediaan pangan, Sumatera Utara juga masih surplus, hal ini turut ditopang oleh keanekaragaman hayati yang tinggi di Sumatera Utara. Kondisi kekurangan pangan di beberapa wilayah di Sumatera Utara dapat dipengaruhi oleh jasa lingkungan penyediaan pangan yang memiliki kategori rendah dan sangat rendah yang terdapat pada wilayah barat Sumatera Utara. Kerentanan wilayah yang tinggi terhadap dampak perubahan iklim juga dapat mempengaruhi produksi pangan.

Perubahan iklim dan pencegahan serta penanggulangan bencana juga merupakan permasalahan di Provinsi Sumatera Utara. Aspek perubahan iklim menyangkut jumlah emisi gas rumah kaca yang masih tinggi, intensitas energi primer yang masih tinggi serta upaya penyerapan emisi gas rumah kaca terutama pada wilayah perkotaan yang masih minim yang terlihat dari belum terpenuhinya penerapan green waste dan ruang terbuka hijau.

Perubahan iklim ini akan menimbulkan dampak yang semakin parah mengingat 73% wilayah Sumatera Utara cukup rentan terhadap perubahan iklim terlebih pada 2% wilayah yang sangat rentan perubahan iklim. Pada sisi lain jasa lingkungan pengatur iklim juga dominan bernilai rendah hingga sangat rendah pada wilayah Pesisir Timur Sumatera.

Aspek pencegahan serta penanggulangan bencana mencakup jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana, jumlah kerugian ekonomi langsung karena bencana, jumlah daerah bencana alam yang diperlengkapi secara khusus, dan penurunan indeks risiko bencana yang belum mencapai target. Aspek-aspek ini belum mencapai target juga dipengaruhi oleh wilayah Sumatera Utara yang memiliki potensi bencana tinggi pada beberapa wilayah seperti potensi banjir tinggi pada pantai utara Kabupaten Langkat hingga Kabupaten Labuhanbatu Selatan, potensi kekeringan kelas tinggi pada beberapa kabupaten. Keberadaan potensi bencana yang tinggi ini belum dibarengi dengan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi bencana. Pada sisi lain jasa lingkungan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam juga sangat rendah terutama pada sisi timur Sumatera Utara dan kepulauan Nias. Mengingat dominan bencana alam di Sumatera Utara adalah bencana hidrometeorologi, bencana yang disebabkan oleh dampak perubahan iklim serta ketidakmampuan alam menampung dampak perubahan iklim, maka upaya penurunan faktor penyebab perubahan iklim mutlak dilakukan disertai dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan bencana alam.

6. Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Infrastruktur

   Infrastruktur yang berkaitan dengan konektivitas dan sistem logistik berpotensi menekan aktivitas ekonomi berupa mahalnya biaya logistik dari wilayah penghasil komoditas menuju lokasi pengolahan dan pemasaran. Hal tersebut perlu diupayakan dengan upaya meningkatkan kelancaran arus barang, jasa, dan informasi, menurunkan biaya logistik, mengurangi ekonomi biaya tinggi, mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah, dan mewujudkan sinergi antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Aksesibilitas daerah juga dapat ditinjau dari

ketersediaan fasilitas perhubungan yang meliputi darat, laut dan udara. Perhubungan darat di dibagi atas beberapa bagian jaringan transportasi seperti jaringan angkutan jalan raya, jaringan jalur kereta api, jaringan angkutan sungai dan danau, dan jaringan angkutan penyeberangan.

7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Akuntabel, Transparan dan Kolaboratif

   Provinsi Sumatera Utara masih menghadapi dua persoalan utama, yaitu memperbaiki tata kelola pemerintahan yang fokus pada kapabilitas dan integritas dan memperbaiki kualitas pelayanan publik yang belum optimal kepada masyarakat. Kapabilitas tata pemerintahan berfokus pada penguatan transisi reformasi birokrasi menuju reformasi Birokrasi tematik, memperbaiki proses bisnis adaptif dengan dukungan teknologi informasi, meningkatkan profesionalisme ASN melalui meritokrasi dan penguatan core value.

Isu-isu berkaitan dengan tata kelola pemerintahan lainnya ialah pemanfaatan kehadiran teknologi informasi dalam area deregulasi kebijakan, penataan kelembagaan, penguatan profesionalisme ASN, penguatan kualitas pengawasan, penguatan akuntabilitas dan pelayanan publik. Ketersediaan dan keterjangkauan teknologi pada masyarakat sipil diharapkan mampu mentransformasi posisi masyarakat dari objek menjadi subjek pembangunan.

D Isu Strategis Kabupaten Tapanuli Tengah

Isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah. Isu strategis menjadi hal krusial karena pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada pembangunan masa mendatang. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu baik internasional, nasional maupun daerah, dapat ditentukan isu strategis untuk Kabupaten Tapanuli Tengah yang akan ditangani dalam 5 tahun ke depan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Optimalisasi hilirisasi industri berbasis SDA

   Pada pembangunan jangka menengah 2025-2029 di Kabupaten Tapanuli

Tengah, fokus utama adalah pada optimalisasi hilirisasi industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA), dengan menonjolkan potensi pertanian dan pariwisata alam. Dalam sektor pertanian, upaya akan difokuskan pada peningkatan produksi dan diversifikasi produk pertanian lokal, perkebunan yang berkelanjutan serta penguatan rantai pasokan dan nilai tambah melalui pengolahan dan pengemasan yang lebih baik. Sementara itu, pariwisata alam akan dikembangkan melalui promosi destinasi wisata yang mengutamakan keindahan alam dan budaya lokal, dengan membangun infrastruktur yang mendukung aksesibilitas dan pelayanan wisata yang berkualitas. Dengan pendekatan ini, Kabupaten Tapanuli Tengah diharapkan dapat memanfaatkan secara optimal potensi SDA untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

2. Akselerasi pemenuhan konektivitas antarwilayah dan infrastruktur dasar berkualitas

   Pada pembangunan jangka menengah 2025-2029 di Kabupaten Tapanuli Tengah, fokus utama adalah pada akselerasi pemenuhan konektivitas antarwilayah dan infrastruktur dasar berkualitas. Hal ini mencakup pembangunan jaringan transportasi yang memadai, termasuk perbaikan dan pengembangan jalan raya utama serta jembatan untuk menghubungkan daerah-daerah terpencil. Langkah ini tidak hanya akan mempermudah aksesibilitas penduduk lokal dalam beraktivitas sehari-hari tetapi juga akan membuka akses ke pasar regional dan nasional, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal secara signifikan. Selain itu, perluasan jaringan transportasi akan mengurangi disparitas antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta memungkinkan distribusi barang yang lebih efisien dari dan ke daerah pedalaman. Selain infrastruktur transportasi, akselerasi ini juga mencakup peningkatan infrastruktur dasar lainnya seperti pendidikan dan kesehatan. Pembangunan dan perluasan sekolah-sekolah, rumah sakit, puskesmas, dan sarana

pendukung lainnya akan memastikan bahwa penduduk di Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki akses yang setara terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Ini tidak hanya meningkatkan taraf hidup masyarakat tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan manusia yang menjadi pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan.

3. Mewujudkan SDM yang Cerdas, Sehat dan Unggul

   Pada pembangunan jangka menengah 2025-2029 di Kabupaten Tapanuli Tengah, fokus utama adalah pada upaya mewujudkan SDM yang cerdas, sehat, dan unggul. Langkah pertama adalah memperkuat sistem pendidikan, mulai dari peningkatan akses pendidikan prasekolah hingga perguruan tinggi, untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang merata dan berkualitas terhadap pendidikan. Ini meliputi investasi dalam fasilitas pendidikan yang memadai, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Selain itu, penting untuk memperkuat pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi tenaga kerja lokal, terutama dalam sektor-sektor yang mendukung perekonomian lokal seperti pertanian, pariwisata, dan industri kreatif. Selanjutnya, upaya mewujudkan SDM yang sehat akan diperkuat dengan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Ini termasuk pembangunan dan perluasan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan sarana kesehatan lainnya di seluruh kabupaten. Program-program kesehatan masyarakat yang efektif juga akan diperkuat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat dan pencegahan penyakit. Selain itu, pendidikan tentang kesehatan mental juga akan diberikan perhatian untuk memastikan kesejahteraan psikologis masyarakat secara keseluruhan. Dengan mewujudkan SDM yang cerdas, sehat, dan unggul, Kabupaten Tapanuli Tengah bertujuan untuk membangun fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Langkah-langkah ini tidak hanya akan meningkatkan kapasitas individu untuk bersaing di pasar kerja global tetapi juga akan

meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan bagi penduduk Tapanuli Tengah.

4. Akselerasi pengentasan kemiskinan ekstrem

   Pada periode 2025-2029, Kabupaten Tapanuli Tengah memprioritaskan isu akselerasi pengentasan kemiskinan ekstrem sebagai bagian integral dari agenda pembangunan jangka menengah. Langkah utama dalam upaya ini adalah meningkatkan akses terhadap lapangan kerja produktif melalui program pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi masyarakat terpinggirkan. Ini termasuk investasi dalam pendidikan dan pelatihan vokasional yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan regional, serta pembangunan infrastruktur ekonomi yang mendukung pertumbuhan sektor-sektor potensial seperti pertanian, pariwisata, dan industri kreatif. Selain itu, upaya akselerasi ini juga melibatkan penguatan sistem perlindungan sosial untuk melindungi dan memberdayakan kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Program bantuan sosial yang tepat sasaran akan diperkuat untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat jangka pendek tetapi juga berkelanjutan dalam membangun kapasitas dan kemandirian ekonomi keluarga.

5. Ancaman degradasi kualitas lingkungan hidup dan ketahanan ekologi

   Pada periode pembangunan 2025-2029, Kabupaten Tapanuli Tengah menghadapi tantangan serius terkait dengan ancaman degradasi kualitas lingkungan hidup dan ketahanan ekologi. Isu ini meliputi berbagai aspek, mulai dari deforestasi dan degradasi lahan hingga penurunan kualitas air dan keanekaragaman hayati. Untuk mengatasi tantangan ini, langkah-langkah strategis akan diterapkan dengan fokus pada pemulihan ekosistem yang terganggu, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan perlindungan terhadap habitat satwa liar serta ekosistem kritis. Pembangunan infrastruktur akan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan, termasuk

penggunaan teknologi hijau dan praktik konstruksi ramah lingkungan. Selain itu, upaya perlindungan dan restorasi hutan serta lahan basah akan ditingkatkan untuk mempertahankan fungsi ekologisnya yang vital dalam mengatur tata air dan menjaga keanekaragaman hayati. Kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan sektor swasta akan menjadi kunci dalam implementasi kebijakan lingkungan yang efektif dan berkelanjutan. Pendidikan lingkungan dan kesadaran masyarakat juga akan ditingkatkan untuk meningkatkan partisipasi aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Kabupaten Tapanuli Tengah berkomitmen untuk menjaga kualitas lingkungan hidup yang baik dan meningkatkan ketahanan ekologi sebagai bagian dari visi pembangunan berkelanjutan untuk masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

6. Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berintegritas

   Pemerintah daerah berperan sebagai pendukung dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Tapanuli tengah akan terus meningkatkan kualitas tata kelolanya melalui peningkatan kapasitas ASN yang profesional, penerapan sistem pemerintahan yang adil dan transparan berbasis digital, serta adaptif terhadap berbagai perubahan. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah akan memperkuat kapasitas ASN melalui pelatihan, penerapan sistem meritokrasi, dan optimalisasi teknologi informasi untuk mendukung transparansi dan efisiensi. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah akan mewujudkan peningkatan kesejahteraan ASN melalui peningkatan nilai Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan mendorong kinerja ASN yang lebih baik dengan dukungan fasilitas kantor melalui pembangunan gedung kantor yang baru dan tertata dengan baik. Tidak kalah pentingnya, penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal akan tetap dipertahankan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan memastikan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

BAB III

Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.1 Visi dan Misi

Visi merupakan gambaran ideal tentang masa depan yang ingin dicapai, bersifat inspiratif dan jangka panjang, sementara Misi menjelaskan langkah-langkah konkret untuk mewujudkan visi tersebut melalui program dan kebijakan terukur. Keduanya harus spesifik, terukur, dan selaras dengan tantangan aktual (seperti regenerasi petani atau adaptasi iklim) untuk memastikan implementasi efektif. Keberhasilan ditunjukkan oleh konsistensi antara pernyataan visi-misi dengan alokasi sumber daya dan capaian kinerja.

Visi RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029 adalah:

Membangun Tapanuli Tengah Adil untuk Semua, Lestari, dan Berkeadaban

Visi tersebut memiliki makna, yaitu:

1. Adil untuk Semua

   Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
2. Lestari

   Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi daerah yang asri memiliki lingkungan yang asri dan menjadi tempat yang nyaman untuk berusaha dan bertempat tinggal
3. Berkeadaban

   Masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah yang menjunjung tinggi nilai budaya dan harmonisasi keberagaman, kebenaran, dan berkeadilan sosial, serta memiliki daya saing unggul

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka disusun 9 misi pembangunan jangka menengah. Adapun 9 misi pembangunan jangka menengah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan manusia yang berkarakter, produktif, berkualitas, dan kreatif untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri

   Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan yang berkarakter dan

berkualitas untuk menciptakan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah yang cerdas dan berdaya saing, serta terampil dan inovatif. Hal ini akan dicapai melalui pembangunan pendidikan dan ekosistem pembelajaran yang adaptif berbasis digital, serta tenaga pendidik yang berkualitas.

2. Memastikan akses kesehatan untuk seluruh masyarakat Tapanuli Tengah sehat jasmani dan rohani

   Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan inklusif, di mana seluruh masyarakat dari seluruh golongan dapat merasakannya. Peningkatan akses kesehatan melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan yang berbasis teknologi, serta dokter dan tenaga kesehatan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah

3. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil-menengah yang inklusif dan kreatif

   Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil-menengah yang inklusif dan kreatif

4. Membangun kemandirian ekonomi daerah Tapanuli Tengah berbasis potensi sumber daya lokal dengan memanfaatkan teknologi

   Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah dan pengelolaan pendapatan asli daerah secara optimal. Selain itu, pengelolaan Badan Usaha Milik Darah juga akan dibenahi lebih baik lagi agar mampu menghasilkan pendapatan bagi daerah sebagai sumber dana untuk membiayai keperluan pembangunan daerah

5. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera) Tapanuli Tengah yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi

menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang melayani, transparan, bebas dari korupsi, dan berkeadaban

Meningkatkan pelayanan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melalui implementasi sistem pemerintahan yang berbasis teknologi sehingga seluruh masyarakat dapat memperoleh akses yang samas. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah juga akan meningkatkan kapasitas dan daya saing ASN sehingga memberikan pelayanan yang profesional kepada masyarakat dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.

6. Memajukan kebudayaan Tapanuli Tengah dalam semangat kebhinnekaan dan toleransi sebagai warisan leluhur bangsa Indonesia

   Mewujudkan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah kuat budaya, serta menjunjung tinggi persatuan dalam perbedaan dan toleransi antar umat beragama

7. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah kuat budaya, serta menjunjung tinggi persatuan dalam perbedaan dan toleransi antar umat beragama

   Melaksanakan pembangunan infrastruktur yang berkualitas untuk meningkatkan konektivitas antar daerah, memperlancar aktivitas ekonomi, dan meningkatkan mobilitas masyarakat

8. Mengelola sumber daya alam dan potensi alam yang ada di Tapanuli Tengah, baik Sektor Kelautan, Perkebunan, Pertanian, Perikanan, Hutan, Sungai, Sumber Daya Energi Terbarukan (air, angin, gelombang laut, dll.) secara optimal dengan memperhatikan prinsip peembangunan berkelanjutan dan kelestarian lingkungan hidup

   Memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah secara optimal dengan pelaksanaan pembangunan yang tidak merusak lingkungan sekitar sehingga menjaga kebersihan dari lingkungan hidup Kabupaten Tapanuli Tengah. Kabupaten Tapanuli Tengah akan meningkatkan pengelolaan lingkungan, mengatasi pencemaran lingkungan, melaksanakan pembangunan infrasturktur yang ramah

lingkungan, serta menjaga konsistensi perencanaan dan pembangunan yang berkelanjutan

9. Perencanaan pembangunan daerah dan desa yang terintegrasi

   Melaksanakan pembangunan secara adil dan merata ke seluruh desa sehingga seluruh masyarakat dapat merasakannya. Masyarakat desa diberdayakan sehingga memiliki keterampilan yang baik dan mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan ekonominya.

Berikut adalah Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029:

Tabel 3.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Kondisi Awal	Tahun					Target Transisi (2030)
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	**Meningkatkan pembangunan manusia yang berkarakter, produktif, berkualitas, dan kreatif untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri**										
		1.1	Meningkatnya kualitas SDM yang berkarakter dan berdaya saing	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,50	13,59-13,79	13,66-13,87	13,73-13,95	13,79-14,02	13,86-14,10	13,93-14,18
				Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8,92	9,17-9,52	9,30-9,67	9,43-9,81	9,55-9,96	9,68-10,10	9,81-10,25
		1.1.1	Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Literasi SD (Poin)	53,81	54,00	55,00	56,00	57,00	58,00	59,00
				Literasi SMP (Poin)	62,39	62,50	63,00	63,50	63,80	64,00	65,00
				Numerasi SD (Poin)	56,17	56,50	56,70	57,00	57,50	58,00	60,00
				Numerasi SMP (Poin)	63,04	64,00	64,50	65,00	66,00	67,00	68,00
		1.1.2	Meningkatnya literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Poin)	N/A	50,00	51,86	53,78	55,78	57,85	60,00

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Kondisi Awal	Tahun					Target Transisi (2030)
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		1.1.3	Meningkatnya prestasi olahraga	Persentase atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional (%)	N/A	10,00	12,01	14,43	17,33	20,81	25,00
		1.2	Meingkatnya daya saing tenaga kerja dan wirausaha	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,45	7,65-7,49	7,52-7,4	7,41-7,33	7,3-7,25	7,19-7,17	7,09-7,09
		1.2.1	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rp/jiwa)	67,41	68,76	70,14	71,54	72,97	74,43	75,92
		1.1.3	Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian	Kontribusi UMKM terhadap PDRB (%)	N/A	0,50	0,66	0,87	1,15	1,52	2,00
2	**Memastikan akses kesehatan untuk seluruh masyarakat Tapanuli Tengah sehat jasmani dan rohani**										
		2.1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup (Tahun)	71,96	71,93-72,11	72,18-72,36	72,43-72,61	72,68-72,85	72-94-73,10	73,19-73,35
		2.1.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment	68,57	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Kondisi Awal	Tahun					Target Transisi (2030)
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
				success rate) (%)							
				Jumlah Kematian Ibu	4	4	4	4	4	4	4
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	32,30	29,25	26,20	23,15	20,10	17,05	14,00
		2.1.2	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang inklusif	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	91,41	98,60	98,60	98,60	98,60	98,60	98,60
3	**Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil-menengah yang inklusif dan kreatif**										
		3.1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Persentase Penduduk Miskin (%)	11,80	10,20 – 9,53	9,68-8,99	9,19-8,48	8,72-8	8,28-7,54	7,86-7,11
		3.1.1	Menurunnya ketimpangan pendapatan	Gini Ratio (Poin)	0,234	0,230 – 0,240	0,227-0,237	0,224-0,234	0,221-0,231	0,218-0,228	0,215-0,225
		3.1.2	Meningkatnya kesejahteraan sosial	Indeks Kesejahteraan Sosial (Poin)	N/A	40,00	41,83	43,73	45,73	47,82	50,00

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Kondisi Awal	Tahun					Target Transisi (2030)
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		3.1.3	Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	Inflasi (%)	2,94	1,00-3,00	1,00-3,00	1,00-3,00	1,00-3,00	1,00-3,00	1,00-3,00
		3.1.4	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan (Poin)	73,81	74,00	75,16	76,34	77,54	78,76	80,00
		3.2	Meningkatnya pendapatan masyarakat	PDRB Per Kapita (Rp juta)	34,62	35,40	40,78	46,97	54,10	70,19	80,85
		3.2.1	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani (Poin)	N/A	90,00	93,69	97,52	101,52	105,67	110,00
		3.2.2	Meningkatnya kesejahteraan nelayan	Nilai Tukar Nelayan (Poin)	N/A	95,00	97,83	100,74	103,73	106,82	110,00
		3.2.3	Meningkatnya partisipasi penyandang disabilitas dalam pekerjaan formal	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	N/A	20,00	22,97	26,39	30,31	34,82	40,00

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Kondisi Awal	Tahun					Target Transisi (2030)
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		3.2.4	Meningkatnya kesejahteraan pekerja rentan (sektor informal)	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	N/A	10,00	13,20	17,41	22,97	30,31	40,00
4	**Membangun kemandirian ekonomi daerah Tapanuli Tengah berbasis potensi sumber daya lokal dengan memanfaatkan teknologi**										
		4.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,15	4,33 – 4,47	4,34-4,5	4,35-4,53	4,36-4,56	4,37-4,59	4,38-4,62
		4.1.1	Meningkatnya daya saing industri	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	11,26	11,61 – 11,80	12,04-12,24	12,49-12,7	12,95-13,17	13,43-13,66	13,93-14,17
		4.1.2	Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum (%)	1,33	1,32-1,39	1,35-1,42	1,38-1,45	1,42-1,48	1,46-1,51	1,5-1,54
		4.1.3	Meningkatnya kontribusi koperasi dan UMKM dalam perekonomian	Proporsi jumlah UMK non pertanian (%)	62,00	70,00	80,00	85,00	87,00	90,00	95,00
				Rasio Volume Usaha Koperasi	0,072	0,073	0,094	0,122	0,157	0,203	0,261

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Kondisi Awal	Tahun					Target Transisi (2030)
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
				terhadap PDRB (%)							
		4.1.4	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase Peningkatan Investasi (%)	10,00	10,50	11,03	11,58	12,16	12,76	13,40
		4.1.5	Meningkatnya nilai tambah perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	12,42	12,79	13,18	13,57	13,98	14,40	14,83
		4.1.6	Meningkatnya literasi digital masyarakat	Indeks Masyarakat Digital (Poin)	40,34	41,25	42,35	43,45	45,50	47,07	48,00
		4.2	Meningkatkan kemandirian daerah	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	7,34	7,49	7,64	7,79	7,94	8,10	8,26
		4.2.1	Meningkatnya sumber pendapatan asli daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,18	0,38-0,48	0,4-0,5	0,42-0,52	0,44-0,54	0,46-0,57	0,49-0,6
		4.2.2	Meningkatnya kontribusi BUMD terhadap	RoA BUMD (%)	N/A	6,25	6,85	7,52	8,25	9,04	9,92

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Kondisi Awal	Tahun					Target Transisi (2030)
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
			pendapatan daerah								
		4.2.3	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Level)	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	**Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera) Tapanuli Tengah yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang melayani, transparan, bebas dari korupsi, dan berkeadaban**										
		5.1	Terwujudnya tata pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	CC	60-70	61,23-71,26	62,48-72,54	63,76-73,85	65,07-75,18	66,4-76,53
		5.1.1	Terciptanya tata pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Indeks Pelayanan Publik (Poin)	3,47	3,55	3,64	3,73	3,81	3,91	4,00
				Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	84,36 (B)	85,46	86,69	87,75	88,86	89,00	90,30

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Kondisi Awal	Tahun					Target Transisi (2030)
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		5.1.2	Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN (Poin)	62,23	64,30	66,25	68,75	71,50	73,75	75,25
		5.1.3	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM	Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)	N/A	70,00	71,89	73,84	75,84	77,89	80,00
				Indeks Harmoni Indonesia (Poin)	N/A	6,30	6,40	6,50	6,60	6,70	6,80
6	**Memajukan kebudayaan Tapanuli Tengah dalam semangat kebhinnekaan dan toleransi sebagai warisan leluhur bangsa Indonesia**										
		6.1	Terwujudnya masyarakat yang berbudaya dan harmonis	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Poin)	N/A	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00
		6.1.1	Terwujudnya keluarga yang berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga (Poin)	56,74	48,88-57,64	49,12-57,64	49,36-57,64	49,6-57,64	49,84-57,64	50,08-57,64
		6.1.2	Terwujudnya berkebudayaan maju	Persentase Warisan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Kondisi Awal	Tahun					Target Transisi (2030)
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
				Budaya yang Dilestarikan							
		6.1.3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesakan (%)	97,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		6.1.4	Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Ketimpangan Gender (Poin)	0,438	0,425-0,395	0,405-0,375	0,395-0,365	0,390-0,360	0,380-0,350	0,370-0,340
				Indeks Perlindungan Anak (Poin)	55,15	55,80	56,10	56,40	56,70	57,00	57,30
7	**Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, irigasi/bendungan, serta berbagai sarana-prasarana pendukungnya**										
		7.1	Meningknya kualitas infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur (Poin)	N/A	65,00	66,42	67,86	69,34	70,85	72,39
		7.1.1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (Poin)	N/A	50,00	53,48	57,20	61,19	65,44	70,00

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Kondisi Awal	Tahun					Target Transisi (2030)
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
				Persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman (%)	N/A	10,00	10,94	11,96	13,08	14,31	15,65
				Persentase Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	N/A	0,50	0,91	1,66	3,02	5,49	10,00
		7.1.2	Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Rasio Konektivitas (%)	83,33	83,33	83,33	83,87	83,87	87,10	87,10
		7.1.3	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Rumah Tangga dengan akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	83,53	86,04	88,62	91,28	94,01	96,83	99,74
		7.1.4	Meningkatkan infrastruktur yang resilien	Indeks Risiko Bencana (Poin)	181,49	172,42	163,79	155,60	147,82	140,83	133,41

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Kondisi Awal	Tahun					Target Transisi (2030)
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
			terhadap bencana								
8	**Mengelola sumber daya alam dan potensi alam yang ada di Tapanuli Tengah, baik Sektor Kelautan, Perkebunan, Pertanian, Perikanan, Hutan, Sungai, Sumber Daya Energi Terbarukan (air, angin, gelombang laut, dll.) secara optimal dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan kelestarian lingkungan hidup**										
		8.1	Terwujunya pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	N/A	57,97	60,13	67,04	70,54	74,45	77,96
			8.1.1	Terjaganhya kelestarian lingkungan hiduo	Porsi EBT dalam Bauran Energi (%)	N/A	20,00	21,69	23,52	25,51	27,66	30,00
			8.1.2	Meningkatknya pengelolaan sampah	Timbulan Sampah (Ton)	N/A	66.000 ,00	64.753 ,82	63.531 ,17	62.331 ,61	61.154 ,69	60.000,0 0
			8.1.3	Menurunnya emisi gas rumah kaca	Penurunan Emisi GRK (ton CO2eq)	N/A	142.48 8,58	164.12 4,30	189.04 5,24	217.75 0,21	242.84 4,49	279.718, 44
9	**Perencanaan pembangunan daerah dan desa yang terintegrasi**										
		9.1	Terwujudnya pembangunan desa yang merata	Indeks Desa (%)	0,6023 (IDM)	57,00	58,39	59,54	61,24	63,29	65,00

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Kondisi Awal	Tahun					Target Transisi (2030)
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		9.1.1	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Persentase Desa Mandiri (%)	0	1,26	1,89	2,52	3,14	4,40	5,03
		9.1.2	Meningkatya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Poin)	N/A	70,00	73,61	77,40	81,39	85,59	90,00

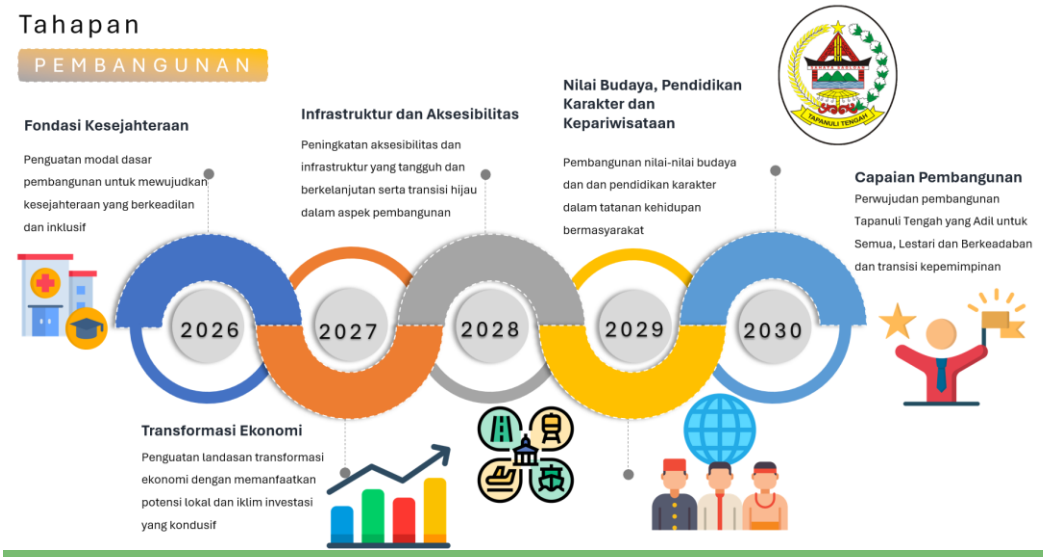
Tabel 3.2 Penyelarasan Target Sasaran RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029

No	RPJMN Tahun 2025-2029 (Sasaran Per Provinsi)			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029		
	Indikator	2025	2029	Indikator	2025	2029	Indikator	2025	2029
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,30	7,60	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,30	7,60	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,33 – 4,47	4,37-4,59
2	PDB per Kapita (Rp juta)	78,40	115,30	PDB per Kapita (Rp juta)	78,40	115,30	PDRB per Kapita (Rp juta)	35,40	70,19
3	Kontribusi PDB Provinsi (%)	5,20	5,30	Kontribusi PDB Provinsi (%)	5,20	5,30	Kontribusi PDRB Kabupaten (%)	1,20	1,90
4	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96 - 7,46	2,82 - 3,32	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96 - 7,46	2,82 - 3,32	Tingkat Kemiskinan (%)	10,20 – 9,53	8,28-7,54
5	Rasio Gini (Poin)	0,303 - 0,305	0,207 - 0,231	Rasio Gini (Poin)	0,303 - 0,305	0,207 - 0,231	Rasio Gini (Poin)	0,230 – 0,240	0,218 - 0,228
6	Indeks Modal Manusia (Poin)	0,54	0,57	Indeks Modal Manusia (Poin)	0,54	0,57	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	74,55 – 76,76	75,99 - 78,36
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	1,00	16,88	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	1,00	16,88	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Ton Co_2 Eq)	142.488,58	242.844,49
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	77,20	77,87	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	77,20	77,87	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	57,97	74,45
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,27 - 5,56	4,74 - 5,20	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,27 - 5,56	4,74 - 5,20	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,65-7,49	7,19-7,17

3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Pembangunan di Kabupaten Tapanuli Tengah diarahkan untuk mencapai visi pembangunan daerah, "Membangun Tapanuli Tengah Adil untuk Semua, Lestari, dan Berkeadaban". Dalam pelaksanaannya, pemerintah berupaya untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif serta memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Demi mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pemerintah perlu mempersiapkan keberlanjutan pembangunan selama periode penyelenggaraan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan mengembangkan fokus-fokus pembangunan. Penyusunan tema pembangunan sebagai fokus utama dilakukan secara tahunan dengan menyesuaikan kepada isu-isu strategis yang akan diselesaikan melalui penyelenggaraan pemerintahan. Penyusunan tema pembangunan juga memberikan perencanaan yang lebih terstruktur sehingga diharapkan dapat mempercepat penyelesaian permasalahan dan isu strategis sembari mewujudkan visi dan misi-misi daerah.

Tema pembangunan disusun sebagai prioritas pembangunan daerah dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan. Pemerintah juga mempersiapkan arah kebijakan tahunan yang susun secara bertahap mulai dari tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 sebagai tahun transisi kepemimpinan. Hal ini dilakukan untuk mengedepankan keberlanjutan pembangunan pada periode pembangunan jangka menengah berikutnya.



Gambar 3.1 Tahapan Pembangunan Tahunan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2026 – 2030

Penyelenggaraan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 – 2029 didasarkan dengan memedomani arah kebijakan pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 – 2045, khususnya pada bagian pembangunan tahap pertama. Pemerintah mempersiapkan periode perencanaan tahun 2025 sampai dengan 2029 serta pedoman pembangunan pada masa transisi pemerintahan tahun 2030.

Fokus Pembangunan Tahun 2025

Fokus penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2025 adalah tahapan konsolidasi dan persiapan awal pembangunan daerah. Perencanaan pada tahun 2025 disesuaikan dengan rencana pembangunan daerah pada tahun berjalan, sesuai dengan periodisasi kepemimpinan RPJMD yang baru dimulai pada tahun 2025. Pemerintah fokus dalam penyesuaian program prioritas sesuai dengan visi-misi Kepala Daerah yang menjadi visi-misi Kabupaten Tapanuli Tengah. Pemerintah melakukan konsolidasi untuk penguatan kelembagaan serta regulasi-regulasi pendukung yang mempersiapkan arah kebijakan transformasional ke depannya. Pemerintah juga sudah mulai merintis penyelenggaraan program-program unggulan daerah yang dapat

memberikan hasil cepat (quick win) penyelenggaraan pemerintahan.

Tahun 2026: Fondasi Kesejahteraan

Tahun 2026 menjadi tahun yang difokuskan untuk memperkuat fondasi dasar kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Tapanuli Tengah memprioritaskan kesejahteraan masyarakat sebagai titik utama pembangunan di daerah. Pemerintah memperkuat modal dasar pembangunan untuk persiapan penyelenggaraan kebijakan transformasional baik dari ekonomi, sosial maupun tata kelola menuju Indonesia Emas 2045 mendatang. Pemerintah mengutamakan pemerataan layanan kepada seluruh masyarakat sehingga dapat mendukung pencapaian peningkatan kesejahteraan yang berkeadilan dan inklusif.

Tahun 2027: Transformasi Daerah

Dengan terwujudnya penguatan fondasi kebijakan transformasi yang kokoh pada tahun 2026, pemerintah berupaya membangun arah kebijakan transformasional. Pemerintah berupaya mengoptimalkan transformasi tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien sehingga layanan pemerintahan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat yang berkeadilan. Pemerintah mengedepankan transformasi sosial untuk memberdayakan dan melindungi seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang non-produktif secara ekonomi dan terkendala keterampilan. Pemerintah juga menyelenggarakan transformasi ekonomi dengan memanfaatkan potensi-potensi lokal, membangun kemandirian daerah serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Tahun 2028: Penguatan Infrastruktur dan Aksesibilitas

Demi mempercepat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, Kabupaten Tapanuli Tengah memerlukan optimisasi infrastruktur dan aksesibilitas dari berbagai aspek pembangunan. Pemerintah fokus untuk

meningkatkan aksesibilitas dan infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan serta transisi hijau dalam aspek pembangunan. Pemerintah berupaya memberikan infrastruktur layanan dasar yang berkualitas kepada seluruh masyarakat. Pemerintah juga menigkatkan akses infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang murah dan terjangkau. Arah kebijakan pembangunan dilakukan dengan menerapkan transisi hijau untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang.

Tahun 2029: Nilai Budaya, Pendidikan Karakter dan Kepariwisataan

Visi dan misi-misi Kabupaten Tapanuli Tengah tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan transformasi dari nilai-nilai budaya, karakter dan kepariwisataan. Pemerintah berupaya untuk mewujudkan pembangunan nilai-nilai budaya dan dan pendidikan karakter dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini pemerintah berupaya untuk menyinergikan pembangunan kebudayaam dalam kepariwisataan dan transformasi sosial. Penyelenggaraan pemerintahan berupaya untuk mencapai masyarakat berkeadaan yang tetap menjaga nilai-nilai budaya dan lingkungan yang lestari serta memberikan kesejahteraan yang berkeadilan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah.

Tahun 2030: Memperkuat Tapanuli Tengah yang Adil, untuk Semua, Lestari, dan Berkeadaban

Tahun 2030 menjadi tahun transisi kepemimpinan daerah sehingga fokus penyelenggaraan pemerintahan dibagi ke dua fokus utama, yaitu (1) memperkuat capaian pembangunan daerah yang memberikan wujud nyata dari visi-misi Kabupaten Tapanuli Tengah 2025-2029 dengan mewujudkan Tapanuli Tengah Adil untuk Semua, Lestari, dan Berkeadaban. Selain itu pemerintah juga mempertahankan capaian pembangunan sembari mempersiapkan transisi kepemimpinan daerah menuju periode pelaksanaan RPJPD Tahap 2.

Penjelasan tema pembangunan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2025 – 2029 yang tertuang dalam tema prioritas pembangunan tahun 2026 sampai dengan 2030 dirangkum sebagai berikut:

Tabel 3.3 Tahapan Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah

Prioritas Pembangunan Daerah	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tema	Penguatan modal dasar pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan inklusif	Penguatan landasan transformasi ekonomi dengan memanfaatkan potensi lokal dan iklim investasi yang kondusif	Peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan serta transisi hijau dalam aspek pembangunan	Pembangunan nilai-nilai budaya dan pendidikan karakter dalam tatanan kehidupan bermasyarakat	Perwujudan pembangunan Tapanuli Tengah yang Adil untuk Semua, Lestari dan Berkeadaban serta transisi kepemimpinan
Penjelasan umum	Pemerintah fokus untuk memperkuat modal dasar pembangunan terutama dari sisi pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar yang mencapai seluruh daerah termasuk daerah terpencil	Pemerintah melaksanakan pembangunan dengan memperkuat sektor perekonomian dengan memanfaatkan keunggulan lokal dengan pendekatan keberlanjutan. Penguatan UMKM dan iklim investasi pada tahapan ini juga menjadi kunci dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Pemerintah fokus untuk mengembangkan infrastruktur transportasi, digitalisasi serta energi yang mendukung konektivitas antar daerah. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan juga menjadi kunci dalam transisi hijau untuk memastikan keberlanjutan pembangunan	Pemerintah berupaya untuk memperkuat identitas budaya serta nilai-nilai lokal dalam pembangunan. Pemerintah melaksanakan pembinaan dan pendidikan karakter, pelestarian budaya serta kepariwisataan berbasis budaya sebagai dasar perwujudan pembangunan masyarakat yang berkeadaban	Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah mengoptimalkan sinergi pembangunan berkelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya sehingga menjadi daerah yang berkeadilan dan berdaya saing. Sinergi ekonomi, sosial dan lingkungan yang terjadi mendorong pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah mewujudkan capaian berkeadaban dengan menjaga nilai-nilai luhur.

Dengan berdasar pada strategi, tema dan arah pembangunan yang telah dirumuskan pada pembahasan sebelumnya maka dirumuskan arah kebijakan yang dipersiapkan untuk mencapai sasaran pembangunan daerah. Penetapan arah kebijakan untuk mencapai sasaran tersebut menjadi acuan penetapan program dan kegiatan sebagai bentuk perwujudan strategi yang telah dirumuskan sebelumnya. Sebagai bentuk perwujudan strategi utama pembangunan ditetapkan program prioritas Kabupaten Tapanuli Tengah setiap tahun yang disesuaikan dengan tema dan arah pembangunan.

Tabel 3.4 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tapanuli Tengah

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
1	**Meningkatkan pembangunan manusia yang berkarakter, produktif, berkualitas, dan kreatif untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri**				
		1.1	Meningkatnya kualitas SDM yang berkarakter dan berdaya saing		
		1.1.1	Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Meningkatkan akses dan pemerataan layanan pendidikan berkarakter ke seluruh daerah	Memberikan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas guru dan mengembangkan kurikulum pendidikan berkarakter
					Memberikan bantuan beasiswa sebagai akses pendidikan yang merata kepada keluarga kurang mampu dan berprestasi
					Merevitalisasi sekolah dengan fasilitas yang memadai dan memiliki akses untuk internet dan perpustakaan digital
		1.1.2	Meningkatnya literasi masyarakat	Memberdayakan fungsi dan layanan gerakan membaca dan melek literasi	Mendorong keterlibatan masyarakat dan komunitas untuk mengikuti gerakan literasi ilmiah
					Mempersiapkan akses internet gratis di ruang publik untuk langganan perpustakaan digital
					Membangun dan mempersiapkan perpustakaan desa, taman baca masyarakat serta pojok baca di ruang terbuka publik
		1.1.3	Meningkatnya prestasi olahraga	Meningkatkan daya saing atlet daerah	Peningkatan pembinaan atlet dan fasilitas olahraga
					Peningkatan dukungan finansial dan kesejahteraan atlet
		1.2	Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan wirausaha		

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
		1.2.1	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Meningkatkan perluasan kesempatan kerja	Memperkuat fungsi balai latihan kerja berbasis kebutuhan industri lokal
					Memberikan pelatihan dan sertifikasi keahlian bagi tenaga kerja
		1.1.3	Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian	Meningkatkan kualitas dan daya saing produk UMKM daerah	Memperluas akses permodalan bagi masyarakat yang ingin merintis usaha atau bekerja mandiri
					Memberikan pelayanan inovasi bisnis dan inkubator usaha bagi wirausaha pemula
2	**Memastikan akses kesehatan untuk seluruh masyarakat Tapanuli Tengah sehat jasmani dan rohani**				
		2.1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat		
		2.1.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan pelayanan dan upaya promotif-preventif kesehatan melalui edukasi dan pemeriksaan kesehatan	Memperkuat pelayanan Puskesmas dan tenaga medis yang memadai dengan akses yang mudah dari seluruh kecamatan
					Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat serta berkecukupan gizi
					Memperkuat deteksi penyakit menular dan tidak menular serta penanganan permasalahan kesehatan yang lebih baik
		2.1.2	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang inklusif	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana fasilitas kesehatan kepada masyarkaat	Memberikan fasilitas transportasi untuk mempermudah akses kesehatan bagi masyarakat
					Memastikan masyarakat telah memiliki akses BPJS Kesehatan untuk memperoleh jaminan pelayanan kesehatan

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
					Memberikan insentif bagi tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terpencil
					Meningkatkan gizi bagi ibu hamil dan anak-anak balita
					Memberikan pemeriksaan kehamilan gratis secara berkala untuk deteksi dini stunting
					Menyediakan sarana air bersih dan akses air minum layak
3	**Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil-menengah yang inklusif dan kreatif**				
	3.1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat			
		3.1.1	Menurunnya ketimpangan pendapatan	Menerapkan kebijakan fiskal progresif dan program pemberdayaan ekonomi bagi kelompok berpendapatan rendah	Memberikan pelatihan kewirausahaan berbasis ekonomi kreatif kepada masyarakat untuk berwirausaha
					Meningkatkan keterampilan kerja melalui kemitraan dan pelatihan vokasional
		3.1.2	Meningkatnya kesejahteraan sosial	Memperluas jaminan sosial dan bantuan sosial bagi keluarga kurang mampu	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pelayanan sosial
					Memberikan bantuan sosial secara tepat sasaran
		3.1.3	Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	Mengoptimalkan sistem distribusi dan stok pangan untuk menjaga kestabilan pasokan dan harga	Mendistribusikan pangan secara merata ke seluruh wilayah sesuai kebutuhan
					Menguatkan pengawasan terhadap jaringan distribusi pangan
		3.1.4	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Mendukung produktivitas pertanian melalui teknologi tepat guna dan perbaikan infrastruktur penyimpanan	Mempersiapkan kawasan pertanian terpadu untuk peningkatan produktivitas pangan daerah
					Mempersiapkan diversifikasi sumber pangan lokal

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
		3.2	Meningkatnya pendapatan masyarakat		
		3.2.1	Meningkatnya kesejahteraan petani	Memberikan akses harga yang adil dan pelatihan agribisnis bagi petani kecil	Memberikan subsidi alat dan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian daerah
					Mengembangkan rantai distribusi yang lebih optimal untuk pemasaran hasil pertanian
		3.2.2	Meningkatnya kesejahteraan nelayan	Menyediakan sarana tangkap modern dan akses pasar yang luas untuk nelayan tradisional	Mempersiapkan bantuan peralatan tangkap ikan yang ramah lingkungan untuk mengoptimalkan hasil tangkapan ikan
					Memberikan pelatihan untuk pengolahan hasil tangkapan ikan yang memberikan nilai tambah kepada nelayan dan masyarakat
		3.2.3	Meningkatnya partisipasi penyandang disabilitas dalam pekerjaan formal	Mendorong kebijakan inklusif dan pelatihan keterampilan khusus bagi penyandang disabilitas	Meregulasi kebijakan kuota minimal bagi perusahaan dan instansi pemerintah dalam merekrut tenaga kerja disabilitas
					Memberikan pelatihan kerja berbasis keterampilan digital untuk penyandang disabilitas
					Meregulasi lingkungan kerja yang inklusif bagi penyandang disabilitas
		3.2.4	Meningkatnya kesejahteraan pekerja rentan (sektor informal)	Menyediakan perlindungan sosial dan program pengembangan keterampilan untuk pekerja informal	Memberikan perlindungan sosial yang layak bagi tenaga kerja rentan dalam sektor informal
					Memberikan pelatihan bagi tenaga kerja informal untuk memperluas peluang kerja formal
4	**Membangun kemandirian ekonomi daerah Tapanuli Tengah berbasis potensi sumber daya lokal dengan memanfaatkan teknologi**				
		4.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing		

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
		4.1.1	Meningkatnya daya saing industri	Pengembangan kawasan industri dan infrastruktur logistik yang terintegrasi	Mengembangkan kawasan industri terpadu berbasis potensi daerah
					Meningkatkan infrastruktur logistik yang lebih baik untuk kelancaran distribusi barang
		4.1.2	Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Mengembangkan pariwisata dan kebudayaan, serta karya ekonomi kreatif dengan kearifan lokal	Mengelola daya tarik dan destinasi wisata dengan konsep berkelanjutan dan mengintegrasikan budaya lokal
					Memberikan pelatihan dan pengembangan desa wisata melalui keterlibatan masyarakat setempat sebagai pelaku utama
					Mempersiapkan perencanaan penyelenggaraan festival budaya sebagai daya tarik wisata
		4.1.3	Meningkatnya kontribusi koperasi dan UMKM dalam perekonomian	Meningkatkan Daya Saing Koperasi dan UMKM melalui Digitalisasi dan Kemitraan Strategis	Peningkatan Akses Pembiayaan melalui Kredit dan Koperasi
					Promosi Ekspor dan Pemasaran Produk UMKM melalui Kolaborasi dan Platform Digital
		4.1.4	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Menyederhanakan regulasi serta memberikan insentif yang menarik bagi investor	Mempersiapkan penawaran peluang investasi kepada para investor melalui penyusunan potensi investasi daerah
					Meningkatkan akses konektivitas antar wilayah
					Memberikan insentif dan kemudahan berinvestasi di daerah pada sektor-sektor unggulan
		4.1.5	Meningkatnya nilai tambah perdagangan	Memperkuat rantai pasok dan memperluas jaringan	Penguatan nilai tambah melalui hilirisasi produk-produk lokal

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
				distribusi dalam negeri dan ekspor	Peningkatan akses menuju pasar lokal, luar daerah, nasional dan internasional
		4.1.6	Meningkatnya literasi digital masyarakat	Menyelenggarakan pelatihan dan literasi digital yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat	Menyediakan jaringan internet dan telekomunikasi di seluruh daerah khususnya pada area blank spot
					Memberikan sosialisasi dan edukasi digital bagi seluruh masyarakat secara berkala
		4.2	Meningkatkan kemandirian daerah		
		4.2.1	Meningkatnya sumber pendapatan asli daerah	Mengoptimalkan potensi daerah melalui pengembangan sektor unggulan dan peningkatan efisiensi pajak daerah	Mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah
					Meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah
					Penyusunan Roadmap Optimalisasi PAD
		4.2.2	Meningkatnya kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah	Meningkatkan profesionalisme manajemen dan inovasi layanan di BUMD agar lebih kompetitif dan produktif	Meningkatkan kualitas tata kelola BUMD
					Menginisiasi diversifikasi bisnis dan inovasi
		4.2.3	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Mengoptimalkan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Berbasis Teknologi Digital	Penerapan Sistem Informasi Keuangan dan Aset Terintegrasi
					Peningkatan Kapasitas Pengawasan Keuangan dan Aset Daerah

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
5	**Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera) Tapanuli Tengah yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang melayani, transparan, bebas dari korupsi, dan berkeadaban**				
	5.1	Terwujudnya tata pemerintahan yang transparan dan akuntabel			
		5.1.1	Terciptanya tata pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Menguatkan sistem e-government yang terbuka dan mekanisme pelaporan publik secara real-time	Meningkatkan penerapan e-government dalam memberikan transparansi layanan publik
					Memperkuat kapasitas unit pemberantas korupsi terutama pada urusan yang rawan terhadap korupsi
		5.1.2	Meningkatnya profesionalitas ASN	Melaksanakan pelatihan berkelanjutan dan evaluasi kinerja berbasis kompetensi	Memperkuat pelaksanaan penilaian kinerja ASN berbasis kompetensi dan meritokrasi
					Memberikan pelatihan dan pengembangan kepada ASN untuk membangun kompetensi dan profesionalitas diri
					Membangun kolaborasi dengan masyarakat sebagai bagian dari penilaian pemberian pelayanan publik dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan
		5.1.3	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM	Mengintegrasikan pendidikan nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan HAM dalam program sosialisasi dan sekolah	Menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan masyarakat
					Meningkatkan perlindungan kepada Hak Asasi Manusia melalui hukum yang berkeadilan
6	**Memajukan kebudayaan Tapanuli Tengah dalam semangat kebhinnekaan dan toleransi sebagai warisan leluhur bangsa Indonesia**				
	6.1	Terwujudnya masyarakat yang berbudaya dan harmonis			

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
		6.1.1	Terwujudnya keluarga yang berkualitas	Meningkatkan edukasi parenting dan kesehatan keluarga secara berkelanjutan	Memberikan layanan konseling keluarga dalam membina perilaku rumah tangga yang harmonis
					Membangun kebijakan yang memberikan keseimbangan work-life balance kepada masyarakat sehingga tidak mengganggu keharmonisan rumah tangga
					Memberikan edukasi parenting bagi orang tua untuk mengoptimalkan pola asuh positif di lingkungan keluarga
		6.1.2	Terwujudnya berkebudayaan maju	Meningkatkan pelestarian cagar budaya daerah	Mempersiapkan pusat kebudayaan dan galeri seni untuk melestarikan warisan budaya daerah
					Membangun integrasi budaya dalam pendidikan berbasis kurikulum muatan lokal berkarakter dan berbudaya
					Membangun sinergi dengan pelaku industri kreatif dalam mengembangkan ekonomi berbasis budaya daerah
		6.1.3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Meningkatkan keamanan masyarakat	Penguatan sistem keamanan lingkungan
					Peningkatan kapasitas aparat dalam menjaga lingkungan
					Peningkatan toleransi dan kerukunan antar umat
		6.1.4	Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Menguatkan regulasi dan kampanye kesetaraan gender serta layanan	Memberikan pelatihan dan keterampilan bagi perempuan untuk mendorong partisipasi perempuan di lingkungan kerja

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
				perlindungan anak yang responsif.	Membangun kebijakan penegakan hukum terhadap kasus bullying, kekerasan anak dan eksploitasi anak
7	**Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, irigasi/bendungan, serta berbagai sarana-prasarana pendukungnya**				
		7.1	Meningknya kualitas infrastruktur daerah		
		7.1.1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Melaksanakan pembangunan dan perbaikan infrastruktur dengan prioritas wilayah tertinggal dan padat penduduk	Mengoptimalkan perluasan akses jaringan listrik dan air bersih untuk menjangkau seluruh wilayah Tapanuli Tengah
					Meningkatkan kualitas pembangunan jalan dan jembatan untuk konektivitas desa dan kecamatan
		7.1.2	Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Mengembangkan moda transportasi massal yang terintegrasi dan tarif yang ramah bagi masyarakat	Meningkatkan keamanan di jalan lintas dengan pemasangan rambu, penerangan jalan serta pemantauan pada daerah rawan kecelakaan
					Mewujudkan layanan transportasi publik yang nyaman dan modern untuk mendukung aksesibilitas dan keterhubungan antar wilayah dengan angkutan umum masif
		7.1.3	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Mendorong pembangunan perumahan dengan konsep ramah lingkungan dan subsidi bagi keluarga berpenghasilan rendah	Mempersiapkan kemudahan akses kredit perumahan bersubsidi kepada masyarakat khususnya pekerja sektor informal dan UMKM
					Mewujudkan revitalisasi kawasan permukiman kumuh serta memberikan fasilitas air bersih dan sanitasi layak di seluruh rumah

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
		7.1.4	Meningkatkan infrastruktur yang resilien terhadap bencana	Menerapkan standar bangunan tahan bencana dan meningkatkan sistem peringatan dini di daerah rawan	Mempersiapkan sistem peringatan dini untuk bencana alam, khususnya banjir, longsor, gempa dan tsunami
					Memberikan simulasi tanggap darurat bencana secara berkala kepada aparatur dan masyarakat
8	**Mengelola sumber daya alam dan potensi alam yang ada di Tapanuli Tengah, baik Sektor Kelautan, Perkebunan, Pertanian, Perikanan, Hutan, Sungai, Sumber Daya Energi Terbarukan (air, angin, gelombang laut, dll.) secara optimal dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan kelestarian lingkungan hidup**				
		8.1	Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup		
		8.1.1	Terjaganya kelestarian lingkungan hidup	Menerapkan pengelolaan kawasan hijau dan pengawasan kualitas udara, air, dan lahan	Melaksanakan kebijakan konservasi hutan lindung dan normalisasi daerah aliran sungai
					Meningkatkan pengawasan terhadap limbah industri dan persampahan
					Mendorong keterlibatan masyarakat dalam program gotong royong merawat lingkungan serta sadar lingkungan
		8.1.2	Meningkatnya pengelolaan sampah	Mengoptimalkan sistem pengumpulan, daur ulang, dan edukasi pengurangan sampah di masyarakat	Menguatkan sistem pengelolaan sampah
		8.1.3	Menurunnya emisi gas rumah kaca	Mendorong penggunaan teknologi rendah karbon dan restorasi ekosistem penyerap karbon	Meningkatkan bauran EBT pada sektor energi listrik dan transportasi

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
9	**Perencanaan pembangunan daerah dan desa yang terintegrasi**				
		9.1	Terwujudnya pembangunan desa yang merata		
		9.1.1	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Mengembangkan badan usaha dan kelembagaan ekonomi desa sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi lokal	Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa dan koperasi desa sebagai penggerak ekonomi desa
					Memperkuat kelembagaan dan sistem tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel
					Memperkuat perekonomian melalui produk unggulan di setiap desa
					Mengoptimalkan potensi pendapatan daerah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak
		9.1.2	Meningkatya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Melibatkan pemangku kepentingan secara partisipatif dan berbasis data dalam proses perencanaan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan daerah agar kebijakan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat
					Meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian dalam meningkatkan analisis kebijakan publik

3.3 Program Prioritas

Program Prioritas adalah program yang dirancang untuk mencapai tujuan pembangunan dengan fokus pada penyelesaian permasalahan utama secara cepat, tepat, dan terukur. Program Prioritas bertujuan untuk memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pelaksanaan Program Prioritas didukung oleh kolaborasi lintas sektor dan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, swasta, dan Masyarakat. Program Prioritas menjadi tulang punggung dalam mewujudkan visi pembangunan, sekaligus menjawab tantangan spesifik yang dihadapi oleh daerah. Program prioritas pembangunan disusun selaras dengan isu strategis pembangunan daerah. Ada pun Program prioritas pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah dan kegiatan strategis untuk mendukung program tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Isu Strategis, Program Prioritas, dan Kegiatan Strategis Daerah

No	Isu Strategis	Program Prioritas		Kegiatan Strategis Daerah
1	Optimalisasi hilirisasi industri berbasis SDA	1	Peningkatan Daya Saing Ekonomi	Peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi produk pertanian Pengolahan perkebunan Berkelanjutan dan perikanan
				Peningkatan daya saing produk UMK menuju ekspor
				Pembangunan pusat kuliner dan pusat UMK
				Penataan dan pengembangan destinasi wisata bahari, wisata religi (inclinator makam Papan Tinggi), Pemandu Wisata dan kepulauan
				Penataan bibir pantai sebagai destinasi wisata dan pusat kuliner seafood
				Pengembangan dan mempromosikan situs dan cagar budaya sebagai destinasi wisata
				Penyusunan potensi dan peluang investasi daerah

No	Isu Strategis	Program Prioritas		Kegiatan Strategis Daerah
		2	Peningkatan Kemandirian Daerah	Optimalisasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penggalian potensi Pajak dan Retribusi Daerah
				Optimalisasi tata telola BUMD dan Koperasi
				Pengembangan sistem penerimaan pajak dan retribusi daerah berbasis digital
		3	Penguatan dan Pengembangan Ketahanan Pangan	Penguatan pertanian berbasis komoditas unggulan termasuk hortikultura
				Pengembangan sistem pertanian berbasis kearifan local
				Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan serta peningkatan kualitas dan nilai tambah hasil produksi pangan organik dalam rangka pemenuhan
				Pemberdayaan penyuluh pertanian serta Pelatihan dan Edukasi Pertanian Berbasis Teknologi
				Stabilisasi Harga dan Jaminan Ketersediaan Bibit dan Pupuk Bersubsidi serta dukungan modernisasi alat dan mesin pertanian
				Ketersediaan Bibit dan Pupuk Bersubsidi serta dukungan modernisasi alat dan mesin pertanian
2	Akselerasi pemenuhan konektivitas antarwilayah dan infrastruktur dasar berkualitas	4	Peningkatan Kualitas Infrastruktur	Peningkatan persentase jalan dalam kondisi baik
				Peningkatan jaringan irigasi dalam kondisi baik
				Peningkatan akses rumah layak huni melalui bedah rumah
				Penurunan kawasan permukiman kumuh
				Peningkatan akses air minum aman
				Peningkatan akses sanitasi aman
				Peningkatan konektivitas antar daerah
		5	Peningkatan Ketahanan Daerah	Pemetaan desa rawan bencana
				Pembentukan desa tangguh bencana dan budaya sadar bencana bagi masyarakat
				Peningkatan respon time terhadap bencana

No	Isu Strategis	Program Prioritas		Kegiatan Strategis Daerah
3	Mewujudkan SDM yang Cerdas, Sehat, dan Unggul	6	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Pembangunan sekolah unggulan dan sekolah rakyat
				Pemerataan Kualitas Pembelajaraan di tingkat Pendidikan Dasar, PAUD dan Kesetaraan
				Penyediaan program beasiswa untuk siswa kurang mampu dan guru berprestasi
				Pemberian insentif dan fasilitas untuk guru-guru di daerah terjauh dan tertinggal, dan guru madrasah dan sekolah minggu
				Pengembangan perpustakaan digital
		7	Peningkatan Kesempatan Kerja	Pendirian Balai Latihan Kerja (BLK)
				Pelatihan peningkatan kompetensi calon tenaga kerja sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri melalui BLK
				Pelatihan calon wirausaha untuk pemuda dan masyarakat
				Membuat MoU dan PKS dengan perusahaan swasta untuk pekerja lokal dan penyandang disabilitas
				Peningkatan kerjasama dengan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) untuk penempatan tenaga kerja di luar negeri
		8	Peningkatan Kualitas Kesehatan yang Merata	Penguatan program UHC
				Pengembangan Rumah Sakit Unggul dan Berkualitas
				Perluasan layanan kesehatan dengan menambah Puskesmas Rawat Inap dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut
				Peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan pemenuhan tenaga kesehatan ke setiap Puskesmas
				Pemberian insentif untuk tenaga kesehatan di daerah terjauh dan tertinggal
		9	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Masyarakat	Pembangunan pusat moderasi beragama
				Optimalisasi peran FKUB dan para pemuka agama serta tokoh masyarakat

No	Isu Strategis	Program Prioritas		Kegiatan Strategis Daerah
				Pengembangan kurikulum pendidikan untuk kebudayaan lokal
				Pembangunan taman budaya sebagai wadah seni dan pengembangan budaya
		10	Peningkatan Budaya dan Olahraga	Tersedianya kalender event seni dan budaya
				Pembangunan sarana dan prasarana olahraga di setiap desa
				Pembangunan *creative-hub* (alun-alun) di kecamatan
				Pembentukan layanan help desk (*call center*) untuk permasalahan rumah tangga
		11	Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak	Peguatan regulasi dan kebijakan perlindungan Perempuan dan anak
				Edukasi parenting sebelum pernikahan
				Sistem Keamanan yang efektif dengan melibatkan koordinasi antara lembaga penegak hukum
				Peningkatan hubungan kemitraan dengan para stakeholder terkait dalam rangka menjaga kamtibmas
		12	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Penggunaan Teknologi untuk Pengawasan serta Partisipasi aktif dari masyarakat dengan melakukan kolaborasi antar Tokoh Masyarakat, Pemuka Agama, Influencer Lokal dan Aparat Penegak Hukum untuk melakukan edukasi dan menyampaikan pesan - pesan tentang bahaya judi online, narkoba
				Dukungan penyelesaian konflik Agraria
				Pemberian bantuan bibit unggul pertanian dan alsintan
				Pemberian bantuan benih unggul untuk perikanan
				Peningkatan kualitas irigasi untuk pertanian
4	Akselerasi pengentasan kemiskinan ekstrem	13	Peningkatan Ekonomi Rakyat	Optimalisasi penyuluh pertanian dan perikanan
				Bantuan sosial modal kerja untuk kelompok tani, nelayan, pembudidaya ikan, abang becak, pemandu wisata dan UKM
				Perlindungan sosial kepada petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan

No	Isu Strategis	Program Prioritas		Kegiatan Strategis Daerah
				pelaku UKM melalui BPJS Ketenagakerjaan
				Pemetaan dan pengembangan produk-produk unggulan
				Pembangunan Tempat pelelangan Ikan dan *cold storage* untuk perikanan
5	Ancaman degradasi kualitas lingkungan hidup dan ketahanan ekologi	14	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pengembangan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Pengolahan Sampah (Circular Economy)
				Peningkatan layanan persampahan
				Pemanfaatan sumber daya air dan angin sebagai sumber EBT
6	Tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berintegritas	15	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah	Pembangunan Kantor Induk Pemerintahan/Kantor Bupati dan Pengembangan Mall Pelayanan Publik (MPP) dan peningkatan kualitas SDM ASN penyelenggara pelayanan publik
				Optimalisais kinerja sistem dan metode pelayanan publik (SOP yang transparan, pembuatan aplikasi online)
				Optimalisasi kinerja pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik (media sarana pengaduan dan survei kepuasan publik secara berkala)
				Peningkatan sistem pemerintahan berbasis elektronik
		16	Pengembangan Desa dan Perencanaan Pembangunan	Peningkatan tata kelola pemerintahan desa
				Pemberdayaan masyarakat desa
				Pemetaan potensi dan sumber pendapatan desa
				Peningkatan kemandirian desa melalui BUMDes dan Koperasi Merah Putih
				Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Program prioritas berdasarkan sasaran pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas
1	**Meningkatkan pembangunan manusia yang berkarakter, produktif, berkualitas, dan kreatif untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri**					
		1.1	Meningkatnya kualitas SDM yang berkarakter dan berdaya saing		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	
					Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	
		1.1.1	Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah		Literasi SD (Poin)	
					Literasi SMP (Poin)	
					Numerasi SD (Poin)	
					Numerasi SMP (Poin)	
				Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah dalam Pendidikan Menengah (APS)	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun	Program Pengelolaan Pendidikan
					Angka Partisipasi Sekolah 7-15 Tahun	
					Angka Partisipasi Sekolah 7-18 Tahun Kesetaraan	
				Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidikan	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		1.1.2	Meningkatnya literasi masyarakat		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Poin)	

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas
				Meningkatnya layanan perpustakaan	Nilai Tingkat Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional	Pembinaan Perpustakaan
		1.1.3	Meningkatnya prestasi olahraga		Persentase atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional (%)	
				Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
		1.2	Meingkatnya daya saing tenaga kerja dan wirausaha		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	
		1.2.1	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rp/jiwa)	
				Meningkatnya kesempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota	Penempatan Tenaga Kerja
		1.1.3	Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian		Kontribusi UMKM terhadap PDRB (%)	
				Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM)
					Pertumbuhan Wirausaha	
2	**Memastikan akses kesehatan untuk seluruh masyarakat Tapanuli Tengah sehat jasmani dan rohani**					

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas
		2.1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat		Umur Harapan Hidup (Tahun)	
		2.1.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	
					Angka Kematian Ibu	
					Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	
				Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
				Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan
		2.1.2	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang inklusif		Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	
				Meningkatnya akreditasi pelayanan kesehatan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan terakreditasi Paripurna	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
3	**Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil-menengah yang inklusif dan kreatif**					

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas
		3.1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat		Persentase Penduduk Miskin (%)	
		3.1.1	Menurunnya ketimpangan pendapatan		Gini Ratio (Poin)	
				Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
		3.1.2	Meningkatnya kesejahteraan sosial		Indeks Kesejahteraan Sosial (Poin)	
				Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang tertangani	Rehabilitasi Sosial
		3.1.3	Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok		Inflasi (%)	
				Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas
		3.1.4	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau		Indeks Ketahanan Pangan (Poin)	
				Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
				Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan
		3.2	Meningkatnya pendapatan masyarakat		PDRB Per Kapita (Rp juta)	
		3.2.1	Meningkatnya kesejahteraan petani		Nilai Tukar Petani (Poin)	
		3.2.2	Meningkatnya kesejahteraan nelayan		Nilai Tukar Nelayan (Poin)	
				Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
					Peningkatan produksi hortikultura	
					Peningkatan produksi komoditas peternakan	

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas
		3.2.3	Meningkatnya partisipasi penyandang disabilitas dalam pekerjaan formal		Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	
				Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Pengelolaan Perikanan Tangkap
				Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Pengelolaan Perikanan Budidaya
		3.2.4	Meningkatnya kesejahteraan pekerja rentan (sektor informal)		Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	
				Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Hubungan Industrial
4	**Membangun kemandirian ekonomi daerah Tapanuli Tengah berbasis potensi sumber daya lokal dengan memanfaatkan teknologi**					
		4.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing		Pertumbuhan Ekonomi (%)	
		4.1.1	Meningkatnya daya saing industri		Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas
				Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Perencanaan dan Pembangunan Industri
		4.1.2	Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum (%)	
				Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
				Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata
		4.1.3	Meningkatnya kontribusi koperasi dan UMKM dalam perekonomian		Proporsi jumlah UMK non pertanian (%)	
					Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	
				Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
				Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Pengembangan UMKM
		4.1.4	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif		Persentase Peningkatan Investasi (%)	

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas
				Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		4.1.5	Meningkatnya nilai tambah perdagangan		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	
				Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
		4.1.6	Meningkatnya literasi digital masyarakat		Indeks Masyarakat Digital (Poin)	
				Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
		4.2	Meningkatkan kemandirian daerah		Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	
		4.2.1	Meningkatnya sumber pendapatan asli daerah		Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	
				Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas
		4.2.2	Meningkatnya kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah		RoA BUMD (%)	
				Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	Pengelolaan Pendapatan Daerah
		4.2.3	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel		Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Level)	
				Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pengelolaan Keuangan Daerah
					Persentase Penurunan SILPA	
5	**Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera) Tapanuli Tengah yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang melayani, transparan, bebas dari korupsi, dan berkeadaban**					
		5.1	Terwujudnya tata pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	
		5.1.1	Terciptanya tata pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Indeks Pelayanan Publik (Poin)	

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas
					Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	
				Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejagteraan Rakyat	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
		5.1.2	Meningkatnya profesionalitas ASN		Indeks Profesionalitas ASN (Poin)	
				Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	Kepegawaian Daerah
		5.1.3	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM		Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)	
				Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
6	**Memajukan kebudayaan Tapanuli Tengah dalam semangat kebhinnekaan dan toleransi sebagai warisan leluhur bangsa Indonesia**					
		6.1	Terwujudnya masyarakat yang berbudaya dan harmonis		Indeks Kerukunan Umat Beragama (Poin)	

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas
		6.1.1	Terwujudnya keluarga yang berkualitas		Indeks Pembangunan Keluarga (Poin)	
				Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Pemberdayaan dan Peningkatan KS
		6.1.2	Terwujudnya berkebudayaan maju		Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	
				Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
		6.1.3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat		Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesakan (%)	
				Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		6.1.4	Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak		Indeks Ketimpangan Gender (Poin)	

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas
					Indeks Perlindungan Anak (Poin)	
				Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (Poin)	Peningkatan Kualitas Keluarga
7	**Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, irigasi/bendungan, serta berbagai sarana-prasarana pendukungnya**					
		7.1	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah		Indeks Infrastruktur (Poin)	
			7.1.1 Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (Poin)	
					Persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman (%)	
					Persentase Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	
				Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	Pengembangan Permukiman

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas
		7.1.2	Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau		Rasio Konektivitas (%)	
				Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
					Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	
		7.1.3	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan		Rumah Tangga dengan akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	
				Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)
		7.1.4	Meningkatkan infrastruktur yang resilien terhadap bencana		Indeks Risiko Bencana (IRB)	
				Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Penanggulangan Bencana

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas
8	**Mengelola sumber daya alam dan potensi alam yang ada di Tapanuli Tengah, baik Sektor Kelautan, Perkebunan, Pertanian, Perikanan, Hutan, Sungai, Sumber Daya Energi Terbarukan (air, angin, gelombang laut, dll.) secara optimal dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan kelestarian lingkungan hidup**					
		8.1	Terwujunya pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	
			8.1.1 Terjaganhya kelestarian lingkungan hidup		Porsi EBT dalam Bauran Energi (%)	
				Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT	Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
			8.1.2 Meningkatknya pengelolaan sampah		Timbulan Sampah (Ton/Hari)	
				Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Pengelolaan Persampahan
			8.1.3 Menurunnya emisi gas rumah kaca		Penurunan Emisi GRK (ton CO2eq)	
				Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan ilingkungan hidup	Indeks Kualitas Udara	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
9	**Perencanaan pembangunan daerah dan desa yang terintegrasi**					
		9.1	Terwujudnya pembangunan desa yang merata		Indeks Desa (%)	

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Outcome	Indikator	Program Prioritas
		9.1.1	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa		Persentase Desa Mandiri (%)	
				Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	Penataan Desa
		9.1.2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Poin)	
				Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
					Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	

BAB IV

Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Program perangkat daerah Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan pelaksanaan dari urusan wajib pelayanan dasar, wajib non pelayanan dasar dan urusan pilihan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah serta unsur penunjang dan unsur kewilayahan. Program Perangkat daerah merupakan program yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program Perangkat Daerah RPJMD Kabupaten Tapanuli tengah Tahun 2026-2030 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2030

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
I	**Layanan Urusan Wajib Dasar**														
1	**Pendidikan**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(AKIP)	66,83	67,78	276.459.354.950	68,48	288.584.063.268	68,90	291.407.725.904	69,51	295.048.769.064	69,98	299.846.479.494	70,10	306.951.682.491
	Program Pengelolaan Pendidikan	Iklim Keamanan SD	69,40	70,87	97.762.860.659	71,52	109.217.770.769	72,20	110.286.416.539	73,50	111.664.408.840	74,90	113.480.154.422	75,5	116.169.195.609
		Iklim Keamanan SMP	68,84	69,78		70,80		71,90		73,25		74,50		75,5	
		Iklim Kebhinekaan SD	70,93	70,93		71,10		71,70		72,25		72,65		73	
		Iklim Kebhinekaan SMP	74,25	74,25		74,70		75,00		75,50		76,00		76,5	
		Iklim Inklusivitas SD	52,39	55,17		57,05		57,75		58,10		58,80		59,25	
		Iklim Inklusivitas SMP	57,09	57,46		57,90		58,10		58,60		59,25		59,5	
	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum muatan lokal	N/A	15,00	97.304.790	25,00	203.729.455	45,00	205.722.855	60,00	208.293.294	70,00	211.680.296	80,00	216.696.301
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kualitas Pembelajaran SD	63,10	63,10	1.479.992.262	63,50	1.977.710.526	63,80	1.997.061.516	64,00	2.022.014.139	64,20	2.054.893.579	64,50	2.103.586.617
		Kualitas Pembelajaran SMP	65,17	65,17		65,25		65,80		66,10		66,30		66,70	

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang diterbitkan/diperbarui	N/A	5,00	-	6,00	200.000.000	7,00	201.956.908	8,00	204.480.293	9,00	207.805.293	10,00	212.729.476
	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Jumlah Pengembangan Bahasa dan Sastra	N/A	2	535.188.954	2	570.525.446	2	576.107.776	3	583.306.052	3	592.791.039	3	606.837.896
	Jumlah				**376.334.701.615**		**400.753.799.465**		**404.674.991.497**		**409.731.271.682**		**416.393.804.123**		**426.260.728.391**
2	**Kesehatan**														
	Dinas Kesehatan														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(AKIP)	69,42	69,95	82.396.905.642	70,50	85.523.819.012	71,10	85.360.630.336	71,60	85.727.183.182	72,00	86.121.170.359	72,50	88.161.909.336
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah Kematian Balita	0	1	90.317.394.709	3	100.280.709.001	3	102.242.340.640	3	104.194.835.535	3	106.856.598.876	3	109.341.295.117
		Cakupan imunisasi bayi lengkap	52,00	80,00		85,00		90,00		93,00		95,00		95,00	
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	39,95	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan	N/A	77,00		78,00		79,00		79,50		80,00		80,00	
	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan	50	50,00	113.000.117	55,00	245.000.000	55,00	247.397.213	60,00	250.488.359	60,00	254.561.484	65,00	260.593.608
	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	N/A	100,00	89.599.689	100,00	205.000.000	100,00	207.005.831	100,00	209.592.300	100,00	213.000.426	100,00	218.047.713
	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	5,00	5,00	129.998.836	9,00	218.000.000	12,00	220.133.030	18,00	222.883.519	20,00	226.507.770	20,00	231.875.129
	Jumlah				**175.046.898.993**		**186.472.528.013**		**188.277.507.050**		**190.604.982.895**		**193.671.838.915**		**198.213.720.903**
	RSUD PANDAN														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(AKIP)	70,00	70,50	58.324.464.391	71,00	62.175.407.094	71,50	62.783.764.922	72,00	63.568.227.300	72,50	64.601.893.525	73,00	66.132.708.788

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan	77,00	77,00	9.719.790.700	77,00	10.361.551.537	77,00	10.462.934.564	77,00	10.593.665.471	77,00	10.765.926.279	77,00	11.021.037.134
		Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan di Kabupaten	0,03	0,05		0,05		0,05		0,05		0,05		0,05	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan	15,00	16,00	8.923.200.000	16,50	9.512.364.980	16,50	9.605.439.107	16,50	9.725.455.892	17,00	9.883.598.972	17,00	10.117.802.079
	Jumlah				**76.967.455.091**		**82.049.323.611**		**82.852.138.592**		**83.887.348.663**		**85.251.418.776**		**87.271.548.000**
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (%)	N/A	100,00	19.463.125.510	100,00	20.748.201.712	100,00	20.951.213.344	100,00	21.212.991.826	100,00	21.557.930.707	100,00	22.068.770.368
	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	N/A	20,00	5.979.816.558	20,00	6.374.641.117	20,00	6.437.014.055	20,00	6.517.442.417	22,50	6.623.420.834	25,00	6.780.370.316

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob	N/A	20,00		20,00		20,00		20,00		22,50		25,00	
		Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	N/A	15,00		15,00		17,50		20,00		22,50		25,00	
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum (%)	N/A	61,13		61,13	5.000.000.000	61,13	5.500.000.000	61,13	6.000.000.000	61,13	6.500.000.000	61,13	7.000.000.000
	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati hunian dengan Akses Sanitasi (Air limbah Domestik Layak dan Aman)	N/A	40,00	200.000.000	40,00	311.879.400	40,00	500.000.000	40,00	550.000.000	40,00	600.000.000	40,00	650.000.000
	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	N/A	57,00	200.000.000	59,00	713.205.240	60,00	720.183.626	61,00	729.182.082	62,00	741.039.120	63,00	758.598.884
	Program pengembangan permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur	N/A	60,00		65,00	190.996.400	68,75	192.865.212	72,50	195.274.999	76,25	198.450.315	80,00	203.152.820

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Permukiman dalam Kondisi Baik													
	Program penataan bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	N/A	70,00	20.544.286.626	75,00	16.111.077.227	81,25	15.632.570.427	87,50	15.352.862.240	93,75	15.159.018.922	100,00	15.136.471.664
	Program penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	N/A	65,00	2.834.622.496	70,00	3.021.781.846	77,50	3.051.348.594	85,00	3.089.474.186	92,50	3.139.711.313	100,00	3.214.110.340
	Program penyelenggaraan jalan	Tingkat Kemantapan Jalan	61,12	63,00	37.433.446.610	65,00	46.633.408.806	70,00	46.130.190.306	75,00	45.807.253.399	80,00	45.782.182.606	85,00	46.427.823.019
	Jumlah				**86.655.297.800**		**99.105.191.747**		**99.115.385.564**		**99.454.481.150**		**100.301.753.816**		**102.239.297.411**
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	N/A	100,00	3.798.996.900	100,00	3.784.794.900	100,00	3.849.979.354	100,00	3.920.480.473	100,00	4.039.731.506	100,00	4.196.337.163
	Program pengembangan perumahan	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleg Rumah Layak Huni	N/A	100,00	659.725.099	100,00	653.199.039	100,00	653.199.039	100,00	673.199.039	100,00	673.199.039	100,00	693.199.039

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni)	N/A	16,47	1.000.000.000	15,96	1.000.000.000	15,73	1.000.000.000	15,48	1.000.000.000	15,23	1.000.000.000	14,99	1.000.000.000
	Program Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 ha yang Ditangani	N/A	100,00	-	100,00	560.000.000	100,00	560.000.000	100,00	560.000.000	100,00	560.000.000	100,00	560.000.000
	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase PSU Permukiman yang Sudah Dilengkapi	N/A	80,00	1.235.000.000	85,00	1.100.000.000	88,75	1.100.000.000	92,50	1.100.000.000	96,25	1.100.000.000	100,00	1.100.000.000
	Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum PSU	N/A	85,00	-	90,00	10.000.000	95,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000
	Jumlah				**6.693.721.999**		**7.107.993.939**		**7.173.178.393**		**7.263.679.512**		**7.382.930.545**		**7.559.536.202**
5	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**														
	Satuan Polisi Pamong Praja														

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				4.967.503.674		4.277.295.103		4.459.306.988		4.667.272.336		4.885.635.950		5.091.666.841,87
	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	75,00	75,00	6.555.350.000	75,00	6.266.530.043	100,00	6.568.356.545	100,00	6.885.274.372	100,00	7.218.038.090	100,00	7.567.439.994
		Persentase Penanganan Gangguan Tibumtranmas	97,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	N/A	85,00		90,00		92,50		95,00		97,50		100,00	
		Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya		65,00		70,00		80,00		90,00		100,00		100,00	
	Program pencegagan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	N/A	100,00	2.864.071.301	100,00	3.194.347.500	100,00	3.300.964.875	100,00	3.412.913.119	100,00	3.530.458.775	100,00	3.653.881.713
		Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Jumlah				**14.386.924.975**		**13.738.172.646**		**14.328.628.408**		**14.965.459.827**		**15.634.132.815**		**16.312.988.548,87**

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Badan Penanggulangan Bencana														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				3.232.010.190,00		3.445.407.539		3.479.119.270		3.522.589.715		3.579.869.620		3.664.698.698
	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	N/A	65,00	2.312.781.388	70,00	2.535.097.403	80,00	2.559.902.168	90,00	2.591.887.299	100,00	2.634.033.297	100,00	2.696.449.708
		Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana		85,00		90,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Persentase Penanganan Pasca Bencana		85,00		90,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Jumlah				**5.544.791.578**		**5.980.504.942**		**6.039.021.439**		**6.114.477.014**		**6.213.902.917**		**6.361.148.406**
6	**Sosial**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(AKIP)	68,42	69,50	3.178.788.545	71,6	3.338.671.871	72,7	3.371.339.243	73,8	3.413.463.012	74,9	3.468.968.436	76,10(	3.551.169.585

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program pemberdayaan sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Diluar Panti Rehabilitasi Sosial	80,3	80,6	49.999.420	80,9	83.000.000	81,2	83.812.117	81,5	84.859.322	81,8	86.239.197	100,00	88.282.732
		Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Diluar Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	80,3	80,6		80,9		81,2		81,5		81,8		100,00	
		Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	55	56,5		58		59,5		61		62,5		64	
		Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang meningkat kualitas dalam pelayanan sosial	75	75		80		90		100		100		100	

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program rehabilitasi sosial	Persentase Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	84,77	85,00	437.241.096	85,50	441.255.798	86,00	445.671.129	86,50	451.364.589	87,00	458.866.717	87,50	469.977.047
		Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	83,26	83,50		84,00		84,50		85,00		85,50		86,00	
		Persentase Lansia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	85,19	85,50		86,00		86,50		87,00		87,50		88,00	
		Persentase Gelandangan/Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	82,36	82,50		83,00		83,50		84,00		84,50		85,00	
	Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	27,00	27,10	47.773.101	27,20	100.000.000	27,30	100.978.454	27,40	102.240.147	27,50	103.902.647	27,60	106.364.738
		Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Fakir Miskin	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Program penanganan bencana	Persentase Korban Bencana Alam , Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah	80,97	81,00	331.996.780	82	340.000.000	83,00	343.326.744	84,00	347.616.498	85,00	353.268.999	86,00	361.640.109

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Tanggap Darurat Bencana													
		Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang meningkat Kesiapsiagaannya	70,00	72,00		73		75,00		75,00		78,00		80,00	
	Program pengelolaan taman makam pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Terkelola dengan baik	100,00	100,00	-	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000
	Jumlah				**4.045.798.942**		**4.312.927.669**		**4.355.127.687**		**4.409.543.567**		**4.481.245.996**		**4.587.434.211**
II	**Layanan Urusan Wajib Non Dasar**														
7	**Tenaga Kerja**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(AKIP)	69,42	70,00	3.366.545.157	70,50	3.563.446.907	71,00	3.598.313.599	72,00	3.643.273.338	73,00	3.702.515.647	73,50	3.790.250.962
	Program perencanaan tenaga kerja	Persentase Kabupaten/Kota Menyusun Rencana Tenaga Kerja	100,00	100,00	69.999.751	100,00	100.000.000	100,00	100.978.454	100,00	102.240.147	100,00	103.902.647	100,00	106.364.738
	Program Pelatihan kerja dan	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang	70,00	75,00	192.993.908	75,00	205.736.562	80,00	207.749.600	80,00	210.345.363	85,00	213.765.733	85,00	218.831.155

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	produktivitas tenaga kerja	Meningkat Produktivitasnya													
	Program penempatan tenaga kerja	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	50,90	55,21	204.999.867	57,96	218.535.229	61,59	220.673.496	62,85	223.430.738	64,25	227.063.887	67,46	232.444.424
		Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	32,00	40,00		45,00		53,00		60,00		65,00		70,00	
	Program hubungan industrial	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan hak-hak Pekerja dan Dialog Sosial	11.432	11.686	142.780.985	11.989	152.208.271	12.231	153.697.559	12.389	155.617.959	12.578	158.148.422	12.871	161.895.928
	Jumlah				**3.977.319.668**		**4.239.926.969**		**4.281.412.708**		**4.334.907.544**		**4.405.396.336**		**4.509.787.207**
8	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(AKIP)	65,67	67,00	2.887.959.369	68,00	3.053.200.699	69,50	3.083.074.867	70,70	3.121.596.867	72,00	3.172.356.333	73,00	3.247.528.921

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Tingkat Partisipasi Angkatan kerja Perempuan (%)	66,75	67,00	90.499.744	67,50	96.475.098	68,00	97.419.063	68,50	98.636.282	69,00	100.240.180	69,50	102.615.485
		Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	31,25	32,50		35,00		37,50		40,00		42,00		44,00	
	Program perlindungan perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kompregensif	100,00	100,00	82.498.297	100,00	87.945.346	100,00	88.805.851	100,00	89.915.451	100,00	91.377.542	100,00	93.542.837
	Program pengelolaan sistem data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan	100,00	100,00	7.499.883	100,00	10.000.000	100,00	10.097.845	100,00	10.224.015	100,00	10.390.265	100,00	10.636.474
	Program pemenuhan hak anak (PHA)	Indeks Pemenuhan hak Anak (IPHA)	N/A	58,50	49.795.372	59,50	53.083.171	60,50	53.602.566	61,50	54.272.312	62,50	55.154.820	63,50	56.461.776
	Program perlindungan khusus anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100,00	100,00	90.584.338	100,00	120.000.000	100,00	121.174.145	100,00	122.688.176	100,00	124.683.176	100,00	127.637.685
		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	N/A	48,00		49,44		50,92		52,45		54,02		55,65	

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Jumlah				**3.208.837.003**		**3.420.704.314**		**3.454.174.336**		**3.497.333.102**		**3.554.202.316**		**3.638.423.178**
9	**Pangan**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			2.414.665.859,00	75,00	2.574.097.067,95	75,00	2.599.283.426,58	75,00	2.631.760.613,36	75,00	2.674.554.980,49	75,00	2.737.931.599,40
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan				65	-	65	150.000.000,00	70	150.000.000,00	75	150.000.000,00	80	150.000.000,00
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pengawasan Keamanan Pangan				70	-	70	300.000.000,00	70	300.000.000,00	70	300.000.000,00	70	300.000.000,00
	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	81,30	81,60	1.095.998.820,00	82,27	1.168.363.456,39	82,94	479.795.356,68	82,94	494.536.509,48	84,31	513.960.553,47	85,00	542.726.728,00
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan				70	-	70	250.000.000,00	70	250.000.000,00	70	250.000.000,00	70	250.000.000,00

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Jumlah				**3.510.664.679**		**3.742.460.524**		**3.779.078.783**		**3.826.297.123**		**3.888.515.534**		**3.980.658.327**
10	**Pertanahan**														
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	N/A	100,00	-	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000
	Program Penatagunaan Tanah	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah	N/A	15,00	-	30,00	10.000.000	50,00	10.000.000	70,00	10.000.000	85,00	10.000.000	95,00	10.000.000
	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase tersedianya tanah untuk masyarakat	N/A	10,00	10.000.000	25,00	10.000.000	45,00	10.000.000	65,00	10.000.000	80,00	10.000.000	90,00	10.000.000
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang dilakukan melalui Mediasi			15.000.000	100,00	15.000.000	100,00	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00	20.000.000
	Program Redistribusi tanah dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	N/A	10,00	10.000.000	25,00	20.000.000	45,00	20.000.000	65,00	20.000.000	80,00	20.000.000	90,00	20.000.000

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Jumlah				**35.000.000**		**65.000.000**		**70.000.000**		**70.000.000**		**70.000.000**		**70.000.000**
11	**Lingkungan Hidup**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	PersentaseTerlaksanaya Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	94	3.068.034.135	95	3.068.034.135,00	95	3.068.034.135,00	100	3.068.034.135,00	100	3.068.034.135,00	100	3.068.034.135,00
	Program perencanaan lingkungan Hidup	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	N/A	100,00	130.000.000	100,00	138.583.406	100,00	139.939.381	100,00	141.687.877	100,00	143.991.827	100,00	147.403.876
	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	N/A	47,00	172.265.000	50,00	183.639.003	62,25	185.435.827	66,50	187.752.786	70,75	190.805.785	75,00	195.327.144
		Indeks Kualitas Udara		73,00		75,00		78,00		80,00		83,00		85,00	
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan		49,00		50,00		55,00		60,00		65,00		70,00	
	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	N/A	55,00	14.993.000	60,00	15.982.931	67,50	16.139.316	75,00	16.340.972	82,50	16.606.688	90,00	17.000.202

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan	N/A	75,00	57.184.015	80,00	60.959.658	85,00	61.556.120	90,00	62.325.244	95,00	63.338.698	100,00	64.839.581
	Program peningkatan pendidikan, Pelatihan dan penyuluhan lingkungan Hidup untuk masyarakat	Persentase Penyulug Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	N/A	75,00	29.989.000	80,00	31.969.060	85,00	32.281.862	90,00	32.685.213	95,00	33.216.699	100,00	34.003.807
	Program penghargaan lingkungan Hidup untuk masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Lingkungan	N/A	100,00	39.929.000	100,00	42.565.360	100,00	42.981.843	100,00	43.518.887	100,00	44.226.536	100,00	45.274.534
	Program pengelolaan persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	N/A	25,00	5.462.132.000	30,00	5.822.775.815	43,75	5.879.749.005	57,50	5.953.214.524	71,25	6.050.018.180	85,00	6.193.380.234
	Program Keanekaragaman Hayati (KeHati)	Persentase RTH					67.523.544		78.190.667		91.945.657		110.070.260		136.912.018

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang ditingkatkan Kapsitasnya					67.523.544		78.190.667		91.945.657		110.070.260		136.912.018
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup					67.523.544		78.190.667		91.945.657		110.070.260		136.912.018
	Jumlah				**8.974.526.150**		**9.567.080.001**		**9.660.689.489**		**9.781.396.609**		**9.940.449.327**		**10.175.999.567**
12	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(AKIP)	68,42	69,50	4.024.189.407	70,70	4.939.891.338	71,90	4.988.225.908	73,10	5.050.552.141	74,30	5.132.677.841	75,20	5.254.302.474
	Program pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (%)	9,11	10,00	698.790.011	14,00	744.928.459	18,00	752.217.243	22,00	761.615.948	26,00	774.000.385	30,00	792.341.203

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	30,90	34,00		39,20		44,40		49,60		54,80		60,10	
	Program pencatatan sipil	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	100,00	100,00	199.999.850	100,00	213.205.080	100,00	215.291.194	100,00	217.981.186	100,00	221.525.721	100,00	226.775.024
		Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	18,2	24,2	774.855.468	24,2	176.016.229	27,3	177.738.467	30,3	179.959.251	33,3	182.885.521	36,4	187.219.201
	Program pengelolaan profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	100	100	29.980.137	100	31.959.611	100	32.272.322	100	32.675.554	100	33.206.882	100	33.993.757
	Jumlah				**5.727.814.873**		**6.106.000.719**		**6.165.745.134**		**6.242.784.080**		**6.344.296.350**		**6.494.631.660**

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
13	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(AKIP)	65,67	65,80	2.605.195.500	66,76	2.677.206.657	69,75	2.703.401.896	71,25	2.737.180.008	72,75	2.781.688.572	74,50	2.847.603.844
	Program Penataan Desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	N/A	15,00	-	15	100.000.000	15	100.978.454	15	102.240.147	15	103.902.647	15	106.364.738
	Program peningkatan kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	N/A	100,00	2.126.835.000	100	2.267.261.831	100	2.289.445.948	100	2.318.051.818	100	2.355.745.049	100	2.411.567.104
	Program administrasi pemerintahan desa	Persentase Fasilitasi Aparatur Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	N/A	60,00	689.340.700	63	734.855.246	66	742.045.468	69	751.317.080	72	763.534.050	75	781.626.857
		Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	N/A	10,00		13		16		19		22		25	
	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat Hukum adat	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga	N/A	75,00	499.999.930	80	533.013.025	80	538.228.313	80	544.953.298	80	553.814.640	85	566.937.907
		Persentase Fasilitasi Lembaga Adat dan Masyarakat hukum Adat	N/A	75,00		80		80		80		80		85	
	Jumlah				**5.921.371.130**		**6.312.336.760**		**6.374.100.078**		**6.453.742.351**		**6.558.684.958**		**6.714.100.449**
14	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**														

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(AKIP)	69,42	70,42	5.056.958.000	71,22	5.150.000.000	72,00	5.200.390.387	72,80	5.265.367.545	73,20	5.350.986.302	74,00	5.477.784.001
	Program pengendalian penduduk	Total Fertility Rate (Rata-Rata Anak Per Wanita)	2,73	2,67	1.493.396.739	2,69	1.632.849.766	2,67	1.648.826.451	2,65	1.669.427.993	2,64	1.696.574.122	2,6	1.736.776.373
		Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (ASFR 15-19)	14,7	13,7-13,4		12,6-12,3		11,7-11,4		11,0-10,7		10,4-10,1		10,1-9,8	
	Program pembinaan keluarga berencana (KB)	Rasio Akseptor KB (%)	N/A	41,50	7.544.959.749	42,70	8.143.124.764	43,50	8.222.801.503	44,50	8.325.542.689	45,50	8.460.922.149	47,00	8.661.413.312
		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	39,70	40,50		41,00		42,00		42,75		43,50		44,25	
		Persentase kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	25,30	20,00		16,52		16,00		15,00		14,00		13,00	
		Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	28,40	33,00		38,30		44,50		50,00		56,50		70,10	
	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	79,30	80,90	3.235.438.800	82,40	3.549.062.527	83,80	3.583.788.475	85,10	3.628.566.727	86,20	3.687.569.896	87,00	3.774.951.054
		Indeks Lansia Berdaya	63,30	64,30		65,20		66,10		67,00		67,80		70,00	
	Jumlah				**17.330.753.288**		**18.475.037.056**		**18.655.806.816**		**18.888.904.953**		**19.196.052.468**		**19.650.924.740**

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
15	**Perhubungan**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemrintahan Umum	N/A	100	2.677.156.464	100	4.173.918.930	100	3.997.156.464	100	4.237.850.895	100	4.285.297.301	100	4.355.563.389
	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkatan jalan (LLAJ)	Konektivitas Darat	N/A	38,00	1.410.999.264	38,00	184.162.182	39,00	403.566.472	39,00	217.857.619	40,00	242.864.317	40,00	279.898.163
		Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal		83,33		83,33		83,87		83,87		87,10		87,10	
	Jumlah				**4.088.155.728**		**4.358.081.112**		**4.400.722.936**		**4.455.708.514**		**4.528.161.618**		**4.635.461.552**
16	**Komunikasi dan Informatika**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintah daerah		80,00	3.764.280.000,00	85,00	4.012.821.101,04	90,00	4.052.084.714,14	95,00	4.102.714.172,53	100,00	4.169.427.328,60	100,00	4.268.226.646,17
	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Cakupan Layanan Telekomunikasi (%)	N/A	70,00	359.999.319,00	71,89	383.768.705,74	73,84	387.523.706,42	75,84	392.365.686,97	77,89	398.745.842,21	80,00	408.194.577,97

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE	2,38	2,60	1.289.996.301,00	2,80	1.375.169.853,71	3,30	1.388.625.259,70	3,30	1.405.975.673,07	3,70	1.428.837.873,69	4,00	1.462.695.810,46
	Jumlah				**5.414.275.620**		**5.771.759.660**		**5.828.233.680**		**5.901.055.533**		**5.997.011.044**		**6.139.117.035**
17	**Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			1.842.977.255,00		1.964.662.038,32		1.983.885.354,83		2.008.673.346,23		2.041.335.855,19		2.089.707.627,51
	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Pendidikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	N/A	50,00	286.125.975,00	60,00	305.017.785,61	70,00	308.002.244,68	80,00	311.850.630,87	90,00	316.921.551,95	100,00	324.431.368,19
	Program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha kecil dan Usaha mikro (UMKM)	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	N/A	60,00	329.999.450,20	65,00	351.788.059,63	73,75	355.230.144,36	82,50	359.668.627,54	91,25	365.517.104,49	100,00	374.178.447,56
		Pertumbuhan Wirausaha	N/A	4,50		5,00		5,75		6,50		7,25		8,00	
	Jumlah				**2.459.102.680**		**2.621.467.884**		**2.647.117.744**		**2.680.192.605**		**2.723.774.512**		**2.788.317.443**
18	**Penanaman Modal**														

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indek Kepuasan Masyarakat (Poin)	N/A	79	3.323.221.539,00	79	3.323.221.539,00	79	3.323.221.539,00	79	3.323.221.539,00	79	3.323.221.539,00	79	3.323.221.539,00
	Program pengembangan iklim Penanaman Modal	Realisasi Total terhadap target investasi (persen)	N/A	N/A	-	100%	150.000.000	100%	151.467.681	100%	153.360.220	100%	155.853.970	100%	159.547.107
	Program promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi	N/A	1,00	14.999.992	10,00	15.990.384	12,50	16.146.843	15,00	16.348.592	17,50	16.614.433	20,00	17.008.131
	Program pelayanan penanaman modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	N/A	100,00	91.996.874	100,00	98.071.078	100,00	99.030.658	100,00	100.268.014	100,00	101.898.446	100,00	104.313.045
	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha	N/A	100,00	-	100,00	69.419.687	100,00	102.615.125	100,00	145.419.821	100,00	201.822.486	100,00	285.352.409
	Program pengelolaan data dan sistem informasi	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	N/A	100,00	5.942.829	100,00	6.335.211	100,00	6.397.199	100,00	6.477.129	100,00	6.582.452	100,00	6.738.431

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	penanaman modal														
	Jumlah				**3.436.161.234**		**3.663.037.900**		**3.698.879.045**		**3.745.095.315**		**3.805.993.325**		**3.896.180.661**
19	**Kepemudaan dan Olahraga**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(AKIP)	65,33	66,00	1.507.102.500	66,60	1.546.610.750	67,10	1.561.743.626	67,60	1.581.257.096	68,00	1.606.969.502	68,70	1.645.048.470
	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	1,74	1,74	56.123.400	2,00	99.829.015	2,40	100.805.796	2,80	102.065.331	3,20	103.724.988	3,20	106.182.870
		Tingkat pemuda partisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	2,06	2,06		2,25		2,60		3,10		3,50		4,00	
	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (%)	30,00	30,00	609.556.000	32,00	669.802.666	32,00	676.356.378	33,00	684.807.227	34,00	695.942.697	35,00	712.433.850
		Peningkatan Prestasi Olahraga	2	2		3		3		3		3		4	
	Program pengembangan kapasitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	0,00	5,00	124.150.000	10,00	132.347.153	15,00	133.642.109	20,00	135.311.923	30,00	137.512.194	35,00	140.770.702

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Jumlah				**2.296.931.900**		**2.448.589.583**		**2.472.547.909**		**2.503.441.577**		**2.544.149.382**		**2.604.435.892**
20	**Statistik**														
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	1,90	2,60	44.526.295,00	2,80	47.466.197,02	3,00	47.930.631,98	3,20	48.529.509,37	3,50	49.318.634,96	3,70	50.487.296,05
	Jumlah				**44.526.295**		**47.466.197**		**47.930.632**		**48.529.509**		**49.318.635**		**50.487.296**
21	**Persandian**														
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (%)	N/A	20,00	39.994.554,00	40,00	42.635.242,39	60,00	43.052.408,67	80,00	43.590.334,28	80,00	44.299.145,24	80,00	45.348.863,82
	Jumlah				**39.994.554**		**42.635.242**		**43.052.409**		**43.590.334**		**44.299.145**		**45.348.864**
22	**Kebudayaan**														
	Program Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Pengembangan Kebudayaan	N/A	10,00	1.203.460.567	15,00	1.282.920.494	16,25	1.295.473.282	17,50	1.311.659.793	18,75	1.332.988.348	20,00	1.364.575.021
	Program pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	N/A	10,00	85.502.480	15,00	265.000.000	16,25	267.592.903	17,50	270.936.388	18,75	275.342.014	20,00	281.866.555
	Program pembinaan sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	N/A	10,00	-	15,00	205.000.000	16,25	207.005.831	17,50	209.592.300	18,75	213.000.426	20,00	218.047.713

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dimanfaatkan	13	13	526.508.474	30	611.271.827	30	617.252.842	30	624.965.212	30	635.127.607	30	650.177.677
		Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	N/A	10,00		15,00		16,25		17,50		18,75		20,00	
	Jumlah				**1.815.471.521**		**2.364.192.321**		**2.387.324.858**		**2.417.153.693**		**2.456.458.393**		**2.514.666.966**
23	**Perpustakaan**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintah daerah	N/A	80,00	2.128.382.637,00	85,00	2.188.911.652,91	90,00	2.210.329.149,01	95,00	2.237.946.480,72	100,00	2.274.337.139,82	100,00	2.328.230.142,30
	Program pembinaan perpustakaan	Nilai Tingkat Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional	N/A	80,00	70.795.000,00	85,00	105.469.324,77	88,75	106.501.293,72	92,50	107.831.992,16	96,25	109.585.419,82	100,00	112.182.170,85
	Jumlah				**2.199.177.637**		**2.294.380.978**		**2.316.830.443**		**2.345.778.473**		**2.383.922.560**		**2.440.412.313**
24	**Kearsipan**														
	Program pengelolaan arsip	Nilai Pengawasan Kearsipan	N/A	C	29.999.900,00	CC	81.980.679,37	B	82.782.822,70	BB	83.817.166,69	A	85.180.095,60	A	87.198.534,74
	Jumlah				**29.999.900**		**81.980.679**		**82.782.823**		**83.817.167**		**85.180.096**		**87.198.535**
III	**Urusan Pilihan**														

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
25	**Kelautanan dan Perikanan**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (%)	80	100	2.926.524.798	100	2.926.524.798	100	2.926.524.798	100	2.926.524.798	100	2.926.524.798	100	2.926.524.798
	Program pengelolaan perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	4,498	52,192	199.999.811	54,213	213.205.038	57,234	215.291.152	60,757	217.981.144	66,833	221.525.678	73,516	226.774.980
	Program pengelolaan perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	650,16	880	199.999.010	898,579	213.204.184	915,068	215.290.290	932,181	217.980.271	952,852	221.524.790	980,606	226.774.072
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Luasan Kawasan Konservasi (KMA^2)	0	0	-	1	100.000.000	1	129.613.156	1	167.798.589	1	218.114.568	1	292.630.371
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	40,5	0		46,5	93.227.309	51,4	94.139.496	56,6	95.315.738	62,2	96.865.642	68,4	99.160.983
	Jumlah				**3.326.523.619**		**3.546.161.330**		**3.580.858.891**		**3.625.600.539**		**3.684.555.476**		**3.771.865.204**
26	**Pariwisata**														

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya pelaksanaan urusan penunjang pemerintah Daerah (% realisasi anggaran)	88,97	100	2.517.966.090,00	100	2.517.966.090,00	100	2.517.966.090	100	2.517.966.090	100	2.517.966.090	100	2.517.966.090
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	11,41		399.897.433,19	2,30	426.301.141	2,30	430.472.302	2,30	435.850.911	2,30	442.938.168	2,30	453.434.091
	Program pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	N/A	20,00		25,00	83.125.865	31,25	96.257.785	37,50	113.191.071	43,75	135.503.633	50,00	168.547.580
	Program Pengembangan Ekonomi Kretatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi yang memiliki Kekayaan Intelektual	N/A	0,43		0,44	83.125.865	0,46	96.257.785	0,47	113.191.071	0,48	135.503.633	0,5	168.547.580
	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	N/A	35,00	49.999.770,00	40,00	53.301.065	48,75	53.822.591	57,50	54.495.087	66,25	55.381.217	75,00	56.693.538

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Jumlah				**2.967.863.293**		**3.163.820.026**		**3.194.776.553**		**3.234.694.230**		**3.287.292.742**		**3.365.188.878**
27	**Pertanian**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	N/A	100	7.350.694.811	100	7.835.802.865	100	7.912.472.601	100	8.011.336.329	100	8.141.606.562	100	8.334.531.179
	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Peningkatan Produksi hortikultura Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	N/A	5	599.972.608	5	639.586.519	5	645.844.580	5	653.914.194	5	664.547.321	5	680.294.524
	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	N/A	10	418.769.819	10	446.419.598	10	450.787.609	10	456.420.051	10	463.841.778	10	474.833.036
	Program pengendalian kesehatan gewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Vetriner	N/A	5	80.036.862	5	85.321.392	5	86.156.222	5	87.232.716	5	88.651.184	5	90.751.875

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	N/A	5	49.998.374	5	53.299.577	5	53.821.088	5	54.493.565	5	55.379.671	5	56.691.955
	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Pemenuhan Izin Usaha Pertanian	N/A	10	296.798.474	10	316.394.949	10	319.490.729	10	323.482.660	10	328.742.726	10	336.532.658
	Program penyuluhan pertanian	Cakupan Bina Kelompok	N/A	25	2.097.993.470	25	2.236.516.005	25	2.258.399.288	25	2.286.617.240	25	2.323.799.321	25	2.378.864.386
	Jumlah				**10.894.264.418**		**11.613.340.905**		**11.726.972.117**		**11.873.496.755**		**12.066.568.563**		**12.352.499.614**
29	**Energi dan Sumber Daya Mineral**														
	Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Porsi EBT dalam Bauran Energi	N/A	20,00		21,69		23,52	14.000.000,00	25,51	14.174.925,37	27,66	14.405.420,10	30,00	14.746.772,90
	Jumlah				**-**		**-**		**14.000.000**		**14.174.925**		**14.405.420**		**14.746.773**
30	**Perdagangan**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/Kota (Persen)	60		2.648.515.814,00	70	2.823.387.246,66	75	2.824.012.795,29	80	2.859.297.901,21	85	2.905.792.192,33	90	2.974.648.239,69
	Program peningkatan	Persentase Sarana Perdagangan yang	N/A	10	29.051.972,00	15	30.970.163,29	15	31.273.192,13	20	31.663.940,32	20	32.178.819,32	20	32.941.333,01

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	sarana distribusi perdagangan	Ditingkatkan Kualitasnya													
	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi harga Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting	N/A	5,9	229.044.231,00	5,9	244.167.151,02	5,9	246.556.214,55	5,9	249.636.852,91	5,9	253.696.132,11	5,9	259.707.750,20
	Program standardisasi dan perlindungan konsumen	Persentase tertib usaha perdagangan	N/A	75	29.051.834,00	75	30.970.016,18	80	31.273.043,58	85	31.663.789,91	90	32.178.666,47	100,00	32.941.176,53
	Jumlah				**2.935.663.851**		**3.129.494.577**		**3.133.115.246**		**3.172.262.484**		**3.223.845.810**		**3.300.238.499**
31	**Perindustrian**														
	Program perencanaan dan pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	N/A			20,00		55,00	13.000.000,00	70,00	13.162.430,70	85,00	13.376.461,52	100,00	13.693.431,98
	Program pengendalian izin Usaha industri	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	N/A	75	16.553.200,00	75	17.646.144,88	80	17.818.804,31	85	18.041.444,38	90	18.334.811,56	100,00	18.769.275,75
	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	N/A	100,00	8.316.900,00	100,00	8.866.033,30	100,00	8.952.783,36	100,00	9.064.645,43	100,00	9.212.043,25	100,00	9.430.333,08

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Jumlah				**24.870.100**		**26.512.178**		**39.771.588**		**40.268.521**		**40.923.316**		**41.893.041**
IV	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**														
1	**Sekretariat Daerah**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Sekretariat Daerah (%)	23.088.970.566,00	100	27.900.684.319	100	29.742.860.458	100	30.033.880.699	100	30.409.144.106	100	30.903.619.200	100	31.635.915.567
	Program pemerintahan dan kesejagteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	7.032.226.026,00	75,00	8.642.883.311	80,00	9.213.540.045	85,00	9.303.690.307	90,00	9.419.936.840	95,00	9.573.111.956	100,00	9.799.957.720
	Program perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	1.797.715.008,00	75,00	1.457.761.000	80,00	1.554.011.418	85,00	1.569.216.706	90,00	1.588.823.550	95,00	1.614.658.992	100,00	1.652.920.171
	Jumlah		**31.918.911.600**		**38.001.328.630**		**40.510.411.921**		**40.906.787.712**		**41.417.904.496**		**42.091.390.148**		**43.088.793.458**
2	**Sekretariat DPRD**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (%)	N/A	90	22.820.028.747	95	22.484.043.026	100	24.063.537.602	100	24.830.442.790	100	25.623.092.587	100	26.449.396.524

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Daerah Kabupaten/Kota														
	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	N/A	87,50	4.912.334.386	90,00	7.079.382.639	92,50	5.789.152.617	95,00	5.395.246.920	97,50	5.094.089.114	100,00	4.995.663.696
		Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	N/A	83,00		85,00		88,75		92,50		96,25		100,00	
	Jumlah				**27.732.363.133**		**29.563.425.665**		**29.852.690.219**		**30.225.689.711**		**30.717.181.701**		**31.445.060.220**
V	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**														
1	**Perencanaan Pembangunan**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Bappeda (%)	4.810.446.883,00	100	5.085.466.854,00	100	5.421.240.901,00	100	5.474.285.254	100	5.542.684.639	100	5.632.812.776	100	5.766.288.675
	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	640.612.597,00	100,00	522.208.602	100,00	556.688.051	100,00	562.134.988	100,00	569.158.679	100,00	578.413.618	100,00	592.119.786
		Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang pemerintahan dan	330.558.791,00	100,00	380.997.924,00	100,00	406.153.768,00	100,00	410.127.797,00	100,00	415.252.208,00	100,00	422.004.515,00	100,00	432.004.391,00

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	pembangunan Daerah	Pembangunan Manusia													
		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Jumlah		**5.781.618.271**		**5.988.673.380**		**6.384.082.720**		**6.446.548.039**		**6.527.095.526**		**6.633.230.909**		**6.790.412.852**
2	**Keuangan**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah	21.572.721.442		21.941.446.621		22.599.690.020		23.277.680.720		23.976.011.142		24.695.291.476		25.436.150.220
	Program pengelolaan	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang	N/A	35,00	216.968.385.838	30,00	231.985.745.067	27,50	233.732.579.088	25,00	236.186.482.595	22,50	239.649.920.482	20,00	245.150.472.125

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	keuangan Daerah	Dialokasikan melalui TKD													
		Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	N/A	37,00		40,00		42,50		45,00		47,50		50,00	
		Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	N/A	95,00		95,00		95,00		95,00		95,00		95,00	
		Persentase Penurunan SILPA	N/A	20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		20,00	
		Persentase laporan keuangan tepat waktu	N/A	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Program pengelolaan barang milik Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	N/A	5,00	1.088.665.986	5,00	1.121.325.966	5,00	1.154.965.745	5,00	1.189.614.717	5,00	1.225.303.158	5,00	1.262.062.253
	Program pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	7,34	7,49		7,64		7,79		7,94		8,10		8,26	
		Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	N/A	100,00	2.089.567.858	100,00	2.152.254.894	100,00	2.216.822.541	100,00	2.283.327.217	100,00	2.351.827.033	100,00	2.422.381.844
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	N/A	70,00		75,00		81,25		87,50		93,75		100,00	

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Jumlah				**242.088.066.303**		**257.859.015.947**		**260.382.048.094**		**263.635.435.671**		**267.922.342.149**		**274.271.066.442**
3	**Kepegawaian**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang Akurat dan Memadai	N/A	100,00	4.804.002.779	100,00	5.121.192.823	100,00	5.171.301.345	100,00	5.235.915.045	100,00	5.321.054.883	100,00	5.447.143.323
	Program kepegawaian Daerah	Persentase Perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	N/A	87,00	907.751.090	90,00	967.686.444	92,50	977.154.812	95,00	989.364.038	97,50	1.005.451.827	100,00	1.029.277.150
		Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	N/A	60,00		65,00		73,75		82,50		91,25		100,00	
		Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	N/A	50,00		60,00		70,00		80,00		90,00		100,00	
		Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	N/A	85,00		90,00		92,50		95,00		97,50		100,00	
	Jumlah				**5.711.753.869**		**6.088.879.268**		**6.148.456.157**		**6.225.279.083**		**6.326.506.709**		**6.476.420.474**
4	**Pendidikan dan Pelatihan**														

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional	N/A	60,00	640.696.800	65,00	682.999.575	75,00	689.682.412	80,00	698.299.766	90,00	709.654.634	95,00	726.470.707
		Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	N/A	60,00		65,00		75,00		80,00		90,00		95,00	
		Persentase ASN yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	N/A	60,00		65,00		75,00		80,00		90,00		95,00	
		Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi	N/A	60,00		65,00		75,00		80,00		90,00		95,00	
	Jumlah				**640.696.800**		**682.999.575**		**689.682.412**		**698.299.766**		**709.654.634**		**726.470.707**
5	**Penelitian dan Pengembangan**														
	Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan	3.686.122.406	75,00	3.922.326.095	80,00	4.181.302.378	85,00	4.222.214.504	90,00	4.274.969.677	95,00	4.344.483.835	100,00	4.447.431.315

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah		87,50		90,00		92,50		95,00		97,50		100,00	
		Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalagan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis, dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan di Daerah		75,00		80,00		85,00		90,00		95,00		100,00	
	Jumlah				**3.922.326.095**		**4.181.302.378**		**4.222.214.504**		**4.274.969.677**		**4.344.483.835**		**4.447.431.315**
VI	**Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**														
1	**Inspektorat Daerah**														

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah	100	100	6.387.873.756	100	6.809.640.781	100	6.876.269.991	100	6.962.186.711	100	7.075.396.998	100	7.243.056.568
	Program penyelenggaraan pengawasan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	N/A	100	1.813.998.690	100	1.933.770.129	100	1.952.691.182	100	1.977.089.413	100	2.009.238.344	100	2.056.849.529
	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	N/A	II	469.999.244	III	501.031.508	III	505.933.871	III	512.255.347	III	520.584.997	III	532.920.850
		Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	N/A	II		III		III		III		III		III	
	Jumlah				**8.671.871.690**		**9.244.442.417**		**9.334.895.044**		**9.451.531.471**		**9.605.220.338**		**9.832.826.947**
VII	**Unsur Kewilayahan**														
1	**Kecamatan Pandan**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota	Persentase Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Kecamatan Pandan	7.852.120.015,00	100	8.120.996.705	100	8.655.195.250	100	8.739.901.933	100	8.849.129.107	100	8.993.054.989	100	9.206.203.037

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif di Kecamatan Pandan	1.208.324.800,00	100	1.193.701.700	100	1.272.575.917	100	1.285.027.489	100	1.301.083.482	100	1.322.240.058	100	1.353.572.039
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun di Kecamatan Pandan	4.033.783.712,00	100	400.000.000	100	4.264.104.796	100	4.305.827.105	100	4.359.626.991	100	4.430.517.738	100	4.535.503.890
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di kecamatan Pandan	102.930.100,00	100	113.460.300	100	120.951.652	100	122.135.108	100	123.661.146	100	125.671.967	100	128.649.908
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terselenggaranya Pengawasan dan Koordinasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di kecamatan Pandan	N/A	0	0	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan di Kecamatan Pandan	N/A	0	0	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Jumlah		**13.197.158.627**		**9.828.158.705**		**14.314.827.615**		**14.454.891.635**		**14.635.500.726**		**14.873.484.752**		**15.225.928.874**
2	**Kecamatan Sarudik**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Kecamatan Sarudik	3.245.673.215,00	100	3.160.861.700	100	3.366.561.384	100	3.399.530.996	100	3.442.044.495	100	3.498.063.458	100	3.581.025.134
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif di Kecamatan Sarudik	69.376.778,00	100	67.371.228	100	71.819.494	100	72.522.214	100	73.428.356	100	74.622.355	100	76.390.616
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun di Kecamatan Sarudik	799.998.302,00	100	799.899.808	100	852.714.258	100	861.057.676	100	871.816.307	100	885.992.682	100	906.987.286
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di kecamatan Sarudik	N/A	0	0	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terselenggaranyaPengawasan dan KoordinasiPemerintahan Desa dan	N/A	0	0	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Kelurahan di kecamatan Sarudik													
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan di Kecamatan Sarudik	N/A	0	0	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000
	Jumlah		**4.115.048.295**		**4.028.132.736**		**4.294.095.136**		**4.336.110.886**		**4.390.289.158**		**4.461.678.495**		**4.567.403.036**
3	**Kecamatan Tukka**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Kecamatan Tukka	3.068.339.823,00	100	3.165.863.470	100	3.372.893.402	100	3.405.915.185	100	3.448.495.958	100	3.504.603.565	100	3.587.696.521
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif di Kecamatan Tukka	367.712.720,00	100	368.952.066	100	393.312.568	100	397.160.951	100	402.123.346	100	408.662.168	100	418.345.882
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun di Kecamatan Tukka	1.015.201.737,00	100	1.013.998.909	100	1.080.948.529	100	1.091.525.115	100	1.105.163.360	100	1.123.134.131	100	1.149.748.070

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun di Kecamatan Tukka	59.999.699,00	100	62.838.473	100	66.987.458	100	67.642.900	100	68.488.075	100	69.601.742	100	71.251.034
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terselenggaranya Pengawasan dan Koordinasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di kecamatan Tukka	N/A	0	-	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan di Kecamatan Tukka	N/A	0	-	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000
	Jumlah		**4.511.253.979**		**4.611.652.918**		**4.916.141.957**		**4.964.244.151**		**5.026.270.739**		**5.108.001.606**		**5.229.041.507**
4	**Kecamatan Badiri**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Kecamatan Badiri	1.700.613.800,00	100	1.656.757.850	100	1.765.147.273	100	1.782.428.214	100	1.804.711.560	100	1.834.073.760	100	1.877.557.918

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif di Kecamatan Badiri	249.726.092,00	100	228.900.000	100	244.013.396	100	246.400.956	100	249.479.654	100	253.536.377	100	259.544.210
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun di Kecamatan Badiri	408.854.400,00	100	409.942.500	100	437.009.445	100	441.285.382	100	446.799.096	100	454.064.379	100	464.823.950
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di kecamatan Badiri	109.895.400,00	100	70.875.000	100	75.554.606	100	76.293.874	100	77.247.140	100	78.503.236	100	80.363.459
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terselenggaranya Pengawasan dan Koordinasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di kecamatan Badiri	29.000.000,00	100	2.000.000	100	2.132.052	100	2.152.913	100	2.179.813	100	2.215.258	100	2.267.751
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan di Kecamatan Badiri	N/A	0	-	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Jumlah		**2.498.089.692**		**2.368.475.350**		**2.524.856.772**		**2.549.561.339**		**2.581.417.263**		**2.623.393.010**		**2.685.557.288**
5	**Kecamatan Pinangsori**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Kecamatan Pinangsori	2.326.469.651,00	100	2.548.750.783	100	2.715.035.109	100	2.741.620.051	100	2.775.900.676	100	2.821.071.389	100	2.887.967.273
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif di Kecamatan Pinangsori	388.119.600,00	100	352.470.000	100	375.744.386	100	379.420.872	100	384.161.611	100	390.408.362	100	399.659.531
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun di Kecamatan Pinangsori	1.029.556.200,00	100	1.034.965.000	100	1.103.299.805	100	1.114.095.087	100	1.128.015.337	100	1.146.357.697	100	1.173.521.945
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di kecamatan Pinangsori	81.167.100,00	100	23.984.330	100	25.567.924	100	25.818.094	100	26.140.683	100	26.565.749	100	27.195.255
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terselenggaranya Pengawasan dan Koordinasi Pemerintahan Desa	N/A	0	-	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		dan Kelurahan di kecamatan Pinangsori													
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan di Kecamatan Pinangsori	N/A	0	-	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00
	Jumlah		**3.825.312.551**		**3.960.170.113**		**4.221.647.224**		**4.262.954.104**		**4.316.218.307**		**4.386.403.197**		**4.490.344.004**
6	**Kecamatan Lumut**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Kecamatan Lumut	1.123.798.838,00	100	1.144.606.054	100	1.218.180.041	100	1.230.118.943	100	1.245.513.861	100	1.265.799.356	100	1.295.841.302
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif di Kecamatan Lumut	137.864.136,00	100	132.056.061	100	140.775.220	100	142.152.641	100	143.928.791	100	146.269.180	100	149.735.194

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun di Kecamatan Lumut	199.998.829,00	100	199.997.697	100	213.202.784	100	215.288.876	100	217.978.839	100	221.523.336	100	226.772.583
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di kecamatan Lumut	56.080.974,00	100	69.041.112	100	73.599.634	100	74.319.772	100	75.248.373	100	76.471.967	100	78.284.058
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terselenggaranya Pengawasan dan Koordinasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di kecamatan Lumut	N/A	0	-	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan di Kecamatan Sibabangun	N/A	0	-	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000
	Jumlah		**1.517.742.777**		**1.545.700.924**		**1.647.757.679**		**1.663.880.232**		**1.684.669.864**		**1.712.063.839**		**1.752.633.137**
7	**Kecamatan Sibabangun**														

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Kecamatan Sibabangun	1.672.663.549,00	100	1.749.139.739	100	1.862.628.787	100	1.880.873.324	100	1.904.399.204	100	1.935.398.660	100	1.981.307.522
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif di Kecamatan Sibabangun	128.888.535,00	100	117.997.026	100	125.787.921	100	127.018.698	100	128.605.754	100	130.696.979	100	133.793.992
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun di Kecamatan Sibabangun	219.494.781,00	100	217.494.148	100	231.854.459	100	234.123.049	100	237.048.339	100	240.902.920	100	246.611.388
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di kecamatan Sibabangun	46.988.853,00	100	66.195.630	100	70.566.275	100	71.256.734	100	72.147.063	100	73.320.228	100	75.057.634
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terselenggaranyaPengawasan dan KoordinasiPemerintahan Desa dan Kelurahan dikecamatan Sibabangun	N/A	0	-	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan di Kecamatan Sibabangun	N/A	0	-	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000
	Jumlah		**2.068.035.718**		**2.150.826.543**		**2.292.837.442**		**2.315.271.805**		**2.344.200.360**		**2.382.318.787**		**2.438.770.536**
8	**Kecamatan Sukabangun**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Kecamatan Sukabangun	578.237.299,00	100	440.651.432	100	465.745.971	100	470.342.219	100	476.268.969	100	484.078.496	100	495.644.071
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif di Kecamatan Sukabangun	9.796.000,00	0	-	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun di Kecamatan Sukabangun	7.907.880,00	0	-	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di kecamatan Sukabangun	N/A	0	-	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terselenggaranya Pengawasan dan Koordinasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di kecamatan Sukabangun	N/A	0	-	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Kecamatan Sukabangun	24.048.290,00	100	30.399.848	100	32.407.034	100	32.724.122		33.132.999		33.671.766	100	34.469.657
	Jumlah		**619.989.469**		**471.051.280**		**502.153.005**		**507.066.341**		**513.401.968**		**521.750.262**		**534.113.728**
9	**Kecamatan Tapian Nauli**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Kecamatan Tapian Nauli	1.957.338.982	100	1.966.809.000	100	2.095.669.922	100	2.116.184.875	100	2.142.638.400	100	2.177.495.540	100	2.229.117.467

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif di Kecamatan Tapian Nauli	76.662.532	100	61.954.800	100	66.045.439	100	66.691.664	100	67.524.954	100	68.622.960	100	70.249.059
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun di Kecamatan Tapian Nauli	209.854.793	100	206.123.800	100	219.733.371	100	221.883.361	100	224.655.720	100	228.308.788	100	233.718.824
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di kecamatan Tapian Nauli	77.863.245	100	56.999.300	100	60.762.747	100	61.357.282	100	62.123.921	100	63.134.102	100	64.630.136
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terselenggaranya Pengawasan dan Koordinasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di kecamatan Tapian Nauli	28.620.924	100	24.638.000	100	26.264.753	100	26.521.742	100	26.853.122	100	27.289.774	100	27.936.436
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan di	N/A	0	-	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Kecamatan Tapian Nauli													
	Jumlah		**2.350.340.476**		**2.316.524.900**		**2.469.476.232**		**2.493.638.924**		**2.524.796.117**		**2.565.851.164**		**2.626.651.922**
10	**Kecamatan Sitahuis**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Kecamatan Sitahuis	1.574.343.959	100	1.586.906.219	100	1.689.683.605	100	1.706.235.952	100	1.727.579.796	100	1.755.704.038	100	1.797.354.832
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Persentase LembagaKemasyarakatan yang aktif diKecamatan Sitahuis	62.466.642	100	3.897.488	100	4.154.824	100	4.195.477	100	4.247.898	100	4.316.972	100	4.419.268
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun di Kecamatan Sitahuis	201.445.251	100	200.750.000	100	214.004.759	100	216.098.697	100	218.798.779	100	222.356.609	100	227.625.601
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di kecamatan Sitahuis	59.993.250	100	55.918.264	100	59.610.334	100	60.193.594	100	60.945.693	100	61.936.715	100	63.404.375

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terselenggaranya Pengawasan dan Koordinasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di kecamatan Sitahuis	N/A	0	-	1000	1.000.000	1000	1.000.000	1000	1.000.000	1000	1.000.000	1000	1.000.000
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan di Kecamatan Sitahuis	N/A	0	-	1000	1.000.000	1000	1.000.000	1000	1.000.000	1000	1.000.000	1000	1.000.000
	Jumlah		**1.898.249.102**		**1.847.471.971**		**1.969.453.522**		**1.988.723.720**		**2.013.572.166**		**2.046.314.334**		**2.094.804.076**
11	**Kecamatan Sorkam**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Kecamatan Sorkam	1.658.804.950	100	1.725.851.000	100	1.837.802.381	100	1.855.804.003	100	1.879.016.650	100	1.909.603.367	100	1.954.900.981
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif di Kecamatan Sorkam	262.111.200	100	247.423.200	100	263.759.613	100	266.340.380	100	269.668.215	100	274.053.219	100	280.547.221

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun di Kecamatan Sorkam	803.515.700	100	800.000.000	100	852.820.959	100	861.165.421	100	871.925.398	100	886.103.547	100	907.100.778
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di kecamatan Sorkam	63.466.400	100	62.889.240	100	67.041.577	100	67.697.548	100	68.543.407	100	69.657.973	100	71.308.598
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terselenggaranya Pengawasan dan Koordinasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di kecamatan Sorkam	N/A	0	-	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan di Kecamatan Sorkam	N/A	0	-	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000
	Jumlah		**2.787.898.250**		**2.836.163.440**		**3.023.424.530**		**3.053.007.352**		**3.091.153.670**		**3.141.418.106**		**3.215.857.578**
12	**Kecamatan Sorkam Barat**														

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Kecamatan Sorkam Barat	1.130.373.437	100	1.303.454.540	100	1.387.516.689	100	1.401.112.472	100	1.418.643.898	100	1.441.744.615	100	1.475.955.784
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif di Kecamatan Sorkam Barat	170.997.144	100	25.005.636	100	26.656.663	100	26.917.486	100	27.253.811	100	27.696.978	100	28.353.289
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun di Kecamatan Sorkam Barat	404.994.679	100	410.433.784	100	437.533.166	100	441.814.228	100	447.334.550	100	454.608.540	100	465.381.006
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di kecamatan Sorkam Barat	66.040.896	100	65.145.426	100	69.446.731	100	70.126.235	100	71.002.439	100	72.156.991	100	73.866.833
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terselenggaranya Pengawasan dan Koordinasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di kecamatan Sorkam Barat	N/A	0	-	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	PersentasePenyelenggaraanKetenteramandanKetertiban Umum yangdapat diselesaikan di Kecamatan Sorkam Barat	N/A	0	-	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000
	Jumlah		**1.772.406.156**		**1.804.039.386**		**1.923.153.249**		**1.941.970.421**		**1.966.234.698**		**1.998.207.124**		**2.045.556.912**
13															**Kecamatan Kolang**
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Kecamatan Kolang	1.747.825.190	100	2.017.358.200	100	2.147.556.694	100	2.168.598.904	100	2.195.732.314	100	2.231.485.322	100	2.284.433.991
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif di Kecamatan Kolang	N/A	0	-	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun di Kecamatan Kolang	424.999.000	100	409.999.900	100	437.070.635	100	441.347.170	100	446.861.657	100	454.127.957	100	464.889.035
	Program Penyelenggaraan Urusan	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan	39.410.800	100	90.033.369	100	95.977.930	100	96.917.030	100	98.127.976	100	99.723.609	100	102.086.673

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Pemerintahan Umum	umum di kecamatan Kolang													
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terselenggaranya Pengawasan dan Koordinasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di kecamatan Kolang	N/A	0	-	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan di Kecamatan Kolang	N/A	0	-	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000
	Jumlah		**2.212.234.990**		**2.517.391.469**		**2.683.605.259**		**2.709.863.104**		**2.743.721.947**		**2.788.336.888**		**2.854.409.699**
14	**Kecamatan Pasaribu Tobing**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Kecamatan Pasaributobing	707.241.150	100	801.427.950	100	852.343.191	100	860.702.547	100	871.481.730	100	885.685.187	100	906.719.896
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang	3.000.000	100	2.857.500	100	3.046.169	100	3.075.975	100	3.114.408	100	3.165.051	100	3.240.050

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	dan pelayanan Publik	aktif di Kecamatan Pasaributobing													
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun di Kecamatan Pasaributobing	2.500.000	100	5.155.000	100	5.495.365	100	5.549.134	100	5.618.469	100	5.709.829	100	5.845.130
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di kecamatan Pasaributobing	34.161.900	100	20.492.500	100	21.845.541	100	22.059.290	100	22.334.914	100	22.698.096	100	23.235.953
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terselenggaranya Pengawasan dan Koordinasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di kecamatan Pasaributobing	1.560.000	0	-	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan di Kecamatan Pasaributobing	N/A	0	-	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Jumlah		**748.463.050**		**829.932.950**		**884.730.266**		**893.386.946**		**904.549.521**		**919.258.163**		**941.041.029**
15	**Kecamatan Barus**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Kecamatan Barus	1.655.602.319	100	1.660.232.540	100	1.768.851.384	100	1.786.168.568	100	1.808.498.648	100	1.837.922.429	100	1.881.497.786
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif di Kecamatan Barus	116.374.335	100	19.999.945	100	21.320.465	100	21.529.076	100	21.798.075	100	22.152.527	100	22.677.457
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan	Persentase sarana dan prasaranapublik yang terbangun di Kecamatan Barus	421.670.106	100	420.099.884	100	447.837.482	100	452.219.366	100	457.869.698	100	465.314.997	100	476.341.164
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di kecamatan Barus	139.497.578	100	36.999.895	100	39.442.857	100	39.828.787	100	40.326.435	100	40.982.172	100	41.953.291
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terselenggaranya Pengawasan dan Koordinasi Pemerintahan Desa	2.999.943,00	100	1.212.786	100	1.292.861	100	1.305.511	100	1.321.823	100	1.343.317	100	1.375.148

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		dan Kelurahan di kecamatan Barus													
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan di Kecamatan Barus	N/A	0	-	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000
	Jumlah		**2.333.144.338**		**2.138.545.050**		**2.279.745.049**		**2.302.051.308**		**2.330.814.679**		**2.368.715.442**		**2.424.844.846**
16	**Kecamatan Sosorgadong**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Kecamatan Sosorgadong	1.079.561.548	100	1.212.595.785	100	1.290.658.875	100	1.303.306.949	100	1.319.616.328	100	1.341.106.783	100	1.372.933.225
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif di Kecamatan Sosorgadong	121.673.900	100	116.533.200	100	124.227.444	100	125.442.952	100	127.010.321	100	129.075.602	100	132.134.195
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun di Kecamatan Sosorgadong	200.000.270	100	200.000.000	100	213.205.239	100	215.291.355	100	217.981.349	100	221.525.886	100	226.775.194

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di kecamatan Sosorgadong	82.236.000	100	57.994.419	100	61.828.900	100	62.433.867	100	63.213.958	100	64.241.863	100	65.764.147
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terselenggaranya Pengawasan dan Koordinasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di kecamatan Sosorgadong	N/A	0	-	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan di Kecamatan Sosorgadong	N/A	0	-	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000
	Jumlah		**1.483.471.718**		**1.587.123.404**		**1.691.920.458**		**1.708.475.123**		**1.729.821.956**		**1.757.950.134**		**1.799.606.761**
17	**Kecamatan Barus Utara**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Kecamatan Barus Utara	726.976.569	100	672.197.855	100	713.580.524	100	720.591.936	100	729.632.978	100	741.546.130	100	759.188.996

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif di Kecamatan Barus Utara	N/A	0	-	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun di Kecamatan Barus Utara	5.043.700	100	5.088.072	100	5.424.018	100	5.477.089	100	5.545.524	100	5.635.698	100	5.769.242
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di kecamatan Barus Utara	95.963.195	100	68.160.122	100	72.660.475	100	73.371.425	100	74.288.176	100	75.496.157	100	77.285.124
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terselenggaranya Pengawasan dan Koordinasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di kecamatan Barus Utara	N/A	0	-	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	PersentasePenyelenggaraanKetenteramandanKetertiban Umum yangdapat diselesaikan di Kecamatan Barus Utara	N/A	0	-	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Jumlah		**827.983.464**		**745.446.049**		**794.665.017**		**802.440.450**		**812.466.678**		**825.677.985**		**845.243.362**
18	**Kecamatan Andam Dewi**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Kecamatan Andam Dewi	994.945.098	100	942.047.200	100	1.002.246.996	100	1.012.073.092	100	1.024.743.600	100	1.041.439.207	100	1.066.164.685
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif di Kecamatan Andam Dewi	63.834.063	100	49.000.000	100	52.235.283	100	52.746.382	100	53.405.430	100	54.273.842	100	55.559.922
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun di Kecamatan Andam Dewi	199.999.776	100	199.999.800	100	213.205.026	100	215.291.139	100	217.981.131	100	221.525.665	100	226.774.967
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di kecamatan Andam Dewi	81.600.310	100	60.690.500	100	64.697.663	100	65.330.699	100	66.146.985	100	67.222.584	100	68.815.499

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase tePersentase terselenggaranya Pengawasan dan Koordinasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di kecamatan Andam Dewirselenggaranya	N/A	0	-	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan di Kecamatan Andam Dewi	N/A	0	-	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000
	Jumlah		**1.340.379.247**		**1.251.737.500**		**1.334.384.968**		**1.347.441.312**		**1.364.277.146**		**1.386.461.298**		**1.419.315.073**
19	**Kecamatan Sirandorung**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Kecamatan Sirandorung	1.451.344.273	100	1.472.200.560	100	1.568.404.367	100	1.583.760.268	100	1.603.561.324	100	1.629.652.674	100	1.668.292.841
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif di	132.000.000	100	161.999.970	100	172.696.212	100	174.385.965	100	176.564.860	100	179.435.935	100	183.687.873

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	dan pelayanan Publik	Kecamatan Sirandorung													
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun di Kecamatan Sirandorung	199.999.845	100	199.999.754	100	213.204.977	100	215.291.090	100	217.981.081	100	221.525.614	100	226.774.915
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di kecamatan Sirandorung	103.870.207	100	22.266.146	100	23.736.294	100	23.968.543	100	24.268.022	100	24.662.638	100	25.247.047
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terselenggaranya Pengawasan dan Koordinasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di kecamatan Sirandorung	N/A	100	3.499.857	100	3.730.939	100	3.767.444	100	3.814.517	100	3.876.544	100	3.968.403
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan di Kecamatan Sirandorung	N/A	0	-	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Jumlah		**1.887.214.325**		**1.859.966.287**		**1.982.772.789**		**2.002.173.310**		**2.027.189.804**		**2.060.153.405**		**2.108.971.079**
20	**Kecamatan Manduamas**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Kecamatan Manduamas	1.718.293.257	100	1.559.804.111	100	1.660.792.047	100	1.677.061.705	100	1.698.041.025	100	1.725.684.945	100	1.766.624.403
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif di Kecamatan Manduamas	255.807.156	100	227.745.687	100	242.782.869	100	245.158.388	100	248.221.561	100	252.257.826	100	258.235.362
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun di Kecamatan Manduamas	605.950.401	100	602.999.873	100	642.813.662	100	649.103.299	100	657.213.630	100	667.900.408	100	683.727.067
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di kecamatan Manduamas	75.689.834	100	44.999.822	100	47.970.989	100	48.440.363	100	49.045.609	100	49.843.127	100	51.024.216
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terselenggaranya Pengawasan dan Koordinasi Pemerintahan Desa	N/A	0	-	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		dan Kelurahan di kecamatan Manduamas													
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan di Kecamatan Manduamas	N/A	0	-	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000
	Jumlah		**2.655.740.648**		**2.435.549.493**		**2.596.359.567**		**2.621.763.755**		**2.654.521.825**		**2.697.686.306**		**2.761.611.048**
VIII	**Unsur Pemerintahan Umum**														
1	**Kesatuan Bangsa dan Politik**														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daaerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Keteresediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Administrasi Kantor	N/A	100	2.218.006.850	100	2.364.453.412	100	2.387.588.504	100	2.417.420.632	100	2.456.729.674	100	2.514.944.674
	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	N/A	75,00	418.686.100	80,00	446.330.352	85,00	450.697.490	90,00	456.328.806	95,00	463.749.048	100,00	474.738.109

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	N/A	60,00	909.842.250	65,00	969.915.676	74,00	979.405.855	83,00	991.643.208	91,00	1.007.768.057	100,00	1.031.648.266
	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	N/A	85,00	70.000.000	90,00	74.621.834	93,00	75.351.974	95,00	76.293.472	98,00	77.534.060	100,00	79.371.318
	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persentase Kebijakan di Bidang ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalaggunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penggayat Kepercayaan di	N/A	75,00	-		193.833.313	85,00	195.729.883	90,00	198.175.463	95,00	201.397.942	100,00	206.170.295

No.	Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Daerah yang Dilaksanakan													
	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	N/A	75,00	899.999.800		765.590.053	85,00	773.081.000	90,00	782.740.392	95,00	795.468.327	100,00	814.317.853
	Jumlah				**4.516.535.000**		**4.814.744.639**		**4.861.854.706**		**4.922.601.973**		**5.002.647.109**		**5.121.190.516**
	TOTAL				**1.222.742.535.503**		**1.307.169.513.560**		**1.319.959.567.426**		**1.336.452.025.684**		**1.358.183.720.560**		**1.390.367.426.895**

Tabel 4.2 Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah Terhadap PHTC Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH
			UTAMA	PENDUKUNG	
1. Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) Kepulauan Nias (2026), Kepulauan Nias dan Pantai Barat (2027), Kepulauan Nias, Pantai Barat dan Dataran Tinggi (2028), Kepulauan Nias, Pantai Barat, Dataran Tinggi dan Pantai Timur (2029) 33 Kabupaten/Kota	2025	Penyusunan kajian akademik tentang bersekolah gratis, Pembentukan Tim Pokja, Validasi data siswa SMA/SMK/SLB Negeri di zona kepulauan Nias, zona Pantai Barat, zona Dataran Tinggi, zona Pantai Timur 33 Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan	Diskominfo (Publikasi Kegiatan)	Menyediakan basis data siswa SMP/SLTP kelas IX yang akan melanjut SLTA Melakukan edukasi kepada siswa SLTP agar seluruhnya melanjut kepada jenjang SLTA
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	Implementasi Program Bersekolah Gratis Kepulauan Nias, Pantai Barat, dan Dataran Tinggi			
	2029	Implementasi Program Bersekolah Gratis Kepulauan Nias, Pantai Barat, Dataran Tinggi, dan Pantai Timur			
	2030	Implementasi Program Bersekolah Gratis Kepulauan Nias, Pantai Barat, Dataran Tinggi, dan Pantai Timur			
2. Program Berobat Gratis (Probis) melalui Program *Universal Health Coverage* (UHC) (mulai Oktober tahun 2025, UHC+ tahun 2026 - 200	2025	Melakukan *Launching* UHC Penyusunan regulasi (Pergub/SK Gub UHC) MoU 33 Kabupaten/Kota Pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara Triwulan IV dimulai Oktober 2025 33 Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Sosial (Pembinaan kepada Dinsos kab/kota untuk melakukan penginputan, pemutakhiran dan verifikasi data DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) pada Pusdatin	- Dukungan penganggaran APBD Kabupaten/Kota untuk UHC/PBPU yaitu pada Tahun 2025 sebesar 80%, tahun 2026 sebesar 77,5%, tahun 2027 sebesar 75%, tahun 2028 sebesar 72,5%, tahun 2029 dan 2030 sebesar 70%. Melakukan penginputan, pemutakhiran dan verifikasi
	2026	- Pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara			

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH
			UTAMA	PENDUKUNG	
		33 Kabupaten/Kota		Kemensos setiap bulannya), Dinas PMD Dukcapil (Penyediaan data kependudukan Provsu) 3. Diskominfo (Publikasi Kegiatan),	data DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) pada Pusdatin Kemensos setiap bulannya Dinas Dukcapil (Penyediaan data Kependudukan Kabupaten/Kota)
	2027	- Pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara 33 Kabupaten/Kota			
	2028	- Pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara 33 Kabupaten/Kota			
	2029	Pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara Peningkatan Pelayanan Kesehatan menjadi UHC Plus 33 Kabupaten/Kota			
	2030	Pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara Peningkatan Pelayanan Kesehatan menjadi UHC Plus 33 Kabupaten/Kota			
3. Program Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pangan (JASKOP)	2025	Tidak ada	Dinas TPH	Disperindag ESDM (Memfasilitasi kemitraan antara petani dan pelaku usaha) Diskop UMKM (Mendorong koperasi tani dan mengkoordinasikan ke koperasi merah putih)	Disperindag Kabupaten/Kota: Melakukan fasilitasi dan pameran produk cabai kering di tingkat lokal Dinas Pertanian Kabupaten/Kota: Menyiapkan lahan dan kelompok tani (CPCL) serta pendampingan kelompok tani
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH
			UTAMA	PENDUKUNG	
				PUPR (Perbaikan akses jalan ke sentra produksi dan koordinasi dengan PUPR kab/kota terkait akses jalan) BUMD Dirga Surya (Skema pembelian hasil pertanian cabai merah ketika harga turun) Biro Pemotda (fasilitasi kerja sama antar pemerintah daerah) Diskominfo (Publikasi Kegiatan)	Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota: Mendorong pembentukan koperasi atau kelompok usaha bersama yang mengelola SDD Total *Solar Dry Dome*: 70
4. Digitalisasi Pelayanan Publik "Cepat, Responsif, Handal, dan Solutif" (CERDAS)	2025	Identifikasi dan pemetaan pelayanan publik yang akan di digitalisasi Pemetaan layanan publik yang akan didigitalisasi, Audit kesiapan infrastruktur dan SDM dan kebijakan pendukung. Penyusunan *roadmap* dan desain awal sistem Layanan digital. Lokasi: Pemerintah Prov. Sumatera Utara. Identifikasi Penetapan Lokasi Pelaksanaan Survei lapangan untuk identifikasi kebutuhan dan potensi gangguan jaringan. Integrasi Sistem (Layanan).	Dinas Kominfo	DPMPTSP Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Bapenda Disperindag ESDM BPSDM Biro Adpem BUMD: PDAM, Bank Sumut	Penyiapan kebijakan/regulasi di tingkat Provinsi/Pemda Kabupaten/Kota. Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di kabupaten/kota. Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan kab/kota. Penentuan lokasi Kesiapan Infrastruktur Internet, dan Kesiapan SDM di Kabupaten/Kota.

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH
			UTAMA	PENDUKUNG	
		Pemetaan Lokasi Strategis. Koordinasi kepada *Stakeholder* dan Penyusunan dokumen perencanaan Teknis dan Administratif. Lokasi Kegiatan: - 33 Kabupaten/Kota			Melakukan Pemeliharaan dan Pengawasan
	2026	Pembangunan integrasi portal aplikasi Pengembangan dan Implementasi Aplikasi. Integrasi Sistem (Layanan). Pelatihan penggunaan Aplikasi. Sosialisasi peggunaan aplikasi kepada masyarakat. Lokasi Kegiatan: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.			Penyiapan dan penguatan infastruktur digital. Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di Kabupaten/Kota. Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan Kabupaten/Kota Penentuan lokasi
		Tidak ada			Kesiapan Infrastruktur Internet, dan Kesiapan SDM di Kabupaten/Kota. Melakukan Pemeliharaan dan Pengawasan
	2027	Pengembangan dan penambahan Pengembangan dan Implementasi Aplikasi. Integrasi Sistem (Layanan). Pelatihan penggunaan Aplikasi. Sosialisasi peggunaan aplikasi kepada masyarakat. Peningkatan kapasitas jaringan dan infrastruktur Lokasi: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.			Penyiapan dan penguatan infastruktur digital. Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di kabupaten/kota. Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan Kabupaten/Kota Penentuan lokasi

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH
			UTAMA	PENDUKUNG	
		Pembangunan dan implementasi serta titik pemasangan jaringan internet 1. Pengadaan Perangkat Jaringan dan akses internet. Pemasangan Titik akses Wifi. Sosialisasi Penggunaan. Evaluasi dan Pengembangan Sistem Monitoring. Lokasi Penggunaan: - 25 Kabupaten			1. Kesiapan Infrastruktur Internet, dan Kesiapan SDM di Kabupaten/Kota. 2. Melakukan Pemeliharaan dan Pengawasan
	2028	Perluasan area layanan dan akses jaringan internet Pengembangan dan Implementasi Aplikasi. Pelatihan penggunaan Aplikasi. Sosialisasi peggunaan aplikasi kepada masyarakat. Peningkatan kapasitas jaringan dan infrastruktur Lokasi Kegiatan: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Tidak ada			Penyiapan dan penguatan infastruktur digital. Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di Kabupaten/Kota. Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan Kabupaten/Kota Penentuan lokasi Kesiapan Infrastruktur Internet, dan Kesiapan SDM di Kabupaten/Kota. Melakukan Pemeliharaan dan Pengawasan
	2029	Perluasan area layanan dan akses jaringan internet Pengembangan dan Implementasi Aplikasi. Pelatihan penggunaan Aplikasi. Sosialisasi peggunaan aplikasi kepada masyarakat.			Penyiapan dan penguatan infastruktur digital. Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di kabupaten/kota.

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH
			UTAMA	PENDUKUNG	
		Peningkatan kapasitas jaringan dan infrastruktur Lokasi Kegiatan: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.			Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan Kabupaten/Kota Penentuan lokasi
		Pengadaan Perangkat Jaringan dan akses internet. Pemasangan Titik akses Wifi. Sosialisasi Penggunaan. Evaluasi dan Pengembangan Sistem Monitoring. Lokasi Perluasan Area Layanan: 25 Kabupaten			Kesiapan Infrastruktur Internet, dan Kesiapan SDM di Kabupaten/Kota. Melakukan Pemeliharaan dan Pengawasan
	2030	Evaluasi dan Monitoring Pengembangan dan Implementasi Aplikasi. Pelatihan penggunaan Aplikasi. Sosialisasi pggunaan aplikasi kepada masyarakat. 4. Peningkatan kapasitas jaringan dan infrastruktur Lokasi kegiatan: 33 Kabupaten/Kota			Penyiapan dan penguatan infastruktur digital. Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di kabupaten/kota. Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan kab/kota. Penentuan lokasi
		Pengadaan Perangkat Jaringan dan akses internet. Pemasangan Titik akses Wifi. Sosialisasi Penggunaan. Evaluasi dan Pengembangan Sistem Monitoring. Lokasi Perluasan Area Layanan: - 33 Kabupaten/Kota			Kesiapan Infrastruktur Internet, dan Kesiapan SDM di Kabupaten/Kota. Melakukan Pemeliharaan dan Pengawasan.
	2025	Tidak ada	Dinas PUPR		

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH
			UTAMA	PENDUKUNG	
5 a. Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi (INSTANSI)	2026	Penyediaan penyusunan desain Perencanaan (DED) Penyusunan Leger jalan 3.Pelaksanaan penanganan Jalan Kawasan Pertumbuhan: Kab. Karo, Kab. Simalungun, Kab. Batu Bara, Kab. Deli Serdang, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kab. Pakpak Bharat, Kota Binjai, Kota Padangsidimpuan Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Karo, Kab. Labuhanbatu, Kab. Asahan, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Tapanuli Selatan Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi: Kab. Mandailing Natal, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Simalungun, Kab. Labuhanbatu, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Dairi, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Toba, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Tapanuli Selatan Kawasan Afirmasi: Kab. Nias Selatan, Kab. Nias Barat 4.Pelaksanaan penanganan Jembatan Kawasan Pertumbuhan: Kab. Simalungun, Kab. Samosir Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Asahan Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi: Kab. Mandailing Natal Kawasan Konservasi/ Rawan Bencana: Kab. Langkat target: jalan 202,84 km jembatan 202,90 m.		OPD Dinas LHK terkait penyiapan dokumen lingkungan/ AMDAL, Dinas Kominfo untuk publikasi Media, Dinas Perhubungan terkait Fasilitas Keselamatan Jalan, Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi	Dukungan penanganan akses jalan dalam koridor pembangunan jalan provinsi yang mendukung kawasan prioritas. Dukungan penyediaan lahan pada rencana pelebaran yang tidak sesuai dengan Ruang Milik Jalan (RUMIJA).

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH
			UTAMA	PENDUKUNG	
	2027	1.Penyediaan penyusunan desain Perencanaan (DED) 2.Penyusunan Leger jalan Pelaksanaan penanganan Jalan Kawasan Pertumbuhan: Kab. Karo, Kab. Simalungun, Kota Pematangsiantar, Kota Medan, Kab. Deli Serdang, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Dairi, Kota Binjai, Kota Padangsidimpuan Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Labuhanbatu, Kab. Asahan, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Tapanuli Selatan Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi: Kab. Serdang Bedagai, Kab. Simalungun, Kab. Labuhanbatu, Kab. Dairi, Kab. Toba, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Tapanuli Selatan Kawasan Afirmasi: Kab. Nias, Kab. Nias Utara, Kab. Nias Barat, Kab. Nias Selatan Kawasan Konservasi/ Rawan Bencana: Kab. Langkat Pelaksanaan penanganan Jembatan Kawasan Pertumbuhan: Kab. Batu Bara, Kab. Deli Serdang Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Serdang Bedagai, Kab. Asahan, Kota Tanjungbalai Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi: Kab. Serdang Bedagai, Kab. Pakpak Barat serta target: jalan 130,99 km & jembatan 708,45 m			

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH
			UTAMA	PENDUKUNG	
	2028	Penyediaan penyusunan desain Perencanaan (DED) Penyusunan Leger jalan 3.Pelaksanaan penanganan Jalan Kawasan Pertumbuhan: Kab. Karo, Kab. Batu Bara, Kota Medan, Kab. Deli Serdang, Kab. Humbang Hasundutan,Kab. Tapanuli Tengah, Kab Toba,Kota Gunungsitoli, Kota Padangsidimpuan Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Karo, Kab. Labuhanbatu, Kab. Asahan, Kota Tanjungbalai, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Tapanuli Tengah Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi: Kab. Mandailing Natal, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Simalungun, Kab. Labuhanbatu, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Toba, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Langkat Kawasan Afirmasi: Kab. Nias Utara, Kab. Nias Barat Kawasan Konservasi/ Rawan Bencana: Kab. Langkat 4. Pelaksanaan penanganan Jembatan Kawasan Pertumbuhan: Kab. Samosir, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Dairi Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Labuhanbatu, Kab. Asahan, Kab. Tapanuli Selatan Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi: Kab.Pakpak Bharat			

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH
			UTAMA	PENDUKUNG	
		serta target: jalan 135,10 km & jembatan 438,90 m			
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			
b. Penguatan Infrastruktur Irigasi dan Sumber Air Pertanian untuk Mendukung Swasembada Pangan Berkelanjutan	2025	tidak ada	Dinas PUPR	OPD Dinas LHK terkait penyiapan dokumen lingkungan/AMDAL, Dinas TPH melakukan pemataan terhadap kawasan swasembada dan dukungan terhadap irigasi tersier dan kuarter, benih, pupuk, alsintan, penyuluh pertanian. Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Dinas Kominfo untuk publikasi Media	Dukungan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan jaringan irigasi tersier Sinergi antara pemerintah daerah, kelompok tani, dan BUMDes untuk pemeliharaan jaringan irigasi Pembangunan embung, sumur bor, dan pompanisasi untuk sumber air cadangan. Digitalisasi sistem irigasi (*smart irrigation*) berbasis sensor dan aplikasi. Pemberdayaan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) untuk pengelolaan irigasi. Integrasi dengan program ketahanan pangan daerah.
	2026	Tidak ada			
	2027	Akselerasi cakupan layanan target 3.175 Ha. Kabupaten Langkat (DI. Secanggang), Kabupaten Mandailing Natal (DI. Terusan), Kabupaten Tapanuli Tengah (DI. Balakka Sitongkon), Kabupaten Tapanuli Tengah (DI.Sigorbus), Kabupaten Mandailing Natal (DI. Roburan Maga), Kabupaten Simalungun (DI. Raja Maligas), Kabupaten Simalungun (DI. Javaconisasi), Kabupaten Dairi (DI. Buluh Duri), Kabupaten Toba (DI. Hinalang), Kabupaten Tapanuli Tengah (DI. Aek Sigeaon), Kabupaten Tapanuli Tengah (DI. Hasak I dan II), Kabupaten Tapanuli Tengah (DI. Mombangboru), Kabupaten Samosir (DI. Tele Harian Boho), Kabupaten Humbang Hasundutan (DI. Parmiahan/Hutapaung), Kabupaten Nias (DI. Gido Zebua), Kabupaten Simalungun (DI. Bah Tongguran I), Kabupaten Simalungun (DI. Raja Hombang/Tongah Mangaraja), Kabupaten Tapanuli Tengah Utara (DI. Padang Garugur), Tapanuli Tengah Utara (DI. Napa Tanjung Beringin), Kabupaten Labuhanbatu (DIR. Cinta Makmur), Kabupaten Asahan (DI. Serbangan), Kabupaten Batubara			

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH
			UTAMA	PENDUKUNG	
		(DI.Simodong), Kabupaten Tapanuli Tengah Utara (DI.Padang Garugur), Kabupaten Labuhanbatu (DIR. Sei Serdang/Sei Rakyat), Kabupaten Mandailing Natal (DI. Terusan), Kabupaten Deli Serdang (DI. Namorambe), Kabupaten Mandailing Natal (DI. Tapus).			
	2028	Penguatan jaringan teknis Kabupaten Batubara (DI. Simodong, DI. Purwodadi, DI. Sei Balai, DI. Suka Makmur, DI. Sijambi), Kabupaten Simalungun (DI. Bah Horas Hulu/Tongah), Kabupaten Tapanuli Tengah Utara (DI. Padang Garugur), Kabupaten Tapanuli Tengah (DI. Sigorbus), Kabupaten Labuhanbatu (DI. Cinta Makmur, DIR. Sei Serdang/Sei Rakyat), Kabupaten Tapanuli Tengah (DI. Mombangboru), Kabupaten Mandailing Natal (DI. Roburan Maga), Kabupaten Langkat (DI. Gebang), Kabupaten Tapanuli Tengah (DI. Pandurungan/Sitandiang), Kabupaten Karo (DI. Parit Lompaten), Kabupaten Toba (DI. Hinalang), Kabupaten Tapanuli Tengah (DI. Sigeaon), Kabupaten Tapanuli Tengah (DI. Simok Mok ,DI. Aek Sarulla), Kabupaten Deli Serdang (DI. Medan Krio), Kabupaten Mandailing Natal (DI. Tapus), Kabupaten Dairi (DI. Buluh Duri, Kabupaten Mandaling Natal (DI. Siulang Aling), Kabupaten Tapanuli Tengah (DI. Badiri Lopian)			
	2029	Penyempurnaan konektivitas saluran Kabupaten Batu Bara (DI.Simodong), Kabupaten Tapanuli Selatan (DI.Sipirok			

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH
			UTAMA	PENDUKUNG	
		Komplek), Kabupaten Labuhanbatu (DI. Cinta Makmur, D.I.R. Sei Serdang/sei Rakyat), Kabupaten Tapanuli Utara - DI.Simok Mok, Kabupaten Mandailing Natal - DI.Tapus, Kabupaten Dairi - DI. Buluh Duri, Kabupaten Mandailing Natal - DI. Siulang-Aling, Kabupaten Tapanuli Tengah - DI Mombangboru, Kabupaten Tapanuli Tengah – DI. Pandurungan/Sitandiang, Kabupaten Tapanuli Tengah - D.I Badiri Lopian, Kabupaten Toba - D.I Sijambur, Kabupaten Simalungun - D.I. Naga Sompah, Kabupaten Karo - DI.Parit Lompaten			
	2030	Kabupaten Dairi - D.I. Siulang-Aling, Kabupaten Tapanuli Selatan - D.I.Sipirok Komplek, Kabupaten Toba - D.I.Simangatasi II, Kabupaten Labuhanbatu - D.I.R Cinta Makmur, Kabupaten Tapanuli Tengah - D.I Badiri Lopian,Kota Pematangsiantar/Simalungun - DI. Rambung Merah, Kota Pematangsiantar - DI. Sibatu-Batu, Kabupaten Simalungun - (DI. Panombean Pane,D.I. Naga Sompah), Kabupaten Deli Serdang - (D.I.R Sisir Gunting,D.I.R Percut, D.I Namorambe)			
c. Peningkatan Kualitas Permukiman Layak, Terjangkau, dan Inklusif melalui Penyediaan Hunian Murah serta	2025	Membentuk Tim Pelaksana, Anggaran Biaya Survei Lokasi di setiap kabupaten/kota Membuat Nota Kesepahaman/Nota kerja sama dengan mitra terkait (REI, Bank Sumut dan lain lain)	Dinas PKP	Dinas PUPR terkait dukungan terkait Tata Ruang, Jalan, dan Keciptakaryaan	Bupati/Wali Kota: Pendataan dan Validasi Calon Penerima (BNBA = *by name by address*)

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH
			UTAMA	PENDUKUNG	
dukungan terhadap pelaksanaan program 3 juta rumah		Penyediaan data dan/atau informasi statistika MBR dan ASN Pemerintah Daerah Launching Pembangunan 15.000 unit rumah bagi MBR dan ASN Pembangunan Fisik setiap Tahun Mengevaluasi dampak program dan penataan lingkungan Kabupaten Simalungun, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Pematangsiantar dan Kota Padangsidimpuan		(sanitasi dan air minum), BPBD koordinasi terhadap Rehab rumah akibat bencana Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi Biro Pemotda (memfasilitasi kerja sama antar Pemerintah Daerah) Badan Kepegawaian dan BP Tapera untuk penyediaan data ASN yang belum memilik rumah Dinas Kominfo untuk publikasi Media	SK Kumuh yang dikeluarkan Bupati atau Wali Kota terkait wewenang Provinsi untuk luasan 10 – 15 Ha SK Pokja Penanganan Kawasan Kumuh pada kabupaten/Kota Melakukan sosialisasi kepada MBR dan ASN Dinas yang Membidangi Perumahan Rakyat (di kab/kota): Pelaksana teknis utama di lapangan. Bertanggung jawab atas pendataan, verifikasi, penyaluran bantuan, pendampingan, monitoring, dan pelaporan langsung dari lokasi perbaikan. Dinas PUPR Kabupaten/Kota: Memberikan bantuan teknis konstruksi, menyusun RAB, dan memberikan supervisi teknis kepada pelaksana di lapangan. Dinas Sosial Kabupaten/Kota: Membantu dalam pembaruan dan verifikasi data kemiskinan di tingkat lokal.
	2026	Tidak ada			
	2027	Membentuk Tim Pelaksana, Anggaran Biaya Survei Lokasi di setiap kabupaten/kota Membuat Nota Kesepahaman/Nota kerja sama dengan mitra terkait (REI, Bank Sumut dan lain lain) Penyediaan data dan/atau informasi statistika MBR dan ASN Pemerintah Daerah Pembangunan Fisik setiap Tahun Perluasan pemasaran dan kepemilikan rumah bagi MBR dan ASN Mengevaluasi dampak program dan penataan lingkungan Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli			

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH
			UTAMA	PENDUKUNG	
		Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kabupaten Samosir, Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan			Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan: Ujung tombak identifikasi awal calon penerima, sosialisasi langsung kepada masyarakat, memfasilitasi gotong royong, dan membantu monitoring di lapangan. Badan Kepegawaian dan BP Tapera: Penyediaan data ASN yang belum memilik rumah
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			
6. Bantuan Hukum dan perlindungan rakyat melalui *Restorative Justice* (PRESTICE).	2025	Tidak ada	Biro Hukum	Dinas PMD Capil (memberikan data/pemetaan desa prioritas kegiatan PRESTICE yaitu desa dengan karakteristik konflik yang tinggi) Diskominfo (Publikasi),	Replikasi Kegiatan Prestice pada tingkat Kabupaten/Kota Edukasi dan sosialisasi Prestice di tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan ke level Kecamatan dan Desa. Pendampingan dari bagian hukum kabupaten/kota dari kasus tidak pidana ringan yang ditangani oleh PRESTICE
	2026	Pembentukan kelembagaan Prestice, Bimbingan Teknis Paralegal Desa dan Edukasi dan Sosialisasi Prestice di 25 kabupaten (Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Tapanuli Tengah, Tapanuli Tengah Utara, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Tengah, Toba) Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum selain kasus KDRT dan Narkoba Pendampingan bagi masyarakat yang berhadapan dengan kasus tindak pidana ringan			

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH
			UTAMA	PENDUKUNG	
		Pelatihan mediator tingkat Kabupaten/Kota (2 orang per Kabupaten/Kota, dilaksanakan di Kota Medan)			
	2027	Pendampingan bagi masyarakat yang berhadapan dengan kasus tindak pidana ringan Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum selain kasus KDRT dan Narkoba Pelatihan mediator tingkat Kabupaten/Kota (2 orang per Kabupaten/Kota, dilaksanakan di Kota Medan)			
	2028	Pendampingan bagi masyarakat yang berhadapan dengan kasus tindak pidana ringan Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum selain kasus KDRT dan Narkoba Pelatihan mediator tingkat Kabupaten/Kota (2 orang per Kabupaten/Kota, dilaksanakan di Kota Medan)			
	2029	Pendampingan bagi masyarakat yang berhadapan dengan kasus tindak pidana ringan Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum selain kasus KDRT dan Narkoba			

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH
			UTAMA	PENDUKUNG	
		Pelatihan mediator tingkat Kabupaten/Kota (2 orang per Kabupaten/Kota, dilaksanakan di Kota Medan)			
	2030	Pendampingan bagi masyarakat yang berhadapan dengan kasus tindak pidana ringan. Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum selain kasus KDRT dan Narkoba Pelatihan mediator tingkat Kabupaten/Kota (2 orang per Kabupaten/Kota, dilaksanakan di Kota Medan)			

Tabel 4.3 Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah erhadap Program Prioritas dan proyek strategis daerah Provinsi Sumatera Utara ke dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
PP1. PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM SEKOLAH UNGGULAN BERBASIS PENINGKATAN SKILL YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEBUTUHAN INDUSTRI DAN POTENSI WILAYAH DI TINGKAT LOKAL					
1. Pemenuhan 100% Fasilitasi Listrik dan Layanan Internet pada Seluruh SMA/SMK/SLB di Sumatera Utara	2025	Tidak ada	Dinas Pendidikan	Disperindag ESDM (pendampingan terhadap akses listrik), Dinas Kominfo (pendampingan terhadap akses internet dan publikasi kegiatan).	Pembangunan akses jalan yang baik ke sekolah yang akan dibangun akses listrik dan layanan internet.
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			
2. Pembangunan 4 SMA/SMK/SLB Unggulan (Nias/SMA - 2026, Asahan/SMK - 2027, Samosir/SMK – 2028, Karo/SLB - 2029)	2025	tidak ada	Dinas Pendidikan	PUPR (Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi) Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan)	- Penyediaan lahan/hibah lahan yang diperlukan - Pembangunan akses jalan yang baik dari dan ke sekolah - Penyediaan lahan/hibah lahanyang diperlukan - Pembangunan akses jalan yang baik dari dan ke sekolah
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			
3. Rehabilitasi Ruang Kelas SMA/SMK/SLB sebanyak 490 Sekolah	2025	Pendataan valid rehab ruang kelas tahun 2026- 2029	Dinas Pendidikan	PUPR (Apraisal/Penilaian Kerusakan, Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi) Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan)	- Penyediaan lahan/hibah lahan yang diperlukan
		Provinsi Sumatera Utara (Dokumen Aprasial)			
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
	2028	Pelaksanaan Fisik Tahap III – 190 Ruang Kelas (2028) di 28 Kabupaten/Kota			
		Medan, Binjai, Langkat, Karo, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Dairi, Tebing Tinggi, Batu Bara, Asahan, Tanjungbalai, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Simalungun, Pematangsiantar, Samosir, Toba, Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Sibolga, Padangsidimpuan, Mandailing Natal, Tapanuli Tengah			
	2029	Monitoring, Evaluasi & Pemutakhiran Data (2029)			
	2030	Tidak ada			
4. Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Unit Sekolah Baru	2025	Tidak ada	Dinas Pendidikan	PUPR (Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi) Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan)	1.Penyediaan atau hibah Lahan dari kabupaten/kota untuk lokasi Pembangunan RKB sesuai kebutuhan. 2.Pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan akses jalan yang baik dari dan menuju sekolah.
	2026	Pembangunan Ruang Kelas Baru (mendesak) Tahap II (2026) sebanyak 80 Ruang Kelas Baru di 19 Kabupaten/Kota Langkat, Binjai, Medan, Dairi, Serdang Bedagai, Batu Bara, Asahan, Simalungun, Labuhanbatu Selatan,			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
		Labuhanbatu Utara, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Padangsidimpuan, Nias, Nias Selatan, Nias Barat, Nias Utara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 4 Unit Sekolah Baru			
	2027	Pembangunan Ruang Kelas Baru sebanyak 30 Ruang Kelas Baru di 14 Kabupaten/Kota Medan, Langkat, Deli Serdang, Simalungun, Asahan, Tapanuli Utara, Padangsidimpuan, Tapanuli Tengah, Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Nias, Nias Selatan, Gunungsitoli			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
5. Optimalisasi Sarana dan Prasarana BLK Provsu menuju BLK Tematik Bioindustri dan Pariwisata	2025	tidak ada	DISNAKER	Dinas Perindustrian Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral: Disperindag ESDM bersifat mendukung dan lintas sektor, bukan pelaksana utama pelatihan. Maka Disperindag ESDM	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Ketenagakerjaan, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan:
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029-2030	tidak ada			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
				mendukung proyek strategis BLK, sebagai berikut: Menjadi penghubung antara pelaku industri/perusahaan dengan Disnaker dan BLK. Memfasilitasi program magang industri dan penempatan lulus BLK ke industri lokal. Disperindag ESDM dapat menjadi mitra dalam pengembangan program pelatihan vokasi di BLK melalui fasilitasi pelatihan berbasis proyek industri, penyediaan instruktur ahli dari sektor industri dan akses terhadap bantuan alat pelatihan. Dinas Pendidikan: Dinas Pendidikan memiliki peran dalam proyek strategis ini dalam hal pelatihan kerja, sebagai berikut: Mendorong sinkronisasi kurikulum SMK/vokasi dengan skema pelatihan	1.Dukungan sarana dan prasaran pendukung sesuai kewenangan kabupaten 2.Memfasilitasi kerja sama antara BLK dan perusahaan lokal untuk program magang, pelatihan kerja, atau penyerapan tenaga kerja berbasis potensi daerah

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
				BLK agar lulusan SMK lebih siap kerja. Memastikan kompetensi lulusan SMK sejalan dengan kebutuhan industri dan program pelatihan BLK. Mengintegrasikan *teaching factory* di SMK dengan fasilitas pelatihan BLK untuk *m*enciptakan ekosistem pelatihan *dual system*. Mendorong peserta didik SMK mengikuti sertifikasi kompetensi melalui LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) yang terhubung dengan BLK. Bersama Disnaker, mendata dan menyiapkan guru produktif/tenaga pelatih yang memenuhi standar pelatihan. Dinas Koperasi dan UMKM: Mengintegrasikan hasil pelatihan BLK dengan program inkubasi usaha UMKM Membina lulusan BLK agar mampu mengembangkan usaha	

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
				mandiri berbasis keahlian yang telah diperoleh Menyediakan pendampingan usaha lanjutan bagi peserta pelatihan BLK yang ingin berwirausaha Menyediakan ruang inkubasi bisnis di sentra-sentra UMKM daerah yang terhubung dengan BLK Membantu lulusan BLK yang berwirausaha dalam promosi dan digitalisasi produk melalui *E-commerce* dan *platform* digital UMKM. Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Menyediakan ruang promosi bagi hasil karya lulusan BLK di sektor kriya, kuliner, dan fesyen etnik melalui festival budaya, *event* pariwisata, serta *platform* pemasaran digital. Menjalin kolaborasi dengan Disnaker untuk mendukung	

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
				pengembangan ekosistem pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat dan budaya lokal melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan. Memberikan dukungan fasilitasi uji kompetensi dan sertifikasi bagi peserta pelatihan BLK untuk meningkatkan daya saing dan kesiapan kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Bekerja sama dengan Disnaker dalam menyusun kurikulum pelatihan di BLK yang relevan dengan kebutuhan industri pariwisata dan subsektor ekonomi kreatif. Dinas Sosial: Menjangkau dan Memberdayakan Kelompok Rentan Sosial. Integrasi Program Rehabilitasi Sosial dan Pelatihan Kerja.	

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
				Bersinergi dengan Disnaker dalam memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan program pelatihan BLK tepat sasaran, terutama bagi warga miskin dan rentan sosial. Melalui tenaga pekerja sosial, Dinas Sosial dapat melakukan pendampingan bagi peserta pelatihan selama dan setelah masa pelatihan, untuk memastikan mereka mampu menerapkan keterampilan yang diperoleh, baik untuk bekerja maupun memulai usaha secara mandiri. Badan Kepegawaiaan Daerah: BKD berperan dalam mendukung ketersediaan ASN dengan kompetensi teknis dan manajerial yang relevan, untuk memperkuat kapasitas kelembagaan BLK, baik sebagai instruktur, tenaga	

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
				administrasi, maupun pengelola program pelatihan. Melakukan pemetaan dan perencanaan kebutuhan SDM aparatur di bidang pelatihan vokasional agar sejalan dengan arah pengembangan BLK, termasuk dalam pengadaan, rotasi, dan pengembangan karier ASN yang ditempatkan di unit- unit pelatihan. BKD dapat mengintegrasikan program pelatihan teknis fungsional dan manajerial bagi ASN yang bertugas di lingkungan BLK ke dalam rencana pengembangan kompetensi tahunan, guna meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan pelatihan. Berperan dalam membangun sistem penilaian kinerja yang berbasis *output* dan dampak, termasuk mengawasi efektivitas	

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
				kinerja ASN di BLK dalam menyelenggarakan pelatihan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja. Kominfo: Dukungan Publikasi Kegiatan	
PP2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMUDA, DAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM BERKARYA DAN BERPRESTASI					
6. Liga Olahraga Pelajar Sumut Piala Gubernur Sumatera Utara Cabang Olahraga Sepak Bola dan Voli tahun 2026 - 2030	2025	Inisiasi dan konsolidasi melalui rapat rapat koordinasi tahun 2025 Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2025 Provinsi Sumatera Utara	Dispora	Dinas Pendidikan/Cabang Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan (pembinaan, edukasi dan sosialisasi kepada pelajar untuk dapat menjadi atlet pelajar) Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan)	1.Melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan liga olahraga pelajar sumut untuk cabor sepak bola dan voli 2.Melaksanakan *side event* pada saat pelaksanaan liga olahraga (pameran UMKM) dan sejenisnya
	2026	Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2026 Penguatan Pembinaan & Kemitraan Tahun 2026 Provinsi Sumatera Utara			
	2027	Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2027 Penguatan Pembinaan & Kemitraan Tahun 2027 Provinsi Sumatera Utara			
	2028	Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2028 Penguatan Pembinaan & Kemitraan Tahun 2028 Provinsi Sumatera Utara			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
	2029	Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2029 Penguatan Pembinaan & Kemitraan Tahun 2029 Provinsi Sumatera Utara			
	2030	Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2030 Penguatan Pembinaan & Kemitraan Tahun 2030 Penguatan *Legacy* & Keberlanjutan Tahun 2030 Provinsi Sumatera Utara			
7. Pekan Olahraga Paralimpik Pelajar Sumatera Utara pada Cabang Olahraga Atletik Tahun 2026 - 2030	2025	Inisiasi konsolidasi melalui pertemuan koordinasi Tahun 2025 Kota Medan dan Kab. Deli Serdang	Dispora	Dinas pendidikan / Cabang Dinas Pendidikan (Edukasi dan Sosialisasi bagi Pelajar Difabel untuk dapat mendata dan membina atlet sesuai potensi dan minat siswa) Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan)	NPC Kabupaten/Kota dan Dispora Kabupaten/Kota a memperkuat perekrutan dan pembinaan para atlet disabilitas pelajar di Kabupaten/Kota
	2026	1. Pelaksanaan Pekan paralimpik pelajar daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Cabang Olahraga para atletik tahun 2026 2. Perluasan Partisipasi & Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2026-2027 Kota Medan dan Kab. Deli Serdang			
	2027	Pelaksanaan Pekan paralimpik pelajar daerah Provinsi Sumatera Utara			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
		untuk Cabang Olahraga para atletik tahun 2027 Perluasan Partisipasi & Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2027-2028 Kota Medan dan Kab. Deli Serdang			
	2028	Pelaksanaan Pekan paralimpik pelajar daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Cabang Olahraga para atletik tahun 2028 Perluasan Partisipasi & Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2028-2029 Kota Medan dan Kab. Deli Serdang			
	2029	Pelaksanaan Pekan paralimpik pelajar daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Cabang Olahraga para atletik tahun 2029 Perluasan Partisipasi & Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2029-2030 Kota Medan dan Kab. Deli Serdang			
	2030	Pelaksanaan Pekan paralimpik pelajar daerah Provinsi Sumatera Utara			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
		untuk Cabang Olahraga para atletik tahun 2030 Perluasan Partisipasi & Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2030 Kota Medan dan Kab. Deli Serdang			
PP 3 KESEHATAN YANG TERINTEGRASI DI BEBERAPA TITIK KAWASAN YANG MENJADI SENTRA LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT TERPADU					
8. Digitalisasi sistem kesehatan terintegrasi *(Sumut e-Health Integration system)*	2025	Penyusunan Kajian dan Bisnis Proses Platform e- Health Integration System Tahun 2025 Pembangunan Aplikasi Tahun 2025 *Launching* Aplikasi *Sumut e-Health Integration System* Tahun 2025 33 Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kominfo (Penyediaan Web, Server dan Publikasi Kegiatan)	1.Penyediaan data kepesertaan JKN Kabupaten/Kota 2.Sosialisasi dan edukasi platform kepada faskes tingkat Kabupaten/Kota
	2026	Edukasi penggunaan Aplikasi ke Masyarakat Tahun 2026 Pengembangan Aplikasi *Sumut e-Health Integration System* Tahun 2026-2029 33 Kabupaten/Kota			
	2027	Edukasi penggunaan Aplikasi ke Masyarakat Tahun 2027 Pengembangan Aplikasi *Sumut e-Health Integration System* Tahun 2026-2029 33 Kabupaten/Kota			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
	2028	Edukasi penggunaan Aplikasi ke Masyarakat Tahun 2028 Pengembangan Aplikasi *Sumut e-Health Integration System* Tahun 2026-2029 33 Kabupaten/Kota			
	2029	Edukasi penggunaan Aplikasi ke Masyarakat Tahun 2029 Pengembangan Aplikasi *Sumut e-Health Integration System* Tahun 2026-2029 33 Kabupaten/Kota			
	2030	Tidak ada			
9. Beasiswa Ikatan Dinas bagi Dokter Spesialis dan dokter spesialis residen di Wilayah Kurang Terlayani (2025 – 2030)	2025	Tidak ada	Dinas Kesehatan	Badan Kepegawaian (Pelaksanaan assesmen kompetensi dokter spesialis sesuai kebutuhan, Pembinaan Monitoring kepada Badan Kepegawaian kab/kota agar Dokter Spesialis yang sudah dididik tidak berpindah tempat kerja) Biro Pemotda (Fasilitasi Penyusunan Dokumen kerja sama dengan USU dan UGM) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	1.Menyediakan data dokter umum yang memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh beasiswa dokter spesialis dan Mengidentifikasi jenis dan jumlah spesialis yang dibutuhkan di RSUD atau faskes daerah 2.Menyiapkan surat komitmen bersama dengan para Bupati/Wali Kota yang menyatakan bahwa peserta dokter spesialis akan kembali ke daerah asal dan RSUD setempat 3.Menentukan jenis spesialis yang paling dibutuhkan
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Pemenuhan dokter spesialis melalui pemberian beasiswa bekerja sama dengan Perguruan Tinggi yakni USU dan UGM Distribusi dokter spesialis sebagai upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Primer dan Rujukan melalui dokter residen (Layanan Medis Merata) Tahun 2025-2030 RSUD Kabupaten Batu Bara, RSUD Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah Kabupaten			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
		Serdang Bedagai, RSUD Tuan Rondahaim di Kabupaten Simalungun, RSUD Salak di Kabupaten Pakpak Bharat, RSUD Parapat Kabupaten Simalungun, RSUD Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, RSUD Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, RSUD Tapanuli Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, RSUD Dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar, RSUD Dr. FL Tobing Kota Sibolga, RSUD Dr. R. M. Djoelham Binjai Kota Binjai, RSUD Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, Lanjutan 2027 : 9 Orang, Lanjutan 2026 : 8 Orang, Lanjutan 2022 : 21 orang			4.Kesiapan Sarana dan Prasarana RSUD 5.Surat Penugasan & dukungan 6.Legal Formal penyediaan Akomodasi dokter residen
	2029	Tidak ada			
	2030	Pemenuhan dokter spesialis melalui pemberian beasiswa bekerja sama dengan Perguruan Tinggi yakni USU dan UGM Distribusi dokter spesialis sebagai upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Primer			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
		dan Rujukan melalui dokter residen (Layanan Medis Merata) Tahun 2025-2030 Kabupaten/Kota yang terintervensi pada tahun 2026, 2027, 2028 dan 2029			
10. Dukungan Pengembangan Rumah Sakit Unggulan (Pengembangan Rumah Sakit Unggulan dan Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan)	2025	Tidak ada	Dinas Kesehatan	PUPR (Manajamen Konstruksi, Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	1.Penyediaan Lahan dan Dokumen Legalitas 2.Menyediakan tenaga non-medis, mendukung rekrutmen tenaga kesehatan, dan pemeliharaan fasilitas 3.Koordinasi Lintas Pemerintahan
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			
PP4 PEMBERANTASAN KEMISKINAN MELALUI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RENTAN SECARA MENYELURUH DAN TEPAT SASARAN					
11. Bantuan Sosial Produktif melalui Program Masyarakat Produktif (MAPRO).	2025	Tidak ada	Dinas Sosial	Disperindag dan Dinas Koperasi UMKM (Dukungan Pelatihan dan Pendampingan bagi sasaran kegiatan Mapro yaitu KUBe dan UEP, fasilitasi keikutsertaan Kelompok Usaha Bersama/Usaha Ekonomi Produktif Mapro dalam pameran/expo yang dilaksanakan oleh Dinas)	1.Dukungan penjajakan calon penerima bantuan agar tepat sasaran. 2.Dukungan koordinasi penyiapan kegiatan pelatihan bagi calon penerima bantuan di kab/kota. 3.Replikasi kegiatan serupa di kab/kota masing-masing.
	2026	Tidak ada			
	2027	Penyaluran bantuan modal usaha dan Pelatihan keterampilan/pengembangan usaha Program Masyarakat Produktif Tahun 2026-2029 - Pendampingan dan monitoring serta Evaluasi lapangan Tahun 2026-2029			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
		Sebanyak 550KK (110 KUBE) di 5 (Lima) Kabupaten/Kota: Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, Labuhanbatu Utara, Toba, Simalungun serta 400 KK (UEP) di 5 Kabupaten/Kota: Binjai, Tapanuli Tengah, Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah, Dairi		Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	
	2028	Tidak ada			
	2029	Penyaluran bantuan modal usaha dan Pelatihan keterampilan/pengembangan usaha Program Masyarakat Produktif Tahun 2026-2029 - Pendampingan dan monitoring serta Evaluasi lapangan Tahun 2026-2029 Sebanyak 650 KK (130KUBE) di 5 Kabupaten/Kota: Padangsidimpuan, Simalungun, Langkat, Tapanuli Tengah, Serdang Bedagai serta 700 KK (UEP) di 5 Kabupaten/Kota: Toba, Deli Serdang, Dairi, Labuhanbatu Utara, Mandailing Natal			
	2030	Tidak ada			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
12. Pelaksanaan Program Pasar Murah Bergerak (PMB)	2025	Identifikasi kebutuhan dan lokasi sasaran (IHK, P3KE, desa rentan pangan, dan wilayah 3T); Penentuan komoditas & harga jual; Penyusunan Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) Pasar Murah Bergerak (PMB); Koordinasi dan Kemitraan dengan TPID, BULOG, CSR, Distributor, Pengusaha daerah/koperasi/BUMEDes, Pemerintah Kabupaten/Kota; Penentuan jadwal & titik lokasi; Pelaksanaan Pasar Murah Bergerak (PMB)	DISPERINDAG ESDM	Dinas TPH : Data pangan strategis dan penyediaan stok Dinas Perhubungan : Transportasi logistik Dinas Sosial : Data P3KE *by name by address* (untuk menentukan titik titik PMB dilakukan) Dinas Koperasi & UMKM : Pelibatan UMKM dan Koperasi dalam penyediaan stok Biro Perekonomian: pelibatan TPID untuk menghitung dampak terhadap pengendalian inflasi Dinas Kominfo: Publikasi Pelaksanaan Bappelitbang: Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat: Pengawasan Pelaksanaan	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan (Tahun 2025-2030): 1.Pendataan kecamatan dan jumlah penduduk miskin dan rawan miskin; 2.Pendataan jumlah KUMKM penyedia Bahan Kebutuhan Pokok; 3.Pengawasan distribusi dan harga bahan kebutuhan pokok; kerja sama antar kabupaten dalam penyediaan Bahan Kebutuhan Pokok 4.Penyediaan lokasi untuk pelaksanaan; 5.Monitoring dan evaluasi
		Tidak ada			
	2026	Konsolidasi kelembagaan, integrasi sistem informasi daerah; Pelaksanaan Pasar Murah Bergerak (PMB)			
		Lokasi: Mandailing Natal (kemiskinan struktural), Tapanuli Tengah (akses terbatas), Nias Barat (isolasi logistik), Humbang Hasundutan (wilayah dataran tinggi), Pakpak Bharat (akses sangat terbatas), Dairi (wilayah perbatasan), Kab. Batu Bara (wilayah pesisir),			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
		Toba (hinterland), Samosir (wilayah tertutup), Labuhanbatu Selatan (kemiskinan tinggi), Nias Selatan (akses sulit), Tapanuli Tengah (rawan logistik), Tapanuli Tengah Utara (wilayah sulit distribusi), Tapanuli Tengah (akses dan harga tinggi), Langkat (distribusi padat dan IHK)			
	2027	Pelaksanaan Pasar Murah Bergerak (PMB) 15 Kabupaten/Kota Lokasi; Karo (rawan inflasi sayur), Deli Serdang (kontributor IHK), Mandailing Natal (kemiskinan ekstrem), Humbang Hasundutan (akses distribusi sulit), Tapanuli Tengah (harga fluktuatif), Toba (wilayah pegunungan), Nias Barat (daerah pulau terluar), Tapanuli Tengah (akses distribusi), Nias Utara (rawan kemiskinan), Nias Selatan (akses logistik laut), Langkat (wilayah Pantai Timur), Samosir (pulau tengah danau), Serdang Bedagai (penyangga distribusi), Tapanuli Selatan			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
		(akses transportasi terbatas), Simalungun (wilayah padat penduduk)			
	2028	Pelaksanaan Pasar Murah Bergerak (PMB) 15 Kabupaten/Kota Medan (kota IHK utama), Pematangsiantar (wilayah urban), Padangsidimpuan (wilayah tertutup distribusi), Deli Serdang (wilayah distribusi padat), Toba (akses perbatasan dan pariwisata), Humbang Hasundutan (wilayah pertanian dan pengunungan), Nias Selatan (terpencil), Karo (akses dan cuaca ekstrem), Langkat (wilayah perbatasan), Simalungun (pusat distribusi regional), Tapanuli Selatan (wilayah pegunungan), Mandailing Natal (akses rendah), Dairi (hinterland), Nias Barat (wilayah terpencil), Tapanuli Tengah (rawan distribusi)			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
	2029	Pelaksanaan Pasar Murah Bergerak (PMB) 15 Kabupaten/Kota Tebing Tinggi (kota IHK baru), Binjai (urban miskin), Toba (wilayah distribusi luas), Langkat (wilayah perbatasan), Samosir (akses logistik air), Pakpak Bharat (akses sangat terbatas), Humbang Hasundutan (wilayah dataran tinggi), Tapanuli Tengah (harga fluktuatif), Mandailing Natal (kemiskinan struktural), Tapanuli Tengah (akses distribusi sulit), Deli Serdang (wilayah IHK), Karo (rawan inflasi hortikultura), Nias Selatan (logistik laut), Simalungun (distribusi lintas kabupaten), Asahan (wilayah urban pertanian)			
	2030	Pelaksanaan Pasar Murah Bergerak (PMB) 15 Kabupaten/Kota Medan (pusat IHK), Tebing Tinggi (akses perdagangan), Pematangsiantar (wilayah urban), Padangsidimpuan (akses logistik terbatas), Gunungsitoli (pulau terluar),			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
		Dairi (wilayah perbatasan), Tapanuli Tengah (kontributor inflasi lokal), Toba (pariwisata dan pertanian), Mandailing Natal (daerah rawan Kemiskinan), Nias Barat (akses sulit), Labuhanbatu Selatan (wilayah miskin), Humbang Hasundutan (akses dataran tinggi), Langkat (wilayah distribusi utama), Samosir (pulau tengah danau), Serdang Bedagai (penyangga Medan)			
13. Perlindungan Sosial bagi Tenaga Kerja Rentan (Subsidi BPJS Ketenagakerjaan)	2025	Pendataan dan verifikasi Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan (Pekerja rentan yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja dibawah standar) sebanyak 21.000 (APBD dan DBH Sawit) Penguatan peran dan komitmen kabupaten/kota dalam pembiayaan dan regulasi (MoU Pemprovsu dengan Kabupaten dan Kota) -33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2)	DISNAKER	Dinas Sosial Dinas Sosial berperan dalam memberikan data dukung DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) untuk memastikan penerima termasuk dalam kategori penerima bantuan. Pendataan dan Validasi Calon Penerima, Mengelola dan memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar penetapan penerima bantuan iuran BPJS.	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Ketenagakerjaan, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: 1.Mendukung pelaksanaan agar bisa mencapai target *Universal Coverage Jamsostek* (UCJ) sebesar 60% sesuai RPJMD 2025-2029 2.Memberikan sosialisasi untuk masyarakat, khususnya untuk tenaga kerja rentan dan masyarakat yang berada di garis kemiskinan

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
	2026	Perluasan kepesertaan pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.645 dengan skema penganggaran 20% Provinsi dan 80% kab/kota -33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Penyediaan dan Verifikasi Data Identitas Menyediakan data kependudukan yang valid (NIK, KK, KTP) sebagai prasyarat utama pendaftaran peserta BPJS Ketenagakerjaan. Melakukan verifikasi dan sinkronisasi data dengan sistem BPJS, DTKS (Dinas Sosial), dan lembaga lain untuk memastikan data pekerja rentan terverifikasi secara administratif. Dukungan Pemutakhiran Data DTKS, Bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk memastikan kesesuaian dan kelengkapan data identitas dalam DTKS (Data Terpadu	3.Pengalokasian DBH sawit dan APBD dengan persentase pembagian 80 persen kab/kota dan 20 persen provinsi utk perlindungan pekerja rentan miskin ekstrem desil 1 dan 2
	2027	Pembayaran kepesertaan pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.646 dengan skema penganggaran 20% Provinsi dan 80% kab/kota -33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2			
	2028	Pembayaran kepesertaan pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.647 dengan skema penganggaran 20% Provinsi dan 80% kab/kota -33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
		informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2		Kesejahteraan Sosial), yang digunakan untuk menetapkan penerima bantuan iuran BPJS.	
	2029	Pembayaran kepesertaan pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.648 dengan skema penganggaran 20% Provinsi dan 80% kab/kota -33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2		Membantu mempercepat proses registrasi atau koreksi data calon penerima manfaat yang belum memiliki dokumen kependudukan lengkap. BPJS Ketenagakerjaan	
	2030	Pembayaran kepesertaan pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.648 dengan skema penganggaran 20% Provinsi dan 80% kab/kota Evaluasi menyeluruh dan pencapaian target cakupan 60% UCJ -33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara		BPJS Ketenagakerjaan berperan menyelenggarakan perlindungan sosial bagi pekerja melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK): Perlindungan atas risiko kecelakaan selama bekerja. Jaminan Kematian (JKm): Santunan kepada ahli waris pekerja yang meninggal. Jaminan Hari Tua (JHT): Tabungan jangka panjang bagi pekerja saat pensiun. Jaminan Pensiun (JP): Penghasilan berkala untuk pekerja setelah pensiun.	

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
				Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP): Bantuan uang tunai, akses informasi kerja, dan pelatihan bagi pekerja yang terkena PHK. Kominfo: Publikasi Kegiatan	
14. Revitalisasi, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Panti Sosial Provinsi	2025	Bimbingan keterampilan dasar bagi PPKS/penghuni panti Pemberian bantuan sosial bagi PPKS/penghuni panti sosial yang akan memasuki masa terminasi		PUPR (Dokumen apraisal, pendampingan, monitoring dan evaluasi untuk revitalisasi panti sosial) Disperindag, Dinas Koperasi UMKM, Disnaker (Dukungan Pelatihan dan Keterampilan Kerja bagi sasaran Penghuni Panti) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	1.kab/kota mendukung pelaksanaan pelatihan bimbingan mental, dan pendidikan paket A/B/C bagi penerima manfaat yang dirujuk dari panti sosial provinsi khususnya panti anak dan remaja 2.Kabupaten/Kota bersama Provinsi melakukan pemantauan, evaluasi atas keberlanjutan penerima manfaat.
	2026	Penyusunan dokumen apraisal/penilaian kerusakan bekerja sama dengan Dinas PUPR Penyusunan dokumen perencanaan (jasa konsultan perencanaan) untuk 13 panti sosial Bimbingan keterampilan dasar bagi PPKS/penghuni panti Pemberian bantuan sosial bagi PPKS/penghuni panti sosial yang akan memasuki masa terminasi			
	2027	Revitalisasi fisik gedung Panti Sosial (4 unit) 1.PSAR Anak			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
		Tanjung Morawa (Kabupaten Deli Serdang) 2.PS Lansia Kisaran (Kabupaten Asahan) 3.PS Gepeng Binjai (Kota Binjai) 4.PS Lansia TRW Pematangsiantar (Kota Pematangsiantar) Bimbingan keterampilan dasar bagi PPKS/penghuni panti Pemberian bantuan sosial bagi PPKS/penghuni panti sosial yang akan memasuki masa terminasi			
	2028	Revitalisasi fisik gedung Panti Sosial (4 unit) 1.PS Tuna Susila & Tuna Laras Berastagi (Kabupaten Karo) 2.PS Padangsidimpuan (Kota Padangsidimpuan) 3.PS Siborong-borong (Kabupaten Tapanuli Tengah) 4.PS Tebing Tinggi (Kota Tebing Tinggi) Bimbingan keterampilan dasar bagi PPKS/penghuni panti Pemberian bantuan sosial bagi PPKS/penghuni panti sosial yang akan memasuki masa terminasi			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
	2029	Revitalisasi fisik gedung Panti Sosial (5 unit) PS Anak Sidikalang-Kabanjahe (Kabupaten Dairi & Kabupaten Karo) PS Lausimomo-Hutasalem (Kab.Karo & Kabupaten Toba) PS Anak Gunungsitoli (Kota Gunungsitoli) 4.PS Eks Kusta Belidahan-Sicanang (Kota Medan) 5.PS Pinangsori (Kabupaten Tapanuli Tengah) Bimbingan keterampilan dasar bagi PPKS/penghuni panti Pemberian bantuan sosial bagi PPKS/penghuni panti sosial yang akan memasuki masa terminasi			
	2030	Bimbingan keterampilan dasar bagi PPKS/penghuni panti Pemberian bantuan sosial bagi PPKS/penghuni panti sosial yang akan memasuki masa terminasi			
PP 5 PENGUATAN STABILITAS MAKRO EKONOMI DAN KESINAMBUNGAN FISKAL DAERAH					
15. Pembentukan Kawasan Ekonomi	2025	KEK Pertanian tidak ada		Bappelitbang: Menyelaraskan rencana	2025: Dukungan kab/kota untuk Pengembangan KEK

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
Khusus Pertanian dan pariwisata		KEK Pariwisata: Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba tidak ada	DISBUDPAREKRAF DAN DINAS KETAPANG TPH	pengajuan KEK Pariwisata dan Pertanian dengan RPJMD, RTRW, RPJPD, dan RIPPARNAS/RIPPARDA, Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup: Kajian AMDAL dan pengelolaan lingkungan Dinas Ketenagakerjaan: Peningkatan *Capacity Building* Pariwisata dan Pertanian Dinas Pendidikan: Penguatan Vokasi SMK Pariwisata dan Pertanian DInas PUPR: Percepatan Perda RTRW Perubahan, sinkronisasi lokasi KEK pada RTRW Dinas Kominfo: Dukungan Publikasi Kegiatan Biro Hukum: Penetapan Regulasi Perda/Pergub DPMPTSP: fasilitasi perizinan	Pariwisata Koordinasi terkait rencana pengajuan DPSP Danau Toba menjadi KEK 2026: • Persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kawasan Danau Toba dan Penetapan Lokasi Penetapan Pebup RTRW; Kesesuaian Dokumen RTRW dan RDTR 2027: • Penyediaan Lahan (Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang KEK dalam hal terdapat lahan yang belum dibebaskan) Peningkatan infrastruktur kewenangan kabupaten (jalan, air, sarana persampahan, sanitasi) Kemudahan Perizinan Usaha Kewenangan kab/kota 2028: • Peningkatan SDM Pariwisata dan Pertanian Penyediaan Lahan Peningkatan Infrastruktur kewenangan kab/kota Kemudahan Perizinan Usaha Kewenangan kab/kota 2029: • Peningkatan SDM Pariwisata Penyediaan Lahan
	2026	KEK Pertanian tidak ada			
		KEK Pariwisata: Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba tidak ada			
	2027	KEK Pertanian tidak ada			
		KEK Pariwisata: Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba tidak ada			
	2028	KEK Pertanian tidak ada			
		KEK Pariwisata: Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba tidak ada			
	2029	KEK Pertanian tidak ada			
		KEK Pariwisata: Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba tidak ada			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
	2030	KEK Pertanian tidak ada KEK Pariwisata: Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba tidak ada			Peningkatan Infrastruktur kewenangan kab/kota Kemudahan Perizinan Usaha Kewenangan kab/kota Promosi Investasi 2030: • Peningkatan SDM Pariwisata dan Pertanian Penyediaan Lahan Peningkatan Infrastruktur kewenangan kab/kota Kemudahan Perizinan Usaha Kewenangan kab/kota Promosi Investasi
16. Penguatan Hilirisasi Komoditas Unggulan di Kawasan Industri Sumatera Utara	2025	Tidak ada	DISPERINDAG ESDM	Dinas TPH: Peningkatan Produksi Cabe melalui Sarprodi; Pemberian Bibit Cabai varietas tahan hama & cocok untuk pengeringan, *capacity building* bagi petani Dinas Perkebunan dan Peternakan: Peningkatan Produksi Kelapa, Aren dan Kopi melalui Sarprodi; Pemberian	Dukungan Kabupaten/Kota: 1.Menyediakan Data IKM sektor Kopi, Kelapa, Aren, Cabe (jenis produk, data produksi, nilai omset produksi) 2.Peningkatan *capacity building* pada IKM (kelapa, cabe, kopi, aren); 3.menyusun regulasi pengembangan hilirisasi, Penguatan kemitraan hilirisasi antar kab/kota. 4.Pemasaran, dukungan promosi, *capacity building* diversifikasi produk hilirisasi ,
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
				Bibit Kelapa genjah, Kopi Unggu, Aren, *capacity building* bagi petani Dinas PUPR : Penguatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Dinas Kominfo : Dukungan Publikasi Kegiatan	Penyediaan Rumah kemasan oleh kab/kota 5.Menentukan IKM yang akan dilakukan *capacity building*, menyusun regulasi pengembangan hilirisasi, penguatan kemitraan hilirisasi antar kab/kota, peningkatan akses pembiayaan melalui KUR atau Koperasi, fasilitasi *capacity building* standarisasi ekspor bagi pelaku IKM. 6. Dukungan pembiayaan KUR, identifikasi IKM berpotensi untuk dilakukan *business matching*. *7.Branding* Ekspor
17. BUMD Reform Program (Penguatan Peran BUMD sebagai Motor Ekonomi)	2025	Tidak ada	-	Bappelitbang: Penyusunan konsep dan perencanaan kesehatan BUMD, GCG Biro Hukum: percepatan fasilitasi regulasi Biro Pemotda: Fasilitasi Kerja sama Diskominfo: Publikasi Kegiatan Inspektorat: Audit BUMD	-
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			
18. Pemanfaatan Aset barang milik daerah melalui	2025	Inventarisasi Barang Milik Daerah yang belum optimal, serta potensi pemanfaatan	BKAD	Bapenda Provsu: Dukungan dalam proses bisnis pendapatan	Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota pada pelaksanaan pengamanan

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
kerja sama ekonomi		Penyusunan skema/proses bisnis pemanfaatan aset BMD Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi Proses digitalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah		melalui pemafaatan aset BMD dengan kerja sama ekonomi Bappelitbang Provsu: Dukungan dalam penyusunan konsep dan perencanaan Diskominfo: Dukungan dalam penyediaan web aplikasi dan promosi OPD Pengguna BMD: Dukungan dalam inventarisir dan pengamanan aset serta pemeliharaan BMD	BMD dalam penerbitan SKT lahan (Surat Keterangan Kepemilikan Lahan) dari Pemerintah Setempat (Kelurahan atau Kepala Desa)
	2026	Pemanfaatan aset Barang Milik Daerah yang berdasarkan hasil inventarisasi (target 2 BMD yang termanfaatkan) Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi Penyusunan Regulasi penggunaan web aplikasi pemanfaatan Barang Milik Daerah Peningkatan kapasitas dan kuantitas SDM penilai barang			
	2027	Pemanfaatan aset Barang Milik Daerah yang berdasarkan hasil inventarisasi (target 2 BMD yang termanfaatkan)			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
		Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi Pengembangan skema peman faatan Barang Milik Daerah Pengembangan sistem informasi atau promosi			
	2028	Pemanfaatan aset Barang Milik Daerah yang berdasarkan hasil inventarisasi (target 2 BMD yang termanfaatkan) Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi Penguatan kemitraan dalam perluasan pemanfaatan Barang Milik Daerah termasuk kerja sama dengan platform lain			
	2029	Pemanfaatan aset Barang Milik Daerah yang berdasarkan hasil inventarisasi (target 2 BMD yang termanfaatkan) Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi Penguatan kemitraan dalam perluasan pemanfaatan			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
		Barang Milik Daerah termasuk kerja sama dengan platform lain (kerja sama dengan 1 Platform) Evaluasi dan Monitoring secara berkala terhadap Pemanfaatan Barang Milik Daerah produktif berkelanjutan			
	2030	Pemanfaatan aset Barang Milik Daerah yang berdasarkan hasil inventarisasi (target 2 BMD yang termanfaatkan) Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi Evaluasi dan Monitoring secara berkala terhadap Pemanfaatan Barang Milik Daerah melalui kerja sama ekonomi berkelanjutan			
PP.6 PENGEMBANGAN EKONOMI HIJAU DAN BIRU					
19. Pengembangan Kawasan Perkebunan (Kelapa, Kopi, Aren)	2025	Tidak ada	DISBUNAK	1. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Provinsi Sumatera Utara: memberikan pelatihan pengemasan izin edar hasil produk, pelatihan pengemasan produk dan sertifikasi halal serta	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan:
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
				pemberian alat untuk mengolah hasil produksi dalam rangka hilirisasi hasil Perkebunan kelapa seperti alat untuk menjadikan air kelapa menjadi minyak kelapa/VCO, dan *coconut milk*, kemudian biji kopi menjadi kopi bubuk dan kopi ekstrak, kemudian aren menjadi gula aren dan bioetanol Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara: pembentukan dan pelatihan UMKM bagi kelompok pekebun dan alat pengolah hasil produksi kelapa, kopi dan aren. Dinas PMD Dukcapil: untuk pembentukan dan pemberdayaan BUMDes di lokasi intervensi pengembangan kawasan perkebunan Diskominfo: untuk publikasi media	1. Dukungan data CPCL di lokas intervensi 2. Melakukan Pembinaan dan pelatihan peningkatan produksi atau peningkatan pasca produksi di lokasi intervensi pengembangan kawasan perkebunan
20. Pengembangan Kawasan Unggulan	2025	Kajian kampung nelayan dan budidaya	DISKANLA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan – Pengolahan, pemasaran,	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera
	2026	Pembuatan *master plan*			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
Perikanan Tangkap dan Budidaya		Pembangunan sarana prasana produksi Perikanan tangkap: sampan, jala dan dermaga Perikanan budidaya: revitalisasi kolam, benih, pakan, kincir, saluran air, *automatic feeder* Perikanan tangkap: kawasan Tapanuli Tengah- Sibolga, kawasan Asahan-Tanjungbalai, Nias Utara; Perikanan budidaya: Kabupaten Simalungun, Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai.		dan ekspor produk perikanan. Dinas Koperasi dan UKM – Penguatan kelembagaan usaha nelayan/pembudidaya. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang – Pembangunan infrastruktur pendukung (jalan dan pelabuhan). Dinas Kominfo: Publikasi, sosialisasi, dan edukasi masyarakat	Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: 1.Pendataan kelompok nelayan dan pembudidaya kab/kota 2.Klasterisasi 3.Sosialisasi dan Edukasi 4.Replikasi di daerah yang sama
	2027	Pengembangan unit pengolahan ikan dalam bentuk *coolbox* dan gudang ikan Kemitraan usaha dengan: Dinas Perindustrian dan Perdagangan – Pengolahan, pemasaran, dan ekspor produk perikanan. Dinas Koperasi dan UKM – Penguatan kelembagaan usaha nelayan/ pembudidaya.			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
		Perikanan tangkap: Kawasan Tapanuli Tengah- Sibolga, kawasan Asahan-Tanjungbalai, Nias Utara; Perikanan budidaya: Kabupaten Simalungun, Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai.			
		Sertifikasi mutu Digitalisasi pemasaran dan sistem logistik hasil perikanan Pembukaan akses pasar ekspor			
	2028	Kawasan perikanan tangkap: Kawasan Tapanuli Tengah-Sibolga (Ikan Asin), kawasan Asahan- Tanjungbalai (Ikan Teri), Nias Utara (Udang Beku) Kawasan perikanan budidaya: Kabupaten Simalungun (Ikan Dori), Deli Serdang (Ikan Mas), Langkat (Udang), Serdang Bedagai (Ikan Gurami).			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			
21. Pengawasan Konservasi Laut	2025	Pokja Pengawas Laut, Peta digital kawasan rawan	DISKANLA		Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
SEMESTA (Pemberdayaan Nelayan Sebagai Pasukan Penjaga Laut)		pelanggaran, *draft* rencana aksi		BAPPELITBANG: Integrasi program SEMESTA dalam perencanaan daerah. Dinas Lingkungan Hidup Provsu: Kebijakan dan pemantauan kualitas lingkungan laut. Dinas Perhubungan Provsu: Dukungan transportasi laut dan keselamatan pelayaran patroli. Satpol PP Provsu: Penegakan perda terkait konservasi laut. Dinas Pariwisata Provsu: Sinergi dengan wisata bahari berkelanjutan. Dinas Kominfo Provsu: Publikasi, sosialisasi, dan edukasi masyarakat. Dinas Koperasi & UKM Provsu: Penguatan kelembagaan nelayan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provsu: Kesiapsiagaan dan tanggap darurat di laut.	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: 1.Pendataan Nelayan kab/kota 2.Klasterisasi 3.Sosialisasi dan Edukasi
	2026	Laporan Patroli dan Peralatan + Aplikasi e-Mawas Kabupaten/kota dan perairan Pantai Timur dan Barat Sumatera Utara.			
	2027	Laporan Patroli dan Peralatan + Aplikasi e-Mawas Kabupaten/kota dan perairan Pantai Timur dan Barat Sumatera Utara.			
	2028	Modul Hukum & Klinik Konsultasi. Kabupaten/kota dan perairan Pantai Timur dan Barat Sumatera Utara.			
	2029	Laporan Evaluasi dan strategi pengawas baru Kabupaten/kota dan perairan Pantai Timur dan Barat Sumatera Utara.			
	2030	Buku capaian dan film dokumenter Kabupaten/kota dan perairan Pantai Timur dan Barat Sumatera Utara.			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
				Inspektorat: Pengawasan dan pendampingan jalannya program	
22. Rehabilitasi Mangrove dan Pesisir berbasis Masyarakat	2025	Tidak ada	DLHK	1. Dinas Kominfo - Media massa -Publikasi kegiatan 2. Kementerian Kehutanan Penyediaan Regulasi Koordinasi program-program	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui DLHK dengan dukungan *stakeholder* terkait diantaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kementerian Kehutanan, Kelompok Masyarakat Pesisir dan LSM/NGO/pemerhati Lingkungan. adapun dukungan kabupaten/kota pada kegiatan ini diantaranya: 1.Kolaborasi *Multistakeholder* dalam kegiatan 2.Pemberdayaan Masyarakat: Program rehabilitasi yang sukses tidak hanya tentang menanam pohon, tapi juga tentang memberdayakan masyarakat. Membantu dalam proses pengadaan lahan dan memastikan status hukum lahan tersebut jelas Pemerintah kabupaten melakukan pemantauan dan
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
					pemeliharaan secara berkala untuk memastikan pertumbuhan mangrove berjalan baik dan program mencapai tujuannya.
23. Pengembangan Energi Baru Terbarukan (PLTS Pompa Air Untuk Irigasi Pertanian/PLTA Mikrohidro dan lainnya)	2025	Tidak ada	DISPERINDAG ESDM	TPH: Pembinaan Kelompok Petani dalam penggunaan PLTS. Bappelitbang: Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan untuk Tahun 2025-2030: 1.Data Kelompok Tani (CPCL) 2.data penentuan lokasi pengadaan lahan 3.Data produksi pertanian; kondisi air 4.Data *readiness criteria*
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada		Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat: Pengawasan Pelaksanaan Dinas Kominfo: Dukungan Publikasi Kegiatan	
	2030	Tidak ada			
PP 7 KETAHANAN PANGAN MELALUI PENGUATAN NILAI BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL AGAR DIVERSIFIKASI HASIL PERTANIAN MENJADI LEBIH PRODUKTIF DAN BERDAMPAK PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LOKAL					
24. Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Unggulan Padi, Jagung, Cabai	2025	Tidak ada	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memiliki peran krusial dalam pembangunan infrastruktur dasar	1.Memfasilitasi penyediaan benih unggul, pupuk, dan alat pertanian dasar. 2.Mendorong sinergi antar pemangku kepentingan lokal (petani, penyuluh, BUMDes).
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
Merah, dan bawang merah	2030	Tidak ada	Sumatera Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan dan TPH	pendukung pertanian. Ini mencakup pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, jalan usaha tani, serta infrastruktur penunjang lainnya yang memperlancar distribusi hasil panen dan aksesibilitas kawasan pertanian. Penataan ruang juga menjadi fokus penting untuk memastikan kawasan pertanian unggulan tidak terganggu oleh alih fungsi lahan. 2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) turut berperan dalam mendorong hilirisasi produk pertanian melalui pengembangan industri	3.Memfasilitasi pembangunan/peningkatan akses jalan produksi di kawasan unggulan. 4.Mendukung pembangunan fasilitas pascapanen: gudang, alat pengering, rumah sortasi. 5.Mengkoordinasikan petani/UMKM untuk mengikuti pelatihan sertifikasi ekspor dan standar internasional. 6.Memberikan laporan lengkap atas capaian program, kendala, dan peluang lanjutan. 7.Replikasi di daerah yang sama
				pengolahan hasil tani, seperti pengeringan, pengemasan, dan pengolahan lanjutan produk padi, jagung, cabai, dan bawang merah. Di sisi perdagangan, dinas ini memastikan akses pasar	

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
				yang lebih luas dan stabil melalui promosi, fasilitasi perdagangan, dan penguatan sistem rantai pasok. Adanya kegiatan Gerakan pangan Murah membuat Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dapat berkolaborasi dengan Dinas ketahanan Pangan dan TPH dalam menjalankan kegiatan ini Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) memegang peranan sebagai koordinator perencanaan strategis lintas sektor. Bappelitbang merumuskan arah kebijakan, menyusun rencana aksi, serta memastikan sinergi antar-dinas dalam pengembangan kawasan unggulan. Diskominfo (Publikasi)	

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
25. Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Peternakan unggulan	2025	Tidak ada	DISBUNAK	1. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Provinsi Sumatera Utara: Memberikan pelatihan pengemasan izin edar hasil produk, pelatihan pengemasan produk dan sertifikasi halal serta pemberian alat untuk mengolah hasil Produksi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara: Koordinasi pembentukan dan pelatihan UMKM bagi kelompok peternak Dinas PMD Dukcapil: Untuk pembentukan dan pemberdayaan BUMDes di lokasi intervensi pengembangan kawasan peternakan Diskominfo: Untuk publikasi media	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: 1. Dukungan data CPCL di lokasi intervensi 2. Melakukan Pembinaan dan pelatihan peningkatan produksi atau peningkatan pasca produksi di lokasi intervensi pengembangan kawasan peternakan 3. Pemberian izin usaha untuk koperasi, UMKM, BUMDes yang mengolah hasil produksi berada di kawasan peternakan 4. Replikasi di daerah yang sama
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			
26. Program Pengembangan	2025	Tidak ada	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH Provinsi berperan	PT. Dirga Surya: memasarkan produksi bibit unggul padi	Dinas Pertanian Kabupaten mempromosikan dan
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
Bibit Unggul Pertanian	2028	Tidak ada	sebagai inisiator utama program. Mereka bertanggung jawab atas perumusan kebijakan, penyediaan alokasi anggaran, serta koordinasi lintas sektor di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dalam implementasinya , mereka juga menetapkan lokasi uji multilokasi dan mendukung pelepasan varietas secara resmi		menggunakan bibit unggul padi varietas baru.
	2029	Tidak ada			
	2030	Pengembangan produksi benih unggul dan pemasaran di Kabupaten/Kota sentra provinsi Sumatera Utara dan di kepulauan Sumatera			
27. Fasilitasi Akses Permodalan Terhadap Kelompok Tani	2025	Fokus pada persiapan program, pembentukan Tim Pokja FPPS di provinsi dan kabupaten/kota, rekrutmen dan pelatihan Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya (FPPS), pemutakhiran data kelompok tani, koordinasi	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH bertindak sebagai penghubung antara kelompok tani dengan lembaga keuangan formal	a) Dinas Koperasi dan UKM memiliki peran sentral dalam penguatan kelembagaan kelompok tani melalui pembinaan koperasi tani dan UMKM berbasis pertanian. Dinas ini dapat memfasilitasi	Memetakan kelompok tani yang layak dan potensial untuk memperoleh akses permodalan, berdasarkan data luas lahan, komoditas yang diusahakan, serta rekam jejak kelembagaan kelompok

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
		dengan lembaga keuangan, dan sosialisasi program. 33 Kabupaten/Kota	seperti bank, koperasi, serta lembaga penjaminan kredit. Melalui penyediaan data kelompok tani, pelatihan manajemen usaha tani, serta pembentukan kelembagaan petani yang kuat, dinas membantu petani memenuhi persyaratan administratif dan teknis agar layak mengakses program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan skema pembiayaan pertanian lainnya.	akses permodalan bagi kelompok tani melalui penguatan koperasi simpan pinjam, pelatihan manajemen usaha tani, hingga menjembatani kerja sama antara koperasi dan lembaga keuangan. Disperindag ESDM berkontribusi dalam mendorong hilirisasi produk pertanian dan menjaga stabilitas harga hasil tani. Melalui penguatan rantai nilai dan pasar hasil tani, dinas ini dapat membuka peluang tambahan pendapatan bagi petani yang dapat digunakan sebagai modal atau premi asuransi. Dinas Kominfo memainkan peran dalam penyebarluasan informasi terkait program bantuan iuran premi asuransi dan akses permodalan. Melalui berbagai saluran komunikasi digital dan non-digital, Kominfo	
	2026	Mulai pelaksanaan Temu Pembiayaan tahap I dan II, pendampingan realisasi kredit, pelatihan manajemen keuangan bagi kelompok tani penerima pembiayaan, serta monitoring awal terhadap usaha penerima kredit. 33 Kabupaten/Kota			
	2027	Memperluas cakupan penerima pembiayaan, memperkuat kemitraan dengan BUMN, BUMD, dan swasta, serta memberikan pelatihan lanjutan kepada FPPS terkait negosiasi bisnis dan pemasaran. 33 Kabupaten/Kota			
	2028	Mengintegrasikan pemasaran digital dan *e- commerce*, mengembangkan sistem informasi pembiayaan pertanian berbasis aplikasi, serta melatih FPPS dan kelompok tani dalam penggunaannya 33 Kabupaten/Kota			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
	2029	Melakukan diversifikasi sumber pembiayaan melalui koperasi, CSR, dan investor. Mengembangkan usaha hilir di bidang pascapanen dan olahan, memberikan pelatihan manajemen usaha hilir, serta mendorong pemasaran produk hilir. 33 Kabupaten/Kota		dapat menjamin transparansi program, meningkatkan literasi digital kelompok tani, dan mendorong penggunaan teknologi informasi dalam pengajuan permodalan dan asuransi pertanian. e) Dinas Pemdesdukcapil memiliki peran strategis dalam verifikasi dan validasi data kependudukan serta kelembagaan desa sebagai basis penyaluran bantuan. Melalui data kependudukan dan basis kelompok tani di desa, Pemdesdukcapil memastikan agar bantuan permodalan maupun iuran premi asuransi diberikan secara tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil kelompok tani. f) Diskominfo (Publikasi)	
	2030	Melaksanakan kajian dampak ekonomi program, menyusun model pendampingan berkelanjutan, dan melatih FPPS menjadi konsultan atau koperasi tani. 33 Kabupaten/Kota			
PP 8 PARIWISATA YANG MENGGERAKKAN POTENSI ALAM LOKAL DI PEDESAAN DAN PERKOTAAN DENGAN MELIBATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT SECARA LANGSUNG (KOMUNITAS, PEMERINTAH DAERAH/DESA/KELURAHAN DAN PENGUSAHA LOKAL)					
28. Dukungan terhadap	2025	Tidak ada	DISBUDPAREKRAF	KOMINFO : Publikasi Media	-Memastikan keselarasan Program/Kegiatan dalam
	2026	Tidak ada			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba	2027	Tidak ada		DISBUDPAREKRAF : Penguatan Atraksi Budaya dan Pariwisata; Pengembangan SDM dan Ekonomi Kreatif; Promosi dan Pemasaran Destinasi; Pengembangan Infrastruktur dan Amenitas Pariwisata; Kolaborasi dan Sinkronisasi Program; Penguatan Tata Kelola Destinasi; PERAN BPODT (Badan Pelaksana Otorita Danau Toba) : Koordinasi Pengelolaan Kawasan Pariwisata Strategis; Pengembangan infrastruktur dan Investasi; Promosi dan Branding Kawasan; Pengembangan SDM dan Ekosistem Wisata PERAN BAPPELITBANG (Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah) : Integrasi	Rencana Aksi Tahap II telah sesuai dengan Dokumen Perencanaan di darah (RPJMD Kab & RKPD Kab) dan Integrasi RIPDN ke dalam renja OPD -Menyusun rencana aksi tahunan -Memastikan ketersediaan anggaran dalam mendukung Pengembangan DPSP Danau Toba -Penyediaan Lahan yang *Clean & Clear* (jika terdapat pembangunan fisik) -Pembentukan Desa Wisata sesuai dengan potensi; -Pembentukan Tata Kelola / Kelembagaan untuk Desa Wisata; -Pendampingan Desa Wisata; -Pendataan Potensi Unggulan Daerah di bidang Kebudayaan, Pariwisata & Ekonomi Kreatif; -Pendataan jumlah Pelaku Usaha Industri Pariwisata (Usaha Penyediaan Makan-Minum, Penyediaan Akomodasi (*Homestay*/Hotel), Penyedia Jasa Transportasi, Penyeda Jasa *Travel Agent*));
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
				Perencanaan Pengembangan DPP Danau Toba; Sinkronisasi Program Daerah dengan Nasional; Litbang	-Pendampingan Pelaku Usaha Pariwisata -Pelaksaan *Event* Budaya, Pariwisata dan Ekonomi Keratif berskala Nasional
				& Evaluasi Program Pengembangan Pariwisata; Dukungan Kebijakan Inovatif & Kolaboratif Sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumut Nomor 188.44/159/KTPS/2019 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja P3TB Provinsi Sumatera Utara, seluruh OPD Pemprovsu yg termasuk dalam SK Gubsu tersebut berperan dalam mendukung Pengembangan DPSP Danau Toba sesuai dengan Rencana Aksi yang disusun	
29. Pengelolaan dan Penataan	2025	Tidak ada	DISBUDPAREKRAF	1. DISBUDPAREKRAF : Penyaluran Belanja Operasional	Memastikan ketersediaan dukungan anggaran dalam pengelolaan Geosite di masing- masing Kabupaten;
Kawasan Toba Caldera UGGp dan	2026	Tidak ada			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
Kawasan Geopark lainnya	2027	Tidak ada		BP TCUGGp; Pembangunan *Visibilities di Geosite*; Pelatihan dan Pembinaan Pelaku Pariwisata dan Pengelola Desa Wisata; Identifikasi dan Penetapan *Cultural Heritage* di Kawasan *Geopark*; Melaksanakan *Event Geofest*. 2. DINAS Koperasi &UMK: Melakukan Pelatihan & Pembinaan UMKM terutama di Kawasan *Geosite*; 3. Dinas Pendidikan: Melaksanaan kegiatan *Geopark* *to School* dan edukasi terkait *Geopark* kepada pelajar; 4. Dinas PUPR : Peningkatan kualitas jalan/jembatan di ruas jalan Provinsi yang menghubungkan antar *Geosite*;	Penyusunan muatan Lokal; -Bekerja sama dengan BP dalam melaksanakan sosialisasi & edukasi kepada Masyarakat, Pelaku Wisata, Pelajar dan ASN tentang *Geopark*; -Melaksanakan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM terutama dalam pengembangan Geoproduk; -Mengidentifikasi dan menginventarisasi serta melakukan penelitian terkait potensi *Geological Heritage, Biological/Natural Heritage* dan *Cultural Heritage;* -Rutin melaksanaan *Event GeoFest*; -Menyusun kajian awal terkait Kawasan *Geopark* baru;
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			-Pembentukan Desa Wisata sesuai dengan potensi; -Pembentukan Tata Kelola / Kelembagaan untuk Desa Wisata; -Pendampingan Desa Wisata; -Pendataan jumlah Pelaku Usaha Industri Pariwisata (Usaha Penyediaan Makan-Minum, Penyediaan

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
				5.Bappeltbang: Melaksanakan penelitian terkait *Geological Heritage/Natural/Biological Heritage/Cultural Heritage* di Kawasan Toba Caldera UGGp maupun di Kawasan Geopark yang baru; BPBD : Mitigasi Bencana & Sosialisasi; Dinas LHK : Pelestarian Hutan dan ekosisten di Kawasan Danau Toba Dinas Kominfo: Publikasi kegiatan;	Akomodasi (*Homestay*/Hotel), Penyedia Jasa Transportasi, Penyedia Jasa *Travel Agent*); -Pendampingan Pelaku Usaha Pariwisata
30. Pembentukan & Pengembangan Kawasan Strategis Budaya, Parawisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi yang Terintegrasi (TATABUSE, SIBANDAN, SIPUAN, KARDAPAK dan BAHLIKE)	2025	Inventarisasi & Identifikasi SDM Kawasan (BUMDES/Pokdarwis/Pengelola Desa Wisata/UMKM); Penyusunan Regulasi Penetapan Kawasan Strategis; Penyusunan *Masterplan* Sibolga-Pandan, Sipirok-Padangsidimpuan, Bawomatoluo-Hilisimaetano-Sorake, Tanjung Pura-Tangkahan-Bukit Lawang-Sei Bingai, Karo-Dairi-Pakpak Bharat.	DISBUDPAREKRAF	Dinas Koperasi & UMKM: Pelatihan dan Pembinaan kepada UMKM di Kawasan. Dinas PUPR: Pembangunan Kawasan (jika ada pembangunan fisik); Peningkatan Akses Ruas Jalan Provinsi menuju Kawasan. Dinas PMD: Pelatihan dan Pembinaan pengelola BUMDES Wisata Dinas Kominfo: Penyediaan Failitas	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, sementara kabupaten/kota berperan dalam: 1.Memastikan ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan Proyek Strategis; 2.Penyediaan Lahan yang *Clean & Clear* (jika terdapat pembangunan fisik);

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
	2026	Penataan Kawasan, Pembinaan, Pelatihan & Pendampingan bagi BUMDes/Pokdarwis/Pengelola Desa Wisata/UMKM dan Peningkatan Aksesibiltas Kawasan Strategis SIBANDAN		Digital di Kawasan; Publikasi Kegiatan	3.Pembentukan Desa Wisata sesuai dengan potensi; 4.Pembentukan Tata Kelola / Kelembagaan untuk Desa Wisata; 5.Pendampingan Desa Wisata; Pendataan Potensi Unggulan Daerah di bidang Kebudayaan, Pariwisata & Ekonomi Kreatif; 6.Pendataan jumlah Pelaku Usaha Industri Pariwisata (Usaha Penyediaan Makan-Minum, Penyediaan Akomodasi (*Homestay*/Hotel), Penyedia Jasa Transportasi, Penyeda Jasa *Travel Agent*); 7.Pendampingan Pelaku Usaha Pariwisata; 8.Pendataan dan inventarisasi pelaku UMKM; 9.Pendampingan kepada pelaku UMKM; 10.Pelaksaan *Event* Budaya, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berskala Nasional
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			
31. Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Situs Cagar Budaya Sumatera Utara	2025	Pemetaan dan verifikasi kondisi situs cagar budaya (fisik & nonfisik) Nias Selatan, Kawasan Danau Toba, Tapanuli	DISBUDPAREKRAF	Dinas Koperasi & UMKM: Pelatihan dan Pembinaan kepada UMKM di kawasan.	1.Memastikan ketersediaan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Provinsi;

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
		Tengah, Langkat & Tapanuli Tengah Utara		Dinas PUPR: Peningkatan Akses Ruas Jalan Provinsi menuju Kawasan. Dinas PMD: Pelatihan dan Pembinaan pengelola BUMDes Wisata Dinas Kominfo: Penyediaan Failitas Digital di Kawasan; Publikasi Kegiatan Dinas Pendidikan: Edukasi kepada pelajar tentang Situs Cagar Budaya	2.Penyediaan Lahan yang *Clean & Clear* (jika terdapat pembangunan fisik); 3.Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Tingkat Kabupaten/Kota; 4.Pembentukan Pengelola Kawasan Situs Cagar Budaya; 5.Melaksanakan Program edukasi kepada masyarakat dan pelajar tentang Kawasan Situs Cagar Budaya; 6.Pendataan, Inventarisasi, Pendaftaran dan Penetapan Cagar Budaya di Kabupaten/Kota 7.Pembentukan Desa Wisata sesuai dengan potensi; 8.Pembentukan Tata Kelola / Kelembagaan untuk Desa Wisata; 9.Pendampingan Desa Wisata; 10.Pendataan jumlah Pelaku Usaha Industri Pariwisata (Usaha Penyediaan Makan-Minum, Penyediaan Akomodasi (*Homestay*/Hotel), Penyedia Jasa Transportasi, Penyeda Jasa *Travel Agent*); Pendampingan Pelaku Usaha Pariwisata;
	2026	Penyusunan dokumen perencanaan pelestarian (*masterplan*, DED, *roadmap*); Pelaksanaan konservasi/pemugaran bangunan bersejarah; Pelatihan konservasi dasar & manajemen situs budaya; Pelaksanaan Program Edukasi di Sekolah & Masyarakat Nias Selatan, Kawasan Danau Toba, Tapanuli Tengah, Langkat & Tapanuli Tengah Utara			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
					11.Pendataan dan Pendampingan UMKM; 12.Pelaksaan *Event* Budaya, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berskala Nasional
32. Pelaksanaan Event Internasional, pengembangan paket wisata dan digitalisasi promosi pariwisata global	2025	Tidak ada	DISBUDPAREKRAF	Dinas Perhubungan: Memastikan ketersediaan transportasi dan lalu lintas saat event internasional dilaksanakan Dinas Kesehatan: Dukungan Tenaga Kesehatan dan Ambulans Dinas Koperasi &UMKM: Pelatihan dan pendampingan UMKM untuk mendukung pelaksaan event internasional Dinas Kominfo: Memastikan ketersediaan jaringan digital saat pra event-event-pasca event internasional; publikasi kegiatan Satpol PP: Keamanan Pelaksanaan *Event* dan ketertiban Penyelenggaraan acara Dinas Pemuda dan Olahraga; Pembinaan	1.Pelaksanaan *Side Event* saat pelaksanaan *Event* Internasional; 2.Pelaksanaan Promosi melalui media digital dan cetak; 3.Sosialisasi & Edukasi kepada Pelaku Usaha Pariwisata (Penyedia Jasa Akomodasi (Hotel & *Homestay*),Penyedia Jasa makan-minum, Penyedia Jasa Transportasi, dan *Travel Agent*); 4.Pendataan & pendampingan terhadap UMKM; 5.Memastikan kelancaran aksesibiltas terutama saat pelaksanaan *Event* internasional (Pengaturan lalu lintas; Peningkatan kualitas jalan)
	2026	Kawasan Pariwisata Provinsi Sibolga-Pandan, Sipirok-Padangsidimpuan, Bawomatoluo-Hilisimaetano-Sorake, Tanjung Pura-Tangkahan-Bukit Lawang-Sei Bingai, Karo-Dairi-Pakpak (Event Internasional), Luar Negeri (Digitalisasi Promosi)			
	2027	Penyelenggaraan *event* tematik baru (kuliner, minat khusus, budaya), dan Diversifikasi wisata minat khusus (*geo tourism, wellness, heritage*, *agro*, religi); Penyusunan *Calender*			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
		of Event dan Penyelenggaraan *Event* Internasional Kawasan Pariwisata Provinsi Sibolga-Pandan, Sipirok-Padangsidimpuan, Bawomatoluo-Hilisimaetano-Sorake, Tanjung Pura-Tangkahan-Bukit Lawang-Sei Bingai, Karo-Dairi-Pakpak (Event Internasional), Luar Negeri (Digitalisasi Promosi)		Pemuda untuk partisipasi dalam penyelenggaraan *event* (*sport, e- sport*, dsb)	
	2028	Penyusunan *Calender of Event* dan Penyelenggaraan *Event* Internasional. Melaksanakan kerja sama Sponshorship dalam mendukung pelaksaan event; Pendataan, Inventarsasi dan penyusunan kajian awal terkait *event* tematik; Bersama dengan ASITA menyusun Paket-paket wisata; Melaksanakan kerja sama dengan influencer untuk mempromosikan pariwisata SUMUT; Melaksanakan kerja sama dengan *platform* pariwisata (traveloka, booking.com, tiket.com,dll).			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
		Kawasan Pariwisata Provinsi Sibolga-Pandan, Sipirok-Padangsidimpuan, Bawomatoluo-Hilisimaetano-Sorake, Tanjung Pura-Tangkahan-Bukit Lawang-Sei Bingai, Karo-Dairi-Pakpak (*Event* Internasional), Luar Negeri (Digitalisasi Promosi)			
	2029	Penyusunan *Calender of Event* dan Penyelenggaraan *Event* Internasional; Kemitraan dengan diaspora & pelaku pariwisata global, Integrasi penuh dengan *platform* pariwisata nasional dan global			
		Kawasan Pariwisata Provinsi Sibolga-Pandan, Sipirok-Padangsidimpuan, Bawomatoluo-Hilisimaetano-Sorake, Tanjung Pura-Tangkahan-Bukit Lawang-Sei Bingai, Karo-Dairi-Pakpak (*Event* Internasional), Luar Negeri (Digitalisasi Promosi)			
	2030	Penyusunan *Calender of Event* dan Penyelenggaraan *Event* Internasional; Kemitraan dengan diaspora &			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
		pelaku pariwisata global, Integrasi penuh dengan *platform* pariwisata nasional dan global Kawasan Pariwisata Provinsi Sibolga-Pandan, Sipirok-Padangsidimpuan, Bawomatoluo-Hilisimaetano-Sorake, Tanjung Pura-Tangkahan-Bukit Lawang-Sei Bingai, Karo-Dairi-Pakpak (*Event* Internasional), Luar Negeri (Digitalisasi Promosi)			
PP 9 EKONOMI KREATIF DAN INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI					
33. Sentra industri kreatif di Kawasan Sport Center Sumatera Utara	2025	Tidak ada	DISBUDPAREKRAF	Dinas PUPR: Pembangunan Sentra Industri Kreatif Biro Perekonomian: Menyusun Kajian pembentukan BLUD; Pembentukan BLUD pengelola Sentra Industri Kreatif. Dinas Perindag ESDM: Pendataan, Pelatihan & Pembinaan IKM Kreatif. Dinas Koperasi UMK: Pendataan, Pelatihan & Pembinaan UMKM	1.Pendataan Pelaku Industri Kreatif & Data UMKM Potensial; 2.Kurasi Pelaku Ekonomi Kreatif; 3.Fasilitasi HAKI bagi Pelaku Ekonomi Kreatif; 4.Pelaksanaan *Event* Ekonomi Kreatif secara rutin di Sentra Industri Kreatif; 5. Promosi terkait Sentra Industri Kreatif melalui media digital dan cetak;
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
				5. Dinas Kominfo: Penyediaan Fasilitas Digital (Internet, dll) di Kawasan Sentra Industri Kreatif; Publikasi Kegiatan	
34. Sumut digital market dan galeri virtual produk UMKM kreatif	2025	Evaluasi *Platform e-commerce* yang sudah ada (SIMITRA)	DISKOP UMKM	KOMINFO: Publikasi Media	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Koperasi dan UKM, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: 1.Pendataan UMKM binaan kab/kota 2.Kurasi Produk UMKM 3.Klasterisasi UMKM yang dapat dimasukkan ke dalam Galeri 4.*Capacity Building*
	2026	Desain dan pengembangan platform e-commerce; Kurasi awal 100 produk UMKM; Kemitraan dengan *platform* logistik & *payment gateway*. Manajemen Operasional *platform e-commerce*; Promosi dan sosialisasi *platform e-commerce*; PLUT		DISKOP UKM: Pendataan dan Kurasi Produk UMKM; Pelatihan dan Literasi Digital UMKM; Pembangunan dan Pengelolaan *Platform*; Promosi dan Akses Pasar; Pendampingan dan Skema Dukungan Lanjutan	
	2027	*Onboarding* UMKM; Pelatihan dan fasilitasi branding, dan manajemen toko online. Manajemen Operasional *platform e-commerce*; Promosi dan sosialisasi *platform* e-commerce; PLUT		DISKOP UKM: Pendataan dan Kurasi Produk UMKM; Pelatihan dan Literasi Digital UMKM; Pembangunan dan Pengelolaan *Platform*; Promosi dan Akses Pasar; Pendampingan dan Skema Dukungan Lanjutan	
	2028	Pengembangan *E-commerce* menjadi Market Place;			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
		Integrasi dengan katalog elektronik, Manajemen Operasional *platform e-commerce*; Promosi dan sosialisasi *platform* e-commerce; PLUT			
	2029	Galeri Virtual 3D; Kampanye digital nasional & regional, Manajemen Operasional *platform e- commerce*; Promosi dan sosialisasi *platform* e- commerce; PLUT			
	2030	Kurasi produk ekspor; Promosi virtual di *event* internasional (*virtual expo, marketplace* ASEAN), Manajemen Operasional *platform e-commerce* dan Promosi dan sosialisasi *platform e-commerce* ; PLUT			
PP 10 REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN					
35. Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	2025	Penyusunan SK Tim Forum Pemangku Kepentingan SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2030 Sosialisasi SK Tim forum dan *milestone* TPB SDGs 2025-2030	Bappelitbang	Seluruh Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs kab/kota se- Sumut tahun 2025-2030 Dukungan pelaksanaan skema BRS Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs :

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
		Updating target capaian SDGs tahun 2025 disesuaikan dengan dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 Penyusunan skema *Declaration and Registration System* Pembangunan fitur aplikasi pendaftaran BRS SDGs Replikasi, instalasi dan *Capacity Building* Aplikasi E-Monev SDGs (Inovasi) Menyusun Draf Rancangan Awal RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2030 *Launching* dan Pelaksanaan BRS *pilot project* sekaligus penyerahan sertifikat kepada 15 UMKM *Workshop* Penyusunan *Voluntary Local Review* (VLR) Kabupaten/Kota Modifikasi Aplikasi E-Monev SDGs *Workshop E-Monev* dengan Bappeda/Bapperida/Bappelitbang Kabupaten/Kota Menyusun *draf Monev* capaian SDGs tahun			1.identifikasi UMKM/IMK serta pelaku usaha 2.Dukungan pelaksanaan *North Sumatera SDGs Action Awards* 3.Dukungan proses penginputan E-Monev Kabupaten/Kota 4.Peningkatan Kapasitas untuk implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
		2025			
	2026	Inovasi *Business Registration System Policy TPB/SDGs*			
		Diseminasi Skema BRS TPB/SDGs (Kolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM pada acara FYP, BRS SDGs dijadikan kurikulum)			
		Menyusun Laporan Monev TPB/SGDs Tahun 2025			
		Finalisasi Draf RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026-2030 melalui desk per pilas TPB/SDGs			
		Launching Aplikasi e-Monev			
		Pelaksanaan skema *Declaration and Registration System BRS TPB/SDGs*			
		Diseminasi RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026-2030			
		Penyusunan Rancang Bangun aplikasi e-Monev SDGs (INOVASI)			
		Workshop Penyusunan *Voluntary Local Review (VLR)* Kabupaten/Kota			
		Menyusun draf Monev capaian SDGs tahun			
		2026			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
		11. Sosialisasi *North Sumatra SDGs Action Award 2027* (Indikator RAD TPB/SDGs, VLR dan Laporan Monev)			
	2027	Pembangunan aplikasi e-Monev SDGs (INOVASI) Menyusun Laporan Monev TPB/SGDs Tahun 2026 Forum *Business Registration System* (BRS) *North Sumatra SDGs Action Award 2027* (Indikator RAD TPB/SDGs, VLR dan Laporan Monev) *Desk* capaian pelaksanaan program unggulan tematik berbasis lokus prioritas SDGs Tahun 2026 *Workshop* Penyusunan *Voluntary Local Review* (VLR) Kabupaten/Kota Menyusun draf Monev capaian SDGs tahun 2027 Sosialisasi penyusunan rancang bangun Integrasi Satu Data SDGs Provinsi Sumatera Utara (INOVASI)			
	2028	Menyusun Laporan Monev TPB/SGDs Tahun 2027			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
		Finalisasi aplikasi e-Monev SDGs Penyusunan rancang bangun Integrasi Satu Data SDGs Provinsi Sumatera Utara (INOVASI) *North Sumatra SDGs Action Award 2028* *Launching* aplikasi e-Monev SDGs Diseminasi pemanfaatan aplikasi e-Monev SDGs *Desk* capaian pelaksanaan program unggulan tematik berbasis lokus prioritas SDGs Tahun 2027 *Workshop* Penyusunan *Voluntary Local Review (VLR)* Kabupaten/Kota Menyusun draf Monev capaian SDGs tahun 2028			
	2029	Menyusun Laporan Monev TPB/SGDs Tahun 2028 Pelaksanaan Skema BRS Finalisasi integrasi Satu Data SDGs pada aplikasi SADAINA *Launching* integrasi Satu Data SDGs pada aplikasi SADAINA Diseminasi pemanfaatan aplikasi e-Monev SDGs			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
		Desk capaian pelaksanaan program unggulan tematik berbasis lokus prioritas SDGs Tahun 2028 Penyusunan rancang bangun Integrasi Satu Data SDGs Provinsi Sumatera Utara (INOVASI) *North Sumatra SDGs Action Award 2029* Pelaksanaan Skema BRS Menyusun draf Monev capaian SDGs tahun 2029			
	2030	Menyusun Laporan Monev TPB/SGDs Tahun 2029 Desk capaian pelaksanaan program unggulan tematik berbasis lokus prioritas SDGs tahun 2029 *North Sumatra SDGs Action Award 2030* Menyusun Draf Laporan Monev RAD TPB/SGDs Tahun 2026-2030 *Workshop* Penyusunan *Voluntary Local Review* (VLR) Kabupaten/Kota Menyusun laporan akhir kegiatan SDGs			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
36. Kerja sama APIP dan APH dalam Pendampingan Proyek Strategis dan Kegiatan Unggulan Daerah melalui pendampingan sejak tahapan perencanaan, pelaksanaan dan serah terima kegiatan proyek strategis	2025	Penyusunan MoU antara APIP dengan APH (Kejaksaan Tinggi, Kepolisian) Pendampingan Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah	Inspektorat	Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) Perangkat Daerah yang memiliki Proyek Strategis	Inspektorat kab/kota: Koordinasi Pengawasan dengan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara terkait pelaksanaan Proyek Strategis yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota
	2026	Reviu Perencanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara Pendampingan Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara			
	2027	Reviu Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara Pelaksanaan Kolaborasi Pendampingan Proyek Strategis Daerah Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Proyek Strategis Daerah			
	2028	Reviu Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara Pelaksanaan Kolaborasi Pendampingan Proyek Strategis Daerah			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
		Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Proyek Strategis Daerah			
	2029	- Reviu Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara			
		Pelaksanaan Kolaborasi Pendampingan Proyek Strategis Daerah Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Proyek Strategis Daerah			
	2030	- Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Proyek Strategis Daerah			
PP 11. TRANSFORMASI DIGITAL DAN INOVASI TEKNOLOGI PADA PELAYANAN PUBLIK DAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT					
37. Pemanfaatan Satu Data SUMUT pusat data dan informasi pembangunan	2025	Tindak lanjut MoU terkait kerja sama teknis dengan BPS dan Diskominfo dalam pembangunan aplikasi Satu Data (SADAINA *Reborn*) Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD *Launching* SADAINA *Reborn* di Konreg PDRB ISEI (BPS dan Diskominfo) *Updating* SK Tim Pelaksana SADAINA *Reborn* Diseminasi aplikasi dan tupoksi tim SADAINA	Dinas Kominfo	Seluruh OPD menginput data statistik sektoral	Replikasi aplikasi, menyediakan SDM, menyiapkan regulasi terkait

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
	2026	Pemanfaatan SADAINA *Reborn* Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD Forum Satu Data tingkat Daerah Proses integrasi Satu Data dengan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Provsu Penyusunan Proses Bisnis integrasi SADAINA dan Data Geospasial Penyusunan Proses Bisnis integrasi SADAINA dan Data SDGs			
	2027	Pemanfaatan SADAINA *Reborn* Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD Forum Satu Data tingkat Daerah Pemanfaatan SADAINA dan Data Geospasial Pemanfaatan SMART SADAINA SDGs Proses bisnis integrasi SADAINA *Reborn* dengan Kabupaten/Kota			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
	2028	Pemanfaatan SADAINA *Reborn* Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD Forum Satu data tingkat Daerah Pengembangan fitur SADAINA (API) Peningkatan kapasitas user SADAINA *Reborn* Pemanfaatan dan replikasi SADAINA *Reborn*			
	2029	Pemanfaatan SADAINA *Reborn* Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD Forum Satu data tingkat Daerah Menyediakan API (*Application Programming Interface*) Peningkatan kapasitas user SADAINA *Reborn* Pemanfaatan dan replikasi SADAINA *Reborn*			
	2030	Menyediakan API (*Application Programming Interface*) Pemanfaatan SADAINA *Reborn*			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
		Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD Forum Satu data tingkat Daerah Monitoring dan Evaluasi			
PP 12. INFRASTRUKTUR DENGAN PRIORITAS JALAN, JEMBATAN, DAN IRIGASI YANG LANGSUNG BERDAMPAK PADA PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT LOKAL					
38. Pembangunan Ruas Jalan Baru Penghubung Wilayah Terisolir atau Strategis yang Merupakan kewenangan Provinsi	2025	Tidak ada	Dinas PUPR	Dinas Kominfo, untuk publikasi kegiatan, Dinas LHK mendukung proses penyusunan dokumen lingkungan, AMDAL dan izin pinjam pakai Hutan, Dinas Perhubungan untuk penyediaan Fasilitas Keselamatan Jalan, Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Inspektorat melaksanakan pengawasan	-Memberikan dukungan administratif atas pembangunan jalan yang berada di wilayah kewenangannya, mendukung penyediaan lahan pada trase jalan serta perizinan -Menyelaraskan program jalan dengan perencanaan pembangunan daerah dan usulan prioritas lokal. -Melaksanakan koordinasi teknis lapangan dan penyedia data kondisi eksisting jalan serta kebutuhan daerah.
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			
	2025	Tidak ada	Dinas PUPR		-Pemerintah Kabupaten/Kota: Menyediakan lahan, mengarahkan program RTLH (Air Minum dan Sanitasi), menetapkan penerima bantuan, dan mengalokasikan anggaran daerah. -Dinas Perumahan Rakyat kab/kota: Pelaksana utama di
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
39. Pemerataan Infrastruktur Layanan Dasar bagi Kawasan Afirmasi, Terluar, dan Terpencil untuk Mewujudkan Keadilan Pembangunan				Dinas LHK untuk penyediaan dokumen lingkungan, AMDAL, Dinas Kominfo untuk publikasi kegiatan, Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Inspektorat melaksanakan pengawasan	lapangan yang mengurus pendataan, verifikasi, penyaluran bantuan, pendampingan, monitoring, dan pelaporan. -Dinas PUPR kab/kota: Memberikan dukungan teknis konstruksi, membuat RAB, dan mengawasi pelaksanaan di lapangan. -Dinas Sosial kab/kota: Membantu memperbarui dan memverifikasi data kemiskinan lokal. -Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan pada kab/kota: Melakukan identifikasi penerima bantuan, sosialisasi, memfasilitasi gotong royong, serta membantu pemantauan di lapangan.
PP13. PENGEMBANGAN SISTEM LOGISTIK DAN TRANSPORTASI YANG MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN DAYA SAING					
40. Dukungan Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Melalui Pembangunan BRT dan Peningkatan Kereta *Commuter*	2025	Tidak ada	Dinas Perhubungan	Dinas Kominfo untuk publikasi Media, Dinas PUPR terkait penyelenggaraan Jalan Provinsi (jika trayek melalui jalan provinsi) Dinas LHK untuk penyediaan dokumen lingkungan dan AMDAL,	Dinas Perhubungan Kab/Kota Pelaksana operasional harian, koordinator lapangan. Kota Binjai: Dukungan penetapan lokasi lahan depo BRT Kab. Deli Serdang: Dukungan penetapan lokasi lahan depo BRT
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
				Biro Organisasi membentuk kelembagaan (BLUD) BRT Mebidang, Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Inspektorat melaksanakan pengawasan	
41. Subsidi Transportasi Bus Perintis untuk Daerah-Daerah Terpencil	2025	Tidak ada	Dinas Perhubungan	Dinas Kominfo untuk publikasi Media, Dinas PUPR terkait penyelenggaraan Jalan Provinsi (jika trayek melalui jalan provinsi) Dinas LHK untuk penyediaan dokumen lingkungan dan AMDAL, Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Inspektorat melaksanakan pengawasan	1.Koordinasi dan Penyediaan Data: Pemerintah kabupaten/kota berperan menyediakan data dan kebutuhan daerah terkait angkutan perintis serta berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi agar subsidi dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi wilayah terpencil yang membutuhkan akses transportasi. 2.Fasilitasi Pelaksanaan Program: Kabupaten/kota membantu pelaksanaan program subsidi dengan memastikan armada bus perintis dapat beroperasi di wilayahnya, menyediakan dukungan administratif, dan memantau pelaksanaan layanan agar berjalan lancar
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
					dan memenuhi kebutuhan masyarakat yaitu penyediaan fasilitas pendukung untuk kelancaran operasional, berupa lahan untuk titik keberangkatan 3.Penentuan Rute dan Kebijakan Lokal: Pemerintah daerah menetapkan rute bus perintis yang strategis sesuai kebutuhan wilayah dan sinkron dengan program nasional, serta mengeluarkan kebijakan pendukung agar subsidi bisa dimanfaatkan optimal untuk membuka keterisolasian daerah, yaitu pengusulan dan penetapan trayek dan sosialisasi program kepada masyarakat serta kesiapan infrastruktur jalan di kabupaten dalam kondisi layak dan aman, yang akan dilalui oleh trayek 4. Pengawasan dan Monitoring: Kabupaten/kota melakukan pemantauan operasional bus perintis di lapangan untuk memastikan layanan tetap berjalan dengan baik, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat di daerah terpencil.

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
PP 14. PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN DAN BERKETAHANAN TERHADAP BENCANA					
42. Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir	2025	Penetapan lokasi banjir Penyusunan DED (*Detail Engineering Design*) dan pemenuhan *readiness criteria* Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Simalungun pada Sungai Aek Natas, Sungai Kualuh, Sungai Aek Sirahar, Sungai Bah Lombut sepanjang 1.490 meter	Dinas PUPR	Dinas LHK untuk dokumen lingkungan dan AMDAL, BPBD menyusun kajian resiko bencana, rencana mitigasi, dan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat pada wilayah bencana, Diskominfo untuk publikasi kegiatan	Penyediaan Data dan Koordinasi: Kabupaten/kota berperan menyediakan data wilayah yang terdampak banjir serta kebutuhan teknis di lapangan dan melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi agar pembangunan bisa tepat sasaran dan efektif (BPBD) Fasilitasi Pelaksanaan dan Administrasi: Kabupaten/kota membantu kelancaran pelaksanaan pembangunan dengan menyediakan dukungan administratif, perizinan, penyediaan lahan, dan tenaga lokal di wilayahnya (PUPR) Pemeliharaan dan Pengawasan: Setelah pembangunan infrastruktur pengendali banjir dilakukan, pemerintah kabupaten/kota turut bertanggung jawab melakukan pemeliharaan, pengawasan, dan
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	Pengerjaan fisik Penyusunan DED (*Detail Engineering Design*) dan pemenuhan *readiness criteria* Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Sungai Suka, Sungai Humanga, Sungai Aek Sirahar sepanjang 648 meter			
	2029	Tidak ada			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
	2030	Tidak ada			pengendalian agar fasilitas yang dibangun tetap berfungsi sesuai perencanaan dan umur yang diharapkan (PUPR) Pemberdayaan Masyarakat dan Kolaborasi: Pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk pemerintah provinsi dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan pengendalian banjir melalui manajemen drainase, normalisasi sungai, dan pengelolaan ruang terbuka hijau (LHK, Dinas PKP kab/kota) Penyesuaian Kebijakan Lokal: Kabupaten/kota juga menetapkan kebijakan lokal yang mendukung implementasi program pengendalian banjir provinsi, termasuk pengelolaan tata ruang dan penggunaan teknologi mitigasi banjir (LHK, Dinas PKP kab/kota, BPBD)
	2025	tidak ada		PUPR:	

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
43. Pembangunan TPST Regional	2026	tidak ada	Dinas PUPR : pelaksana	-Penyiapan dokumen Lingkungan, -Dalam pembuatan FS dan DED, dan pembangunan infrastruktur serta pendukungnya, Dinas LHK : - Dukungan dalam proses penyusunan dokumen lingkungan hidup -Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, -Dinas Kominfo untuk publikasi media	Penyusunan peraturan atau SK terkait pengelolaan sampah terpilah Penyediaan dan penentuan lokasi Dukungan pengumpulan sampah terpilah oleh Dinas Lingkungan Hidup kab/kota Dukungan pengangkutan sampah terpilah ke tempat pengolahan Dukungan pemilahan sampah terpilah dan pra pengolahan Dukungan SDM
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			
44. Pembangunan PLTSa	2025	Tidak ada	DISPERINDAG ESDM	PUPR : Pembangunan TPST LHK: Pengelolaan Sampah Dinas Kominfo: Dukungan Publikasi Kegiatan	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: 1.Lahan dan wilayah untuk pembangunan PLTSa, 2.Penerapan Sistem
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
					Persampahan Terpilah 3.Perizinan 4.Penyusunan peraturan atau SK terkait pengelolaan sampah terpilah 5.Penyediaan dan penentuan lokasi 6.Dukungan pengumpulan sampah terpilah oleh Dinas Lingkungan Hidup kab/kota 7.Dukungan pengangkutan sampah terpilah ke tempat pengolahan 8.Dukungan pemilahan sampah terpilah dan pra pengolahan 9.Dukungan SDM
45 Pengembangan SPAL Regional	2025	Tidak ada	Dinas PUPR	Dinas LHK untuk penyediaan dokumen lingkungan dan AMDAL, PDAM dalam peningkatan layanan, Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Dinas kominfo untuk publikasi media	Perencanaan tata ruang (PKP Tata Ruang) 1.Membuat regulasi dan menerbitkan perizinan (LHK, DPMPTSP) 2.Sosialisasi kepada masyarakat (Dinas Kesehatan) 3.Dukungan penyediaan lahan (PKP Tata Ruang) 4.Menyediakan alokasi anggaran (BKAD) 5.Pembentukan kelembagaan untuk mengelola operasional IPLT (Biro Organisasi)
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
46. Pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati	2025	Rapat koordinasi, pembentukan tim *appraisal* dan pembentukan pokja rencana Pembangunan Taman Kehati	DLHK	1. Biro Pem Otda - SK Penlok 2. BPN - Sertifikat Lahan 3. Diskominfo - Publikasi Media	Dukungan terhadap pengadaan lahan Penetapan Taman Kehati pada RTRW kab/kota
	2026	Penyusunan dokumen DPPT dan pembebasan lahan			
	2027	Penyusunan dokumen FS, DED, dan dokumen administrasi lainnya			
	2028	Pekerjaan fisik di lapangan sesuai dengan Perdirjen KSDAE Nomor P.5 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan *Design* Dasar (*Design* Vegetasi dan *Design* Infrastruktur Taman Kehati)			
	2029	Tahap lanjutan kegiatan penanaman dan pemeliharaan vegetasi serta - Membuat Rencana Kesepakatan Bersama/ kerja sama Pembangunan Taman Kehati sebagai dukungan Pengembangan Kawasan Konservasi Taman Kehati			
	2030	Pembukaan dan peresmian Taman Kehati serta tahap lanjutan kegiatan penanaman			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
		Pemeliharaan vegetasi serta kegiatan pengembangan Pembentukan UPT Taman Keanekaragaman Hayati			
PP 15. MELANJUTKAN PEMBANGUNAN BERBASIS DESA					
47. Penguatan Ekonomi Desa untuk Mengurangi Ketergantungan pada Pusat Kota dengan Penguatan Ekonomi Lokal melalui Pembuatan *Master Plan* Desa Produktif dan Mandiri.	2025	Tidak ada		Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) Dinas Perkebunan (Pemberian bantuan/pelatihan pengembangan komoditas gula aren, kopi, dan kelapa kepada kelompok yang terdapat pada desa yang menjadi sasaran intervensi kegiatan ini)	-Menyediakan data potensi desa yang akurat termasuk peta sebaran komoditi unggulan. -Memperbaiki jalan produksi, pasar desa, gudang, sentra dan pengolahan -Memfasilitasi kerja sama antar desa atau antar BUMDes untuk memperkuat rantai pasok. -Memfasilitasi sertifikasi produk (halal, organik, SNI) untuk meningkatkan daya saing. -Pembinaan Penggunaan dana desa untuk ekonomi desa pada Lokus yang di intervensi
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			
48. Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan bagi Pengelola BUMDES	2025	Pendataan BUMDES/BUMDesma yang akan menerima pemanfaatan kegiatan 27 Kabupaten/Kota yang memiliki desa		Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) Disperindag, Dinas Koperasi UMKM, (Dukungan Pelatihan dan Keterampilan bagi pengelola	1.Menugaskan tenaga pendamping desa atau penyuluh ekonomi untuk mendampingi operasional BUMDES.

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
				BUMDES/Masyarakat Desa).	2.Memfasilitasi akses internet dan teknologi informasi untuk mendukung pemasaran digital. 3.Memfasilitasi sertifikasi kompetensi pengelola BUMDES melalui lembaga pelatihan resmi.
	2026	Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi pengelola BUMDES/BUMDesma Monitoring dan Evaluasi kegiatan Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Nias, Simalungun, Asahan, Dairi, Mandailing Natal, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Samosir, Tapanuli Tengah Utara, Tapanuli Tengah, Labuhanbatu Utara, Gunungsitoli, Padangsidimpuan, Karo, Toba, Labuhanbatu Selatan, Tapanuli Selatan, Labuhanbatu (20 Kabupaten/Kota)			
	2027	pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi pengelola BUMDes/BUMDesma Monitoring dan Evaluasi kegiatan *27 Kabupaten/kota yang memiliki desa			
	2028	pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
		pendampingan bagi pengelola BUMDES/BUMDesma Monitoring dan Evaluasi kegiatan *27 Kabupaten/kota yang memiliki desa			
	2029	pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi pengelola BUMDES/BUMDesma Monitoring dan Evaluasi kegiatan *27 Kabupaten/kota yang memiliki desa			
	2030	Tidak ada			
PP 16. MENINGKATKAN KETAHANAN SOSIAL DAN BUDAYA YANG MENDUKUNG SUASANA YANG HARMONIS, TOLERAN, DAN RUKUN					
49. Bantuan Hibah Rumah Ibadah di 33 Kabupaten/Kota	2025	-Penyusunan perubahan Pergub Hibah Rumah Ibadah dengan mekanisme penyaluran hibah yang memuat alokasi terhadap biaya operasional pengelola dan sarpras rumah ibadah Tahun 2025 -Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran	Biro KESRA	Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) Inspektorat (pendampingan menyeluruh dan tinjauan terhadap tata kelola pemberian bantuan hibah rumah ibadah)	-

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
		Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 -Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara			
	2026	-Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 -*Monitoring* dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara			
	2027	-Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 -Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
		33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara			
	2028	-Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 -Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara			
	2029	-Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 -Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara			
	2030	-Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
		-Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara			
50. Festival Seni dan Budaya Daerah	2025	Festival Bunga dan Buah, Pemetaan *Event* Budaya Potensial yang sudah dilaksanakan 3 tahun untuk ditingkatkan menjadi kalender *event* nasional (KEMENPAR) dan kalender *event* budaya (KEMENDIKBUD). Penyusunan *Calender of Event* 2026 Kawasan Pariwisata Provinsi Sibolga - Pandan, Sipirok - Padangsidimpuan, Bawomatoluo - Hilisimaetano - Sorake, Tanjung Pura-Tangkahan- Bukit Lawang-Sei Bingai, Karo-Dairi-Pakpak	DISBUDPAREKRAF	Dinas Perhubungan: Memastikan ketersediaan transportasi dan lalu lintas saat *event* internasional dilaksanakan Dinas Kesehatan: Dukungan Tenaga Kesehatan dan Ambulans Dinas Koperasi &UMKM: Pelatihan dan pendampingan UMKM untuk mendukung pelaksaan *event* internasional Dinas Kominfo: Memastikan ketersediaan jaringan digital saat pra *event*-*event*-pasca *event* internasional; publikasi kegiatan Satpol PP: Keamanan Pelaksanaan *Event* dan ketertiban penyelenggaraan acara	1.Memastikan ketersediaan anggaran dalam mendukung Proyek Strategis Provinsi; 2.Pelatihan dan pembinaan Sanggar Kesenian Daerah; 3.Pendataan/Inventarisasi potensi Festival Seni Budaya di masing-masing daerah; 4.Memastikan kontinyuitas pelaksaan Festival Seni Budaya di masing-masing daerah 5.Promosi pelaksaan Festival Seni-Budaya; 6.Penyusunan Kalender Budaya
	2026	Penyelenggaraan Event Budaya yang telah dilaksanakan 3 Tahun berturut untuk dinaikkan ke KhariSMA *Event* Nasional (KEN), Sinkronisasi *travel*			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
		pattern dan *travel package* dengan CoE Provinsi dan Nasional (KEN), Koordinasi dengan Ashita, *Travel*, penguatan sektor promosi, medsos, online, *influencer*. Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan kabupaten/kota terkait penyelenggaraan event. Rekomendasi Tema 2026 "Festival Bahari Pesisir Barat" → parade perahu hias, lomba layar tradisional, kuliner laut, tari dan musik pesisir. Waktu pelaksanaan pada musim libur anak sekolah, libur musim panas dan libur musim dingin Kawasan Pariwisata Provinsi Sibolga – Pandan dan Sipirok - Padangsidimpuan			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			
51. Edukasi dan Pembekalan Solidaritas, Ketahanan Sosial Dan Wawasan	2025	Tidak ada		Dinas Pendidikan (Koordinasi rekomendasi satuan pendidikan yang membutuhkan pembekalan terhadap	Replikasi pelaksanaan kegiatan Edukasi dan Pembekalan Solidaritas, Ketahanan Sosial Dan Wawasan Kebangsaan bagi
	2026	Tidak ada			
	2027	-Pendataan Sasaran Ormas dan Kelompok masyarakat pada daerah rawan konfilk di			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
Kebangsaan bagi Organisasi Masyarakat Dan Kelompok Masyarakat		Sumatera Utara di Tahun 2027 -Pelaksanaan Kegiatan edukasi wawasan kebangsaan dan Solidaritas bagi Ormas Tahun 2027 -Monitoring dan Evaluasi Tahun 2027 Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Samosir, Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kota Padangsidimpuan		edukasi wawasan kebangsaan) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	Organisasi Masyarakat Dan Kelompok Masyarakat di Kabupaten/kota
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			
PP 17. TERCIPTANYA KEHIDUPAN YANG LEBIH AMAN DAN TERTIB					
52. Patroli Gabungan untuk Narkoba di Pintu Masuk Narkoba dan Kawasan-Kawasan Kenakalan Remaja (Genk Motor).	2025	Tidak ada	Satpol PP	Kesbangpol (Penyediaan data dan peta daerah rawan narkoba) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	1.Melakukan koordinasi dengan Satpol PP Kabupaten/Kota terkait dukungan personel dalam pelaksanaan kegiatan.
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			

Proyek strategis	Tahun	Rencana Aksi dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Tapanuli Tengah
			Utama	Pendukung	
53. Pemberantasan Pengguna dan Bandar Narkoba melalui Pemindahan Gembong Narkoba dari Lapas ke Nusakambangan	2025	Tidak ada		Dinas Perhubungan (pengaturan lalu lintas untuk pemindahan gembong narkoba) Satpol PP (pendampingan saat pemindahan gembong narkoba)	2.Kesbangpol (Penyediaan data dan peta daerah rawan narkoba di Kab/Kota) 3.Penguatan pencegahan narkoba di pemerintahan daerah
	2026	Tidak ada			
	2027	Tidak ada			
	2028	Tidak ada			
	2029	Tidak ada			
	2030	Tidak ada			

Tabel 4.4 Keselarasan Program Nasional, Provinsi Sumatera Utara, dan Kabupaten Tapanuli Tengah

No	RPJM Nasional	No	RPJMD Provinsi Sumatera Utara	No	RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah	Mendukung Program RPJMN ke-	Mendukung Program RPJMD Provinsi ke-
1	Mencapai swasembada pangan, energi, dan air.	1	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal.	1	Peningkatan Kualitas Pendidikan	8	1
2	Penyempurnaan sistem penerimaan negara.	2	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas Dalam Berkarya dan Berprestasi	2	Peningkatan Kesempatan Kerja	15	1
3	Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.	3	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu.	3	Peningkatan Kualitas Kesehatan yang Merata	7	3
4	Pencegahan dan pemberantasan korupsi.	4	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah.	4	Peningkatan Ekonomi Rakyat	14	4, 9
5	Pemberantasan kemiskinan.	5	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru.	5	Peningkatan Daya Saing Ekonomi	15	5, 7, 8, 13

No	RPJM Nasional	No	RPJMD Provinsi Sumatera Utara	No	RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah	Mendukung Program RPJMN ke-	Mendukung Program RPJMD Provinsi ke-
6	Pencegahan dan pemberantasan narkoba.	6	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal.	6	Peningkatan Kemandirian Daerah	12	4, 10
7	Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.	7	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal).	7	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah	2, 3, 4	10, 11
8	Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi.	8	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi.	8	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Masyarakat	16	16, 17
9	Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.	9	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran.	9	Peningkatan Budaya dan Olahraga	17	16
10	Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.	10	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan.	10	Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak	10	2
11	Menjamin pelestarian lingkungan hidup.	11	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat.	11	Peningkatan Kualitas Infrastruktur	13, 14	12, 13

No	RPJM Nasional	No	RPJMD Provinsi Sumatera Utara	No	RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah	Mendukung Program RPJMN ke-	Mendukung Program RPJMD Provinsi ke-
12	Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani.	12	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal.	12	Peningkatan Ketahanan Daerah	9	15
13	Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersaitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan.	13	Pengembangan Sistem Logistik dan Transportasi yang Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Daya Saing.	13	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	11	14
14	Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan IKN serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya.	14	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana.	14	Pengembangan Desa dan Perencanaan Pembangunan	12, 14	15
15	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan SDA, termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.	15	Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa.	15	Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Lingkungan	6, 16	17
16	Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah.	16	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun.	16	Penguatan dan Pengembangan Ketahanan Pangan	1, 12	6
17	Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.	17	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib.				

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja didefinisikan sebagai keluaran atau hasil dari suatu kegiatan atau program yang telah atau akan dicapai terkait dengan penggunaan anggaran, dengan ukuran kuantitas dan kualitas yang dapat diukur. Indikator merupakan tanda yang berfungsi sebagai alat untuk mengukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program, sasaran, atau tujuan, yang dapat berupa keluaran (*output*), hasil (*outcome*), atau dampak (impact). Dampak (*impact*) mengacu pada kondisi yang ingin diubah sebagai hasil dari pembangunan atau layanan yang diperoleh melalui pencapaian hasil (outcome) dari beberapa program. Sementara itu, hasil (outcome) adalah kondisi yang ingin dicapai atau dipertahankan oleh penerima manfaat dalam periode waktu tertentu, yang mencerminkan keberhasilan keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

Penetapan Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2030

No	Indikator	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	73,34	74,55 – 76,76	74,91-77,16	75,27-77,56	75,63-77,96	75,99-78,36	76,35-78,76
2	Persentase Penduduk Miskin (%)	11,80	10,20 – 9,53	9,68-8,99	9,19-8,48	8,72-8	8,28-7,54	7,86-7,11
3	PDRB Per Kapita (Rp juta)	34,62	35,40	40,78	46,97	54,10	70,19	80,85
4	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,15	4,33 – 4,47	4,34-4,5	4,35-4,53	4,36-4,56	4,37-4,59	4,38-4,62
5	Indeks Pelayanan Publik (Poin)	2,26	2,30	2,36	2,41	2,47	2,53	2,60
6	Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)	N/A	70,00	71,89	73,84	75,84	77,89	80,00
7	Indeks Harmoni Indonesia (Poin)	N/A	6,30	6,40	6,50	6,60	6,70	6,80
8	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Poin)	N/A	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00
9	Indeks Infrastruktur (Poin)	N/A	65,00	66,42	67,86	69,34	70,85	72,39
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	76,27	81,81	81,98	82,15	82,32	82,50	82,67
11	Indeks Desa (%)	0,6023 (IDM)	57,00	58,39	59,54	61,24	63,29	65,00

Tabel 4.6 Penyelarasan Indikator Kinerja Utama Pembangunan RPJMN Nasional Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029, dan RPMJD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029

No	RPJMN Tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kab/Kota Tahun 2025-2029		
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,73	74,54	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,73	74,54	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	71,93-72,11	72-94-73,10
2	Kesehatan Ibu dan Anak			Kesehatan Ibu dan Anak			Kesehatan Ibu dan Anak		
	a Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	146	94	a Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	146	94	a Kasus Kematian Ibu (Kasus)	4,00	4,00
	b Prevalensi stunting pendek dan sangat pendek pada balita (%)	16,4	12,3	b Prevalensi stunting pendek dan sangat pendek pada balita (%)	16,4	12,3	b Prevalensi stunting pendek dan sangat pendek pada balita (%)	29,25	17,05
3	Insidensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk (kasus)			Insidensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk (kasus)			Insidensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk (kasus)		
	a Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	90	90	a Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	90	90	a Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	90,00	90,00
	b Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	90	90	b Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	90	90	b Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment	90,00	90,00

No	RPJMN Tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kab/Kota Tahun 2025-2029		
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
							success rate) (%)		
4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,6	99	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,6	99	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,60	98,60
5	Hasil Pembelajaran			Hasil Pembelajaran			Hasil Pembelajaran:		
	a Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:	-	-	a Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:	-	-			
	- Literasi membaca	6,06-12,12	27,27-30,30	- Literasi membaca	6,06-12,12	27,27-30,30			
	- Numerasi	0,00-3,03	6,06-9,09	- Numerasi	0,00-3,03	6,06-9,09			
	b Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:	-	-	b Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:	-	-	a Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
	- Literasi membaca	35,99-38,49	41,53-44,03	- Literasi membaca	35,99-38,49	41,53-44,03	- Literasi SD	53,81	57,50
							- Literasi SMP	62,39	63,80

No	RPJMN Tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kab/Kota Tahun 2025-2029		
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
	- Numerasi	33,70-36,20	37,70-40,20	- Numerasi	33,70-36,20	37,70-40,20	- Numerasi SD	53,81	56,50
							- Numerasi SMP	62,39	65,50
	c Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	10,30-10,33	10,83-10,84	c Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	10,3-10,33	10,83-10,84	b Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,17-9,52	9,68-10,10
	d Harapan Lama Sekolah	13,51-13,63	13,86-13,87	d Harapan Lama Sekolah	13,51-13,63	13,86-13,87	c Harapan Lama Sekolah	13,59-13,79	13,86-14,10
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi(%)	11,12	11,12-11,40	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi(%)	11,12	11,12-11,40	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi(%)		
7	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	71,1	76,59	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	71,1	76,59	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	55,21	64,25
8	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96-7,46	2,82-3,82	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96-7,46	2,82-3,82	Tingkat Kemiskinan (%)	10,20 – 9,53	8,28-7,54
9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	29,27	40,61	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	29,27	40,61	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	39,68	39,68
10	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)			Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)			Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)		

No	RPJMN Tahun 2025-2029				RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029				RPJMD Kab/Kota Tahun 2025-2029			
		Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029		Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029		Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
11	a	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	19,00-19,50	15,40-15,10	a	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	19,00-19,50	15,40-15,10	a	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	11,61 – 11,80	13,43-13,66
	b	Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	5,20	7,80	b	Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	5,20	7,80	b	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)		
12	Pengembangan Pariwisata				Pengembangan Pariwisata				Pengembangan Pariwisata			
	a	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,42	2,73	a	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,42	2,73	a	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,32-1,39	1,46-1,51
	b	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	300,00-350,00	421,14	b	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	300,00-350,00	421,14	b	Wisatawan Mancanegara (Jiwa)		
13	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)		5,45	5,43	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)		5,45	5,43				
14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN				Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN				Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN			
	a	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) (%)	3,20	3,51	a	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) (%)	3,20	3,51	a	Proporsi Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Non Pertanian pada Level Kabupaten (%)	70,00	90,00

No	RPJMN Tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kab/Kota Tahun 2025-2029		
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
	b Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,63	4,06	b Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,63	4,06	b Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	2,50	3,97
	c Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,79	0,81	c Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,79	0,81	c Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,07	0,20
	d Return on Asset (RoA) BUMD (%)	1,24	1,97	d Return on Asset (RoA) BUMD (%)	1,24	1,97	d Return on Asset (RoA) BUMD (%)	6,25	9,04
15	Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik			Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik			Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik		
	a Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,27-5,56	4,74-5,20	a Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,27-5,56	4,74-5,20	a Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,65-7,49	7,19-7,17
	b Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	43,00	50,40	b Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	43,00	50,40			
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	59,29-61,67	59,48-63,87	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	59,29-61,67	59,48-63,87	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	67.00-69.50	71.00-73.50
17	Tingkat Penguasaan IPTEK			Tingkat Penguasaan IPTEK					
18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		
	a Indeks Ekonomi Hijau Daerah	51,12	51,18	a Indeks Ekonomi Hijau Daerah	51,12	51,18	a Indeks Ekonomi Hijau Daerah		

No	RPJMN Tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kab/Kota Tahun 2025-2029		
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
	b Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	18,42	21,49	b Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	18,42	21,49	b Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	20,00	27,66
19	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6,00	6,90	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6,00	6,90	Indeks Masyarakat Digital	41,25	47,07
20	Koefisien Variasi Harga antar Wilayah Tingkat Provinsi	10,10	9,50	Koefisien Variasi Harga antar Wilayah Tingkat Provinsi	10,10	9,50	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok (%)		
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,7	29,76-30,04	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,7	29,76-30,04	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	19,00	17,99
22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	16,45-16,54	17,13-17,41	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	16,45-16,54	17,13-17,41	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	1,00-3,00	1,51-3,82
23	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan		
	a Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%)	2,26	2,33	a Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah (%)	2,26	2,33	a Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi (%)		
	b Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (%)	74,36	81,01	b Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (%)	74,36	81,01	b Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (%)		

No	RPJMN Tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kab/Kota Tahun 2025-2029		
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
	c Persentase Desa Mandiri (%)	8.44	8,93	c Persentase Desa Mandiri (%)	8.44	8,93	c Persentase Desa Mandiri (%)	0,00	4,40
24	Indeks Materi Hukum Proksi di Daerah: Indeks Reformasi Hukum (IRH)	70	71,5	Indeks Materi Hukum Proksi di Daerah: Indeks Reformasi Hukum (IRH)	70	71,5	Indeks Reformasi Birokrasi	60-70	65,07-75,18
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	3,71	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	3,71	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,55	3,91
26	Indeks Pelayanan Publik	3,57	3,69	Indeks Pelayanan Publik	3,57	3,69	Indeks Pelayanan Publik	70,89	72,70
27	Indeks Integritas Nasional	66,78	69,51	Indeks Integritas Nasional	66,78	69,51	Indeks Integritas Nasional	0,00	0,00
28	Disesuaikan dengan karakteristik daerah. Usulan proksi:			Disesuaikan dengan karakteristik daerah. Usulan proksi:			Disesuaikan dengan karakteristik daerah. Usulan proksi:		
	a Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah (%)	70,00	75,70	a Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah (%)	70,00	75,70	a Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah (%)	75,00	100,00
	b Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM (%)	60,00	70,00	b Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM (%)	60,00	70,00	b Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM (%)	70,00	73,61
29	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	58,50	62,00	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	58,50	62,00	Indeks Rasa Aman (Poin)	50,00	72,82

No	RPJMN Tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kab/Kota Tahun 2025-2029		
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
30	Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)	82,58-85,83	86,83-90,08	Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)	82,58-85,83	86,83-90,08	Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)	70,00	77,89
31	Rasio Pajak terhadap PDB (%)			Rasio Pajak terhadap PDB (%)			Rasio Pajak terhadap PDB (%)	0,38-0,48	0,46-0,57
32	Tingkat Inflasi (%)	1,80-3,80	1,40-3,70	Tingkat Inflasi (%)	1,80-3,80	1,40-3,70	Tingkat Inflasi (%)	1,00-3,00	1,00-3,00
33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan			Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan			Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan		
	a Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	28,77	33,92	a Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	28,77	33,92			
	b Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,13	0,14	b Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,13	0,14			
	c Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah)	8.103.064,03	10.402.072,39	c Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah)	8.103.064,03	10.402.072,39			
	d Total Kredit/PDRB (%)	25,70	31,49	d Total Kredit/PDRB (%)	25,70	31,49			
34	Inklusi Keuangan (%)	97,52	97,88	Inklusi Keuangan (%)	97,52	97,88	Indeks Akses Keuangan Daerah	3,26	3,41
35	Disesuaikan dengan karakteristik daerah			Disesuaikan dengan karakteristik daerah			Disesuaikan dengan karakteristik daerah		
	Jumlah Kerjasama Provinsi/Kabupaten/ Kota Kembar/ Bersaudara (Sister Province/Sister City)			Jumlah Kerjasama Provinsi/Kabupaten/Kota Kembar/ Bersaudara (Sister Province/Sister City)					
36	Disesuaikan dengan karakteristik daerah			Disesuaikan dengan karakteristik daerah			Disesuaikan dengan karakteristik daerah		

No	RPJMN Tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kab/Kota Tahun 2025-2029		
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
	(Asia Power Indeks - Military Capability)			(Asia Power Indeks - Military Capability)			(Asia Power Indeks - Military Capability)		
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,44 - 55,48	57,56 - 57,67	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,44 - 55,48	57,56 - 57,67	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	60,00	67,87
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	81,17 - 81,2	82,62 - 82,79	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	81,17 - 81,2	82,62 - 82,79	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	75,00	80,00
39	Indeks Pembangunan Keualitas Keluarga	71,04	73,67	Indeks Pembangunan Keualitas Keluarga	71,04	73,67	Indeks Pembangunan Keluarga (Poin)	48,88-57,64	49,84-57,64
40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,407	0,370	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,407	0,370	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,41	0,380-0,350
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,562	0,581	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,562	0,581			
42	Kualitas Lingkungan Hidup			Kualitas Lingkungan Hidup			Kualitas Lingkungan Hidup		
	a Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,20	77,87	a Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,20	77,87	a Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	81,81	82,50
	b Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	10,00	15,00	b Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	10,00	15,00			
	c Pengelolaan Sampah			c Pengelolaan Sampah			c Pengelolaan Sampah		
	- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas	16,00	28,00	-Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengelolaan Sampah (%)	16,00	28,00	-Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas	20,81	21,21

No	RPJMN Tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kab/Kota Tahun 2025-2029		
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
	Pengelolaan Sampah (%)						Pengelolaan Sampah (%)		
	- Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	62,00	100,00	- Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	62,00	100,00			
43	Ketahanan Energi, Air dan Pangan			Ketahanan Energi, Air dan Pangan			Ketahanan Energi, Air dan Pangan		
	a Ketahanan Energi			a Ketahanan Energi			a Ketahanan Energi		
	- Konsumsi listrik per kapita (kWh)	850,00	1.282,00	- Konsumsi listrik per kapita (kWh)	850,00	1.282,00	- Konsumsi listrik per kapita (kWh)	406-501	569,57-685,4
	- Intensitas energi primer (SBM/ Rp Miliar)	170,57	141,18	- Intensitas energi primer (SBM/ Rp Miliar)	170,57	141,18			
	b Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (prevalence of Undernourishment) (%)	7,35	4,48	b Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (prevalence of Undernourishment) (%)	7,35	4,48	b Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (prevalence of Undernourishment) (%)	6,50 - 6,00	3,89-3,3
	c Ketahanan Air			c Ketahanan Air			c Ketahanan Air		
	- Kapasitas tampungan air (m3/kapita)			- Kapasitas tampungan air (m3/kapita)			- Kapasitas Air Baku (m3/kapita)	1	5

No	RPJMN Tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kab/Kota Tahun 2025-2029		
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
	- Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpiaan (%)	40,95	53,00	- Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpiaan (%)	40,95	53,00	- Akses rumah tangga terhadap air minum aman (%)	0,50	5,49
44	Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level provinsi)	157,53	152,55 - 147,69	Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level provinsi)	157,53	152,55 - 147,69	Indeks Risiko Bencana (IRB)	172,42	140,83
45	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)			Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)			Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Juta ton eq2)		
	a Kumulatif	10,06	12,92	a Kumulatif	10,06	12,92			
	b Tahunan	19,04	25,38	b Tahunan	19,04	25,38	a Tahunan	142.488,58	242.844,49

Tabel 4.7 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2030

No	Indikator	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	**Aspek Geografi dan Demografi**							
1	Indeks Ketahanan Pangan (Poin)	73,81	74,00	75,16	76,34	77,54	78,76	80,00
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	6,66	6,50 - 6,00	5,72-5,17	5,03-4,45	4,42-3,83	3,89-3,3	3,42-2,84
3	Konsumsi Listrik Per Kapita (kWh/Kapita)	N/A	406-501	441,86-541,83	480,88-585,99	523,35-633,75	569,57-685,4	619,87-741,26
4	Kapasitas Air Baku (m^3/detik)	N/A	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
5	Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman	N/A	0,50	0,91	1,66	3,02	5,49	10,00
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	76,27	81,81	81,98	82,15	82,32	82,50	82,67
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Ton Co_2 Eq)	N/A	142.488,58	164.124,30	189.045,24	217.750,21	242.844,49	279.718,44
8	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	N/A	10,00	10,94	11,96	13,08	14,31	15,65
9	Indeks Risiko Bencana (Poin)	181,49	172,42	163,79	155,60	147,82	140,83	133,41
10	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	20,71	20,81	20,91	21,01	21,11	21,21	21,31
11	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	2,11	2,02	1,97	1,93	1,88	1,83	1,77
12	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km^2)	179,92	183,56	187,18	190,78	194,36	197,92	201,43
13	Rasio penduduk ber-KTP (%)	94,42	95,20	96,00	96,80	97,60	98,50	99,40

No	Indikator	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
14	Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 (%)	93,16	94,32	95,50	96,00	97,20	98,33	99,00
II	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**							
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,15	4,33 – 4,47	4,34-4,5	4,35-4,53	4,36-4,56	4,37-4,59	4,38-4,62
2	Persentase Penduduk Miskin (%)	11,8	10,20 – 9,53	9,68-8,99	9,19-8,48	8,72-8	8,28-7,54	7,86-7,11
3	Gini Ratio (Poin)	0,234	0,230 – 0,240	0,227-0,237	0,224-0,234	0,221-0,231	0,218-0,228	0,215-0,225
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,45	7,65-7,49	7,52-7,4	7,41-7,33	7,3-7,25	7,19-7,17	7,09-7,09
5	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	73,34	74,55 – 76,76	74,91-77,16	75,27-77,56	75,63-77,96	75,99-78,36	76,35-78,76
6	Umur Harapan Hidup (Tahun)	71,96	71,93-72,11	72,18-72,36	72,43-72,61	72,68-72,85	72-94-73,10	73,19-73,35
7	Prevalensi stunting (%)	32,3	29,25	26,20	23,15	20,10	17,05	14,00
8	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8,92	9,17-9,52	9,30-9,67	9,43-9,81	9,55-9,96	9,68-10,10	9,81-10,25
9	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,5	13,59-13,79	13,66-13,87	13,73-13,95	13,79-14,02	13,86-14,10	13,93-14,18
10	Literasi SD (Poin)	52,84	53,81	54,50	55,00	56,50	57,50	58,50
11	Literasi SMP (Poin)	57,25	62,39	62,50	63,00	63,50	63,80	64,00
12	Numerasi SD (Poin)	52,84	53,81	54,50	55,70	56,00	56,50	57,00

No	Indikator	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
13	Numerasi SMP (Poin)	57,25	62,39	63,70	64,50	65,00	65,50	66,00
14	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun	76,66	77,20	77,80	78,00	78,10	78,50	79,00
15	Angka Partisipasi Sekolah 7-15 Tahun	99,38	99,59	99,60	99,61	99,62	99,63	99,64
16	Angka Partisipasi Sekolah 7-18 Tahun Kesetaraan	2,18	2,20	2,50	2,80	3,10	3,40	3,70
17	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidikan	87,19	89,20	90,00	92,25	94,45	97,50	98,00
18	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Poin)	N/A	50,00	51,86	53,78	55,78	57,85	60,00
19	Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	91,41	98,60	98,60	98,60	98,60	98,60	98,60
20	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	40,72	39,68	39,67	39,66	39,65	39,68	40,00
21	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	0,042	0,071	0,100	0,128	0,157	0,185	0,214
22	Indeks Harmoni Indonesia (Poin)	N/A	6,30	6,40	6,50	6,60	6,70	6,80
23	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Poin)	N/A	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00
24	Indeks Perlindungan Anak (Poin)	55,15	55,80	56,10	56,40	56,70	57,00	57,30
25	Indeks Pembangunan Keluarga (Poin)	56,74	48,88-57,64	49,12-57,64	49,36-57,64	49,6-57,64	49,84-57,64	50,08-57,64

No	Indikator	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
26	Indeks Pembangunan Gender (Poin)	95,38	95,70	95,90	96,10	96,30	96,50	96,70
27	Indeks Pemberdayaan Gender (Poin)	79,25	79,50	80,40	81,30	82,20	83,10	84,00
28	Indeks Ketimpangan Gender (Poin)	0,438	0,410	0,390	0,380	0,375	0,365	0,355
29	Jumlah Kematian Ibu (Kasus)	4	4	4	4	4	4	4
30	Angka Kematian Bayi	0,85	2,34	2,19	2,04	1,89	1,74	1,60
31	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan ketahanan Keluarga	N/A	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00
32	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	68,57	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
33	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	N/A	36,00	46,00	55,00	61,00	70,00	80,00
34	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan terakreditasi Paripurna	11,53	11,53	11,53	19,23	19,23	19,23	19,23
35	Bed Occupation Ratio (BOR)	61,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
36	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
37	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	9	9	10	11	12	13	14

No	Indikator	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
39	Indeks Kesejahteraan Sosial (Poin)	N/A	58,35	60,50	63,00	65,50	68,00	70,50
40	Persentase PPKS yang tertangani (%)	26,00%	26,00%	27,00%	28,00%	29,00%	30,00%	31,00%
41	Persentase atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional (%)	25,00	25,00	25,00	25,00	30,00	30,00	35,00
42	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	0,00	0,00	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00
III	**Aspek Daya Saing Daerah**							
1	Angka Ketergantungan (Per 100 Penduduk)	48,03	46,59	45,19	43,83	42,52	41,24	40,00
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	11,26	11,61 – 11,80	12,04-12,24	12,49-12,7	12,95-13,17	13,43-13,66	13,93-14,17
3	Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum (%)	1,33	1,32-1,39	1,35-1,42	1,38-1,45	1,42-1,48	1,46-1,51	1,5-1,54
4	Indeks Akses Keuangan Daerah (Poin)	3,19	3,26	3,30	3,33	3,37	3,41	3,43
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	75,72	77,19	78,69	80,23	81,79	83,38	85,00
6	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	2,50	2,63	2,90	3,17	3,44	3,70	3,97
7	Indeks Inovasi Daerah (Poin)	22,62	40	41	42	43	44	45
8	Indeks Ekonomi Hijau (Poin)	N/A	10,00					25,00
9	Indeks Ekonomi Biru (Poin)	N/A	20,00	20,32	20,64	20,97	21,30	21,64

No	Indikator	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Poin)	N/A	52,57	53,63	54,72	55,83	56,95	58,11
11	Indeks Masyarakat Digital (Poin)	40,34	41,25	42,35	43,45	45,50	47,07	48,00
12	Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB (%)	20,65	19,00	18,74	18,49	18,24	17,99	17,75
13	Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB (%)	N/A	1,00-3,00	1,11-3,19	1,23-3,39	1,36-3,6	1,51-3,82	1,68-4,06
14	Indeks Infrastruktur (Poin)	N/A	65,00	66,42	67,86	69,34	70,85	72,39
15	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (Poin)	N/A	50,00	53,48	57,20	61,19	65,44	70,00
16	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (%)	83,53	86,04	88,62	91,28	94,01	96,83	99,74
17	Indeks Desa (%)	0,6023 (IDM)	57,00	58,39	59,54	61,24	63,29	65,00
18	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,18	0,38-0,48	0,4-0,5	0,42-0,52	0,44-0,54	0,46-0,57	0,49-0,6
19	Inflasi (%)	2,94	1,00-3,00	1,00-3,00	1,00-3,00	1,00-3,00	1,00-3,00	1,00-3,00
20	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	0,066	0,11	0,155	0,177	0,20	0,22	0,266

No	Indikator	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
21	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rupiah/Tenaga Kerja)	57,648	62,392	65,512	68,787	72,227	75,838	79,630
22	Persentase Desa Mandiri (%)	0	1,26	1,89	2,52	3,14	4,40	5,03
23	Persentase pengentasan desa tertinggal	0	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89
24	Persentase peningkatan status desa mandiri	0,00	1,26	0,62	0,62	0,62	1,26	0,62
IV	**Aspek Pelayanan Umum**							
A	**Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif**							
1	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	CC	60-70	61,23-71,26	62,48-72,54	63,76-73,85	65,07-75,18	66,4-76,53
2	Indeks Reformasi Hukum (Poin)	51,4	53	54,00	55,00	56,00	57,00	58,00
3	Indeks SPBE (Poin)	2,38	2,60	2,80	3,30	3,50	3,70	4,00
4	Indeks Pelayanan Publik (Poin)	3,47	3,55	3,64	3,73	3,81	3,91	4,00
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	84,36 (B)	85,46	86,69	87,75	88,86	89,00	90,30
6	Indeks Integritas Nasional (Poin)	70,44	70,89	71,34	71,79	72,24	72,70	73,16
B	**Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial**							
1	Persentase Penegakan Perda (%)	75,00	75,00	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Capaian Aksi HAM (%)	N/A	70,00	70,89	71,78	72,69	73,61	74,54
3	Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)	N/A	70,00	71,89	73,84	75,84	77,89	80,00
4	Indeks Rasa Aman (Poin)	N/A	50,00	54,93	60,34	66,29	72,82	80,00

No	Indikator	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesakan (%)	97,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C	**Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan**							
1	Indeks Daya Saing Daerah (Poin)	3,19	3,25	3,31	3,37	3,44	3,50	3,57
	Indikator Kinerja Kunci							
A	**Pendidikan**							
1	Iklim Keamanan SD	69,40	70,87	71,52	72,20	73,50	74,90	75,50
2	Iklim Keamanan SMP	68,84	69,78	70,80	71,90	73,25	74,50	75,50
3	Iklim Kebhinekaan SD	70,93	70,93	71,10	71,70	72,25	72,65	73,00
4	Iklim Kebhinekaan SMP	74,25	74,25	74,70	75,00	75,50	76,00	76,50
5	Iklim Inklusivitas SD	52,39	55,17	57,05	57,75	58,10	58,80	59,25
6	Iklim Inklusivitas SMP	57,09	57,46	57,90	58,10	58,60	59,25	59,50
7	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum muatan lokal	N/A	15,00	25,00	45,00	60,00	70,00	80,00
8	Kualitas Pembelajaran SD	63,10	63,10	63,50	63,80	64,00	64,20	64,50
9	Kualitas Pembelajaran SMP	65,17	65,17	65,25	65,80	66,10	66,30	66,70
10	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang diterbitkan/diperbarui	N/A	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00
11	Jumlah Pengembangan Bahasa dan Sastra	N/A	2	2	2	3	3	3

No	Indikator	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
B	**Kesehatan**							
	DINAS KESEHATAN							
1	Jumlah Kematian Balita	0	1	3	3	3	3	3
2	Cakupan imunisasi bayi lengkap	52,00	80,00	85,00	90,00	93,00	95,00	95,00
3	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	39,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan	N/A	77,00	78,00	79,00	79,50	80,00	80,00
5	Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan	50,00	50,00	60,00	60,00	60,00	70,00	70,00
6	Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	5,00	5,00	9,00	12,00	18,00	20,00	20,00
8	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	54,80	54,80	56,30	57,80	58,80	69,80	69,80
	RUMAH SAKIT UMUM PANDAN							
1	Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00
2	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan di Kabupaten	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

No	Indikator	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan	15,00	16,00	16,50	16,50	16,50	17,00	17,00
C	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**							
1	Jalan dalam kondisi baik (%)	43,76	46,12	48,61	51,24	54,01	56,93	60,00
2	Saluran irigasi dalam kondisi baik (%)	N/A	30,00	33,23	36,80	40,76	45,14	50,00
3	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	N/A	20,00	20,00	20,00	20,00	22,50	25,00
4	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob	N/A	20,00	20,00	20,00	20,00	22,50	25,00
5	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati hunian dengan Akses Sanitasi (Air limbah Domestik Layak dan Aman)	N/A	40,00	40,00	42,00	44,00	46,00	48,00
7	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	N/A	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00
8	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	N/A	40,00	42,00	44,00	46,00	48,00	50,00
9	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	N/A	50,00	52,00	54,00	56,00	58,00	60,00

No	Indikator	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	N/A	50,00	52,00	54,00	56,00	58,00	60,00
11	Tingkat Kemantapan Jalan	61,12	63,00	65,00	67,00	69,00	71,00	73,00
D	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**							
1	Rumah tangga dengan akses sanitasi layak (%)	N/A	62,00	65,24	68,65	72,25	76,02	80,00
2	Rumah tangga dengan akses air minum layak (%)	N/A	80,00	83,65	87,47	91,46	95,64	100,00
3	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	N/A	42,96	43,75	44,56	45,39	46,23	47,08
4	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 ga yang Ditangani	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Persentase PSU Permukiman yang Sudah Dilengkapi	N/A	80,00	85,00	88,75	92,50	96,25	100,00
7	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan	N/A	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum PSU							
E	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**							
1	Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)	53,85	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00
2	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	N/A	0,12	0,12	0,20	0,24	0,30	0,30
3	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	N/A	65,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00
4	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	N/A	65,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00
5	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	N/A	85,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Persentase Penanganan Pasca Bencana	N/A	85,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F	**Sosial**							
1	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang	NA	80,30	80,60	80,90	81,20	81,50	81,80

No	Indikator	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Melaksanakan Pelayanan Sosial di Diluar Panti Rehabilitasi Sosial							
2	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Diluar Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	NA	80,30	80,60	80,90	81,20	81,50	81,80
3	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	55,00	56,50	58,00	59,50	61,00	62,50	64,00
4	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang meningkat kualitas dalam pelayanan sosial	75,00	75,00	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	84,77	85,00	85,50	86,00	86,50	87,00	87,50
6	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	83,26	83,50	84,00	84,50	85,00	85,50	86,00
7	Persentase Lansia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	85,19	85,50	86,00	86,50	87,00	87,50	88,00

No	Indikator	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
8	Persentase Gelandangan/Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	82,36	82,50	83,00	83,50	84,00	84,50	85,00
9	Persentase Penerima Manfaat Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	27,0	27,1	27,2	27,3	27,4	27,5	27,6
10	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Fakir Miskin	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Persentase Korban Bencana Alam , Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana	80,97	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00
12	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang meningkat Kesiapsiagaannya	70,00	72,00	73,00	75,00	75,00	78,00	80,00
13	Persentase Taman Makam Pahlawan Terkelola dengan baik	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
G	**Tenaga Kerja**							
1	Persentase Kabupaten/Kota Menyusun Rencana Tenaga Kerja	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	70,00	75,00	75,00	80,00	80,00	85,00	85,00

No	Indikator	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	50,90	55,21	57,96	61,59	62,85	64,25	67,46
4	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	32,00	40,00	45,00	53,00	60,00	65,00	70,00
5	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan hak-hak Pekerja dan Dialog Sosial	11.432	11.686	11.989	12.231	12.389	12.578	12.871
H	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**							
1	Tingkat Partisipasi Angkatan kerja Perempuan (%)	66,75	67,00	67,50	68,00	68,50	69,00	69,50
2	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	31,25	32,50	35,00	37,50	40,00	42,00	44,00
3	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Indeks Pemenuhan hak Anak (IPHA)	N/A	58,50	59,50	60,50	61,50	62,50	63,50

No	Indikator	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	N/A	48,00	49,44	50,92	52,45	54,02	55,65
I	**Pangan**							
1	Skor Pola Pangan Harapan (Poin)	77,30	77,35	77,55	77,90	78,50	78,50	80,10
J	**Pertanahan**							
1	Jumlah Kasus yang Diselesaikan (kasus)	3	4	4	4	4	4	4
2	Jumlah Kasus yang Terdaftar (kasus)	4	4	4	4	4	4	4
3	Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Penatagunaan Tanah	N/A	15,00	30,00	50,00	70,00	85,00	95,00
5	Pembangunan Sistem Informasi Pertanahan	N/A	10,00	25,00	45,00	65,00	80,00	90,00
K	**Lingkungan Hidup**							
1	Timbulan Sampah (Ton)	N/A	66.000,00	64.753,82	63.531,17	62.331,61	61.154,69	60.000,00

No	Indikator	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Indeks Kualitas Air	69,00	85,72	85,92	86,12	86,32	86,52	86,72
4	Indeks Kualitas Udara	95,80	83,65	83,85	84,05	84,25	84,45	84,65
5	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	52,65	71,69	71,76	71,83	71,90	71,97	72,04
6	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan	100,00	75,00	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00
7	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	N/A	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00
8	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	N/A	25,00	26,00	27,00	28,00	29,00	30,00
L	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**							
1	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (%)	9,11	10,00	14,00	18,00	22,00	26,00	30,00
2	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	30,90	34,00	39,20	44,40	49,60	54,80	60,10
3	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	18,2	24,2	24,2	27,3	30,3	33,3	36,4
8	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
M	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**							
1	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	N/A	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
2	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase Fasilitasi Aparatur Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	N/A	60,00	63,00	66,00	69,00	72,00	75,00
4	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	N/A	10,00	13,00	16,00	19,00	22,00	25,00
5	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga	N/A	75,00	80,00	80,00	80,00	80,00	85,00
6	Persentase Fasilitasi Lembaga Adat dan Masyarakat hukum Adat	N/A	75,00	80,00	80,00	80,00	80,00	85,00
N	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**							

No	Indikator	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Total Fertility Rate (Rata-Rata Anak Per Wanita)	2,73	2,67	2,69	2,67	2,65	2,64	2,60
3	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (ASFR 15-19)	14,7	13,7-13,4	12,6-12,3	11,7-11,4	11,0-10,7	10,4-10,1	10,1-9,8
2	Rasio Akseptor KB (%)	N/A	41,50	42,70	43,50	44,50	45,50	47,00
4	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	39,7	40,50	41,00	42,00	42,75	43,50	44,25
5	Persentase kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	25,3	20,00	16,52	16,00	15,00	14,00	13,00
6	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	28,4	33,0	38,3	44,5	50,0	56,5	70,1
7	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	79,3	80,9	82,4	83,8	85,1	86,2	87,0
8	Indeks Lansia Berdaya	63,3	64,3	65,2	66,1	67,0	67,8	70,0
O	**Perhubungan**							
1	Rasio Konektivitas (%)	N/A	25,00	25,00	26,00	26,00	27,00	27,00
2	Konektivitas Darat	N/A	38,00	38,00	39,00	39,00	39,00	40,00
3	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	N/A	83,33	83,33	83,87	83,87	87,10	87,10
P	**Komunikasi dan Informatika**							
1	Cakupan Layanan Telekomunikasi (%)	N/A	70,00	71,89	73,84	75,84	77,89	80,00

No	Indikator	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Persentase rumah tangga dengan akses internet (%)	N/A	60,00	64,33	68,97	73,95	79,28	85,00
Q	**Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**							
1	Proporsi Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Non Pertanian pada Level Kabupaten (%)	60,00	70,00	80,00	85,00	87,00	90,00	95,00
2	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,07	0,07	0,09	0,12	0,16	0,20	0,26
3	Kontribusi UMKM terhadap PDRB (%)	N/A	0,50	0,66	0,87	1,15	1,52	2,00
4	Persentase Koperasi yang Diberikan Pendidikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	N/A	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00
5	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	N/A	60,00	65,00	73,75	82,50	91,25	100,00
6	Pertumbuhan Wirausaha	N/A	4,50	5,00	5,75	6,50	7,25	8,00
R	**Penanaman Modal**							
1	Realisasi Investasi PMDN (Rp miliar)	3.987,48	22,50	24,50	27,00	29,70	32,67	35,94
2	Realisasi Investasi PMA ($US ribu)	129,84	39,97	59,35	62,21	68,43	79,58	82,00
3	Persentase Peningkatan Investor	N/A	5,00	10,00	12,50	15,00	17,50	20,00

No	Indikator	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
S	**Kepemudaan dan Olahraga**							
1	Rasio Wirausaha Pemuda	1,74	1,74	2,00	2,40	2,80	3,20	3,20
2	Tingkat pemuda partisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	2,06	2,06	2,25	2,60	3,10	3,50	4,00
3	Peningkatan Prestasi Olahraga	2	2	3	3	3	3	4
4	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	0,00	5,00	10,00	15,00	20,00	30,00	35,00
T	**Statistik**							
1	Indeks Pembangunan Statistik (Poin)	1,9	2,60	2,80	3,00	3,20	3,50	3,70
2	Buku Kabupaten dalam Angka (Ada/Tidak Ada)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Buku PDRB Kabupaten (Ada/Tidak Ada)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
U	**Persandian**							

No	Indikator	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (%)	N/A	20,00	40,00	60,00	80,00	80,00	80,00
V	**Kebudayaan**							
1	Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Pengembangan Kebudayaan	N/A	10,00	15,00	16,25	17,50	18,75	20,00
2	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	N/A	10,00	15,00	16,25	17,50	18,75	20,00
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	N/A	10,00	15,00	16,25	17,50	18,75	20,00
4	Jumlah Cagar Budaya yang dimanfaatkan	13	13	30	30	30	30	30
5	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	N/A	10,00	15,00	16,25	17,50	18,75	20,00
W	**Perpustakaan**							
1	Jumlah Pengunjung ke perpustakaan dalam 1 tahun (Jumlah Orang)	10.501	2.991	3.091	3.120	3.220	3.320	3.550
2	Jumlah pustakawan dan tenaga teknis (Jumlah orang)	302	308	312	317	322	325	328
3	Nilai Tingkat Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional	N/A	80,00	85,00	88,75	92,50	96,25	100,00

No	Indikator	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
X	**Kearsipan**							
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baik (Jumlah OPD dan Kecamatan)	8,00	10,00	13,45	16,90	20,34	23,79	30,00
2	Nilai Pengawasan Kearsipan	D	C	C	CC	B	BB	A
Y	**Pariwisata**							
1	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Orang)	44	100	150	200	250	300	350
2	Jumlah Tamu Wisatawan Nusantara (orang)	340.280	401.876	411.071	420.475	430.095	439.935	450.000
3	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	N/A	0,43	0,44	0,46	0,47	0,48	0,5
4	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	-11,41	18,12	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
5	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	N/A	20,00	25,00	31,25	37,50	43,75	50,00
6	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	N/A	35,00	40,00	48,75	57,50	66,25	75,00
Z	**Kelautan dan Perikanan**							
1	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB (%)	N/A	7,00	7,80	8,68	9,67	10,77	12,00
2	Nilai Tukar Nelayan (Poin)	N/A	95,00	97,83	100,74	103,73	106,82	110,00

No	Indikator	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (Poin)	N/A	90,00	92,82	95,72	98,72	101,81	105,00
4	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	41.498	52.192	54.213	57.324	60.757	66.833	73.515
5	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	650,16	880,00	898,579	915,068	932,181	952,852	980,606
AA	**Pertanian**							
1	Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan (%)	47,02	45,50	44,14	42,82	41,53	40,29	39,08
2	Produktivitas tenaga kerja Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (Rp juta/jiwa)	80,44	90,00	97,62	105,88	114,85	124,57	120,00
3	Nilai Tukar Petani (Poin)	N/A	90,00	93,69	97,52	101,52	105,67	110,00
4	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	N/A	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
5	Peningkatan Produksi hortikultura	N/A	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
6	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	N/A	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
7	Cakupan Luas Lagan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	N/A	75,00	80,00	82,50	85,00	87,50	90,00
8	Tingkat Pengendalian Penyakit hewan Menular Strategis (PHMS)	N/A	65,00	70,00	77,50	85,00	92,50	100,00

No	Indikator	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9	Persentase Unit Usaha Pangan Asal hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV	N/A	30,00	35,00	42,50	50,00	57,50	65,00
10	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	N/A	60,00	70,00	77,50	85,00	92,50	100,00
11	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim terhadap Pertanian	N/A	45,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00
12	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	N/A	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00
13	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	N/A	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00
14	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
AB	**Energi dan Sumber Daya Mineral**							
1	Porsi EBT dalam Bauran Energi (%)	N/A	20,00	21,69	23,52	25,51	27,66	30,00
2	Rasio Elektrifikasi (%)	N/A	90,00	90,98	91,97	92,97	93,98	95,00
AC	**Perdagangan**							
1	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	N/A	10,00	15,00	15,00	20,00	20,00	20,00
2	Persentase Stabilisasi harga Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting	N/A	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9

No	Indikator	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Persentase Tertib Usaha Perdagangan	N/A	75,00	75,00	80,00	85,00	90,00	100,00
AD	**Perindustrian**							
1	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (%)	N/A	6,16	6,27	6,39	6,51	6,63	6,75
2	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	N/A	75,00	75,00	80,00	85,00	90,00	100,00
3	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
AE	**Perencanaan Pembangunan**							
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Poin)	N/A	70,00	73,61	77,40	81,39	85,59	90,00
2	Dokumen RPJPD yang Ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Dokumen RPJMD yang Ditetapkan dengan Perda/Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Dokumen RKPD yang Ditetapkan dengan Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Dokumen RTRW yang Ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Indikator	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
AF	**Keuangan**							
1	Opini BPK (Level)	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Return on Asset BUMD (%)	N/A	6,25	6,85	7,52	8,25	9,04	9,92
3	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	N/A	35,00	30,00	27,50	25,00	22,50	20,00
4	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	N/A	37,00	40,00	42,50	45,00	47,50	50,00

No	Indikator	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	N/A	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
6	Persentase Penurunan SILPA	N/A	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
7	Persentase laporan keuangan tepat waktu	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	N/A	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
9	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	7,34	7,49	7,64	7,79	7,94	8,10	8,26
10	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	N/A	70,00	75,00	81,25	87,50	93,75	100,00
AG	**Kepegawaian, serta Pendidikan dan Pelatihan**							
1	Indeks Profesionalitas ASN (Poin)	62,23	64,30	66,25	68,75	71,50	73,75	75,25
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	84,57	85,30	86,00	87,25	88,00	89,15	90,00
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural (%)	10,49	11,00	11,50	12,25	13,00	13,75	14,50

No	Indikator	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Persentase Perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	N/A	87,00	90,00	92,50	95,00	97,50	100,00
5	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	N/A	60,00	65,00	73,75	82,50	91,25	100,00
6	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	N/A	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00
7	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	N/A	85,00	90,00	92,50	95,00	97,50	100,00
AH	**Penelitian dan Pengembangan**							
1	Belanja Riset (% Total Belanja)	N/A	0,33	0,45	0,60	0,82	1,11	1,50
2	Persentase kebijakan berbasis bukti (%)	N/A	40,00	42,63	45,43	48,42	51,61	55,00
3	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan	N/A	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00
4	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	N/A	87,50	90,00	92,50	95,00	97,50	100,00
5	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah							
6	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis, dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan di Daerah	N/A	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00
AI	**Pengawasan**							
1	Persentase tindak lanjut temuan (%)	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Maturitas SPIP (Level)	N/A	II	III	III	III	III	III
3	Kapabilitas APIP (Level)	N/A	II	III	III	III	III	III
4	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	N/A	II	III	III	III	III	III
6	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	N/A	II	III	III	III	III	III
AJ	**Sekretariat Daerah**							
1	Nilai Evaluasi SAKIP (Poin)	CC	CC	CC	B	B	B	BB
2	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	N/A	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00

No	Indikator	Baseline	Target					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	N/A	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00



BAB V

Penutup

5.1 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjadi landasan utama bagi seluruh kegiatan pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dokumen ini berperan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah sekaligus referensi bagi seluruh masyarakat Tapanuli Tengah agar dapat berkontribusi aktif dalam pembangunan sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing.

Penyusunan RPJMD ini mengacu pada prinsip-prinsip pelaksanaan yang meliputi keselarasan antara perencanaan dan pendanaan, penerapan kerangka pengendalian yang efektif, penerapan sistem insentif guna mendorong partisipasi, serta mekanisme penyesuaian yang fleksibel dan responsif. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk memastikan proses pembangunan berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan demi mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran daerah.

Sebagai dokumen yang bersifat dinamis dan operasional, RPJMD 2025-2029 bukan sekadar acuan normatif, melainkan diharapkan mampu mengembangkan potensi daerah secara optimal supaya bersama-sama “Membangun Tapanuli Tengah Adil untuk Semua, Lestari, dan Berkeadaban”. Implementasi pembangunan selama lima tahun ke depan dirancang agar berjalan terarah, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5.1.1 Konsistensi Perencanaan Pembangunan

Kualitas perencanaan pembangunan sangat bergantung pada konsistensi antar dokumen perencanaan serta kesesuaian dengan kebijakan pendanaan. Sinergi ini penting untuk memastikan tiga aspek utama: pertama, pelaksanaan yang selaras dengan rencana; kedua, ketersediaan sumber dana yang memadai; dan ketiga, pemanfaatan anggaran secara efisien. Perencanaan yang terintegrasi dan berkualitas tidak hanya menjadi pedoman operasional bagi pemerintah daerah, tetapi juga menjadi acuan bagi berbagai pihak di luar pemerintahan untuk turut berkontribusi dalam pencapaian

tujuan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dilakukan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang tepat sasaran dan berorientasi pada hasil. Proses ini mencakup penetapan prioritas pembangunan hingga penyusunan teknis proyek serta target yang ingin dicapai, disertai dengan pengawasan pelaksanaan secara ketat. Keberhasilan proses ini sangat bergantung pada pendekatan kolaboratif yang melibatkan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dari tahap perencanaan hingga evaluasi.

Penguatan tata kelola perencanaan dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu:

- Menyelaraskan dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD dengan kebijakan fiskal yang berlaku.
- Mengembangkan sistem monitoring terintegrasi yang mencakup aspek perencanaan dan pengelolaan keuangan.
- Membentuk forum konsultasi untuk melakukan tinjauan bersama terhadap dokumen perencanaan.
- Menerapkan prinsip perencanaan berbasis bukti (*evidence-based planning*) yang didukung oleh data yang akurat dan tepercaya.

Perencanaan ini tidak hanya harus konsisten secara internal, tetapi juga harus responsif terhadap kebutuhan pembangunan yang nyata di lapangan. Tujuan akhirnya adalah mempercepat pembangunan daerah yang inklusif, efektif, dan berkelanjutan dengan pemanfaatan sumber daya secara optimal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

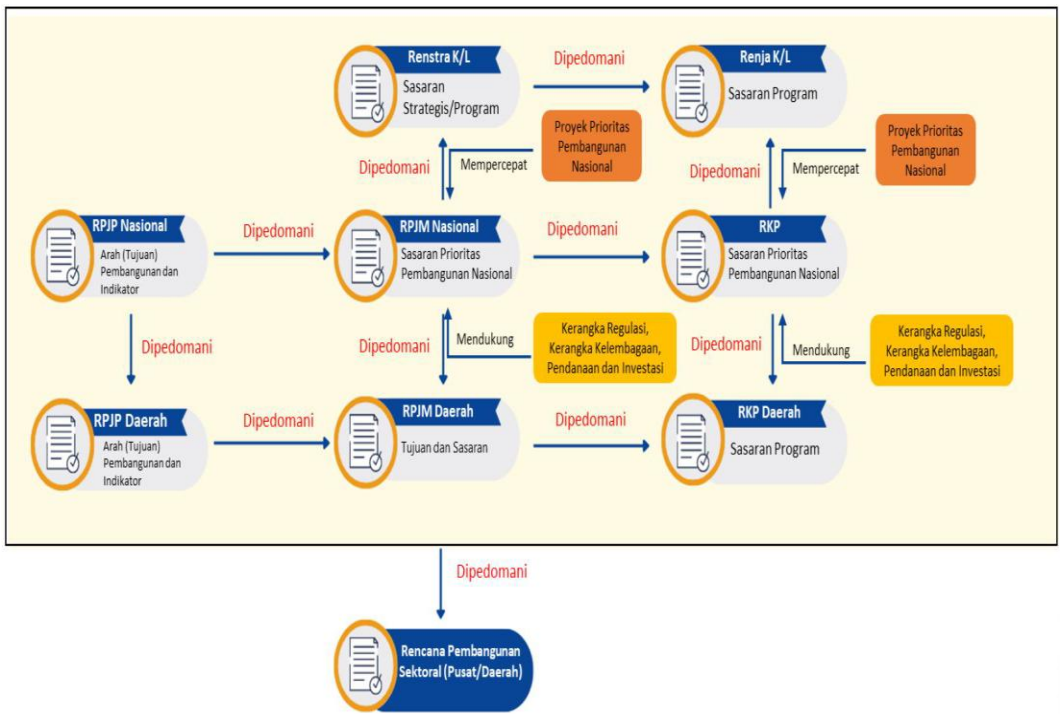
A Keterkaitan RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Perencanaan Pembangunan Provinsi dan Pusat

RPJMD menempati posisi strategis dalam hierarki perencanaan pembangunan daerah dan berfungsi sebagai pedoman utama bagi dokumen perencanaan yang lebih rinci di tingkat bawah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), serta Rencana Kerja

Pemerintah (RKP), yang semuanya wajib dijadikan acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

RPJMD memfokuskan pada penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, arah pembangunan, serta indikator pencapaian tujuan pembangunan daerah. Elemen-elemen ini kemudian menjadi panduan bagi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam merancang tujuan, sasaran, dan program pembangunan tahunan. Seluruh perencanaan pembangunan daerah tersebut harus diselaraskan dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional, di mana RPJPD daerah mengikuti RPJPN nasional, RPJM daerah sejalan dengan RPJMN nasional, dan RKP daerah mengikuti RKP nasional. Selain itu, seluruh rencana sektoral harus mengacu pada rencana pembangunan daerah yang mencakup jangka panjang, menengah, dan tahunan.

Hubungan dan keterkaitan antar dokumen-dokumen perencanaan tersebut biasanya disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut:



Gambar 5.1 Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas

Dalam rangka menyesuaikan dokumen perencanaan dengan kebijakan di tingkat pusat dan provinsi, beberapa hal penting yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. RPJMD bersifat jangka menengah dan memberikan arah pembangunan dalam rentang waktu lima tahun. Dokumen ini khusus memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta kebijakan yang mendukung visi dan misi RPJMN serta Visi Indonesia Emas 2045. RPJMD menjadi rencana strategis daerah untuk lima tahun ke depan.
2. Penyusunan RPJMD, termasuk penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan indikator pembangunan, harus mengacu pada arah pembangunan dan indikator yang tertuang dalam RPJMN serta RPJMD tingkat provinsi.
3. Tujuan dan sasaran dalam RPJMD kabupaten didasarkan pada sasaran dan indikator prioritas pembangunan yang ada pada RPJM provinsi dan nasional. Selain itu, RPJMD kabupaten menjadi acuan bagi sasaran dan indikator prioritas pembangunan dalam RKP daerah, serta sasaran dan indikator strategis pada rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat kabupaten.
4. Sasaran dan indikator strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD menjadi pedoman dalam penyusunan sasaran dan indikator program pada Rencana Kerja (Renja) OPD. Sementara itu, tujuan dan sasaran RPJM daerah menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun sasaran program dalam RKP daerah.
5. Sasaran program dalam RKP daerah mengacu pada sasaran dan indikator prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RKP. RKP daerah juga menjadi pedoman dalam merancang sasaran dan indikator program pada Renja OPD. Indikator prioritas pembangunan daerah diimplementasikan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD, yang digunakan sebagai alat penilaian akuntabilitas kinerja OPD.

Pencapaian sasaran pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada perencanaan, tetapi juga memerlukan dukungan kebijakan kelembagaan, regulasi, serta pendanaan dan investasi. Untuk mempercepat pencapaian sasaran tersebut, sasaran program juga ditetapkan dalam RPJM

dan RKP daerah, lengkap dengan ukuran keberhasilan yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah.

Sebagai salah satu Program Prioritas Nasional, Penguatan Kesetaraan Gender yang selaras dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender dapat dipedomani dalam pengaktualan RPJM ke RKP daerah untuk mempercepat tercapainya upaya lintas sektor terhadap pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Implementasi dapat dilakukan oleh Pemerintah daerah melalui komitmen untuk mewujudkan tata kelola pembangunan yang sensitif gender yang didukung oleh data terpilah, kapasitas kelembagaan, dan penganggaran yang responsif gender (ARG).

B Skema Pendanaan dan Penganggaran

Pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJPD, RPJM Daerah, dan RKP Daerah harus didukung oleh sinkronisasi yang efektif antara perencanaan dan pendanaan pembangunan. Untuk memastikan target pembangunan terealisasi, optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan, baik dari pemerintah maupun pihak swasta diperlukan dengan pendekatan yang inovatif, terintegrasi, serta tepat sasaran.

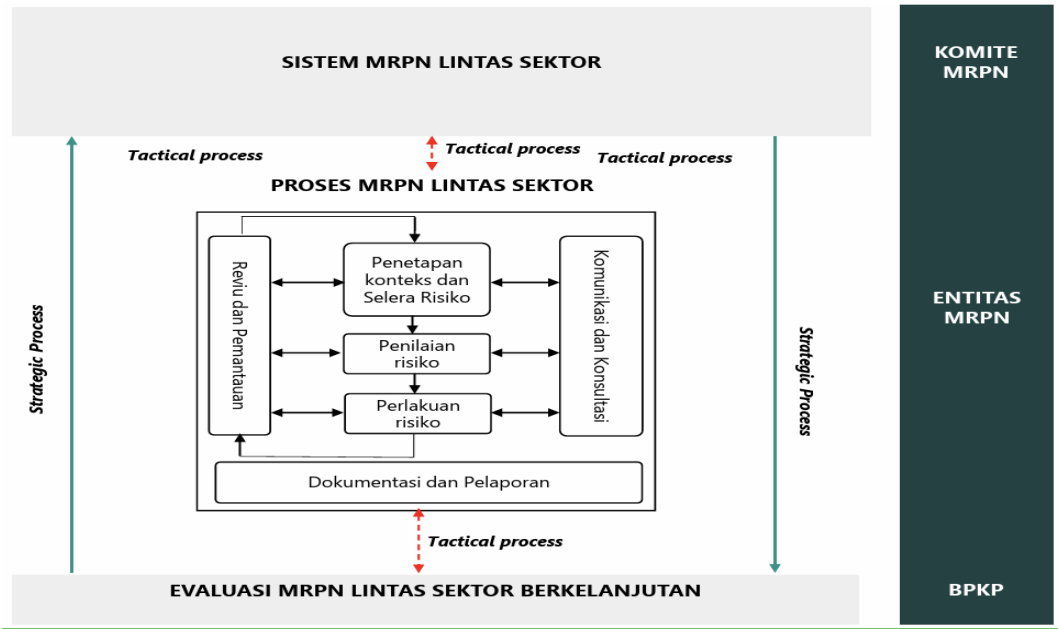
Dalam rangka meningkatkan efektivitas penggunaan sumber pendanaan tersebut, kualitas pengelolaan belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan harus disesuaikan dengan tahapan pembangunan yang sedang berlangsung. Selain mengedepankan efisiensi dan efektivitas pengeluaran, pemerintah daerah dapat memanfaatkan beragam sumber pendanaan, seperti Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), Belanja Kementerian/Lembaga (Belanja K/L), Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan melalui utang daerah, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta dana non-APBN/ APBD. Seluruh sumber dana ini diarahkan untuk menganggarkan serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan yang berkelanjutan.

5.1.2 Kerangka Pengendalian

Untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan daerah secara berkelanjutan, diperlukan pengendalian yang terus-menerus dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan. Hal ini didukung oleh sistem elektronik terpadu dan pengelolaan data pembangunan yang komprehensif. Pengendalian tersebut dilakukan melalui serangkaian kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko sepanjang proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Sistem elektronik yang terintegrasi ini berperan penting dalam mendukung proses tersebut sekaligus mendorong penerapan kebijakan pembangunan berbasis bukti (evidence-based planning).

Dalam manajemen risiko, yang dimaksud adalah Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN). MRPN merupakan upaya terkoordinasi untuk mengarahkan, mengendalikan, dan mengelola risiko yang muncul pada program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan, maupun risiko lintas sektor tertentu dengan tujuan utama meningkatkan pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Sebagai bagian dari implementasi MRPN, pemerintah daerah diwajibkan menerapkan manajemen risiko sejak tahap perencanaan pembangunan daerah. Langkah ini mencakup pembentukan komite manajemen risiko, penyusunan kebijakan terkait, perencanaan kinerja prioritas pembangunan, identifikasi objek dan entitas yang menjadi fokus MRPN, serta pelaksanaan penilaian risiko (risk assessment). Pengambilan serta pelaksanaan keputusan manajemen risiko sangat penting untuk meningkatkan peluang tercapainya tujuan pembangunan sekaligus meminimalkan dampak negatif dari risiko yang dihadapi entitas yang dikelola.

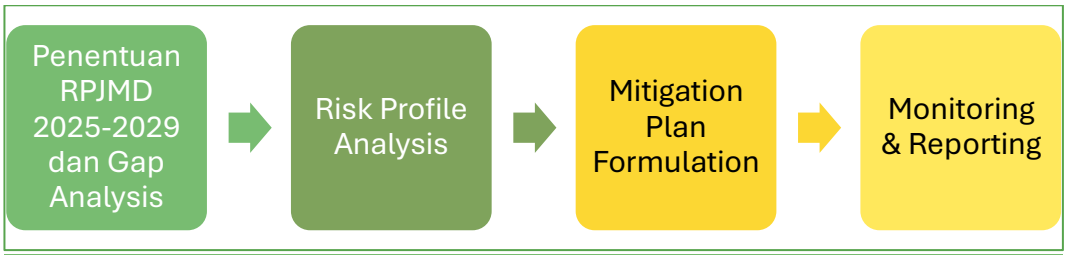


Gambar 5.2 Kerangka Kerja MRPN

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029 harus dilakukan secara berkesinambungan dengan perencanaan pembangunan jangka panjang antar periode, serta menjaga sinkronisasi antara periodisasi dan substansi yang mengacu pada RPJPD Kabupaten Tapanuli Tengah, RPJMD Provinsi, dan RPJM Nasional. Langkah ini sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari visi Indonesia Emas 2045.

Dalam rangka mempercepat pembangunan di berbagai sektor sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan, diperlukan penerapan tahapan manajemen risiko yang komprehensif serta pembentukan dasar hukum yang menjamin integrasi manajemen risiko tersebut dalam pelaksanaan pembangunan. Tahapan manajemen risiko yang mendukung pencapaian target RPJMD dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 5.3 Tahapan Manajemen Risiko untuk Mencapai Target RPJMD

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas

Rincian penjelasan tahapan-tahapan dalam manajemen risiko di atas adalah berupa:

1. Penetapan RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah periode 2025-2029 dilakukan dengan merumuskan arah kebijakan dan target yang hendak dicapai pada tahun 2029. Hal ini mencakup penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, serta prioritas pembangunan jangka menengah yang diharapkan menjadi landasan untuk mewujudkan visi "Menuju Tapanuli Tengah Maju, Sehat, Sejahtera, Religius, dan Berkelanjutan." Proses penyusunan diawali dengan gap analysis terhadap target yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebelumnya—sebuah metode sistematis untuk mengidentifikasi perbedaan antara target pembangunan yang direncanakan dengan capaian aktual, guna mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian dan perbaikan.

   Pendekatan ini berfungsi sebagai instrumen strategis guna meningkatkan kualitas perencanaan melalui beberapa tahapan penting. Pertama, dilakukan pemetaan menyeluruh terhadap indikator kinerja yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Data historis pencapaian dibandingkan dengan target yang akan dicapai untuk menemukan kesenjangan. Analisis ini tidak hanya menilai hasil akhir (outcome), tetapi juga mengevaluasi efektivitas pelaksanaan serta kendala struktural dan operasional yang dihadapi.
2. Analisis Profil Risiko (*Risk Profile Analysis*) dilakukan melalui proses identifikasi dan asesmen risiko. Identifikasi risiko mencakup pengenalan potensi risiko dari faktor internal dan eksternal yang dapat menimbulkan hambatan terhadap pencapaian target RPJMD 2025-2029. Asesmen risiko kemudian menilai kemungkinan terjadinya risiko (*likelihood*) serta tingkat dampak serius (*severity*) dari risiko tersebut. Penilaian ini penting untuk menentukan prioritas penanganan risiko dan merancang langkah mitigasi yang tepat.
3. Tahap berikutnya adalah penyusunan Rencana Mitigasi secara kolaboratif bersama kementerian, lembaga, dan pihak terkait. Proses ini meliputi

identifikasi risiko utama yang harus diatasi serta penetapan jadwal pelaksanaan mitigasi secara terperinci untuk memastikan efektivitas pengelolaan risiko dalam rangka penyusunan RPJMD.

4. Terakhir, pelaksanaan monitoring dan pelaporan menjadi aspek krusial untuk menjaga agar implementasi RPJMD berjalan sesuai rencana. Evaluasi berkala dilakukan guna mengukur pencapaian target sekaligus mendorong partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan. Proses ini melibatkan pemantauan dari internal pemerintah daerah serta partisipasi lembaga pengawas dan organisasi masyarakat guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta memperoleh masukan konstruktif untuk penyempurnaan pelaksanaan RPJMD.

Adapun identifikasi risiko terhadap misi, tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Meningkatkan pembangunan manusia yang berkarakter, produktif, berkualitas, dan kreatif untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri

   Risiko utama yang dapat menghambat pencapaian misi ini adalah rendahnya akses dan kualitas pendidikan serta pelatihan vokasi yang sesuai kebutuhan pasar kerja dan kewirausahaan. Kurangnya kurikulum yang adaptif serta fasilitas penunjang yang memadai dapat menyebabkan peserta didik kurang terampil dan tidak siap menghadapi tantangan dunia kerja atau memulai usaha mandiri. Selain itu, rendahnya dukungan fasilitas pembinaan karakter dan kreativitas dapat menurunkan daya saing sumber daya manusia daerah. Risiko sosial seperti pengangguran dan cadangan tenaga kerja tidak terserap menjadi tantangan. Ketidakmerataan kesempatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan juga berpotensi menciptakan kesenjangan kemampuan dan peluang kerja. Kebijakan yang tidak terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan dan kewirausahaan dapat menyebabkan program pembangunan manusia menjadi kurang efektif dalam mendukung kesiapan kerja dan iklim kewirausahaan yang kuat.

2. Memastikan akses kesehatan untuk seluruh masyarakat Tapanuli Tengah sehat jasmani dan rohani

   Salah satu risiko utama dalam misi ini adalah ketersediaan fasilitas kesehatan yang tidak merata serta minimnya tenaga medis di daerah terpencil, yang menyebabkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan menjadi terbatas. Keterbatasan anggaran juga dapat menghambat peningkatan kualitas layanan kesehatan sehingga target kesehatan jasmani sulit dicapai. Selain itu, kurangnya program yang memadai untuk kesehatan rohani atau mental memperbesar risiko masalah kesehatan psikologis yang tidak tertangani. Risiko lain adalah rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga pola hidup sehat, yang dapat memperburuk kondisi kesehatan secara keseluruhan. Apabila pengelolaan data kesehatan tidak optimal, pengambilan kebijakan juga akan kurang tepat sasaran. Ketersediaan obat-obatan dan layanan preventif juga menjadi permasalahan yang perlu diantisipasi agar akses kesehatan dapat diwujudkan secara menyeluruh.

3. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil-menengah yang inklusif dan kreatif

   Risiko yang mungkin timbul adalah kebijakan yang tidak cukup responsif atau lambat dalam menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil-menengah. Ketimpangan akses terhadap modal, teknologi, dan pasar juga menjadi hambatan utama yang dapat memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi di daerah. Terbatasnya koordinasi antar lembaga pelaksana dan kurangnya pemberdayaan masyarakat menambah risiko ketidakefektifan program penguatan kapasitas ekonomi rakyat. Selain itu, risiko eksternal seperti perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, dan gangguan rantai pasok dapat mengancam ketahanan ekonomi petani dan nelayan. Kelemahan dalam diversifikasi usaha dan inovasi dalam skala usaha kecil-menengah juga

dapat menghambat inklusivitas dan kreativitas ekonomi masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi lokal menjadi tidak berkelanjutan dan tidak mampu menjawab kebutuhan kelompok rentan.

4. Membangun kemandirian ekonomi daerah Tapanuli Tengah berbasis potensi sumber daya lokal dengan memanfaatkan teknologi

   Risiko yang dihadapi dari misi ini adalah keterbatasan infrastruktur teknologi dan digital sehingga pemanfaatan sumber daya lokal berbasis teknologi tidak optimal. Rendahnya literasi digital dan kurangnya akses ke teknologi bagi pelaku usaha lokal menjadi tantangan besar dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah. Selain itu, kemampuan SDM dalam mengelola teknologi secara efektif masih perlu ditingkatkan agar inovasi teknologi dapat mendukung kemandirian ekonomi secara berkelanjutan. Risiko lainnya adalah potensi ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak dikelola secara berkelanjutan, yang dapat menimbulkan degradasi lingkungan sekaligus melemahkan fondasi ekonomi jangka panjang. Jika kebijakan dan regulasi mengenai pemanfaatan teknologi dan sumber daya lokal tidak kuat atau kurang disosialisasikan, maka risiko penyalahgunaan atau ketidaksesuaian penggunaan teknologi akan meningkat, mengurangi manfaat yang bisa diperoleh masyarakat.

5. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera) Tapanuli Tengah yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang melayani, transparan, bebas dari korupsi, dan berkeadaban

   Risiko dari misi tersebut adalah potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah dan menghambat penegakan hukum yang adil. Lemahnya pengawasan internal dan eksternal juga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan serta kegagalan dalam memberikan pelayanan publik yang efektif dan transparan. Kesulitan dalam membangun budaya birokrasi yang berintegritas dan beretika menjadi tantangan lain dalam

mewujudkan tata kelola yang baik. Selain itu, risiko kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan dapat mengurangi legitimasi dan akuntabilitas pemerintahan. Kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 atau tidak mengakomodasi aspirasi masyarakat rentan berisiko memperlemah rasa keadilan sosial dan keberadaban yang ingin diwujudkan sehingga menimbulkan ketimpangan pelayanan dan konflik sosial.

6. Memajukan kebudayaan Tapanuli Tengah dalam semangat kebhinnekaan dan toleransi sebagai warisan leluhur bangsa Indonesia

   Risiko yang dihadapi pada misi ini, meliputi tergerusnya nilai dan tradisi lokal akibat pengaruh globalisasi serta modernisasi yang cepat sehingga generasi muda kurang memahami dan meneruskan kebudayaan daerah. Minimnya dukungan dana dan program konservasi budaya dapat membuat pelestarian kebudayaan terabaikan. Lebih jauh, potensi konflik sosial antar kelompok etnis atau agama berisiko meningkat apabila semangat toleransi tidak diperkuat melalui kebijakan dan praktik sosial yang inklusif. Selain itu, kurangnya integrasi kebudayaan dalam sistem pendidikan dan budaya sehari-hari masyarakat dapat menyebabkan budaya lokal tidak menjadi bagian hidup yang aktif dan dinamis. Ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah dengan aspirasi masyarakat terhadap pengembangan dan pelestarian kebudayaan juga menimbulkan risiko rendahnya partisipasi publik. Hal ini dapat melemahkan kohesi sosial yang menjadi fondasi kebhinnekaan dan toleransi.

7. Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, irigasi/bendungan, serta berbagai sarana-prasarana pendukungnya

   Risiko dalam pembangunan infrastruktur adalah terbatasnya anggaran dan ketidakefisienan pengelolaan dana yang mengakibatkan penundaan atau kualitas rendah proyek-proyek infrastruktur. Selain itu, kurangnya perencanaan yang matang dan analisis dampak lingkungan dapat

menyebabkan pembangunan infrastruktur berdampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Korupsi dan mafia proyek juga menjadi ancaman serius yang dapat menurunkan kualitas dan keberlanjutan infrastruktur. Risiko lain adalah gangguan dari bencana alam seperti banjir, tanah longsor, atau gempa bumi yang dapat merusak infrastruktur yang sudah dibangun. Kurangnya pemeliharaan dan monitoring juga menimbulkan risiko kerusakan dini sehingga investasi infrastruktur tidak optimal. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam teknis dan manajerial juga dapat menghambat pelaksanaan dan pengawasan proyek pembangunan infrastruktur.

8. Mengelola sumber daya alam dan potensi alam yang ada di Tapanuli Tengah, baik Sektor Kelautan, Perkebunan, Pertanian, Perikanan, Hutan, Sungai, Sumber Daya Energi Terbarukan (air, angin, gelombang laut, dll.) secara optimal dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan kelestarian lingkungan hidup

   Risiko yang dihadapi dari misi ini adalah eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga menimbulkan kerusakan ekosistem dan menurunnya produktivitas jangka panjang. Ketidakjelasan regulasi atau lemahnya penegakan hukum terkait pengelolaan lingkungan juga dapat memperburuk kondisi tersebut. Selain itu, risiko konflik antar pemangku kepentingan seperti masyarakat adat, perusahaan, dan pemerintah juga dapat menghambat pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan adil. Selain risiko ekologis, ada pula risiko ekonomi dan sosial seperti ketergantungan pada komoditas tertentu yang rentan fluktuasi pasar global, serta kurangnya diversifikasi yang dapat memicu kerentanan ekonomi daerah. Minimnya akses teknologi ramah lingkungan dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan juga menjadi hambatan dalam mewujudkan pengelolaan yang optimal.

9. Perencanaan pembangunan daerah dan desa yang terintegrasi

   Risiko dalam perencanaan pembangunan terintegrasi adalah kurangnya koordinasi dan sinergi antar sektor dan antar tingkat pemerintahan, yang berpotensi menimbulkan duplikasi program dan pemborosan sumber daya. Ketidakselarasan data dan informasi antara daerah dan desa juga menghambat pengambilan keputusan yang terpadu dan akurat. Selain itu, keterbatasan kapasitas teknis dan manajerial di tingkat desa dapat mengganggu proses perencanaan yang partisipatif dan berkelanjutan. Risiko lain adalah lemahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan, yang dapat menyebabkan perencanaan kurang tepat sasaran dan tidak responsif terhadap kebutuhan lokal. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan rencana juga berpotensi menimbulkan konflik dan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses pembangunan sehingga menghambat pencapaian sinergi pembangunan daerah dan desa.

Dengan mengidentifikasi serta merancang strategi manajemen risiko yang tepat pada setiap pencapaian misi, pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah dapat menjadi lebih efektif sekaligus meminimalkan risiko yang mungkin muncul. Pengendalian terhadap RPJMD dilakukan melalui pengendalian jangka pendek (tahunan) yang hasilnya dilaporkan kepada Kepala Daerah. Berdasarkan tahapan pelaksanaannya, ruang lingkup pengendalian pembangunan daerah terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Pengendalian Perencanaan

   Pengendalian pada tahap perencanaan memegang peranan penting dalam memastikan keselarasan serta konsistensi seluruh proses pembangunan. Mekanisme ini bertujuan utama untuk meningkatkan mutu perencanaan dengan melakukan penyempurnaan terhadap desain program dan target pembangunan daerah secara berkelanjutan. Selain itu, pengendalian ini juga berfungsi sebagai instrumen verifikasi terhadap ketersediaan dan kecukupan sumber pembiayaan, baik yang berasal dari

APBD/APBN maupun mitra pembangunan non-pemerintah. Proses pengendalian dilaksanakan dengan mengacu pada evaluasi menyeluruh terhadap dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) dan jangka pendek (RKPD). Analisis mendalam atas pencapaian serta tantangan pelaksanaan rencana pembangunan sebelumnya menjadi dasar bagi perbaikan yang berkelanjutan. Pendekatan ini memungkinkan proses perencanaan yang adaptif, responsif, dan sesuai dengan perkembangan serta kebutuhan nyata di lapangan.

2. Pengendalian Pelaksanaan

   Pengendalian dalam tahap pelaksanaan berfungsi sebagai mekanisme untuk menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana strategis yang telah disusun. Implementasi dilakukan melalui sistem pemantauan dan evaluasi (monev) yang berlangsung secara kontinu untuk mengukur capaian kinerja pembangunan jangka pendek (tahunan). Sistem ini didukung oleh pelaporan berkala yang memfasilitasi pengambilan keputusan korektif secara tepat waktu. Evaluasi tahunan menjadi bahan pembelajaran penting untuk menyempurnakan siklus perencanaan berikutnya sekaligus memastikan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan.

   Agar pengendalian pembangunan dapat berjalan efektif, diperlukan payung hukum yang kuat dan menyeluruh. Kerangka regulasi tersebut harus mampu mengintegrasikan berbagai aspek pengelolaan pembangunan, meliputi antara lain:

   a. Sistem pemantauan dan evaluasi yang terstruktur
   b. Mekanisme pengendalian yang responsif
   c. Manajemen risiko pembangunan yang proaktif
   d. Sistem manajemen kinerja yang terukur

Harmonisasi regulasi ini penting untuk menjamin keselarasan antara proses pengendalian dengan kinerja Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sinergi regulasi juga menjadi dasar penguatan

sistem manajemen kinerja yang efektif dan akuntabel. Di sisi kelembagaan, dibutuhkan pembentukan struktur pengendalian yang komprehensif dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Fungsi Koordinasi Lintas Sektor yang dapat mengintegrasikan pengendalian secara vertikal (antara Pemerintah Pusat dan Daerah) serta horizontal (antar OPD)
2. Mekanisme Kolaboratif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan
3. Sistem Pelaporan Terpadu berbasis teknologi informasi
4. Kapasitas Kelembagaan yang memadai dalam melakukan analisis dan pengambilan keputusan

5.1.3 Sistem Insentif

Keberhasilan pembangunan daerah secara menyeluruh sangat bergantung pada partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, baik dari unsur pemerintah maupun non-pemerintah. Kolaborasi sinergis antara pemerintah daerah, pelaku usaha, lembaga riset, akademisi, dan komunitas masyarakat merupakan faktor kunci dalam mempercepat tercapainya target pembangunan. Untuk mendorong partisipasi yang lebih luas dan efektif, perlu dikembangkan sistem insentif yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pemangku kepentingan. Bagi unsur pemerintah, insentif diintegrasikan dengan mekanisme manajemen kinerja serta penganggaran daerah yang holistik. Pemberian insentif didasarkan pada pencapaian kinerja nyata, meliputi kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, koordinasi program dengan pendanaan, pencapaian indikator makroekonomi, serta realisasi program prioritas daerah.

Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan kinerja aparatur pemerintah dalam merealisasikan target pembangunan. Sementara itu, bagi pelaku non-pemerintah, sistem insentif dirancang lebih beragam dan aplikatif, meliputi kemudahan perizinan, fasilitas usaha, akses pendanaan, hingga penghargaan khusus. Insentif ini bertujuan menciptakan ekosistem yang kondusif untuk mendorong keterlibatan aktif sektor swasta dan

masyarakat dalam pembangunan. Dengan sistem insentif yang terstruktur dan terukur tersebut, diharapkan terbangun sinergi yang solid antar pemangku kepentingan. Hal ini tidak hanya meningkatkan partisipasi, tetapi juga memastikan bahwa setiap kontribusi memberikan dampak signifikan dalam percepatan pencapaian target pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan daerah dapat menjadi upaya bersama yang memaksimalkan potensi dan sumber daya lokal secara optimal.

5.1.4 Mekanisme Perubahan

Dalam menghadapi kompleksitas dinamika pembangunan, dokumen perencanaan daerah perlu dirancang secara adaptif agar mampu menyesuaikan diri dengan berbagai faktor eksternal yang tidak terduga. Kondisi force majeure seperti ketegangan geopolitik global, fluktuasi ekonomi internasional, serta bencana alam berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap pencapaian target pembangunan. Jika terjadi penyimpangan signifikan dari rencana awal sehingga target RPJMD sulit dicapai, mekanisme revisi melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah menjadi solusi krusial. Revisi ini didasarkan pada evaluasi menyeluruh pelaksanaan pembangunan serta analisis kondisi terkini, guna memastikan target yang ditetapkan tetap relevan dan dapat direalisasikan meskipun dalam situasi perubahan yang dinamis.

Untuk mendukung pelaksanaan yang efektif, pemerintah daerah mengoptimalkan transformasi digital dengan mengembangkan sistem elektronik terpadu yang mencakup seluruh siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses bisnis, serta meningkatkan akurasi dalam pengambilan keputusan. Selain itu, penerapan tata kelola data yang baik menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan. Dengan memanfaatkan data referensi yang terstandarisasi dan terintegrasi, pemerintah daerah dapat menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran.

Perpaduan antara perencanaan yang fleksibel dan pemanfaatan teknologi digital ini menciptakan ekosistem pembangunan daerah yang lebih tangguh, responsif, dan berbasis bukti. Pendekatan tersebut tidak hanya menjamin kelancaran pelaksanaan RPJMD 2025-2029, tetapi juga meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai tantangan sepanjang periode pembangunan.

5.1.5 Komunikasi Publik

Komunikasi publik yang efektif menjadi landasan utama bagi pemerintahan yang transparan dan partisipatif. Dalam kerangka RPJMD 2025-2029, komunikasi tidak hanya berperan sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga dirancang untuk membangun dialog konstruktif antara pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. Prinsip "*no one left behind*" dijadikan pijakan utama guna memastikan setiap suara terdengar dan setiap kelompok mendapatkan akses yang setara terhadap informasi pembangunan. Sistem komunikasi publik ini terdiri dari tiga pilar utama. Pertama, tata kelola komunikasi yang terstruktur dan profesional dengan mengintegrasikan koordinasi lintas sektor serta inovasi dalam penyampaian pesan. Kedua, penyediaan informasi yang akurat, mudah diakses, menarik, dan tepat waktu. Ketiga, penerapan pendekatan partisipatif berbasis data yang mengakomodasi keberagaman kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan komunikasi dilakukan melalui berbagai saluran yang disesuaikan dengan karakteristik para pemangku kepentingan. Forum OPD berfungsi sebagai ruang konsultasi teknis antar perangkat daerah, sementara musyawarah berjenjang dari tingkat kabupaten hingga provinsi menjaga konsistensi kebijakan. Masyarakat umum, termasuk sektor swasta, akademisi, media, dan kelompok rentan, dilibatkan melalui metode komunikasi yang inklusif dan mudah dipahami. Pendekatan ini bertujuan menciptakan pemerintahan yang benar-benar terbuka, di mana setiap kebijakan pembangunan dapat dipahami secara jelas oleh masyarakat dan setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi. Dengan

demikian, komunikasi publik bukan hanya berperan sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai media untuk memperkuat akuntabilitas dan kualitas pembangunan daerah secara menyeluruh.

5.2 Pembiayaan Pembangunan

Pencapaian visi “Membangun Tapanuli Tengah Adil untuk Semua, Lestari, dan Berkeadaban” memerlukan penguatan kapasitas pembiayaan melalui pendekatan inovatif dan kolaboratif. Strategi pembiayaan disusun secara menyeluruh dengan memaksimalkan peran sektor publik dan non-publik, sambil mengedepankan prinsip tata kelola yang baik.

Penguatan pembiayaan sektor publik dilaksanakan melalui lima strategi utama. Pertama, peningkatan perencanaan pembiayaan yang meliputi penataan regulasi daerah, pembentukan kelembagaan yang adaptif, serta pemanfaatan teknologi digital dalam proses bisnis. Kedua, pengembangan kerja sama bilateral dan multilateral guna memperoleh pembiayaan inovatif dengan persyaratan menguntungkan. Ketiga, optimalisasi kemitraan pemerintah dengan badan usaha melalui penyempurnaan regulasi dan tata kelola. Keempat, penerapan skema pembiayaan yang mendukung pemberdayaan industri lokal dan UMKM. Kelima, pemanfaatan aset daerah secara optimal melalui mekanisme seperti daur ulang dan pengelolaan nilai aset. Di sisi lain, pengembangan pembiayaan sektor non-publik dilakukan dengan memanfaatkan berbagai instrumen inovatif, meliputi dana pensiun, pasar modal, produk pembiayaan syariah, serta inovasi pembiayaan hijau dan biru. Penguatan blended financing yang mengombinasikan berbagai sumber dana juga dikembangkan, termasuk skema berbasis transaksi seperti bursa karbon dan plastik sebagai respons terhadap isu perubahan iklim.

Agar pembiayaan dapat berjalan efektif, penguatan manajemen investasi menjadi faktor krusial. Strategi yang dijalankan mencakup penyempurnaan proses identifikasi dan evaluasi proyek, modernisasi sistem pemantauan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Pelibatan

sektor swasta dan masyarakat dalam siklus investasi publik mendapatkan perhatian khusus, didukung oleh penguatan kerangka regulasi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Melalui pendekatan terpadu ini, Kabupaten Tapanuli Tengah membangun ekosistem pembiayaan yang kokoh dan berkelanjutan, serta menciptakan sinergi optimal antara sektor publik dan non-publik demi percepatan pembangunan daerah.

5.3 Kesimpulan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjadi pedoman utama pelaksanaan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran utama, arah kebijakan daerah, serta indikator kinerja dan program prioritas yang dirancang untuk menjawab tantangan dan isu strategis di tingkat daerah. RPJMD juga berfungsi sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Tengah yang dilaksanakan setiap tahun.

RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025-2029 memiliki peran krusial dalam keberhasilan pembangunan jangka menengah guna mewujudkan visi dan misi daerah, yaitu “Menuju Tapanuli Tengah Maju, Sehat, Sejahtera, Religius, dan Berkelanjutan”. Keberhasilan tersebut harus didukung oleh sejumlah faktor kunci, antara lain:

1. Komitmen kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis;
2. Konsistensi kebijakan pemerintah pusat dan daerah;
3. Keberpihakan pembangunan kepada masyarakat;
4. Partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Tengah; serta
5. Upaya menjaga keseimbangan pembangunan dan kesinambungan perencanaan.

Untuk mencapai visi tersebut, diperlukan kolaborasi nyata dari semua lapisan masyarakat. Dukungan politik yang solid, komitmen pelaksanaan yang serius, rasa tanggung jawab, dan semangat gotong royong menjadi fondasi utama dalam mendorong gerakan pembangunan daerah. Seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, organisasi masyarakat, sektor usaha, akademisi, hingga kelompok agama dan pemuda, diharapkan berperan aktif dengan komitmen penuh. Sinergi ini tidak hanya bersifat formalitas, melainkan diwujudkan melalui tindakan konkret, baik dalam pelaksanaan program pembangunan, pengawasan partisipatif, maupun beragam inisiatif lokal yang mendorong kemajuan. Terwujudnya visi dan misi ini juga diharapkan dapat mendukung pencapaian visi pembangunan nasional Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Bupati Tapanuli Tengah



Masinton Pasaribu